

The cover features a high-angle photograph of a city skyline with several skyscrapers. The image is overlaid with large, semi-transparent geometric shapes in shades of green and yellow. The text is positioned on the left side of the page.

***PT Bakrie Telecom Tbk***

LAPORAN  
TAHUNAN  
2018



# DAFTAR ISI

		<b>01</b>	<b>KILAS KINERJA 2018</b> IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	<b>03</b>
<b>08</b>	<b>SAMBUTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS</b> LAPORAN KOMISARIS LAPORAN DIREKSI	<b>02</b>		
		<b>03</b>	<b>PROFIL PERUSAHAAN</b> PROFIL BAKRIE TELECOM RIWAYAT PERUSAHAAN VISI & MISI KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN STRUKTUR ORGANISASI PROFIL DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMEGANG SAHAM ANAK PERUSAHAAN	<b>17</b>
<b>48</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN</b> ANALISIS HASIL OPERASIONAL INFORMASI MATERIAL	<b>04</b>		
		<b>05</b>	<b>TATA KELOLA PERUSAHAAN</b> DIREKSI DEWAN KOMISARIS KOMITE-KOMITE AUDITOR INDEPENDEN SEKRETARIS PERUSAHAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	<b>82</b>
<b>113</b>	<b>LAPORAN BERKELANJUTAN</b>	<b>06</b>		



KILAS **KINERJA**  
2018

01

# IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

---



LAPORAN LABA RUGI (DALAM MILIAR RUPIAH)	2018	2017	2016
Pendapatan Usaha Bruto	8,5	7,9	172,0
Pendapatan Usaha Neto	3,8	3,5	89,8
Laba (Rugi) Bruto	(37,1)	(856,6)	(958,1)
EBITDA	(35,2)	(42,7)	(142,4)
Laba (Rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(728,0)	(1.605,2)	(1.330,3)
Laba (Rugi) Neto	(720,6)	(1.496,5)	(1.392,1)
Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	(720,6)	(1.496,5)	(1.392,1)
Total laba (Rugi) komprehensif	(1.263,9)	(1.496,6)	(1.384,4)
Laba (Rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	(1.263,9)	(1.496,6)	(1.384,4)
Jumlah Saham Beredar (juta lembar)	36.773,9	36.773,9	30.584,6
Laba (Rugi) Neto per Saham Dasar	(19,6)	(40,7)	(45,5)
<b>POSISI KEUANGAN (DALAM MILIAR RUPIAH)</b>			
Kas dan Setara Kas	0,3	0,3	2,2
Aktiva Lancar Lainnya	1,3	3,9	41,3
Aktiva Tidak Lancar	711,9	713,8	1.526,3
Total Aktiva	713,5	718,0	1.569,8
Kewajiban Jangka Pendek	10.096,5	8.933,6	8.191,0
Kewajiban Jangka Panjang	6.036,3	5.939,8	7.276,3
Total Kewajiban	16.132,7	14.873,4	15.467,3
Total Ekuitas (Efisiensi Modal)	(15.419,2)	(14.155,4)	(13.897,5)
Modal Kerja Neto	(10.094,4)	(8.929,3)	(8.147,5)
<b>RASIO (%)</b>			
Margin Pendapatan Neto	44,6	44,5	52,2
Margin EBITDA	(434,6)	(542,5)	(82,8)
Margin Rugi Neto	(8.477,6)	(18.943,0)	(809,3)
Rasio laba (Rugi) terhadap jumlah aset	(101,0)	(208,4)	(88,7)
Rasio laba (Rugi) terhadap ekuitas	4,7	10,6	10,0
Rasio laba (Rugi) terhadap pendapatan	(84,8)	(189,4)	(8,1)
Rasio Lancar	0,02	0,05	0,5
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	(104,6)	(105,1)	(111,3)
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	2.293,2	2.071,5	985,3

## INFORMASI SAHAM

### INFORMASI PERDAGANGAN SAHAM

INFORMASI SAHAM	2018	2017
Harga saham penutupan (Rp per lembar)	50	50
Jumlah saham beredar (juta lembar)	36.773,9	30.584,6
Kapitalisasi pasar (juta Rp)	1.838.695,2	1.529.229,5

PERGERAKAN HARGA SAHAM	2018			2017		
	TERTINGGI	TERENDAH	PENUTUPAN	TERTINGGI	TERENDAH	PENUTUPAN
Kuartal 1 (Rp)	50	50	50	50	50	50
Kuartal 2 (Rp)	50	50	50	50	50	50
Kuartal 3 (Rp)	50	50	50	50	50	50
Kuartal 4 (Rp)	50	50	50	50	50	50

Volume perdagangan saham pada Bursa Efek Indonesia selama 2018 adalah sebanyak 10.508.547.896 saham.

### INFORMASI AKSI KORPORASI

Sepanjang tahun 2018, tidak ada aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan.

### INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSION)

Sepanjang tahun 2018 Perseroan tidak mengalami penghentian sementara perdagangan saham BTEL (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia.

# 02

# SAMBUTAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

---



**ANINDYA N. BAKRIE**  
Komisaris Utama

# LAPORAN DEWAN KOMISARIS

---

## PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KAMI HORMATI,

Sepanjang 2018, perekonomian Indonesia menghadapi sejumlah tantangan baik eksternal maupun domestik sehingga laju pertumbuhan ekonomi nasional hanya bergerak tipis menjadi 5,17% dari sebelumnya 5,07% di tahun 2017 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar Rp. 14.837,4 triliun. Konsumsi rumah tangga yang merupakan elemen utama pertumbuhan ekonomi menyumbang porsi sebesar 56% terhadap PDB atau tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Di sektor industri telekomunikasi dimana Perseroan berkiprah, secara umum tahun 2018 merupakan tahun yang berat dan kurang menguntungkan bagi para pemain di sektor ini dengan pertumbuhan yang negatif atau minus sekitar 7%. Perang harga, kebijakan pemerintah terkait registrasi nomor telepon, dan penurunan penggunaan layanan *legacy* (*voice dan SMS*) merupakan faktor-faktor yang mendominasi turunnya pertumbuhan industri telekomunikasi nasional.

## STRATEGI USAHA DAN PENCAPAIAN PERSEROAN

Perseroan melalui entitas anak yang sejak tahun 2015 telah menjajaki dan merintis inisiatif baru untuk menghadirkan layanan informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital bagi masyarakat juga tidak luput dari kondisi industri telekomunikasi di tahun 2018. Permintaan penyediaan layanan telekomunikasi Perseroan yang menasar segmen pengguna di gedung-gedung tinggi (*high rise building*) baik perkantoran maupun hunian selama tahun 2018 memang belum menunjukkan lonjakan yang tinggi. Namun demikian, Dewan Komisaris mengapresiasi manajemen Perseroan yang mampu mempertahankan jumlah pelanggan layanan telekomunikasi Perseroan dimana sampai akhir tahun 2018 jumlah sambungan dari pelanggan korporat tumbuh 27% dari tahun sebelumnya.

Memang disadari bahwa keberhasilan ini belum menggambarkan suatu sumbangan yang material dan signifikan bagi kinerja pendapatan Perseroan secara keseluruhan. Tetapi grafik pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar bagi Perseroan di masa depan dengan strategi dan model bisnis inovatif yang akan terus menerus diterapkan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris juga memandang bahwa Direksi Perseroan jeli dalam menangkap peluang seiring semakin berkembangnya jual beli produk dan layanan melalui media aplikasi digital maupun situs web berbasis internet atau dikenal dengan *e-commerce*. Para pemain besar *e-commerce* tentunya tidak hanya akan memfokuskan pada tingkat penjualan produk dan layanannya tetapi juga terhadap layanan penanganan pelanggan atau *customer care*. Geliat ini juga dibaca oleh perusahaan besar yang masih bertransaksi dengan pelanggannya secara konvensional untuk meningkatkan pelayanan pelanggan agar tingkat kepuasan pelanggan tetap terjaga. Seiring dengan perkembangan *e-commerce* dan kesadaran perusahaan konvensional akan layanan tersebut, Perseroan yang telah berpengalaman dalam penyediaan jasa *call center* atau *contact center* pada tahun 2018 mendapatkan kepercayaan dari beberapa perusahaan untuk menjadikan *call center* atau *contact center* Perseroan sebagai bagian dari layanan pelanggan perusahaan tersebut.

## PERFORMA DAN PROSPEK PERSEROAN

Secara umum kinerja keuangan Perseroan tahun 2018 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pendapatan usaha kotor Perseroan yang meningkat tipis 8,3%, sementara beban pokok pendapatan hanya mengalami sedikit kenaikan sehingga laba bruto tercatat meningkat. Beban usaha yang mengalami penurunan mendorong jumlah rugi usaha juga ikut menurun. Beban lain-lain mengalami penurunan yang signifikan, sehingga rugi bersih tahun berjalan juga menurun secara signifikan atau sekitar 51% dibandingkan dengan tahun lalu. Di sisi lain menguatnya mata uang US Dollar terhadap Rupiah di tahun 2018 menyumbang kerugian forex yang cukup besar bagi Perseroan mengingat sebagian hutang

yang dimiliki Perseroan dalam mata uang US Dollar. Sampai dengan tahun 2018, kreditur Perseroan yang telah merealisasikan Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham adalah Huawei Group dengan jumlah 6.189 juta lembar saham atau sekitar 16,83% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Realisasi OWK menjadi saham baru di Perseroan sebagaimana diatur oleh Perjanjian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU dapat mengurangi defisiensi modal Perseroan dimana utang Perseroan dikonversi menjadi modal.

Dewan Komisaris memiliki keyakinan dan harapan yang besar pada Direksi Perseroan untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dengan jeli memanfaatkan setiap peluang usaha yang ada, mempertajam strategi untuk meningkatkan layanan yang disediakan, dan terus mencari terobosan bisnis-bisnis baru. Pertumbuhan ruang usaha dan perkantoran dengan konsep *high rise building* di tahun-tahun mendatang dipandang cukup menjanjikan dan peluang ini menuntut kelincahan dan kecepatan Perseroan untuk merespon dengan menyediakan kebutuhan pelaku usaha akan layanan telekomunikasi dan data atau internet maupun layanan berbasis digital lainnya yang andal.

Dewan Komisaris sependapat dengan Direksi Perseroan yang meyakini bahwa perkembangan *e-commerce* dan kesadaran perusahaan konvensional akan pentingnya layanan pelanggan akan terus meningkat dari tahun ke tahun yang pada gilirannya akan semakin memperluas segmen pasar layanan *call center* atau *contact center*. Hal ini jelas menjadi peluang dan tantangan bagi Perseroan untuk semakin kreatif, inovatif dan profesional untuk merebut pangsa pasar di segmen ini.

## TATA KELOLA

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris secara aktif melakukan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat serta saran atas berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam mengelola Perseroan. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh Komite tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya termasuk memberikan rekomendasi serta laporan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya maupun penyempurnaan terkait dengan aspek pengawasan dan tanggung jawab di masing-masing komite. Komunikasi dan kerja sama yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi tercermin pada forum rapat gabungan Komisaris dan Direksi yang diadakan baik secara rutin maupun insidental sehingga Dewan Komisaris dapat selalu memantau sejauh mana kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh Direksi. Selain melalui rapat-rapat internal Dewan Komisaris, fungsi pengawasan juga dilakukan melalui komite-komite tersebut di atas. Organ-organ Dewan Komisaris tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya sesuai lingkup tanggung jawab dan bidangnya masing-masing. Dewan Komisaris terus mendorong implementasi tata kelola perusahaan (good corporate governance - GCG) yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan Perseroan oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan.

Dapat kami laporkan juga kepada Pemangku Kepentingan bahwa sepanjang tahun 2018 Perseroan tidak mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris.

## PENUTUP

Pada akhirnya, kita bersama telah melalui tahun 2018 yang penuh tantangan ini secara umum dengan baik. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada perseroan termasuk tentunya, kepada seluruh karyawan yang telah menunjukkan integritas, komitmen dan dedikasinya. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direksi Perseroan atas segala daya upaya yang telah ditunjukkan di tahun penuh tantangan ini. Semoga dengan inovasi, semangat dan kerja yang fokus, di tahun-tahun mendatang akan menghantarkan Perseroan mencapai kinerja yang diharapkan.

Atas nama Dewan Komisaris,



**ANINDYA NOVYAN BAKRIE**  
Komisaris Utama



**R. BISMARKA KURNIAWAN**  
Direktur Utama

# LAPORAN DIREKSI

---

## PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KAMI HORMATI,

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya meningkat tipis di angka 5,17%, tahun 2018 adalah tahun yang cukup berat dan juga merupakan tahun sangat menantang yang dilalui oleh Perseroan dan bagi para pelaku usaha industri telekomunikasi Indonesia secara umum. Tercatat terjadi pertumbuhan sebesar minus 7% di sektor industri telekomunikasi yang memaksa para pelaku usaha di industri ini membukukan penurunan pendapatan maupun laba bersih yang cukup signifikan di tahun 2018. Persaingan industri telekomunikasi masih didominasi oleh persaingan harga layanan antar operator dan ditunjang dengan perubahan pola berkomunikasi saat ini mengalami perubahan pesat yang diakibatkan tumbuhnya teknologi digital (*digital disruption*), yang tidak bisa dipungkiri mempengaruhi lanskap telekomunikasi di Indonesia. Dinamika pelanggan yang memiliki kecenderungan untuk semakin memanfaatkan aplikasi digital suara dan pesan dalam berkomunikasi mendesak penurunan penggunaan layanan voice melalui *clear channel* dan SMS yang cukup signifikan. Di samping itu, operator telekomunikasi masih beradaptasi dengan konsekuensi diberlakukannya regulasi pemerintah untuk memperketat pendaftaran nomor telepon pelanggan.

## PENCAPAIAN USAHA

PT Bakrie Telecom, Tbk sebagai salah satu pelaku usaha sektor telekomunikasi sedikit banyak terpengaruh dengan kondisi industri ini. Dengan bagian terbesar layanan telekomunikasi Perseroan di segmen sambungan telepon dengan sasaran pengguna di gedung-gedung tinggi perkantoran maupun hunian, Perseroan juga mengalami situasi yang serupa dengan pelaku usaha lainnya, utamanya meningkatnya penggunaan media digital berbasis aplikasi pesan dan suara oleh pelanggan dalam berkomunikasi. Namun demikian sesuai dengan target dan strategi bisnis yang telah dicanangkan oleh Direksi Perseroan sejak tahun 2015, Secara konsisten Perseroan tetap fokus untuk melayani sambungan telepon di segmen *high rise building* karena memiliki potensial yang menjanjikan.

Terdapat karakteristik yang unik dan berbeda antara pelanggan Perseroan di *high rise building* dengan pelaku usaha telekomunikasi lainnya. Pelanggan Perseroan sebagian besar adalah pelanggan korporasi yang membutuhkan suatu sambungan telepon yang dikhususkan untuk keperluan kegiatan usaha korporasi tersebut atau tidak bersifat untuk keperluan individual yang bisa dilayani dengan layanan seluler. Sebagai salah satu tolok ukuran bonafiditas suatu korporasi adalah memiliki kantor atau ruang usaha di gedung khusus perkantoran dan memiliki sambungan telepon yang bersifat tetap atau permanen di lokasi kantor tersebut. Sejak tahun 2015, pertumbuhan *high rise building* di DKI Jakarta dan kota-kota penopangnya cukup pesat. Tentunya potensi ini dibaca sebagai peluang bagi Perseroan untuk mengambil bagian dalam ceruk pasar penyediaan layanan telekomunikasi tersebut yang belum banyak pemain di dalamnya. Untuk segmen ini Perseroan melalui entitas anaknya di tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan kinerja yang meningkat dibandingkan dengan performa tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah sambungan dari pelanggan korporat Perseroan bertambah 27% dengan pertumbuhan kinerja pendapatan sebesar 8%. Ke depan, Perseroan akan terus gencar meningkatkan jumlah pelanggan dengan memperhatikan potensi jumlah pelanggan korporasi yang terus bertumbuh. Di samping itu, Perseroan juga siap untuk menyediakan layanan sambungan data atau internet dan televisi berbayar dengan bersinergi dengan unit usaha lain yang bernaung dalam Kelompok Usaha Bakrie atau berkolaborasi dengan pihak lainnya. Inisiatif ini sejalan dengan strategi dan model bisnis baru yang telah dicanangkan oleh Perseroan sejak tahun 2015 yakni penyediaan layanan informasi, telekomunikasi, dan hiburan berbasis digital.

Di samping bisnis layanan sambungan telepon dengan segmen pengguna di *high rise building*, Perseroan tetap mengelola dan mengembangkan lini usaha *Call Center* atau *Contact Center* yang telah dijalankan Perseroan sejak tahun 2014. Dengan pengalaman dan penghargaan yang telah dimilikinya, sampai dengan tahun 2018 Perseroan telah dipercaya oleh beberapa perusahaan *retail* untuk mengelola layanan *Call Center* atau *Contact Center* bagi konsumen mereka. Kesadaran akan kebutuhan pelaku usaha di berbagai sektor termasuk pelaku usaha *e-commerce* untuk meningkatkan kualitas *customer relation management (CRM)* membuka peluang bagi Perseroan untuk menumbuhkan jumlah pelanggan dan pendapatan dari sektor penyediaan layanan *Call Center* atau *Contact Center* ke depannya. Perseroan juga dan sedang terus mendalami kemungkinan kemungkinan untuk mengantisipasi perkembangan usaha media digital melalui pengadaan infrastruktur telekomunikasi dan media digital tersebut.

Kinerja keuangan Perseroan sampai dengan akhir tahun 2018 menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 8%. Di sisi lain Perseroan di tahun 2018 ini masih mencatat rugi bersih sebesar Rp 720,6 miliar yang mana hal ini secara dominan masih diakibatkan oleh beban keuangan sebesar Rp605,7 miliar yang terutama berasal dari perhitungan akrual bunga pinjaman jangka panjang. Dengan strategi, inisiatif, dan model bisnis yang akan dikembangkan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, manajemen akan terus bekerja keras dan efisien agar performa keuangan Perseroan menjadi lebih baik ke depannya.

## PROSPEK DAN PELUANG

Ke depan, pertumbuhan pembangunan *high rise building* di Jakarta dan kota-kota penopangnya serta kesadaran pelaku usaha korporasi termasuk pelaku usaha *e-commerce* untuk meningkatkan kualitas CRM merupakan potensi dan peluang yang sangat besar yang harus segera ditangkap dan ditanggapi oleh Perseroan dengan mempersiapkan layanan sambungan telepon, internet/data dan *call center* atau *contact center* yang semakin andal. Perseroan juga mempersiapkan strategi dan insiatif baru dalam rangka peningkatan performa Perseroan dengan mengamati dan merebut setiap peluang yang ada serta memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh Perseroan.

## TATA KELOLA

Di sisi tata kelola perusahaan, Perseroan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang sejalan dengan nilai-nilai, kode etik, dan budaya yang dianut Perseroan. Untuk hal ini, Perseroan mengacu pada praktik yang dianggap baik dalam penetapan proses bisnis, pengendalian dan prosedur operasi standar Perseroan. Dengan demikian diharapkan prinsip-prinsip GCG akan mendukung peningkatan kinerja Perseroan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, serta peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan Perseroan. Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris bersama komite-komite yang berada dalam koordinasi Dewan Komisaris secara aktif memberikan pendapat, nasihat, dan masukan kepada Direksi melalui beberapa

pertemuan formal maupun informal dalam rangka pengelolaan Perseroan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Dapat kami informasikan bahwa sepanjang tahun 2018 tidak terdapat perubahan susunan Direksi Perseroan.

## PENUTUP

Akhir kata, Direksi mengucapkan terimakasih kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, segenap karyawan serta pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Atas nama Direksi,



**R. BISMARKA KURNIAWAN**

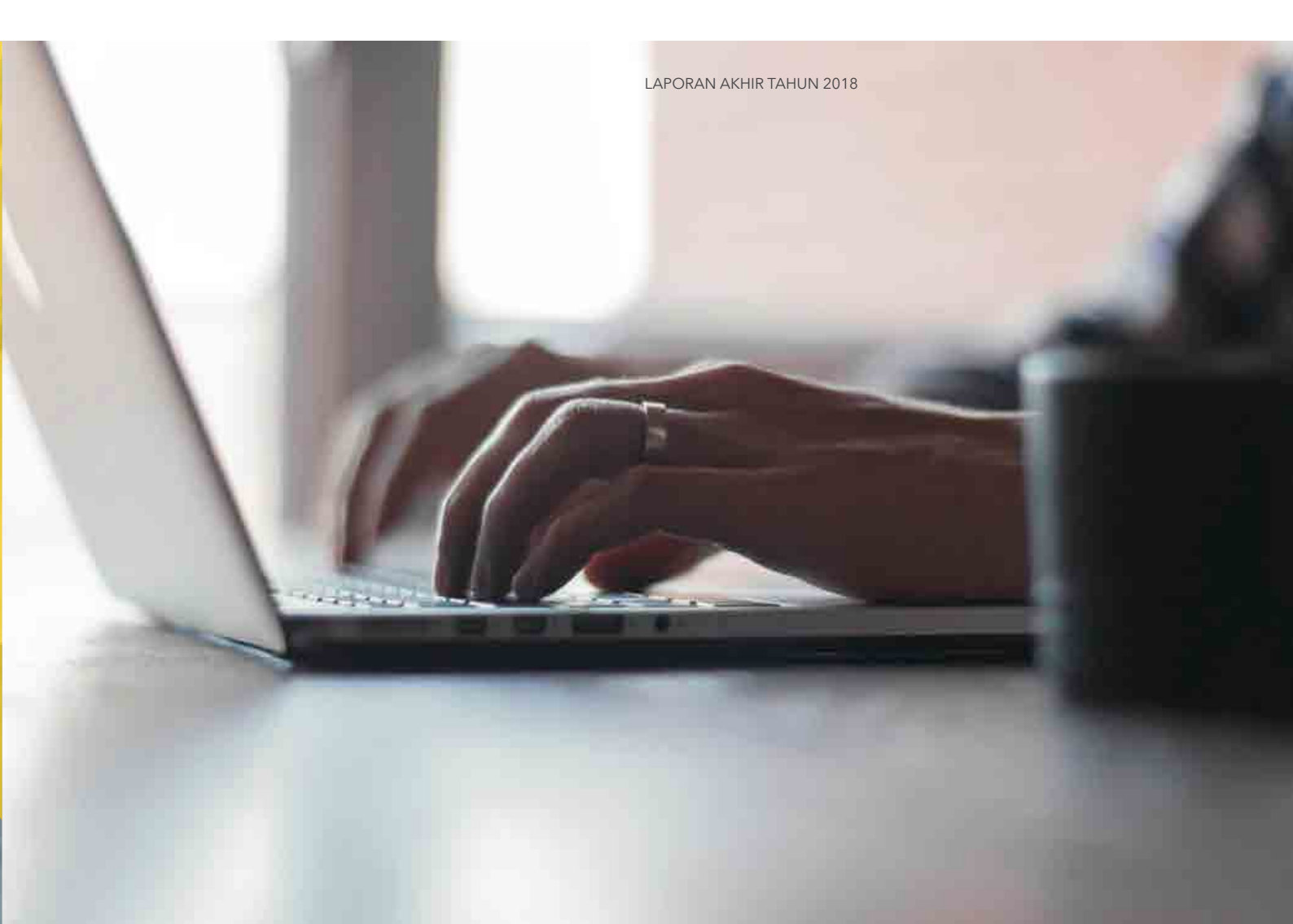
Direktur Utama



PROFIL  
**PERUSAHAAN**

---

03



## PROFIL **BAKRIE TELECOM**

Nama Perusahaan Publik : PT Bakrie Telecom Tbk.

Alamat : Wisma Bakrie Lt. 3  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1 Jakarta 12920

No. Telp./Fax. : +6221 - 52920264

Website : [www.bakrietelecom.com](http://www.bakrietelecom.com)

Email : [corsec@bakrietelecom.com](mailto:corsec@bakrietelecom.com)

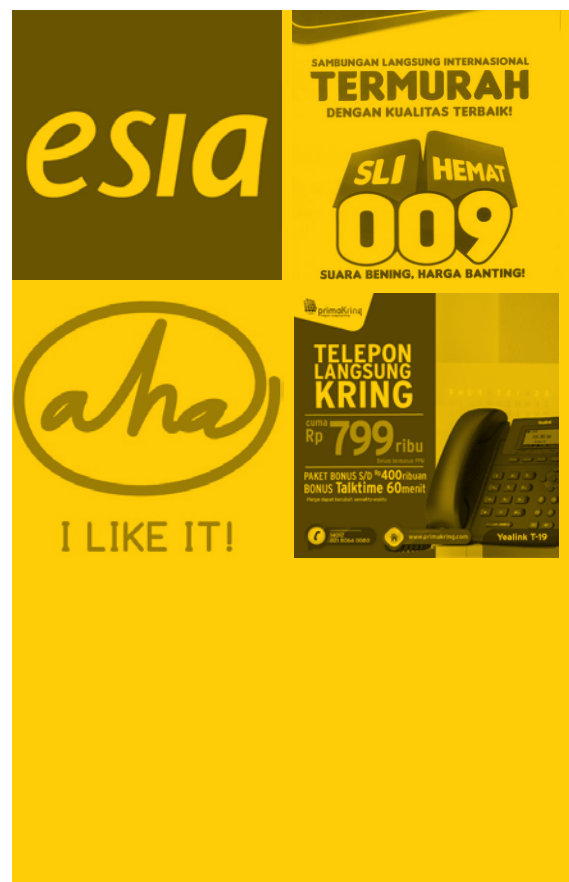
## RIWAYAT PERUSAHAAN

Pertama kali didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Radio Telepon Indonesia (Ratelindo), kehadiran Ratelindo di tengah masyarakat pada saat itu menjadi jawaban bagi sebagian masyarakat yang belum dapat terlayani dengan sambungan telepon yang diselenggarakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Perseoran mengubah namanya pada tahun 2003 menjadi PT Bakrie Telecom yang ditandai dengan penggelaran layanan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas (Fixed Wireless Access (FWA)). Berselang tiga tahun kemudian sebagai langkah strategis untuk menjadi perusahaan telekomunikasi yang andal dan terkemuka, Perseroan menawarkan sebagian sahamnya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyertaan modal ke dalam Perseroan dan kemudian Perseroan menjadi perusahaan publik yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) di tahun 2006. Sebagai perusahaan publik, nama Perseroan berubah menjadi PT Bakrie Telecom Tbk dengan ticker BTEL.

Pada tahun 2007, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercayakan lisensi FWA bagi BTEL dengan cakupan area operasi layanan yang semula di area Jawa Barat-Jakarta-Bandung (JBB) menjadi seluruh area Indonesia. Mengikuti kemajuan teknologi informasi yang sangat dinamis dan memperhatikan kebutuhan konsumen, di tahun 2010 BTEL mulai bertransformasi untuk juga berkompetisi dalam bisnis layanan data Broadband Wireless Access dengan teknologi CDMA EVDO Rev. A, dimana dengan layanan terbaru ini pelanggan dapat

menikmati layanan akses internet atau data dengan berbagai media atau gadget.

Pada tahun 2012, BTEL mengintegrasikan merek dagang Aha yang berada di bawah naungan perusahaan Bakrie Connectivity (BCON) dan ESIA yang berada di bawah lingkup BTEL guna mendukung optimalisasi layanan data. Bersatunya dua merek dagang besar ini ditandai dengan peluncuran modem ESIA Max-D pada 1 Juni 2012. Disamping sejalan dengan strategi bisnis awal BTEL sebagai budget operator, langkah ini juga merupakan jawaban Perseroan dalam menghadapi tantangan persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat. Seiring dengan semakin sengitnya peta kompetisi industri telekomunikasi di Indonesia, di tahun 2013 BTEL mulai mengintensifkan diri untuk memperkuat layanan pada daerah Jawa Barat-Jakarta-Bandung (JBB) yang sejak awal telah menjadi area layanan yang menyumbang pendapatan Perseroan yang terbesar.



Pada tahapan selanjutnya, dengan mengusung konsep kemitraan pemanfaatan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi, pada tahun 2014 Perseroan memulai bertransformasi dari Perusahaan penyelenggara jaringan dan operator jasa teleponi dasar menjadi penyedia layanan teleponi dasar. Hal ini ditandai dengan kolaborasi antara BTEL dan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) dalam kerja sama pemanfaatan jaringan telekomunikasi Smartfren oleh BTEL. Di tahun 2015, BTEL memperoleh izin penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler yang memungkinkan Perseroan ikut berkiprah dalam kancah layanan telekomunikasi seluler.

Di saat bersamaan pesaing BTEL yang menyediakan layanan FWA berbasis CDMA mulai mengibarkan bendera putih, pada tahun 2015 BTEL berhasil untuk tetap mempertahankan keberadaan layanan Fixed Wireless Access (FWA) Esia berbasis CDMA. Sebagai alternatif sekaligus pelengkap layanan Esia yang lebih luas, BTEL juga memfokuskan produk aplikasi EsiaTalk yang merupakan aplikasi percakapan dan pesan yang bertumpu pada jaringan data dari penyedia data manapun di seluruh dunia atau over the top (OTT). Di tahun yang sama BTEL memperoleh lisensi penyelenggaraan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak seluler (mobile celluler) yang memungkinkan BTEL berpartisipasi dalam kompetisi bisnis mobile selular dengan skema MVNO yang dapat mempergunakan teknologi apapun termasuk teknologi terkini LTE (Long Term Evolution)

Perseroan mendapati kenyataan bahwa teknologi CDMA tidak lagi mendapatkan sentuhan pengembangan dari pabrikan pembuatnya sedangkan di sisi lain teknologi GSM semakin gencar dan masif untuk terus dimutakhirkan dimana pada saat ini teknologi 4G sudah cukup lama dinikmati dan bahkan di beberapa negara sudah diperkenalkan teknologi 5G yang lebih maju. Dalam perspektif industri, persaingan usaha layanan dan jaringan telekomunikasi dari tahun ke tahun semakin sengit dengan perebutan pangsa pasar yang cenderung stagnan. Menyadari situasi yang sangat menantang ini, perseroan telah mengambil langkah antisipasi dengan memulai penajakan untuk mengelola dan menghadirkan suatu produk layanan berbasis digital dengan fokus pada kebutuhan masyarakat akan informasi, komunikasi, dan hiburan. Sejak tahun 2016 dan dilanjutkan hingga 2018, Perseroan sudah merintis penyediaan layanan telekomunikasi dengan fokus pada segmen pengguna di gedung-gedung tinggi (*high rise building*) dan tetap menjalankan bisnis call centre atau contact centre yang telah dipercaya oleh pelaku usaha. BTEL meyakini bahwa transformasi model bisnis yang saat ini sedang berjalan mempunyai harapan untuk menjadi lini usaha baru yang akan menjadi andalan Perseroan dalam kontribusi pendapatan ke depan.

# esia max-d



## VISI DAN MISI PERUSAHAAN

### VISI

Menghubungkan semua generasi dengan dunia digital.

### MISI

Memberikan pengalaman unik dan menyenangkan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan dunia informasi, komunikasi dan hiburan.

# KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Menghadapi era teknologi informasi dan telekomunikasi di awal tahun 1990-an, Perseroan didirikan dengan nama PT Radio Telepon Indonesia (Ratelindo) pada tahun 1993 dengan fokus pada kegiatan usaha utama yaitu penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi. Seiring dengan kondisi industri yang kian sengit yang semakin tidak menguntungkan dengan berhentinya pabrikan untuk mengembangkan teknologi CDMA yang dipergunakan oleh Perseroan, maka dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Perseroan telah merintis langkah untuk menciptakan inisiatif baru dengan menjajaki produk layanan berbasis digital dengan fokus pada kebutuhan masyarakat akan komunikasi, informasi, dan hiburan. Walaupun belum terlalu masif, untuk tahap pertama dari inisiatif baru tersebut, Perseroan telah menghadirkan layanan telekomunikasi dengan sasaran utama pelanggan di gedung-gedung perkantoran dan properti lain yang memiliki tingkat hunian yang tinggi. Untuk segmen lainnya, Perseroan masih terus mempersiapkan layanan lain yang fokus pada informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital. Di sisi lain, Perseroan terus mengelola dan mengembangkan layanan call center atau contact center yang pangsa pasarnya tetap menjanjikan terutama dengan semakin tumbuh kesadaran dari produsen atau perusahaan untuk memberikan layanan customer care kepada pelanggannya. Kegiatan-kegiatan usaha tersebut merupakan sebagian dari kegiatan usaha lainnya yang dimungkinkan untuk dioperasikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu antara lain:

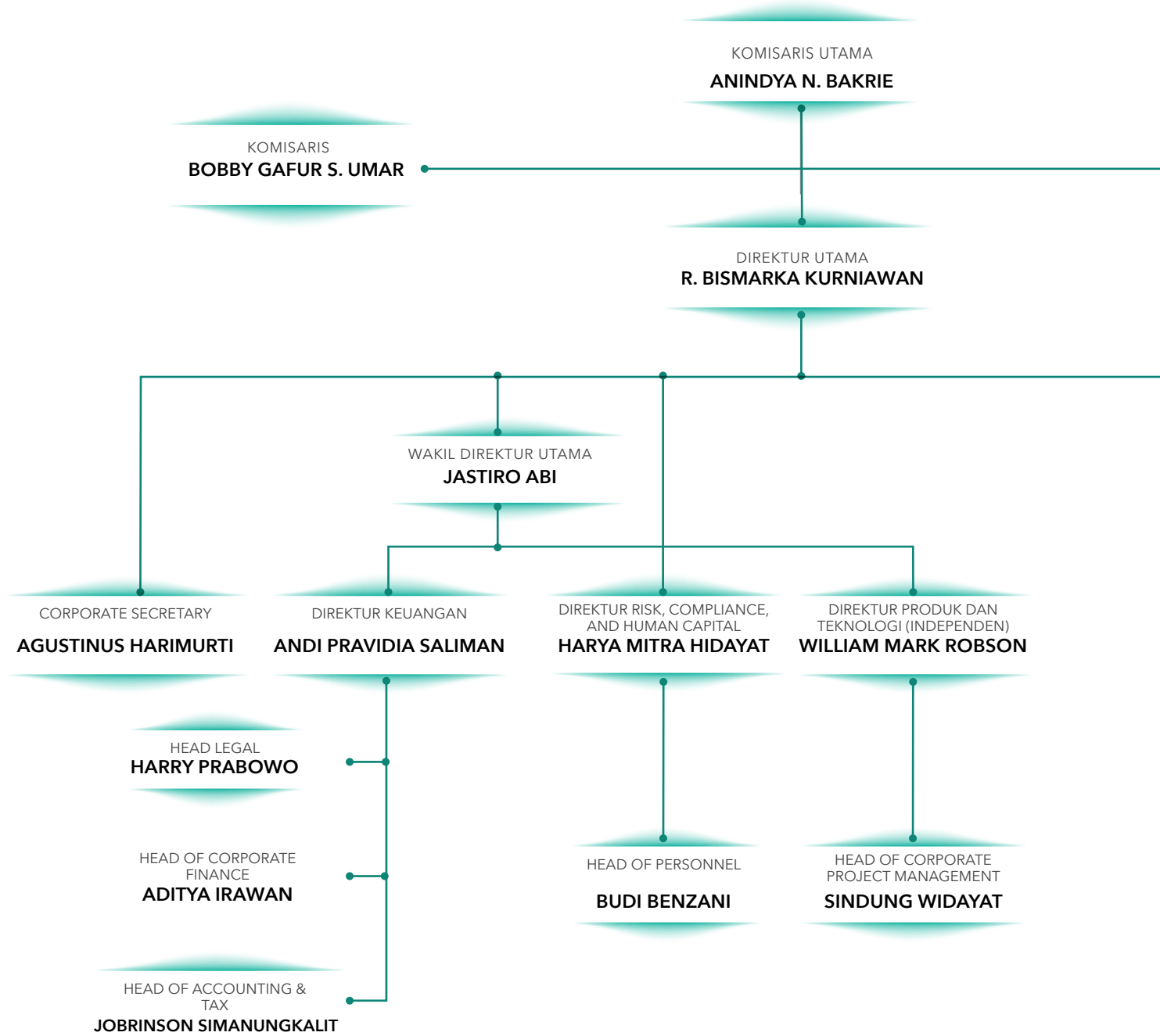
**a.** Menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa, telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap, serta jasa transaksi keuangan secara elektronik termasuk jasa pembayaran dengan menggunakan kartu dan jasa pengiriman uang secara elektronik baik di dalam maupun lintas negara dalam rangka memperluas pelayanan jasa telekomunikasi bagi masyarakat.

**b.** Merencanakan, mendesain, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya sebagai pendukung usaha Perseroan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi.

**c.** Melaksanakan usaha dan kegiatan pengoperasian, dan penjualan jaringan dan/atau jasa yang diselenggarakan Perseroan, pemeliharaan, penelitian, pengembangan dan/atau fasilitas telekomunikasi.

**d.** Memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tidak terbatas import atas barang-barang, perangkat dan/atau produk-produk tersebut, termasuk namun tidak pada handset dan terminal telekomunikasi.

# STRUKTUR ORGANISASI



KOMISARIS INDEPENDEN  
**AI MOELYADI MAMOER**

WAKIL DIREKTUR UTAMA  
**TAUFAN E.N. ROTORASIKO**

HEAD OF BUSINESS  
DEVELOPMENT  
**TEGUH ANANTAWIKRAMA**

INTERNAL AUDIT  
**SASMITO ARYO**

HEAD OF COMMERCIAL  
OPERATION  
**ANDI LASINRANG BHARATA**



A teal-tinted photograph of chess pieces on a board. The pieces are arranged in a row, with a king in the center, a queen to its right, and a pawn in the foreground on the left. The background is dark and out of focus.

## SEKILAS PROFIL DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

---

## PROFIL DIREKSI

### R. BISMARKA KURNIAWAN DIREKTUR UTAMA



Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun.

Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Visi Media Asia Tbk sejak 2011. Di samping itu beliau juga dipercaya untuk menjabat beberapa posisi antara lain Komisaris Utama PT Digital Media Capital sejak 2015, Komisaris PT Bakrie Global Ventura, Komisaris PT Intermedia Capital Tbk. sejak 2012, Komisaris PT Cakrawala Andalas Televisi, Direktur PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal, Direktur Capital Managers Asia Pte. Ltd. dan Direktur Great Asian Holding Pte. Ltd. sejak 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science in Civil Engineering (Construction) dari the University of Southern California, USA in 1993, gelar Master of Engineering in Structural Engineering minoring in Business Administration dari Cornell University, USA pada tahun 1994, dan Master of Business Administration in Finance, Investment and Banking dari the University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, USA di tahun 1995.

**JASTIRO ABI**  
WAKIL DIREKTUR UTAMA



Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak 2016, Direktur Utama Perseroan periode 2013-2016, Wakil Direktur Utama Perseroan kurun waktu 2011-2013 dan Direktur Keuangan Perseroan dari tahun 2007 sampai 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Bakrie Swasakti Utama dan berbagai posisi manajerial pada divisi Corporate Banking, Credit Recovery Unit, Trade Finance di HSBC pada tahun 1998 sampai 2002 dan PT Astra International Tbk. pada tahun 1997 sampai 1998. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Pengawas di Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI). Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Diponegoro pada tahun 1995, M.Eng.Sc. dari Queensland University of Technology Australia pada tahun 1997, M.B.A. dari University of Western Australia pada tahun 2005, dan meraih gelar Doktor dari BINUS University pada tahun 2017

**TAUFAN E. N. ROTORASIKO**  
WAKIL DIREKTUR UTAMA



Warga Negara Indonesia, usia 43 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak 2016. Menyelesaikan pendidikan di Strayer College Washington DC untuk meraih Bachelor of Science in Computer Information System pada tahun 1998 dan menyandang Master of Business Administration dari UCLA-NUS Executive MBA Program pada tahun 2009. Taufan E.N Rotorasiko memulai karir di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai Network Engineer dan Software Engineer di beberapa perusahaan IT di Amerika Serikat diantaranya Nth Information System, Bell Atlantic, dan Verizon. Beliau bergabung di Grup Bakrie sejak tahun 2002 sebagai Group Information System Administration Manager di PT Bakrie & Brothers sampai tahun 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Multi Kontrol Nusantara dan Komisaris PT Bakrie Indo Infrastructure. Beliau terafiliasi dengan Komisaris Utama BTEL karena hubungan keluarga.

**HARYA MITRA HIDAYAT**  
DIREKTUR



Warga Negara Indonesia, usia 45 tahun.

Menjabat sebagai Direktur sejak 2012, dan terakhir diangkat kembali sebagai direktur pada tahun 2015. Sebelumnya di PT Bakrie Telecom Tbk. menjabat sebagai Executive Vice President 2006-2007. Jabatan lain sebelumnya adalah Direktur Utama PT Bakrie Toll Road dari 2007-2012, VP Corporate Finance di PT Bumi Resources Tbk. 2004-2007, VP Corporate Finance di Asia Capital Manager selama 2002-2004. Tahun 2001-2002 menjabat Associate Director di AAJ Associates. Tahun 1998 menjabat sebagai Management Trainee di Worldcom, Associates di Merrill Lynch, Singapura tahun 1999-2001. Memperoleh gelar MBA dari University of Baltimore, Maryland 1999, dan B.S. Business Administration di Denver University, Colorado 1996.

**W. MARK ROBSON**  
DIREKTUR INDEPENDEN



Warga Negara Inggris, usia 51 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Independen sejak 2016. Menempuh pendidikan di Sheridan College, Institute for Technology, Toronto, Canada dengan bidang studi Architectural Engineering dan di George Brown College, Toronto, Canada dengan disiplin ilmu Fiber Optics Engineering and Installation Electrical Engineering. Mark Robson mengawali karirnya sebagai CATV, SMATV and CADD Designer pada tahun 1988 di Cen-Comm Communications, Toronto, Canada. Karir dan kompetensi beliau kian terasah sebagai Technical Advisor di Fortress Satellite Hong Kong LTD, Hong Kong dan Rogers Cable TV & Telecom, Toronto, Canada. Pengalaman di sektor TV engineering membawa beliau selanjutnya untuk berkarya di Indonesia pada tahun 1997, bergabung dengan Group Lippo dalam beberapa unit usaha diantaranya Kabel Vision dan First Media. Mark juga berkontribusi dalam pengembangan Sitra dan Wimax-Bolt dengan posisi terakhir sebagai Vice President of System Network implementation & Engineering sampai tahun 2012. Dengan pengalaman dan keahlian engineering tersebut Mark bergabung sebagai Technical Advisor pada tahun 2012 sampai dengan pertengahan 2015 dengan Pay TV Company yang menggelar layanan TV kabel berbayar.

**ANDI PRAVIDIA S.**  
DIREKTUR



Warga Negara Indonesia, usia 45 tahun.

Menjabat sebagai Direktur sejak 2016. Selepas studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, STEI/AAI, Jakarta tahun 1996, Mulai berkarir sebagai auditor di beberapa Kantor Akuntan di Jakarta. Antara tahun 1998 sampai 2002, beliau berkarya di PT. Putra Sumber Utama Timber, Paper & Forest Product Industry dan di PT Dinar Securities. Pengalamannya sebagai auditor dan kompetensi di bidang keuangan dan accounting membawa Andi Pravidia bergabung dengan Group Bakrie pada tahun 2002 sampai saat ini dengan beberapa posisi terakhir antara lain VP PT Bakrie Global Ventura, Presiden Direktur PT Bumi Fajar Sakti, dan Chief Finance Officer Perseroan.

Nama : R. BISMARKA KURNIAWAN  
Jabatan : Direktur Utama  
Dasar Pengangkatan Terakhir : RUPS 26 Juni 2018  
Periode Jabatan : 2018 - 2021

Nama : JASTIRO ABI  
Jabatan : Wakil Direktur Utama  
Dasar Pengangkatan Terakhir : RUPS 26 Juni 2018  
Periode Jabatan : 2018 - 2021

Nama : TAUFAN E. N. ROTORASIKO  
Jabatan : Wakil Direktur Utama  
Dasar Pengangkatan Terakhir : RUPS 26 Juni 2018  
Periode Jabatan : 2018 - 2021

Nama : W. MARK ROBSON  
Jabatan : Direktur Independen  
Dasar Pengangkatan Terakhir : RUPS 26 Juni 2018  
Periode Jabatan : 2018 - 2021

Nama : ANDI PRAVIDIA SALIMAN  
Jabatan : Direktur  
Dasar Pengangkatan Terakhir : RUPS 26 Juni 2018  
Periode Jabatan : 2018 - 2021

Nama : HARYA MITRA HIDAYAT  
Jabatan : Direktur  
Dasar Pengangkatan Terakhir : RUPS 26 Juni 2018  
Periode Jabatan : 2018 - 2021



# PROFIL DEWAN KOMISARIS

## PROFIL DEWAN KOMISARIS

### ANINDYA NOVYAN BAKRIE KOMISARIS UTAMA



Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun.

Telah menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 2013. Sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2003. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bakrie & Brothers, Tbk, Komisaris Utama PT Viva Media Baru sejak 2013, Direktur Utama PT Visi Media Asia (VIVA) sejak 2008, Komisaris Utama PT Lativi Mediakarya sejak tahun 2007, Komisaris Utama PT Intermedia Capital Tbk. sejak 2013, dan Komisaris Utama PT Cakrawala Andalas Televisi sejak 2009. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Deputy Chief Operating Officer dan Managing Director di PT Bakrie & Brothers Tbk. 1997-1999 dan Analis Keuangan di Salomon Brothers Inc., New York dari tahun 1996 sampai 1997. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media di Kamar Dagang Indonesia ("KADIN"), setelah menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Telekomunikasi di KADIN hingga 2008 dan Anggota Dewan Penasehat Asia Pacific Media Forum (APMF) sejak tahun 2003.

Sebelumnya beliau adalah Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media, dan anggota Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Anggota Asia Pacific Economic Perusahaan Business Advisory Council (ABAC) Delegasi Indonesia dan Dewan Internasional di Belfer Center for Science and International Affairs of Harvard University, serta pendiri dan Ketua Bakrie Center Foundation.



Penerima gelar Sarjana di bidang Ilmu Teknik Industri dari Northwestern University, Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1996 dan gelar Master di bidang Administrasi Bisnis dari Program Manajemen Global di Stanford Graduate School of Business, California, Amerika Serikat pada tahun 2001.

**BOBBY GAFUR S. UMAR**  
WAKIL KOMISARIS



Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2013 dan sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2003. Saat ini beliau adalah Komisaris PT Bakrie & Brothers Tbk dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama. Di samping itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Bakrie Sumatera Plantations sejak Juli 2002, Direktur Utama/CEO PT Bakrie Indo Infrastructure sejak Maret 2008. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota direksi di beberapa Perusahaan antara lain, Vice President Commissioner PT Bakrie & Brothers Tbk., Direktur PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., Direktur PT Bakrie Pasaman Plantations, dan Direktur PT Agrowiyana. Beliau juga merupakan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia masa bakti 2012-2015, Ketua Asosiasi Keinsinyuran se-ASEAN (AFEO) masa bakti 2012-2013, wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia masa bakti 2011-2017, dan Ketua Komite tetap Pengembangan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia masa bakti 2010-2015.

Gelar Master of Business Administration diperoleh Bobby Gafur S. Umar dari University of Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 1995.

## AI MULYADI MAMOER

KOMISARIS INDEPENDEN



Warga Negara Indonesia, usia 72 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2006. Pernah juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Tiga Pilar Kemitraan, sebuah asosiasi anti-korupsi yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dan setelahnya meng-gagas berdirinya Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS) dan Gerakan Nasional Indonesia Berintegritas (GNIB). Beliau adalah Eksekutif Indonesia Procurement Watch, pendiri dan anggota Dewan Eksekutif Masyarakat Pengusaha Indonesia, pendiri dan anggota dari Tim 45 Dewan Integritas Bangsa. Ia juga anggota dari Dewan Eksekutif Transparency International Indonesia, Komunitas Telematika Indonesia, Masyarakat Komisaris Indonesia, Komite Integritas BULOG, PERTAMI-NA, dan JAMSOSTEK. sebelumnya bertindak sebagai Expert Advisor dan Koordinator Expert Advisor Presiden Direktur PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., Komisaris PT Ratelindo, Komisaris Perum Pos dan Giro dan Kepala Departemen Perencanaan di Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung dan gelar Master di bidang Ekonomi dari University of Michigan.

”

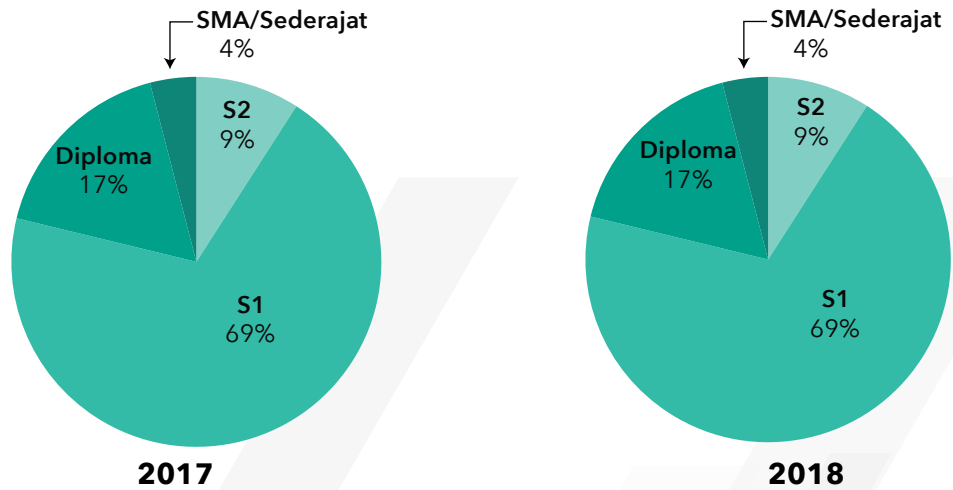
EFISIENSI JUMLAH SUMBER DAYA  
MANUSIA BERIKUT PEMETAAN  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
BERBASIS KEAHLIAN MERUPAKAN  
SALAH SATU PRASYARAT UTAMA  
BAGI PERSEROAN DALAM PROSES  
TRANSFORMASI USAHA.

# SUMBER DAYA MANUSIA

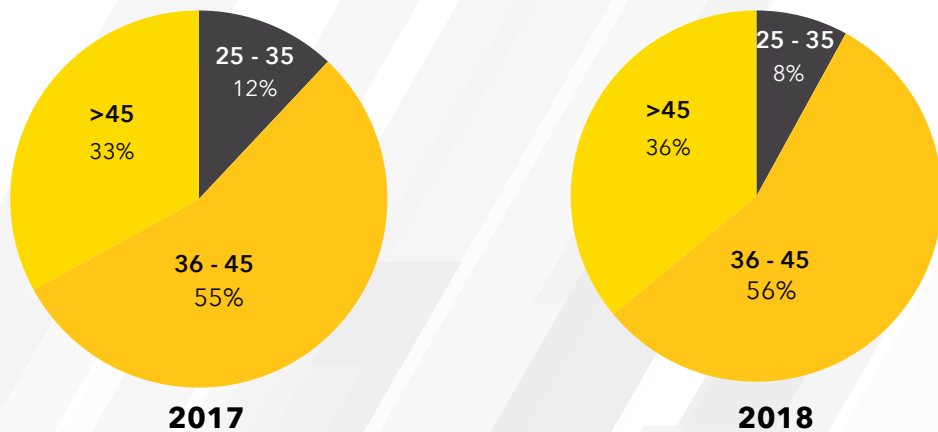
Seiring dengan fokus kegiatan usaha Perseroan pada layanan informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital dan memperhatikan setiap tahap perkembangan kinerja Perseroan, kebutuhan akan sumber daya manusia handal, berkompeten, dan mengikuti perkembangan teknologi sangat krusial dan menjadi tulang punggung Perseroan. Pada tahapan sampai dengan saat ini, efisiensi jumlah sumber daya manusia berikut pemetaan tugas dan tanggung jawab berbasis keahlian merupakan prioritas dan keniscayaan bagi Perseroan dalam proses transformasi usaha.

Pada tahun 2018, jumlah karyawan di dalam grup BTEL adalah sebesar 80 orang dengan demografi sebagai berikut:

## PERSENTASE KARYAWAN BERDASARKAN PENDIDIKAN



## PERSENTASE KARYAWAN BERDASARKAN USIA





## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

DAFTAR PEMEGANG SAHAM PER TANGGAL 31 DESEMBER 2018:

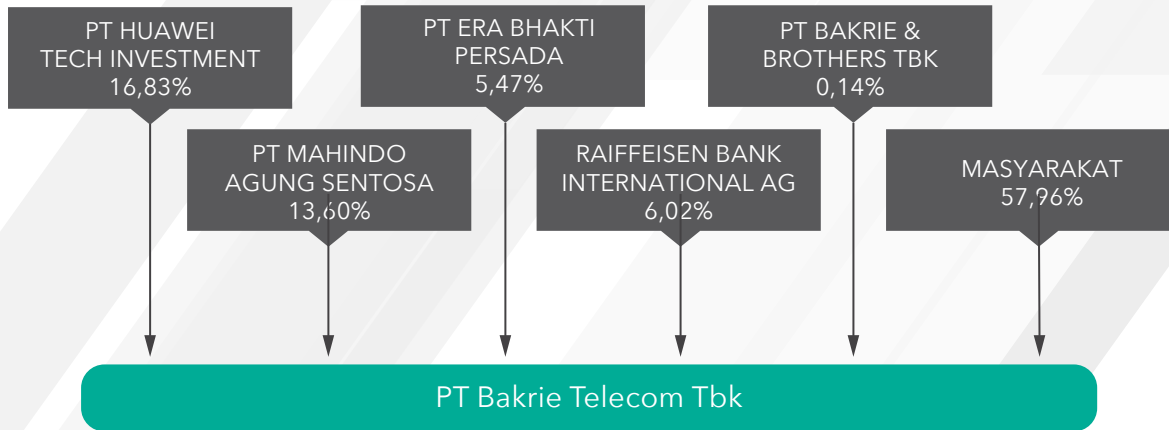
PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM (LEMBAR)	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
PT Huawei Tech Investment	6.189.313.980	16,83
PT Mahindo Agung Sentosa	5.000.439.000	13,60
PT Era Bhakti Persada	2.012.019.117	5,47
Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch S/A Best Quality Global Limited	2.213.279.000	6,02
PT Bakrie & Brothers Tbk.	43.043.142	0,12
Masyarakat	21.315.810.396	57,96
<b>TOTAL</b>	<b>36.773.904.635</b>	<b>100,00</b>

Tidak ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham BTEL pada tahun 2018.

KOMPOSISI KEPEMILIKAN INSITUSI DAN INDIVIDU PER 31 DESEMBER 2018

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM (LEMBAR)	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
Institusi Lokal	13.872.370.835	37,72
Institusi Asing	2.213.279.000	6,02
Individu Lokal	21.315.810.396	57,96
Individu Asing	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>36.773.904.635</b>	<b>100,00</b>

## PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI



Perseroan tergabung dalam kelompok usaha Bakrie.

## ANAK PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN	% KEPEMILIKAN	BIDANG USAHA	MULAI BEROPERASI	DOMISILI
PT. BAKRIE CONNECTIVITY	99,99%	Perdagangan Telekomunikasi	2010	Indonesia
PT. BAKRIE DIGITAL NET (DAHULU PT. BAKRIE NETWORK)	99,80%	Infrastruktur Telekomunikasi	Tahap Pengembangan	Indonesia
BAKRIE TELECOM PTE. LTD	100,00%	Entitas bertujuan khusus	2010	Singapura
PT. ANUGRAH ANDALAN INVESTAMA	99,80%	Perdagangan dan Jasa	2016	Indonesia
PT. MITRA KREASI KOMUNIKA	70,00%	Perdagangan dan Jasa	2016	Indonesia

## PENCATATAN SAHAM

JENIS PENCATATAN	TANGGAL PENCATATAN	JUMLAH SAHAM BEREDAR (LEMBAR)
Penawaran Umum Perdana	3 FEBRUARI 2006	5.500.000.000
Pencatatan Saham	3 FEBRUARI 2006	18.779.415.495
Penerbitan Saham Dengan Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu	29 FEBRUARI 2008	28.482.417.579
Penerbitan Saham Tanpa Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu	22 JUNI 2012 dan 29 AGUSTUS 2012	30.584.590.655
Penerbitan Saham Tanpa Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu (Konversi Obligasi Wajib Konversi)	1 MARET 2017	36.773.904.635

## PENCATATAN OBLIGASI

NAMA OBLIGASI	JUMLAH NOMINAL	TINGKAT SUKU BUNGA	JATUH TEMPO	PERINGKAT
Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007	Rp. 650.000.000.000	11,9 P.A.	4 September 2012 (Lunas)	Id A-
Wesel Senior (Diterbitkan Oleh Bakrie Telecom Pte. Ltd.)	Usd 380.000.000	11,50 P.A.	7 Mei 2015	-

## PROFESI PENUNJANG

**PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR**

*Biro Administrasi Efek*

Mayapada Tower Lantai 10, Suite 02B  
Jl. Jend. Sudirman Kav.28. Karet, Setiabudi,  
Jakarta 12920

No STTD: 09.03.1.66.53633

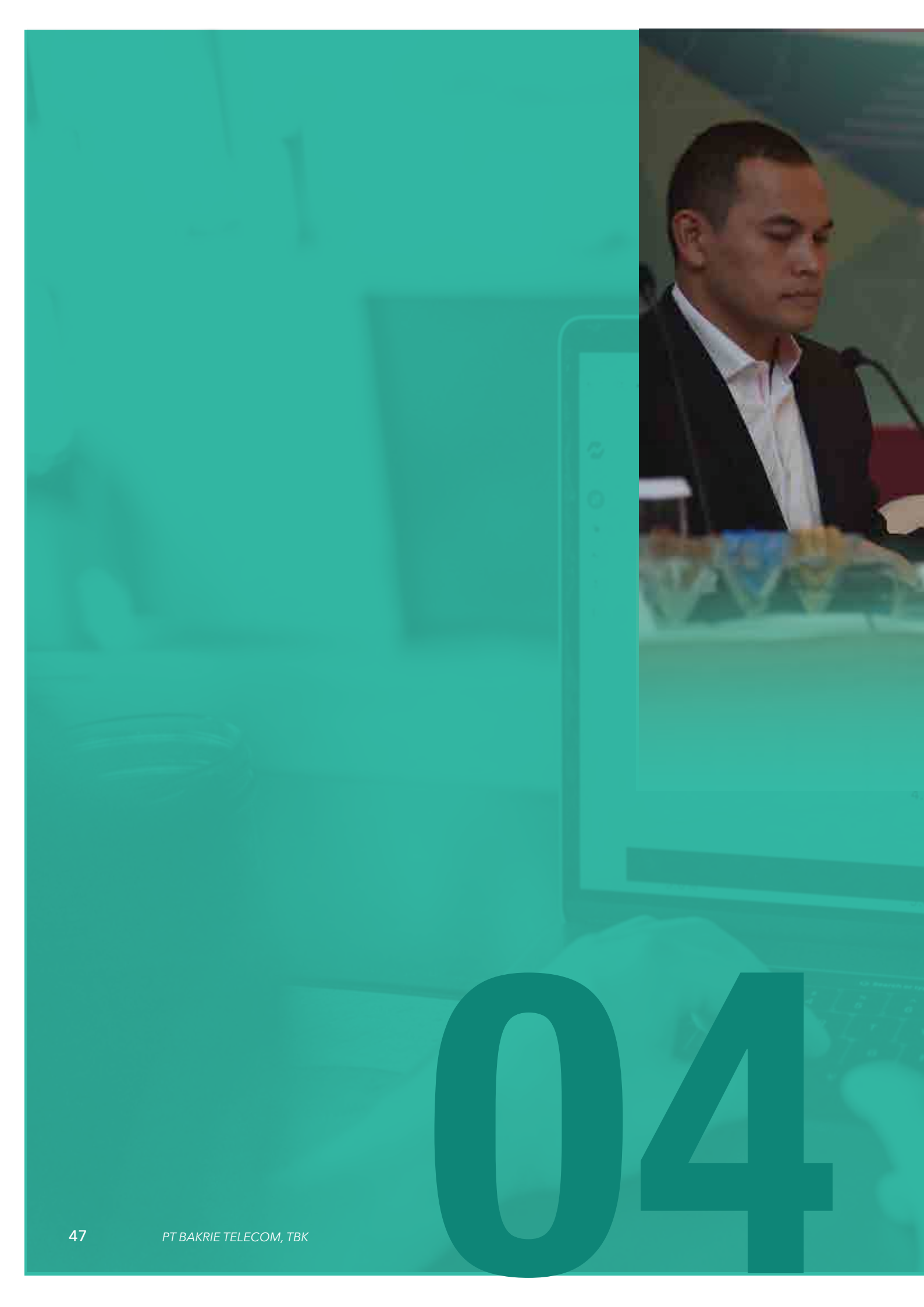
**KAP KRISNAWAN, NUGROHO & FAHMY**

*Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasi*

Patra Office Tower 18th Floor, Suite 1836  
Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34  
Jakarta 12950, Indonesia

No STTD: Kep-367/KM.1/2017





# 04



# ANALISIS & PEMBAHASAN **MANAJEMEN**

---



*Pembahasan dan analisis kinerja keuangan BTEL berikut ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan serta informasi tertentu mengenai data keuangan dan operasi yang terkonsolidasikan.*

*Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk beberapa standar baru atau yang direvisi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013, serta peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh*

*Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM-LK).*

*Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, sedangkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh KAP Krisnawan, Nugroho, dan Fahmy, Auditor untuk tahun 2017 maupun tahun 2018 tidak memberikan opini atas laporan konsolidasi Perseroan, dengan pertimbangan seperti yang dijelaskan pada laporan audit terlampir.*

## ANALISIS HASIL OPERASIONAL

Sejak tahun 2017 dan berlanjut di tahun 2018, Perseroan termasuk anak perusahaan melayani pelanggan korporasi terutama dengan layanan solusi komunikasi, contact center, dan data connectivity.



## PENDAPATAN USAHA

Tabel berikut menjabarkan pendapatan usaha selama tahun 2017 dan 2018, di mana setiap item ditampilkan sebagai persentase dari pendapatan usaha.

DESKRIPSI	2018	%	2017	%	PERUBAHAN
Pendapatan Usaha Kotor	8,5	100,0	7,9	100,0	-17,7%
Pendapatan Jasa Telekomunikasi	8,0	-	7,5	-	-100,0%
Pendapatan lain-lain	0,5	-	0,4	-	-100,0%
Beban Jasa Interkoneksi	(4,7)	(56,9)	(4,4)	(55,7)	-184,1%
Pendapatan Usaha Bersih	2,8	43,0	3,5	44,3	-20,0%

Pendapatan kotor BTEL di 2018, yang dihasilkan oleh anak perusahaan dari PT Mitra Kreasi Komunka yaitu PT Layanan Prima Digital (LPD) sebesar Rp 8,5 miliar, mengalami peningkatan sebesar 8,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan peningkatan pendapatan jasa telekomunikasi dari pelanggan korporat dan pasar perkantoran dan hunian yang berlokasi di gedung-gedung tinggi.

Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dengan menambah jumlah pelanggan serta wilayah layanan untuk dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

## BEBAN USAHA

Tabel di bawah ini menunjukkan beban usaha selama tahun 2018 dan 2017, dengan setiap item disajikan dalam persentase dari beban usaha.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	%	2017	%	PERUBAHAN
Total Beban Usaha	40,8	100,0	860,1	100,0	-95,3%
Penyusutan	1,8	4,4	813,9	93,5	-99,8%
Operasi dan Pemeliharaan	1,2	2,9	1,1	0,1	9,1%
Administrasi dan Umum	29,2	71,6	8,6	1,0	239,5%
Karyawan	8,2	20,1	46,5	5,3	-82,4%
Penjualan dan Pemasaran	0,4	1,0	0,3	0,1	33,3%

Beban usaha menurun sebesar 95,3% dibandingkan tahun lalu atau menjadi sebesar Rp 40,8 miliar untuk tahun 2018 dibandingkan dengan Rp 860,1 miliar pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh penurunan beban sebagai berikut:

- Beban penyusutan menurun 99,8% sebagai akibat habisnya nilai buku aset tetap peralatan CDMA pada tahun 2017.
- Beban operasi dan pemeliharaan relatif stabil di sekitar Rp1.2 miliar, terdiri atas beban sewa dan beban listrik.
- Beban administrasi dan umum naik sebesar Rp20,6 miliar atau sekitar 239%, terutama disebabkan oleh peningkatan beban jasa profesional sebesar Rp 16,1 miliar.
- Beban karyawan turun sebesar 82,4%, dari Rp. 36,2 miliar di tahun 2017 menjadi Rp. 8,2 miliar di tahun 2018.
- Beban penjualan dan pemasaran tahun 2018 sebesar Rp389 juta (naik 33% dari tahun 2017), merupakan biaya sewa tempat.

## BEBAN PENYUSUTAN

Beban penyusutan terdiri dari beban penyusutan atas peralatan jaringan dan aset tetap lainnya, termasuk beban instalasi dan beban konstruksi, serta hak sewa guna usaha dengan dasar sewa pembiayaan selama masa manfaat.

## BEBAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Beban operasi dan pemeliharaan ini mencakup biaya lisensi dan konsesi, biaya listrik, pembayaran sewa dan beban operasional lainnya. Tabel di bawah ini menyajikan beban operasional dan beban pemeliharaan periode 2018 dan 2017, dengan setiap item yang disajikan dalam persentase dari pendapatan usaha kotor.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	%	2017	%	PERUBAHAN
Total Beban Operasi dan Pemeliharaan	1,2	14,4	1,1	14,3	9,6%
Sewa	0,7	8,6	0,9	11,9	-21,9%
Listrik	0,4	5,3	0,1	1,9	203,3%
Royalti Konsesi kepada Depkominfo	0,1	0,5	0,1	0,4	26,5%

## BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi di dalamnya termasuk beban profesional, sewa, transportasi dan beban administrasi dan umum lainnya. Tabel berikut menunjukkan beban umum dan administrasi selama periode 2018 dan 2017, dengan setiap item yang disajikan dalam persentase dari pendapatan usaha kotor.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	%	2017	%	PERUBAHAN
Total Beban Umum dan Administrasi	29,2	342,7	8,6	109,1	240,2%
Jasa Profesional	18,6	218,5	2,5	32,2	634,6%
Perijinan, lisensi dan bea masuk	4,3	50,0	0,0	0,4	n.a
Sewa	2,9	33,9	4,7	59,5	-38,3%
Rugi Penurunan Nilai Piutang	1,4	16,3	0,0	0,0	n.a
Lain - lain (masing-masing di bawah Rp 500 juta)	2,0	24,0	1,3	17,0	52,6%

## BEBAN KARYAWAN

Beban Karyawan terdiri dari biaya gaji dan upah, transportasi dan biaya karyawan lainnya yang berkaitan dengan manfaat dan pelatihan. Tabel berikut menunjukkan biaya karyawan selama periode 2018 dan 2017, dengan setiap item yang disajikan dalam persentase dari pendapatan usaha kotor.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	%	2017	%	PERUBAHAN
Total Beban Karyawan	8,2	96,1	36,2	460,3	-77,4%
Gaji dan Upah	7,6	89,4	34,1	433,6	-77,7%
Transportasi	0,4	4,5	1,6	20,7	-76,4%
Tunjangan	0,2	2,3	0,5	6,1	-60,1%

## LABA DAN MARGIN USAHA

EBITDA negatif berjumlah Rp. 35,2 miliar untuk tahun 2018. Manajemen berupaya untuk terus mencari sumber-sumber pendapatan baru, dan juga melanjutkan upaya pengendalian biaya, untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Perseroan mengharapkan untuk memperoleh pendapatan dari pelanggan dari pangsa pasar perkantoran dan hunian yang berlokasi di gedung-gedung tinggi. Di tahun 2019, Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan dari layanan pelanggan korporat ini.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	%	2017
EBITDA	(35,2)	(42,7)	-17,5%
Margin EBITDA	-434,6%	542,4%	-
Laba (Rugi) Usaha	(37,1)	(856,6)	95,6%

## PENDAPATAN (BEBAN) NETTO LAIN-LAIN

Pada tahun 2018, Perseroan mengalami kerugian yang cukup besar dari pergerakan yang merugikan pada nilai tukar dari Rp 13.548/USD per 31 Desember 2017 naik menjadi Rp 14.481/USD per 31 Desember 2018 atau naik sekitar 6,9%.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	%	2017	%	PERUBAHAN
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(690,9)	8.103,8	(748,6)	10.508,2	-16,5%
Beban Keuangan	(605,7)	7.104,7	(716,8)	9.107,3	-15,5%
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(84,0)	985,3	(71,0)	902,4	18,3%
Lain-lain Bersih	(1,2)	13,8	39,2	498,6	-97,0%

## LABA (RUGI) BERSIH

Pada tahun 2018, Perseroan membukukan kerugian bersih sebesar Rp 720,6 miliar.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	%	2017
Laba (Rugi) Bersih	(720,6)	(1.496,5)	-51,8%
Manfaat (Beban) Pajak	7,4	108,8	93,2%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(728,0)	(1.605,2)	-54,7%

## LIKUIDITAS DAN EKUITAS

Pada tahun 2018 sumber dana likuiditas Perseroan diperoleh hanya terbatas dari aktivitas operasional Perseroan. Sebagai konsekuensinya, belanja modal Perseroan terbatas hanya untuk mendukung pemeliharaan jaringan yang sudah ada. Perseroan berada dalam posisi defisiensi modal sebesar Rp 15,4 triliun pada tanggal 31 Desember 2018. Kondisi ini terutama disebabkan oleh beban keuangan, kerugian dari selisih kurs, dan kerugian operasional dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2018 jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan melebihi Total Aset Lancar, hal ini disebabkan Utang Obligasi Entitas Anak telah direklasifikasi menjadi Liabilitas Jangka Pendek. Sehubungan dengan hal ini, manajemen Perseroan telah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mematuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh para Kreditur dan dihomologasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Melanjutkan perjanjian kemitraan dengan vendor dan operator telekomunikasi lainnya untuk mengoptimalkan operasional.
- Mengelola organisasi perusahaan dan menerapkan kebijakan pengurangan biaya sampai pada level yang paling optimum.
- Restrukturisasi Wesel Senior



## ARUS KAS

Tabel berikut menunjukkan ringkasan laporan arus kas perusahaan untuk periode 2018 dan 2017.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	2017	PERUBAHAN
Arus Kas dari Aktivasi Operasi	0,03	(1,79)	-101,7%
Arus Kas dari Aktivasi Investasi	(0,07)	(0,07)	-
Arus Kas Bersih	(0,04)	(1,86)	-97,8%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(0,04)	(1,86)	-
Kas dan Setara Kas, Awal Tahun	0,35	2,21	-84,2%
Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun	0,31	0,35	-11,4%

### ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Selama tahun 2018, kas bersih dikeluarkan untuk aktivitas operasi adalah Rp 30 juta, yang terdiri atas penerimaan dari pelanggan sebesar Rp8,4 miliar, diikuti dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 42,7 miliar, pembayaran untuk karyawan Rp 21,8 miliar, pembayaran beban lain-lain sebesar Rp184 juta dan penerimaan lainnya sebesar Rp56,3 miliar.

### ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Selama tahun 2018, kas bersih yang dikeluarkan untuk aktivitas investasi adalah Rp 73 juta untuk pembelian aset tetap.

### ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Selama tahun 2018, tidak ada kas bersih yang diterima atau dikeluarkan dari aktivitas pendanaan.

## POSISI KEUANGAN

### ASET LANCAR

Tabel berikut menunjukkan ringkasan aset lancar pada akhir tahun 2018 dan 2017. Aset lancar menurun sebesar 47,2% dari Rp 4,9 miliar menjadi Rp 2,6 miliar pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh penurunan piutang usaha dan uang muka.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	2017	PERUBAHAN
Total Aset Lancar	2,9	5,3	-44,8%
Kas dan Setara Kas	0,3	0,4	-11,4%
Aset Lancar Lainnya	2,6	4,9	-47,2%

### ASET TIDAK LANCAR

Tabel berikut menunjukkan ringkasan aset tidak lancar pada akhir tahun 2018 dan 2017. Aset tidak lancar senilai Rp709,9 miliar sebagian besar terdiri atas jaminan pelunasan kewajiban pembayaran biaya frekuensi.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	2017	PERUBAHAN
Aset Tidak Lancar	710,6	712,8	-0,3%
Aset Tetap - Netto	0,7	2,5	70,7%
Jaminan	709,9	710,3	-0,1%



**TELEPON  
LANGSUNG  
KRING**

## LIABILITAS

Jumlah Liabilitas mencapai Rp 16,1 triliun pada 31 Desember 2018. Liabilitas Jangka Pendek meningkat 13,0% menjadi Rp 10,1 triliun pada tahun 2018. Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp423,7 miliar merupakan saldo di luar utang usaha yang diselesaikan melalui PKPU.

Pada tahun 2018, utang sebesar Rp 6,0 triliun dicatat sebagai Liabilitas Jangka Panjang dalam akun utang yang diselesaikan melalui PKPU yang terdiri atas:

- Utang Usaha sebesar Rp 1,3 triliun.
- Utang penyedia menara sebesar Rp 3,0 triliun.
- Utang atas biaya hak penggunaan frekuensi dan Universal Service Obligation (USO) & Jastel sebesar Rp 866,1 miliar.
- Utang dengan jaminan yang difasilitasi oleh Madison Pacific Trust Limited, sebesar Rp 746,0 miliar.
- Utang terminasi lindung nilai sebesar Rp 200,0 miliar akibat derivatif yang digunakan untuk lindung nilai fluktuasi nilai tukar.
- Utang dari afiliasi Perseroan sejumlah Rp 74,4 miliar.

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	2017	PERUBAHAN
Jumlah Liabilitas Lancar	10.096,6	8.933,6	13,0%
Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	5.502,8	5.148,2	6,9%
Kewajiban Lancar Lainnya	4.593,7	3.785,4	21,4%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.036,3	5.939,8	1,6%
Pajak Tangguhan	-	7,5	n.a
Liabilitas Imbalan Kerja	0,2	1,1	-81,0%
Utang yang Diselesaikan Melalui PKPU	6.036,1	5.931,2	1,8%

## OBLIGASI GLOBAL / WESEL SENIOR

Untuk keterangan lebih lengkap mengenai Wesel Senior dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit halaman 45 catatan 14.

## PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Pada tanggal 8 Desember 2014 rapat kreditur yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perseroan sebagai akibat dari tidak dibayarkannya utang jatuh tempo. Pada tanggal 9 Desember 2014 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (homologasi) atas Perjanjian Perdamaian tersebut (lihat catatan 35 atas Laporan Keuangan konsolidasian).

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	2017	PERUBAHAN
Wesel Senior	5.502,8	5.148,2	6,9%
Utang yang Diselesaikan Melalui PKPU	6.036,1	5.931,3	1,8%
<b>Total</b>	<b>11.538,9</b>	<b>11.079,5</b>	<b>4,1%</b>



## RASIO HUTANG

DESKRIPSI	2018	2017
Rasio Hutang terhadap Asset	22,6	20,7
Rasio Hutang terhadap Ekuitas	-1,0	-1,0

## TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

DESKRIPSI	2018	2017
Jumlah Hari Piutang	40,8	104,5

## STRUKTUR PERMODALAN

Struktur Permodalan Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam miliar rupiah)

DESKRIPSI	2018	2017
Jumlah Modal yang Diinvestasikan	0,0	0,0
Hutang	11.538,9	11.079,5
Jangka Pendek	5.502,8	5.148,2
Jangka Panjang	6.036,1	5.931,3
Modal	(15.419,2)	(14.155,4)

Perseroan berada pada posisi defisiensi modal sebesar Rp 15,4 triliun per 31 Desember 2018. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kerugian operasional tahun-tahun sebelumnya, rugi selisih kurs, dan biaya keuangan yang signifikan.

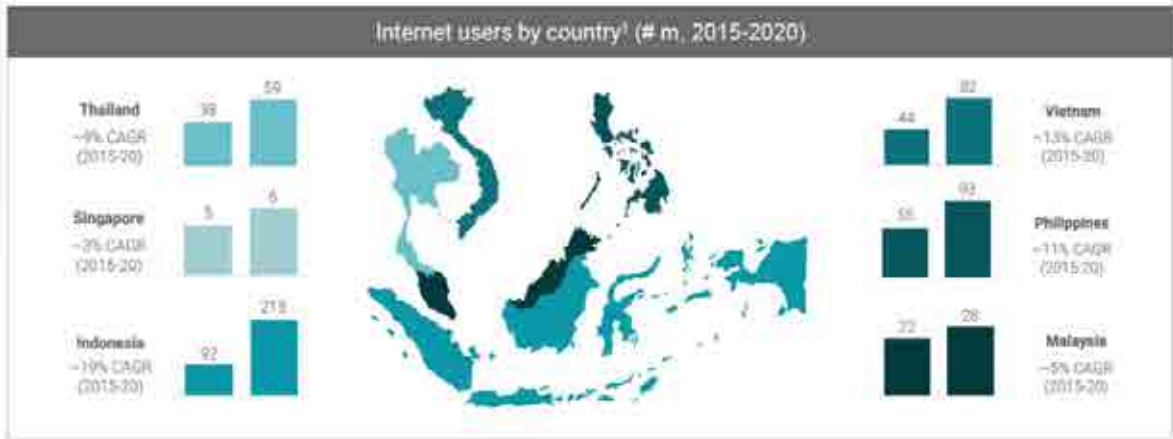
## INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2018, Perseroan tidak melakukan perikatan material untuk investasi barang modal dan belum merealisasikan investasi barang modal baru. Hal ini karena bisnis yang dilakukan Perseroan belum sampai pada tahap untuk pengadaan barang modal.

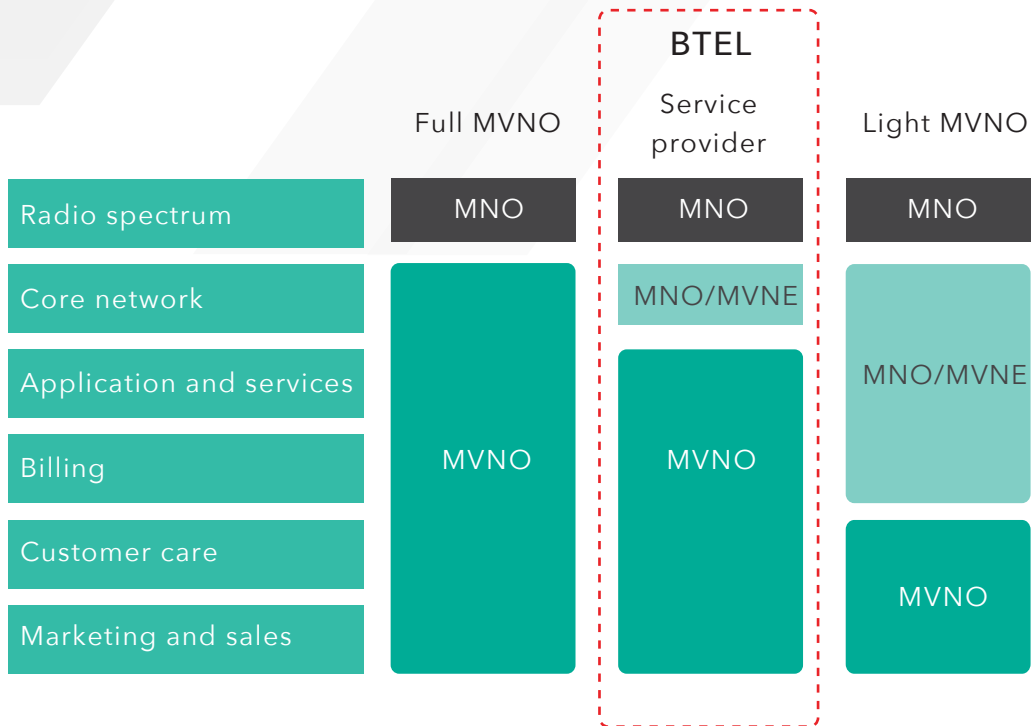
## PROSPEK USAHA

Berdasarkan riset dari Worldbank, Google, dan Temasek, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, dengan perkiraan 215 juta pengguna pada tahun 2020. Sedangkan seiring pertumbuhan Smartphone dan koneksi internet, aplikasi data juga akan mengalami perkembangan, untuk komunikasi dan juga untuk layanan konten. Berdasarkan Survei GlobalWebIndex dalam laporan wearesocial, 27% pengguna smartphone menggunakan mobile messenger, 22% menonton video dan 19% bermain games di perangkat mobile. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar di bisnis komunikasi, informasi, dan hiburan digital.





Strategi Perseroan untuk melayani pelanggan bisnis komunikasi, informasi, dan hiburan digital tersebut adalah dengan tidak membangun atau memiliki jaringan telekomunikasi sendiri melainkan melakukan kerjasama dengan operator pemilik jaringan berdasarkan konsep MVNO, sehingga Perseroan tidak perlu mengeluarkan belanja modal yang besar. Berdasarkan hasil penelitian Pyramid Research, secara umum ada 3 model operasi utama MVNO yaitu full MVNO, service provider, dan light MVNO. Model operasi MVNO yang sesuai untuk Perseroan yaitu Perseroan sebagai service provider, dimana spektrum frekuensi dan core network disediakan oleh MNO sedangkan Perseroan menjalankan *fungsi customer care, sales, and marketing*.





## STRATEGI PEMASARAN

Dalam melakukan pemasaran atas produknya, strategi Perseroan adalah dengan menargetkan pangsa pasar perkantoran dan hunian yang berlokasi di gedung-gedung tinggi. Perseroan juga memfokuskan pada pelanggan yang produktif yang menghasilkan pendapatan per pelanggan yang tinggi. Dalam melakukan pemasaran atas produknya, strategi Perseroan adalah dengan menargetkan pangsa pasar perkantoran dan hunian yang berlokasi di gedung-gedung tinggi. Perseroan juga memfokuskan pada pelanggan yang produktif yang menghasilkan pendapatan per pelanggan yang tinggi.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Selama 2 tahun buku terakhir, Perseroan tidak membagikan dividen oleh karena Perseroan mencatatkan rugi bersih pada periode 2 tahun buku terakhir tersebut.

## REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan melakukan Penawaran Umum terakhir kali adalah pada tahun 2008 untuk Penawaran Umum Terbatas I tahun 2008, dimana tujuan penggunaan telah selesai dilaporkan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian sejak akhir pelaporan tersebut hingga akhir tahun buku 2018 tidak ada lagi pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum ataupun perubahannya.



## INFORMASI MATERIAL

### INVESTASI PADA ANAK PERUSAHAAN

Pada tanggal 16 Juni 2016, berdasarkan Akta Notaris No. 09 dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, SH., M.Kn., Perseroan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Anugerah Andalan Investama (AAI). Ruang lingkup kegiatan AAI adalah meliputi perdagangan produk dan jasa berbasis internet, internet provider, jasa penyediaan sumber daya manusia, jasa televisi berbayar, jasa multimedia, dan jasa media cetak dan elektronik. Kepemilikan saham Perseroan pada AAI yaitu 99,8%, dengan nilai aset AAI pada tahun 2016 yaitu Rp717 juta.

Pada tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris No 22 yang kemudian ditegaskan kembali dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 24 Januari 2017 yang keduanya dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, AAI telah mengambilalih saham-saham pada PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK).

Ruang lingkup kegiatan MKK adalah meliputi perdagangan barang dan jasa antara lain perdagangan alat-alat telekomunikasi, elektronik, jasa pembangunan instalasi telekomunikasi, industri barang-barang elektronik, jasa penerbitan dan desain grafis, jasa teknologi informasi dan internet konten serta jasa multimedia. Kepemilikan saham AAI pada MKK yaitu 70,0%, dengan nilai aset MKK pada tahun 2016 yaitu Rp869 juta.



# TATA KELOLA PERUSAHAAN

# 05

## DIREKSI

Perseroan dipimpin dan dikelola oleh Direksi sebagai manajemen utama Perseroan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan anggota Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai tujuannya.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut:
  - Meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu
  - Memperoleh dengan membeli atau dengan cara lain (kecuali hibah), barang tidak bergerak dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu
  - Menjual atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak (kecuali dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari) dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu
  - Mendirikan suatu usaha baru dan/ atau turut serta dalam perusahaan lain tanpa mengurangi setiap persetujuan yang mungkin diperlukan dari instansi yang berwenang, satu dan lain tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan bursa efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
  - Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist)
  - Menetapkan dan/atau mengadakan perubahan struktur manajemen Perseroan

- d. Direktur Utama dan satu anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

Penetapan remunerasi bagi Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris yang memperoleh pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan memperhatikan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Direksi telah memiliki dan menyatakan komitmennya terhadap Piagam Direksi (Board of Directors Charter) sebagai pedoman etik dan perilaku sebagai anggota direksi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengurusan Perusahaan.

Keanggotaan dan periode jabatan Direksi BTEL pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN TERAKHIR	PERIODE JABATAN
R. BISMARCA KURNIAWAN	Direktur Utama	RUPS 26 Juni 2018	2018 - 2021
JASTIRO ABI	Wakil Direktur Utama	RUPS 26 Juni 2018	2018 - 2021
TAUFAN EN ROTORASIKO	Wakil Direktur Utama	RUPS 26 Juni 2018	2018 - 2021
W. MARK ROBSON	Direktur	RUPS 26 Juni 2018	2018 - 2021
ANDI PRAVIDIA SALIMAN	Direktur	RUPS 26 Juni 2018	2018 - 2021
HARYA MITRA HIDAYAT	Direktur	RUPS 26 Juni 2018	2018 - 2021

Jika tidak ditetapkan lebih lanjut, maka bidang tugas dan tanggung jawab anggota direksi adalah sebagai berikut

NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
R. BISMARCA KURNIAWAN	Direktur Utama	Koordinasi seluruh bidang kerja Direksi
JASTIRO ABI	Wakil Direktur Utama	Strategy & Business Development
TAUFAN EN ROTORASIKO	Wakil Direktur Utama	Operasional & Komersial
W. MARK ROBSON	Direktur	Produk & Teknologi
ANDI PRAVIDIA SALIMAN	Direktur	Kuangan
HARYA MITRA HIDAYAT	Direktur	Risk, Compliance & Human Capital

Sepanjang tahun 2018 Direksi mengadakan rapat Direksi formal sebanyak 16 kali dengan perincian sebagai berikut:

TANGGAL	FOKUS AGENDA	KEHADIRAN (%)
9 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan awal kinerja operasional dan keuangan di tahun 2017</li> <li>• Pembahasan rencana kerja untuk tahun 2018.</li> </ul>	66,6
30 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.</li> </ul>	83,3
13 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan update audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017</li> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Januari 2018</li> </ul>	100
22 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan kinerja operasional dan keuangan bulan Februari 2018</li> <li>• Pembahasan Update audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017</li> <li>• Pembahasan penyusunan Laporan Tahunan 2017</li> </ul>	100
10 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Maret 2018</li> <li>• Rencana dan strategi bisnis</li> <li>• Update audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dan Laporan Tahunan 2017</li> </ul>	83,3
8 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan April 2018</li> <li>• Persiapan RUPS Tahunan</li> <li>• Update Laporan Tahunan 2017</li> </ul>	100
5 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Mei 2018</li> <li>• Persiapan RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan 2017</li> <li>• Pembahasan kegiatan usaha terkait libur hari raya Idul Fitri</li> </ul>	100
21 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan RUPS Tahunan</li> <li>• Pembahasan sumber daya manusia Perseroan</li> </ul>	100
4 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Public Expose Insidentil</li> </ul>	100
17 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan semester I tahun 2018</li> <li>• Rencana dan strategi bisnis semester II tahun 2018</li> </ul>	100
14 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Juli 2018</li> </ul>	66,6
28 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Public Expose Tahunan</li> </ul>	100
13 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan Agustus 2018</li> </ul>	83,3
18 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan laporan keuangan bulan September 2018</li> </ul>	100
15 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan laporan keuangan bulan Oktober 2018</li> <li>• Pembahasan update kewajiban dalam perjanjian perdamaian PKPU</li> </ul>	100
20 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan bulan November 2018</li> <li>• Pembahasan strategi bisnis dan rencana kerja tahun 2019</li> <li>• Rekomendasi penunjukan auditor untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.</li> </ul>	100

Selama 2018 Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat bersama sebanyak lima kali dengan perincian sebagai berikut:

TANGGAL	FOKUS AGENDA	KEHADIRAN (%)
30 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update umum kinerja operasional dan keuangan tahun 2017</li> <li>• Pembahasan rencana kerja tahun 2018</li> </ul>	77,7
10 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan 2017.</li> </ul>	77,7
21 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan kinerja operasional dan keuangan sampai bulan Mei 2018</li> <li>• Persiapan RUPS Tahunan</li> <li>• Pembahasan laporan keuangan dan Laporan Tahunan 2017.</li> </ul>	88,8
28 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan semester I tahun 2018</li> <li>• Update persiapan public expose insidentil</li> </ul>	88,8
20 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update kinerja operasional dan keuangan secara umum tahun 2018</li> <li>• Rencana kerja operasi tahun 2019.</li> </ul>	88,8

Komite-komite Perusahaan secara aktif memantau situasi Perusahaan dan memberikan masukan, saran, serta rekomendasi kepada direksi apabila diperlukan. Selain itu, forum diskusi dan konsultasi yang diadakan antara komite-komite dengan direksi juga merupakan sarana yang efektif bagi direksi untuk mendapatkan masukan, saran, serta rekomendasi dari komite-komite tersebut.

## DEWAN KOMISARIS

*Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris diatur dan ditetapkan dalam Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.*

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi menangani laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Perseroan, dan hal-hal penting lainnya
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran dengan segera memberikan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS

Keanggotaan dan periode jabatan dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Keanggotaan Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 orang anggota terdiri dari 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang atau lebih Komisaris
- Periode jabatan dari Dewan Komisaris adalah terhitung sejak tanggal RUPS pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah pengangkatan

Dewan Komisaris telah memiliki dan menyatakan komitmennya terhadap Piagam Dewan Komisaris (Board of Commissioners Charter) sebagai pedoman etik dan perilaku sebagai anggota dewan komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi Perusahaan.

Keanggotaan dan periode jabatan Dewan Komisaris BTEL pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN TERAKHIR	PERIODE JABATAN
ANINDYA N. BAKRIE	Komisaris Utama	RUPS Tahunan 26 Juni 2018	2018 - 2021
BOBBY GAFUR S UMAR	Wakil Komisaris Utama	RUPS Tahunan 26 Juni 2018	2018 - 2021
AI MULYADI MAMOER	Wakil Komisaris Utama	RUPS Tahunan 26 Juni 2018	2018 - 2021

Selama tahun 2018 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak lima kali dengan rincian sebagai berikut:

- 30 Januari 2018
  - Fokus Agenda:
    - Pembahasan evaluasi untuk Direksi atas kinerja operasional dan keuangan tahun 2017
    - Pembahasan masukan untuk rencana kerja tahun 2018
  - Kehadiran: 66,6%
- 10 April 2018
  - Fokus Agenda:
    - Pembahasan kinerja operasional dan keuangan kuartal 1 2018
  - Kehadiran: 66,6%
- 21 Juni 2018
  - Fokus Agenda:
    - Pembahasan laporan keuangan dan Laporan Tahunan 2017
    - Pembahasan masukan untuk RUPS Tahunan
  - Kehadiran: 66,6%
- 28 Agustus 2018
  - Fokus Agenda:
    - Pembahasan kinerja operasional dan keuangan semester I tahun 2018
    - Pembahasan Masukan untuk public expose tahunan
  - Kehadiran: 66,6%
- 20 Desember 2018
  - Fokus Agenda:
    - Pembahasan kinerja operasional dan keuangan secara umum tahun 2018
    - Pembahasan masukan untuk Rencana kerja operasi tahun 2019.
  - Kehadiran: 66,6%



## KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak mengeluarkan atau memberikan gaji atau remunerasi lainnya kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali Komisaris Independen yang mendapatkan remunerasi dari Perseroan sebesar Rp. 180 juta sepanjang tahun 2018.

## KOMITE KOMITE

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi atau memiliki fungsi tugas Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan komite-komite lainnya merupakan suatu wewenang yang dimiliki oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai ketentuan pasal 121 UU PT dan hal ini merupakan itikad baik dari perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG.



## 1. KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan pertama kali dibentuk dan pengangkatan anggota Komite Audit didasarkan pada peraturan Bapepam Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana diubah melalui Peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Dalam menjalankan kegiatannya, Komite Audit memiliki kerangka tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada periode tahun 2018 Komite Audit beranggotakan dua orang yang terdiri dari satu orang Ketua merangkap Komisaris Independen dan dua orang anggota. Seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi keahlian dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku.

Susunan Komite Audit pada saat ini adalah sebagai berikut:

• **AI MULYADI MAMOER**

*(CV dapat dilihat di profil Dewan Komisaris)*

• **ARYDHIAN B. DJAMIN**

*Selain sebagai anggota Komite Audit di Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT Intermedia Capital Tbk, PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, dan PT Dwi Guna Laksana Tbk. Beliau juga sebagai pengajar di Perbanas Institute sejak tahun 2008 sampai sekarang dan sebelumnya mengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Bina Nusantara. Pengalaman sebagai auditor yaitu di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto dengan posisi terakhir sebagai Junior Partner.*

*Latar belakang pendidikan yaitu memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, dan Magister Sains Akuntansi dari Universitas Indonesia.*

• **DWI WINARNO**

*Beliau sebelumnya bertugas di Perseroan dengan posisi terakhir sebagai VP Business Control hingga tahun 2017.*

Sebagai perusahaan publik yang wajib memiliki Komite Audit, BTEL telah menyusun dan memiliki Piagam Komite Audit yang menjadi salah satu pedoman bagi Komite Audit dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sejak Komite Audit terbentuk dan terdorong kemauan untuk menjalankan Perusahaan dengan lebih baik dan lebih beretika, Perseroan secara konsisten menerapkan dan menjaga prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Pakta Integritas Komite Audit. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Pakta Integritas ini didukung dengan 7 karakteristik integritas BTEL yang menjadi landasan penerapan Good Corporate Governance yaitu sebagai berikut:

**Jujur**, yang bermakna bahwa terdapat keselarasan antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan; menghindari benturan kepentingan; menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas; dan mengakui kesalahan serta menyampaikan sesuatu sesuai fakta.

**Tanggung Jawab**, yang bermakna bahwa terdapat kemampuan untuk menerima amanat dan menjalankan tugas serta kewajiban yang diberikan; dan menuntaskan pekerjaan yang diberikan

**Visioner**, yang bermakna bahwa terdapat keyakinan dalam mewujudkan rencana dan cita-cita; dan ingin melakukan penyempurnaan dan menjadi yang terbaik.

**Disiplin**, yang bermakna bahwa konsistensi terhadap rencana yang telah dibuat dan menjalankan sesuai ketentuan; dan tidak berhenti berupaya

hingga mencapai hasil yang diinginkan.

**Kerja sama**, yang bermakna bahwa terdapat optimalisasi potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, dan saling mendukung untuk menyelesaikan tugas bersama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang disepakati bersama;

**Adil**, yang bermakna bahwa terdapat pengambilan sikap dan keputusan secara proporsional, dan mengapresiasi serta menghukum sesuai dengan ketentuan.

**Peduli**, yang bermakna bahwa terdapat pemahaman atas kondisi pihak lain dan ikut merasakan kesulitan yang dihadapi; dan berinisiatif membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan.

Komite Audit juga senantiasa mendorong Perseroan berikut insan-insan di dalamnya untuk mengedepankan etika dan integritas dalam melakukan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Terkait pemenuhan komitmen integritas insan BTEL, sejak beberapa tahun yang lalu secara rutin atas peran Komite Audit, BTEL memberikan penghargaan "Integrity Award BTEL" kepada beberapa karyawan yang memenuhi kriteria atau aspek Good Corporate Governance, Pakta Integritas, SOP, dan Peraturan Perusahaan dengan baik selama tahun tersebut. Tradisi pemberian "Integrity Award BTEL" tersebut merupakan prakarsa dan dorongan dari Komite Audit kepada Perusahaan dan diharapkan dapat dilangsungkan secara terus menerus setiap tahunnya.

## 2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

### a. Dasar Hukum pengangkatan Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Bapepam/OJK No. IX.B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik

### b. Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko (Risk Management Policy) dan memberikan penilaian atas limit risiko (risk appetite and risk tolerance) yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan prasarana, sarana, sumber daya, dan kompetensi untuk penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Manajemen (ERM))
3. Memastikan pelaksanaan program Manajemen Risiko Perusahaan (risks identification, risks assessment and risks treatment, risks monitoring) berlangsung sesuai dengan standar Manajemen Risiko yang diakui secara internasional.
4. Meminta dan mengumpulkan laporan secara berkala dari manajemen mengenai risiko-risiko usaha yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - Risiko Teknologi
  - Risiko Regulasi
  - Risiko Operasional
  - Risiko Strategis
  - Risiko Persaingan Usaha
  - Risiko Keuangan
  - Risiko Kemitraan
  - Risiko Sosial
5. Melakukan diskusi, evaluasi, verifikasi, dan rekomendasi atas laporan-laporan Manajemen Risiko tersebut pada butir (4) dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
6. Bila diperlukan Komite Manajemen Risiko dapat berkomunikasi dengan Komite Audit terkait dengan hasil audit yang menyangkut aspek pengkajian risiko dan kepatuhan
7. Bila diperlukan Komite Manajemen Risiko atas persetujuan Dewan Komisaris dapat mengundang pihak luar yang independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan (ERM)
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**c. Wewenang Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:**

1. Memperoleh data/informasi dari Internal Auditor mengenai hasil audit internal yang terkait dengan risiko usaha
2. Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan pantauan risiko dan kepatuhan yang dilakukan Auditor Eksternal
3. Memantau secara langsung efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko perusahaan dan berkomunikasi dengan penanggung jawab pelaksana Manajemen Risiko perusahaan
4. Atas persetujuan Dewan Komisaris, dapat memperoleh fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya, yaitu:
  - Mendapatkan asistensi, nasehat, masukan dari tenaga ahli risiko
  - Mendapatkan informasi yang diperlukan dari seluruh karyawan mengenai risiko
  - Menemui semua pejabat perusahaan, Eksternal Auditor, dan Konsultan perusahaan bila diperlukan
5. Atas persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi, melaksanakan pemeriksaan khusus bila ditemukan adanya indikasi penanganan risiko usaha yang tidak benar yang dapat menimbulkan dampak besar bagi perusahaan

**d. Komite Manajemen Risiko terdiri dari dua orang yaitu satu ketua dan satu anggota.**

Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria independensi keahlian dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku. Susunan Komite Manajemen Risiko pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
ANINDYA N. BAKRIE	Ketua
BOBBY GAFUR S. UMAR	Anggota



### e. Laporan Kegiatan Tahun 2018

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sepanjang tahun 2017 sebanyak dua kali, selama tahun tersebut Komite Manajemen Risiko kembali mengingatkan Direksi BTEL untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- i. Agar direksi selalu meninjau kembali risiko-risiko yang telah diungkapkan sebelumnya dan masih relevan dengan kondisi saat ini dan menyempurnakan serta memonitor langkah mitigasinya. Sehubungan dengan fokus Perusahaan untuk melakukan proses transformasi menjadi penyedia layanan informasi, komunikasi, dan hiburan berbasis digital, risiko yang menjadi perhatian utama dalam langkah mitigasinya antara lain risiko perkembangan teknologi, risiko kemitraan, risiko perubahan perilaku konsumen, dan risiko perubahan regulasi.
- ii. Agar direksi kembali memastikan upaya-upaya untuk penyelesaian utang sesuai Perjanjian Perdamaian PKPU BTEL dan memperhatikan resiko hukum yang ada.

## 3. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

### a. Dasar Hukum

Dasar hukum/legal pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Bapepam No. IX.B.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik
3. Peraturan OJK No, 34/PJOK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik

### b. Tugas dan tanggung jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi :
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
    - iii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
    - iv. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
    - v. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Memberikan usulan mengenai calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi :

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - i. Struktur Remunerasi;
  - ii. Kebijakan atas Remunerasi;
  - iii. Besaran atas Remunerasi.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

**c. Susunan Keanggotaan dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.**

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2018 sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
ANINDYA N. BAKRIE	Ketua
BUDI BENZANI (Chief Human Resources Officer)	Anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan OJK Nomor 34/PJOK.04/2014 tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

**d. Laporan Kegiatan Tahun 2018.**

Sepanjang tahun 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi BTEL melaksanakan kegiatan pertemuan sebanyak 1 (satu) kali yang dirangkaikan dengan kegiatan evaluasi kinerja serta melakukan pengkajian terhadap kemungkinan penyesuaian organisasi perusahaan.

## AUDITOR INDEPENDEN

BTEL menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Nugroho & Fahmy sebagai Auditor Independen yang mengaudit laporan keuangan konsolidasian BTEL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Sebelumnya untuk audit untuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dilakukan oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.

Kantor akuntan yang ditunjuk tidak menerima penugasan lain yang menyebabkan benturan kepentingan. Kantor akuntan ini juga tidak ada kaitan apapun ataupun hubungan istimewa dengan Perseroan. Biaya audit total untuk laporan keuangan tahunan 2018 BTEL adalah sebesar Rp 278juta di luar PPN.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan fungsi yang telah dimiliki Perusahaan sejak Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa di tahun 2006. Sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, tugas dan wewenang sekretaris perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mengikuti Perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
  - b) Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi dan/atau dewan komisaris;
  - d) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi dan/atau dewan komisaris.
- Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sekretaris perusahaan diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya untuk menjalankan tugasnya.

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas untuk menjembatani komunikasi dan informasi antara Perusahaan dan pemangku kepentingan di bidang pasar modal, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, pemegang saham, dan masyarakat. Selain itu Sekretaris Perusahaan melakukan korespondensi dengan institusi pasar modal baik yang merupakan mandatory seperti laporan berkala dan penyampaian informasi penting, maupun yang bersifat administratif atau rutin. Sekretaris Perusahaan juga memastikan agar segala kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham, public expose, dan kegiatan wajib lainnya dapat diselenggarakan sebaik-baiknya dan mematuhi peraturan yang berlaku.

### **PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Fungsi sekretaris Perusahaan saat ini dijabat sejak tahun 2015 oleh Agustinus Harimurti, Warga Negara Indonesia, 43 tahun dan berdomisili di Indonesia. Sebelum diangkat menjadi sekretaris Perusahaan beliau menjabat sebagai Executive Vice President di BTEL. Agustinus Harimurti memperoleh gelar sarjana di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999. Memulai karier sebagai advokat/pengacara di Kantor Hukum Yan Apul & Rekan dan kemudian bergabung dengan PT Bakrie Swasakti Utama sebagai Manager Legal pada tahun 2001 selain juga menempati posisi managerial di PT Austral Byna, dan selanjutnya bergabung dengan PT Bakrie Telecom Tbk pada tahun 2004.

RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



TATA KELOLA  
PERUSAHAAN  
YANG BAIK



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan sebagai perusahaan publik berkewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik Tahunan satu tahun sekali maupun Luar Biasa apabila diperlukan. Penyelenggaraan RUPS merupakan bentuk pelaporan atau permintaan persetujuan kepada pemegang saham sebagai pemilik Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Pada setiap pelaksanaan RUPS, BTEL selalu memperhatikan prinsip kepatuhan yang terdapat pada peraturan yang berlaku, di antaranya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/POJK.04/2017 tahun 2017, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E, Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan paparan publik dan keterbukaan informasi kepada publik baik informasi atau laporan yang bersifat rutin atau berkala maupun yang insidental.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama kurun waktu tahun 2018, BTEL telah menyelenggarakan RUPS sebagai berikut:

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pada tanggal 26 Juni 2018, Perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

### HASIL RUPST

#### KEPUTUSAN AGENDA RAPAT

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun 2017 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Menyetujui pemberian kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk”;



## 3. Menyetujui:

- a. Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah habis masa jabatannya untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya yaitu sampai dengan tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie

Wakil Komisaris Utama : Bobby Gafur Umar

Komisaris Independen : Ai Mulyadi Mamoer

**Direksi**

Direktur Utama : Robertus Bismarka Kurniawan

Wakil Direktur Utama : Jastiro Abi

Wakil Direktur Utama : Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

Direktur Independen : Mark W Robson

Direktur : Harya Mitra Hidayat

Direktur : Andi Pravidia Saliman

- b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.
- c. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi dalam masa jabatannya.

**PAPARAN PUBLIK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, BTEL telah melaksanakan paparan publik (public expose) baik insidentil maupun tahunan yang diikuti oleh beberapa kalangan diantaranya, analis, investor, pemegang saham, media massa dan lainnya.

Tanggal	Public Expose	Agenda
6 Juli 2018	Public Expose Insidentil	Penjelasan Perseroan atas opini disclaimer yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
29 Agustus 2018	Public Expose Tahunan	Penjelasan kinerja Perseroan untuk tahun buku 2017 dan update operasional Perseroan sampai dengan semester I tahun 2018

## KORESPONDENSI DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Sepanjang tahun 2017, di samping pertemuan bersifat diskusi dan konsultatif dengan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan telah melakukan komunikasi korespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan online OJK sebagai berikut:

TANGGAL	PERIHAL
19 Mei 2018	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
05 Juni 2018	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
05 Juni 2018	Perubahan Akuntan Publik
06 Juni 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
08 Juni 2018	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
28 Juni 2018	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
28 Juni 2018	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS Tahunan
31 Juli 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Interim
31 Juli 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Interim (koreksi)
02 Agustus 2018	Penyampaian Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2018



## KORESPONDENSI DENGAN BURSA EFEK INDONESIA

Sepanjang tahun 2016, di samping pertemuan bersifat diskusi dan konsultatif dengan Bursa Efek Indonesia, selain selain melalui surat fisik Perusahaan telah melakukan komunikasi dan korespondensi dengan Bursa Efek Indonesia melalui sistem pelaporan elektronik IDXNet sebagai berikut:

TANGGAL	PERIHAL
19 Januari 2018	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Laporan Keuangan Kuartal III 2017
23 Januari 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang tidak diaudit
08 Mei 2018	Laporan Kepemilikan Saham
19 Mei 2018	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
22 Mei 2018	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
22 Mei 2018	Laporan Kepemilikan Saham
04 Juni 2018	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
04 Juni 2018	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
08 Juni 2018	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahunan
11 Juni 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
28 Juni 2018	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
28 Juni 2018	Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
29 Juni 2018	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Insidentil
02 Juli 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang tidak diaudit
03 Juli 2018	Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa
11 Juli 2018	Laporan Hasil Public Expose Insidentil
02 Agustus 2018	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
03 Agustus 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang tidak diaudit
13 Agustus 2018	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan
24 Agustus 2018	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan
29 Agustus 2018	Laporan Hasil Public Expose Tahunan
09 September 2018	Penyampaian Laporan Tahunan
06 November 2018	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang tidak diaudit



## INTERNAL CONTROL

### SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal mengacu pada Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Internal Control Framework yang diterapkan secara menyeluruh pada Perseroan. Perseroan memandang pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Penerapan pengendalian internal ini meliputi:

- Lingkungan Pengendalian
- Penilaian Risiko
- Aktivitas Pengendalian
- Informasi Dan Komunikasi
- Pemantauan



Pengendalian yang dilakukan dalam lingkup tersebut dilaksanakan melalui berbagai tindakan dan kegiatan pimpinan dan semua pegawai yang ada dalam organisasi Perseroan, dirancang dengan pencapaian tujuan organisasi Perseroan terkait dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, kehandalan pelaporan keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan pengendalian internal ini terdapat job description dan Standard Operation Procedure (SOP) yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan struktur organisasi. BTEL juga telah menerapkan prosedur risk assessment yang dilakukan melalui sistem wawancara langsung dengan kepala divisi masing-masing unit kerja dan para pelaksana. Penentuan risiko berdasarkan aktivitas kerja di unit tersebut dengan SOP yang telah ada. Agar proses pengendalian internal

berjalan dengan lancar, maka penyebaran komunikasi dan informasi ke seluruh lapisan organisasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Selama tahun 2014 telah dilakukan beberapa aktivitas penilaian efektivitas pengendalian untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik. Aktivitas penilaian efektivitas pengendalian tersebut, dilakukan melalui audit operasional yang dilakukan secara berkala di seluruh unit kerja sesuai dengan rencana audit tahun 2014.

Perseroan memandang bahwa sistem pengendalian internal perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkesinambungan agar dapat berfungsi semestinya, meliputi kesadaran risiko dan pengendaliannya guna mencapai tujuan Perseroan.

## AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal BTEL dilaksanakan oleh Corporate Internal Audit (CIA) yang saat ini diketuai oleh Sasmito Aryo.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Accounting Perseroandan berpengalaman sebagai auditor di KAP Jimmy Budhi & Rekan. Memiliki gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN) Yogyakarta tahun 2005.

CIA berperan sebagai strategic business partner bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran BTEL dengan melakukan evaluasi berdasarkan risk based audit secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan manajemen risiko, kontrol, dan proses tata kelola. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias, dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan stakeholder, pemahaman terhadap pokok permasalahan dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan dapat dilaksanakan.

## PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Internal BTEL yang disetujui oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 3 April 2009 dimaksudkan sebagai pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi Audit Internal yang perlu diselenggarakan oleh BTEL serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal. Piagam Audit Internal ini ditujukan pula agar terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan BTEL.

Ruang lingkup pekerjaan audit oleh CIA mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan organisasi BTEL. Pekerjaan audit tersebut dilakukan melalui pendekatan risk based audit dengan melihat risiko-risiko terkait dengan objek penugasan audit.

CIA bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berdasarkan arahan Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris ruang lingkup pekerjaan audit oleh CIA juga mencakup kegiatan badan-badan usaha afiliasi dan anak perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan BTEL.





Ruang lingkup CIA mencakup audit dan penilaian atas efektivitas risk management, kecukupan dan efektivitas system pengendalian intern, kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan, serta efektivitas governance processes dengan melakukan:

1. **Audit ketaatan (compliance audit)** terhadap kebijakan, rencana dan anggaran, prosedur, peraturan dan kegiatan operasional lainnya.
2. **Audit operasional (operational/management audit)** dalam rangka meningkatkan efisiensi, pengamanan sumber daya dan dana, serta konsistensi dan efektivitas atas manfaat suatu kegiatan operasional atau program yang telah ditetapkan.
3. **Audit Teknologi Sistem Informasi (TSI)** untuk memastikan terjaminnya integritas data (benar, lengkap, aman, tepat waktu), efektivitas dan efisiensi prosedur operasional dan kelangsungan operasional teknologi sistem informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknologi sistem informasi. Termasuk melakukan audit atas setiap implementasi aplikasi TSI untuk memastikan bahwa aplikasi telah sesuai dengan yang ditetapkan, kepatuhan terhadap ketentuan, terdapat control yang memadai dan tersedianya sarana penelusuran kembali (audit trail), serta memberi rekomendasi mengenai kontrol yang perlu diterapkan.
4. **Audit khusus dan investigasi (special and investigation audit)** terhadap hal-hal yang patut diduga atau diperkirakan merupakan suatu tindak perbuatan kecurangan/penyalahgunaan/manipulasi (fraud), penggelapan, penyimpangan terhadap ketentuan/peraturan internal maupun eksternal, dan lain sebagainya
5. berdasarkan instruksi Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

**Pemantauan secara off-site atau monitoring (desk audit)** terhadap segala aktivitas di seluruh unit kerja BTEL melalui analisis terhadap dokumen dan laporan.

Sesuai dengan program kerjanya, CIA melakukan kegiatan audit yaitu kegiatan internal consulting services. Pada pelaksanaannya, jasa konsultasi internal diarahkan pada pengawasan untuk penyelenggaraan operasional perusahaan khususnya berkenaan dengan respon terhadap risiko, pengembangan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko, termasuk proses risk assessment, dalam pemetaan terhadap unit bisnis yang berisiko tinggi sebagai langkah antisipatif agar penyelenggaraan bisnis tetap mengindahkan rambu-rambu yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa hasil audit dan internal consulting memperoleh tanggapan yang memadai dari auditee, maka dilakukan upaya pengawasan tindaklanjut. Tindaklanjut di lapangan dilakukan oleh auditee yang kemudian dimonitor oleh CIA. Untuk hal ini, tindaklanjut dibatasi pada area-area proses bisnis yang signifikan dengan target waktu yang disepakati bersama.

## PARTISIPASI AUDIT INTERNAL

Dalam rangka memperluas dan mengembangkan wawasan dan kompetensi profesional Auditor Internal, CIA BTEL sebelumnya telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya dalam berbagai organisasi perhimpunan (asosiasi) profesi auditor internal. CIA BTEL sebelumnya telah menyertakan para auditornya dalam berbagai kegiatan perhimpunan profesi internal auditor lain, di antaranya sebagai anggota Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR), Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter (ACFE), dan Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Chapter. Keikutsertaan anggota CIA pada berbagai perhimpunan profesi Internal Auditor sangat mendukung peningkatan kompetensi dan wawasan anggota CIA untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas audit maupun pengembangan dalam pengelolaan kegiatan auditnya.

Perhimpunan-perhimpunan tersebut merupakan ajang pertukaran informasi serta forum diskusi (benchmarking) diantara para internal auditor terkait isu-isu terkini dalam dunia audit.

## KEGIATAN INTERNAL AUDIT

Pada tahun 2018, fokus kegiatan Internal Audit lebih pada pengawasan dan pengawalan strategi dan rencana bisnis BTEL dalam kerangka transformasi. Dengan diminta atau secara proaktif Internal Audit melakukan internal consulting services dengan titik berat pada penyelenggaraan operasional perusahaan khususnya berkenaan dengan respon terhadap risiko, pengembangan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko, termasuk proses risk assessment, dalam pemetaan terhadap unit bisnis yang berisiko tinggi sebagai langkah antisipatif agar penyelenggaraan bisnis tetap mengindahkan rambu-rambu yang berlaku. Untuk memastikan bahwa hasil audit dan internal consulting memperoleh tanggapan yang memadai dari auditee, maka dilakukan upaya pengawasan tindaklanjut. Tindak lanjut di lapangan dilakukan oleh auditee yang kemudian dimonitor oleh CIA. Untuk hal ini, tindaklanjut dibatasi pada area-area proses bisnis yang signifikan dengan target waktu yang disepakati bersama.

## MANAJEMEN RISIKO

Perseroan memandang manajemen risiko merupakan bagian dari pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). BTEL sangat menyadari bahwa untuk berkembang dan berevolusi menjadi perusahaan telekomunikasi yang lebih baik dan sadar lingkungan, perlu menerapkan manajemen risiko yang baik. BTEL telah mengidentifikasi potensi risiko yang terdapat dilingkungan bisnis dan perencanaan serta kemungkinan dampaknya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Perseroan juga telah melakukan mitigasi risiko atas risiko-risiko tersebut. BTEL melaksanakan prosedur manajemen risiko yang disebut *risk self assessment*, yang membantu BTEL mengevaluasi eksposur risiko di setiap proses bisnis. Seluruh karyawan yang terlibat di dalam proses bisnis berperan dalam menentukan, mengevaluasi, dan mengawasi resiko dalam upaya membangun kerja sama tim dan komitmen yang kuat untuk mengelola resiko dan melaksanakan proses bisnis.

## PROSES MANAJEMEN RESIKO OPERASIONAL BTEL

Proses manajemen risiko di BTEL dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### Identifikasi Risiko Operasional

Identifikasi dilakukan untuk setiap produk, aktivitas, proses dan sistem informasi yang ada dan akan digunakan oleh perusahaan. Identifikasi dimulai dari memahami bagaimana proses bisnis dilakukan sesuai dengan pemetaan proses operasional yang ada. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran perusahaan.

### Penilaian/Pengukuran Risiko Operasional

Melakukan klasifikasi kejadian risiko ke dalam beberapa kategori, mulai dari yang impact dan atau frekuensinya paling rendah (*Very Low Frequency/Very Low Impacts*) hingga yang tertinggi (*Very High Frequency/Very High Impacts*). Kemudian diterapkan Risk Appetite untuk menentukan level besaran risiko operasional yang dapat diterima Perseroan agar mampu memaksimalkan hasil dari risiko operasional yang ada ataupun yang mungkin akan terjadi. Toleransi risiko operasional BTEL direfleksikan dalam suatu evaluasi risiko berupa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko operasional yang telah disepakati yang dihasilkan dalam proyek ERM. Aspek dalam kriteria yang berdampak lebih besar dari high tidak dapat ditoleransi dan perlu ditangani dengan segera.

### Pengawasan/Pemantauan Risiko Operasional

Pemantauan/pengawasan risiko operasional dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta *kerugian (loss events) yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional (major business line)*, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal (*internal control*). Fungsi Operational Risk menyusun laporan mengenai dampak kerugian risiko operasional dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi.

### Pengendalian Risiko Operasional

Pengendalian risiko operasional dicantumkan di dalam kebijakan manajemen risiko perusahaan. Pengendalian risiko operasional yang dilakukan adalah:

- i. **Risk Acceptance.** Manajemen mengambil sepenuhnya risiko operasional karena memang harus diambil untuk memanfaatkan kesempatan bisnis. Kontrol risiko operasional yang ketat dijalankan apabila risk acceptance akan diterapkan.
- ii. **Risk Avoidance.** Risiko operasional dihindarkan dengan apabila manfaat suatu aktivitas bisnis tidak lebih besar atau sama dengan eksposur risiko operasional.
- iii. **Risk Transfer.** Risiko operasional yang masih melekat pada aktivitas bisnis dipindahkan kepada pihak lain yang akan mengambil alih risiko operasional tersebut.
- iv. **Risk Mitigation.** Upaya memperkecil kemungkinan terjadinya risiko operasional dengan menciptakan tindakan-tindakan alternatif yang dapat memperkecil kerugian apabila risiko operasional terjadi.

### RISK MATRIX

Likelihood of the Consequence	Maximum Reasonable Consequence				
	(1) Insignificant	(2) Minor	(3) Moderate	(4) Major	(5) Catastrophic
(A) Almost certain	1 High	16 High	20 Extreme	23 Extreme	25 Extreme
(B) Likely	Moderate	12 High	17 High	21 Extreme	24 Extreme
(C) Occasionally	Low	8 Moderate	13 High	18 Extreme	22 Extreme
(D) Unlikely	Low	5 Low	9 Moderate	14 High	19 Extreme
(E) Rare	Low	3 Low	6 Moderate	10 High	15 High

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi, risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan tidak hanya risiko operasional melainkan juga risiko-risiko lainnya yang bersumber dari berbagai lingkungan internal dan eksternal yang terkait erat dengan industri telekomunikasi. Risiko-risiko ini dikendalikan dibawah koordinasi Direksi dan fungsi-fungsi terkait di BTEL dan melalui arahan Komite Manajemen Risiko BTEL. Risiko-risiko yang menjadi lingkup pengendalian manajemen BTEL adalah:

**a. Risiko Stabilitas Ekonomi.**

Perusahaan menghadapi risiko dari kondisi perekonomian domestik maupun global; termasuk faktor perekonomian makro seperti inflasi, tingkat bunga, dan nilai tukar. BTEL telah mengantisipasi risiko tersebut dengan melakukan pengawasan dan mencari ahli di luar BTEL yang akan memberikan saran jika diperlukan.

**b. Risiko Perubahan Politik dan Pemerintahan.**

Industri telekomunikasi merupakan industri yang sangat ditata oleh peraturan. Setiap perubahan dalam peraturan pemerintah akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan. BTEL mengantisipasi risiko ini dengan menyusun rencana contingency untuk menghadapi lingkungan politik yang tidak mendukung atau kurang mendukung. Di samping itu, BTEL mengoptimalkan kinerja unit-unit terkait yang menjalankan fungsinya dalam memonitor kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sehingga kepatuhan tetap terjaga.

**c. Risiko Fluktuasi Valuta Asing.**

BTEL beroperasi di Indonesia dengan pendapatan dalam mata uang Rupiah. Di lain pihak, sebagian kewajiban BTEL adalah dalam mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah dapat berdampak langsung kepada keuntungan Perusahaan.

**d. Risiko Persaingan.**

BTEL menghadapi persaingan yang ketat dengan banyaknya pemain di sektor telekomunikasi. Perusahaan mengantisipasi lingkungan yang penuh persaingan dengan meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk secara terus-menerus dan dengan pendekatan yang bersifat menyeluruh.

**e. Risiko Perkembangan Teknologi**

BTEL sangat dipengaruhi oleh perubahan yang cepat di bidang teknologi yang terdapat di industri telekomunikasi. BTEL mengantisipasi risiko ini dengan cara mendorong product development yang mengikuti dan mengantisipasi perkembangan teknologi terkini. Langkah ini membuat BTEL mampu mengantisipasi kebutuhan pasar terhadap teknologi tersebut.

**f. Risiko Ketergantungan Pada Jaringan Pihak Lain.**

Kegiatan usaha BTEL sangat tergantung kepada perjanjian interkoneksi atau perjanjian pemanfaatan Jaringan telekomunikasi dengan pihak atau operator penyedia jaringan telekomunikasi serta infrastruktur lainnya yang melekat. Tidak tersedianya jaringan dapat berdampak pada terjadinya terganggunya layanan kepada pelanggan dan hilangnya pendapatan potensial. Untuk mengurangi risiko ini, BTEL sangat memperhatikan hubungan dengan pemerintah dan operator-operator lain untuk memungkinkan pemanfaatan jaringan secara terus-menerus.

**g. Risiko Ketergantungan Pada Pola Kemitraan.**

Model bisnis baru di depan maupun yang telah ada saat ini dapat dijalankan oleh BTEL dengan setidaknya dua pola, yaitu pola mandiri dan pola kemitraan. Pola mandiri dimaksudkan bahwa BTEL dapat menjalankan sendiri bisnisnya dengan sarana dan prasarana yang disediakan sendiri. Hal ini berkaitan langsung dengan lisensi yang dimiliki atau peraturan yang dapat dipenuhi oleh BTEL dan kesanggupan secara keuangan dan operasional dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan bisnis. Pola kedua adalah kemitraan dimana dalam kondisi BTEL belum memiliki sarana dan prasarana sendiri maupun lisensi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, maka bermitra dengan pihak lain yang telah memiliki fasilitas dan lisensi yang diperlukan merupakan pilihan yang rasional. Namun demikian, risiko yang mungkin timbul adalah terkait dengan posisi tawar dan dominan yang biasanya berada lebih besar pada mitra. Pemutusan kemitraan dari waktu ke waktu merupakan risiko dengan perencanaan mitigasi tersendiri.

**h. Risiko Fraud Dan Berkurangnya Pendapatan**

Dalam aktivitas operasional dan finansial BTEL, ada kemungkinan muncul risiko terhadap terjadinya fraud. Fraud adalah penipuan, penggelapan atau bentuk penyimpangan lainnya baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi aktivitas operasional dan finansial BTEL. Dengan banyaknya inovasi pasar yang dilakukan oleh BTEL, risiko yang berasal dari fraud memiliki potensi dampak negatif yang harus diperhitungkan jika berlangsung dalam waktu lama dan dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan pendapatan dan keuntungan. BTEL melakukan pencegahan terhadap terjadinya fraud dengan menerapkan revenue assurance untuk pencegahan pengurangan pendapatan. Revenue assurance melakukan pemeriksaan pencatatan, kelengkapan transaksi dan sistem penagihan secara menyeluruh. Prosedur pengujian juga berlaku bagi produk dan layanan baru, sebelum diluncurkan secara komersial.

## PERKARA PENTING

Pada tahun 2018 terdapat perkara penting yang melibatkan Perusahaan yaitu :

1. Perkara gugatan perdata di pengadilan New York Amerika Serikat terhadap beberapa pihak termasuk Perusahaan oleh Universal Investment Advisory SA, Vaquero Master EM Credit Fund Ltd, dan Trucharm Ltd yang yang memegang lebih dari 25% (duapuluh lima persen) Wesel Senior -USD yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom, Pte.Ltd (entitas anak). Gugatan tersebut terkait pemenuhan kewajiban pembayaran bunga Wesel Senior-USD. Gugatan ini sudah muncul sejak September 2014. Sampai dengan Laporan Tahunan ini disusun proses pemeriksaan gugatan ini masing berlangsung di Pengadilan New York. Gugatan perdata ini hingga saat ini tidak memiliki dampak terhadap kegiatan usaha Perusahaan.
2. Permohonan Chapter 15 oleh Perseroan kepada the U. S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York untuk pengakuan atas keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tanggal 9 Desember 2014. Sampai dengan saat ini permohonan Chapter 15 tersebut masih dalam proses persidangan.

## SANKSI ADMINISTRASI

Sebagai perusahaan publik dan emiten, BTEL memiliki kewajiban terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan -undangan di bidang pasar modal, dalam hal ini terutama peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (Bursa). Salah satu kewajiban perusahaan publik yang harus dilaksanakan adalah penyampaian laporan berkala dalam hal ini laporan keuangan dan laporan tahunan. Pada tahun 2018, Perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan akhir tahun buku 2017 yang terdapat konsolidasi dengan entitas anak. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan tahunan 2016 kepada OJK dan Bursa. Atas keterlambatan tersebut OJK dan Bursa mengenakan sanksi administrasi berupa denda. Sanksi denda tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh Perusahaan.

## KODE ETIK

Kode Etik yang dipegang sebagai bagian dari nilai-nilai Perusahaan adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

**Jujur**, yang bermakna bahwa terdapat keselarasan antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan; menghindari benturan kepentingan; menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas; dan mengakui kesalahan serta menyampaikan sesuatu sesuai fakta.

**Tanggung Jawab**, yang bermakna bahwa terdapat kemampuan untuk menerima amanat dan menjalankan tugas serta kewajiban yang diberikan; dan menuntaskan pekerjaan yang diberikan.

**Visioner**, yang bermakna bahwa terdapat keyakinan dalam mewujudkan rencana dan cita-cita; dan ingin melakukan penyempurnaan dan menjadi yang terbaik.

**Disiplin**, yang bermakna bahwa konsistensi terhadap rencana yang telah dibuat dan menjalankan sesuai ketentuan; dan tidak berhenti berupaya hingga mencapai hasil yang diinginkan.

**Kerja sama**, yang bermakna bahwa terdapat optimalisasi potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, dan saling mendukung untuk menyelesaikan tugas bersama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang disepakati bersama;

**Adil**, yang bermakna bahwa terdapat pengambilan sikap dan keputusan secara proporsional, dan mengapresiasi serta menghukum sesuai dengan ketentuan.

**Peduli**, yang bermakna bahwa terdapat pemahaman atas kondisi pihak lain dan ikut merasakan kesulitan yang dihadapi; dan berinisiatif membantu menyelesaikan masalah atau pekerjaan.

## CORPORATE CULTURE

### NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Dalam kerangka kerja Perusahaan di samping dukungan sistem pengendalian internal, penerapan GCG, dan kode etik, Perusahaan juga membangun nilai-nilai yang didorong menjadi corporate culture dan identitas yang melekat pada setiap insan Perusahaan.

- **PASSION**, dorongan untuk menyebarkan energi positif dan menularkannya kepada lingkungan perusahaan. Perilaku nilai tersebut meliputi integritas, penghargaan martabat, motivasi, semangat, dan mempelajari tren, teknologi, metode, dan keterampilan baru.
- **APPRECIATING PEOPLE**, menghargai karyawan sebagai faktor terpenting dengan memahami dan mengakui kontribusi setiap individu. Perilaku nilai tersebut meliputi penghormatan dan penghargaan terhadap sesama, baik internal maupun eksternal, dan pengembangan para pegawai dan mitra sendiri.
- **CUSTOMER CENTRIC**, menyenangkan pelanggan dan melayani mereka dengan produk dan layanan berkualitas tinggi. Perilaku nilai tersebut meliputi interaksi secara langsung dengan pasar, mencari tahu dan memahami kebutuhan pelanggan, pelayanan yang setara bagi semua pelanggan

- **OPERATIONAL EXCELLENCE**, memahami pentingnya efisiensi dan efektivitas dan dampaknya kepada kepuasan pelanggan. Perilaku nilai tersebut meliputi semangat lebih cepat, lebih baik, dan lebih terjangkau harganya, profesionalisme, disiplin, kerja sama dan sinergi.
- **INNOVATION**, keberanian untuk berkompetisi, memproduksi, dan menyuarakan terobosan untuk mendorong perusahaan agar menjadi yang terdepan dalam persaingan bisnis. Perilaku nilai tersebut meliputi mental "Bisa", berpikir kreatif, berpikir secara unik dalam hubungan dengan pengalaman pelanggan, dan berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan

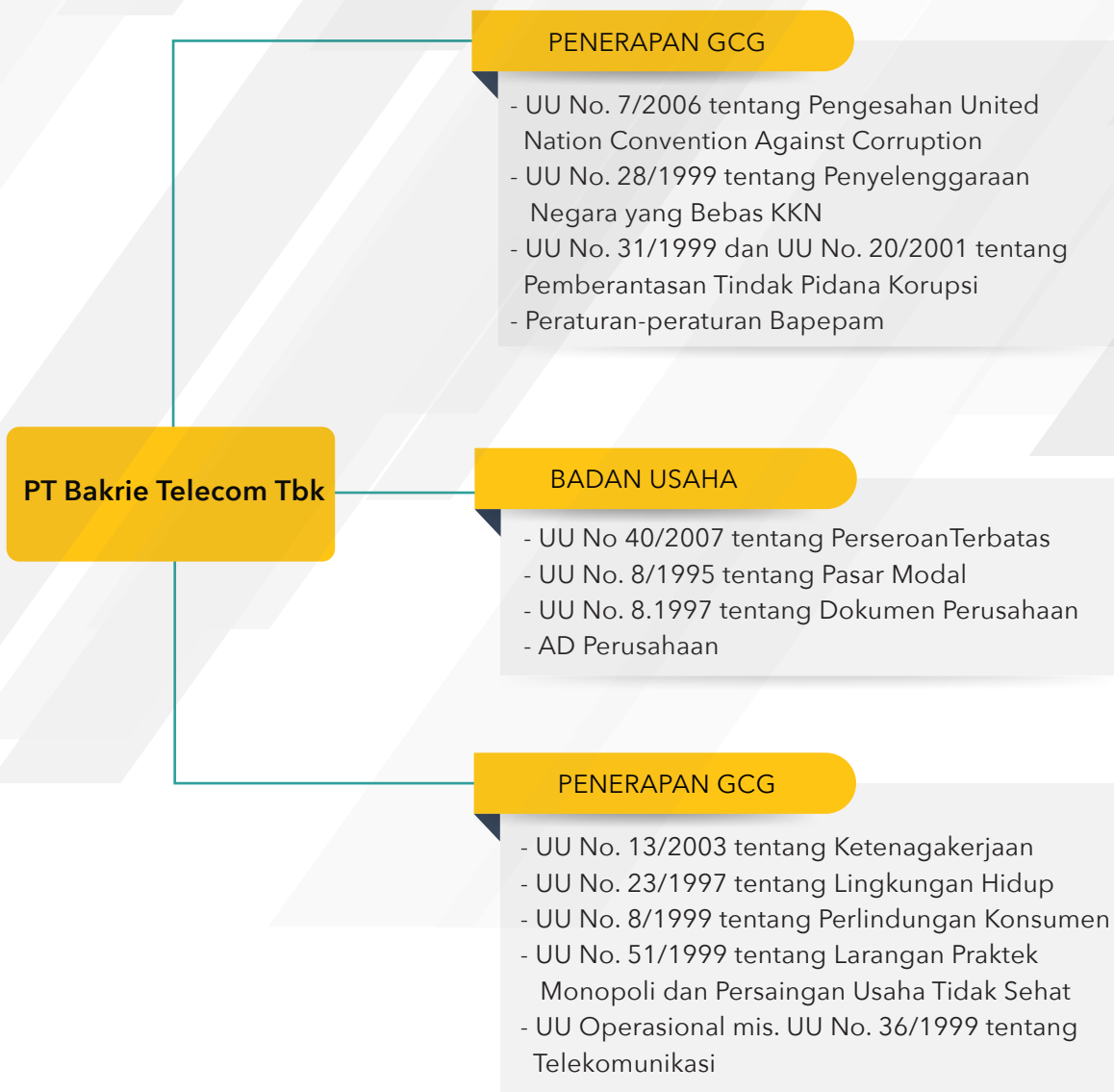
## PENERAPAN GCG

### TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENERAPANNYA

BTEL dengan identitas sebagai perusahaan publik dan organisasi yang berpengalaman telah mengubah sudut pandang terhadap prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) yang sebelumnya dipandang sebagai suatu instrumen syarat yang wajib ditaati menjadi suatu nilai hidup yang disadari membawa kebermanfaatannya yang sangat positif dalam perjalanan bisnis BTEL. Gagasan prinsip-prinsip dasar GCG telah diaplikasikan oleh BTEL secara internal antara lain untuk:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan melalui penerapan maksimal prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan agar Perseroan mempunyai daya saing kuat baik secara nasional maupun regional.
2. Mendukung pengelolaan perusahaan secara bersih, transparan, dan profesional serta memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing organ BTEL, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham, dan Karyawan.
3. Mendorong agar pengelolaan perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral integritas yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial BTEL terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar BTEL.

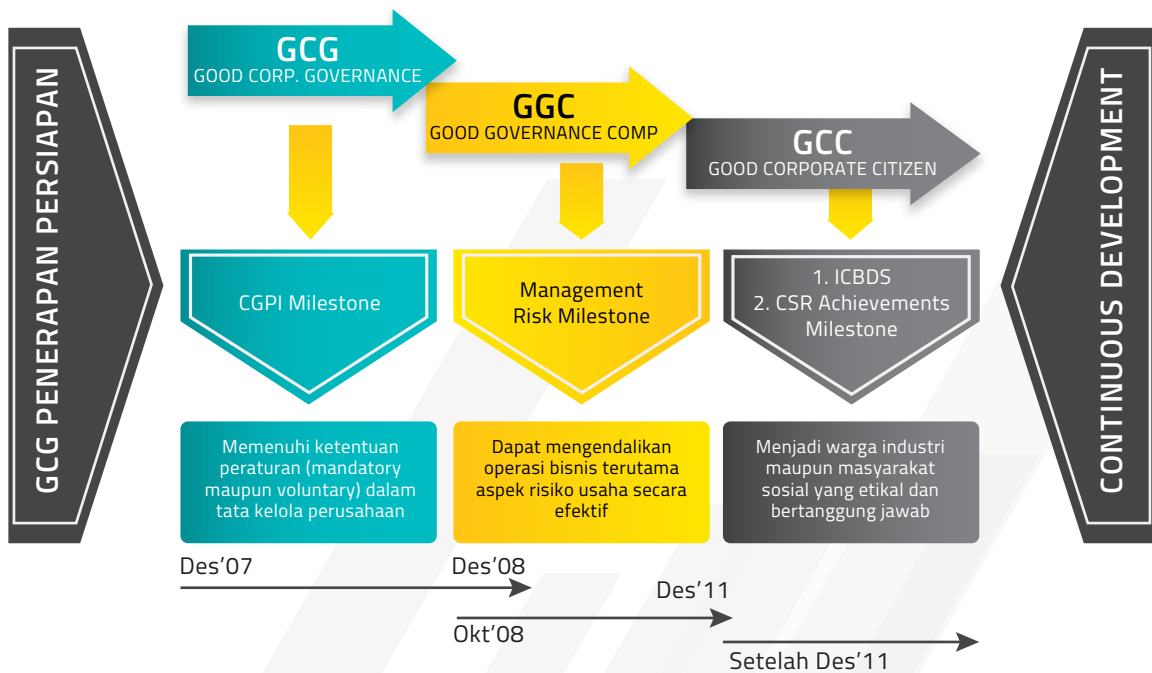
Dari sisi eksternal, penerapan GCG di Perusahaan berpatokan pada kerangka hukum yang menjadi dasar gagasan pemikiran dan penerapan GCG tersebut yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Lebih jauh lagi, BTEL beberapa tahun yang lalu berinisiatif untuk membuat peta jalan (roadmap) tata kelola perusahaan sebagai acuan bagi insan BTEL tanpa kecuali dalam menjalankan roda usaha. Adapun roadmap ini sendiri disusun dengan berdasarkan pada:

1. Visi dan misi Perusahaan
2. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
3. Pertimbangan atas faktor-faktor dan kondisi internal organisasi Perusahaan serta dinamika lingkungan bisnis di industri saat ini dan masa yang akan datang.

Roadmap tersebut berangkat dari konsep suatu proses yang dimulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi GCG sebagai berikut:



*Keterangan:*

- *Milestone 1. GCG (Good Corporate Governance)*  
Memenuhi ketentuan dan peraturan (mandatory maupun voluntary) dalam tata kelola perusahaan
- *Milestone II. GGC (Good Governance Compliance)*  
Dapat mengendalikan operasi bisnis terutama aspek risiko usaha secara efektif
- *Milestone III. GCC (Good Corporate Citizen)*

Pada masa ini, penerapan GCG di BTEL, sedang memasuki tahapan Milestone III

### **Milestone I. GCG (Good Corporate Governance)**

*"Memenuhi ketentuan dan peraturan (mandatory maupun voluntary) dalam tata kelola perusahaan"*

BTEL telah memiliki :

1. Pedoman pelaksanaan Komite Audit (Audit Committee charter)
2. Pedoman pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination & Remuneration Committee charter)
3. Pedoman pelaksanaan Komite Manajemen Risiko (Risk Committee charter)
4. Pedoman pelaksanaan Komite Corporate Governance (CG Committee charter)
5. Modul Pakta Integritas yang berisi Kode Etik
6. Peraturan perusahaan
7. Manual Mutu BTEL-QMS (Sistem Manajemen Mutu BTEL)

### **Milestone II. GGC (Good Governance Compliance)**

*"Dapat mengendalikan operasi bisnis terutama aspek risiko usaha secara efektif"*

BTEL telah menerapkan :

1. Sistem Pengendalian Internal (Corporate Internal Audit)
2. Program BTEL Integritas dan Best Performance Award sebagai bentuk penilaian kepatuhan, etika, dan kinerja
3. Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management (ERM))
4. Survei mutu internal secara periodik
5. Penerapan konsep FBC (Faster, Better, Cheaper) di aktivitas operasional
6. Penyusunan Kebijakan & Prosedur Manajemen (Policy & Procedures):
  - a. Pemetaan proses bisnis terkait
  - b. Penetapan kebijakan manajemen pada proses-proses bisnis tersebut
  - c. Penyusunan Standard Operating Procedures

### **Milestone III. GCC (Good Corporate Citizen)**

*"Menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang memiliki etika dan bertanggung jawab"*

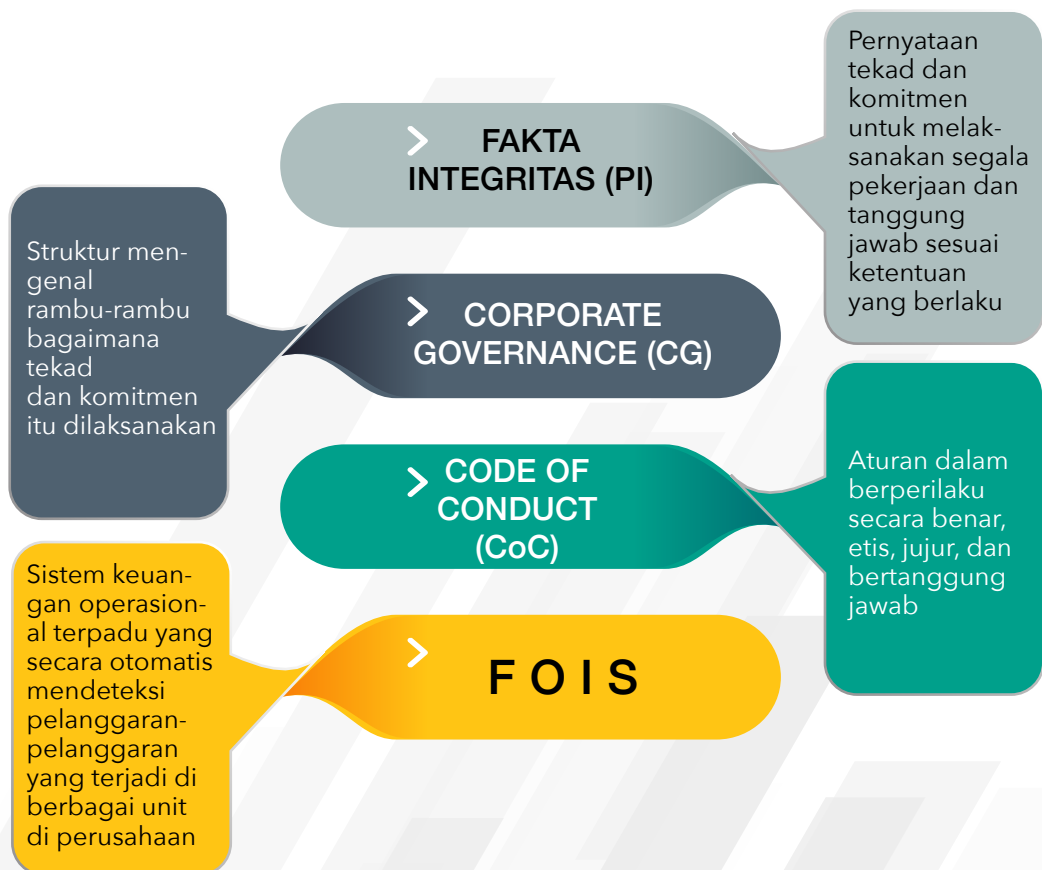
Dalam rangka mewujudkan agar BTEL menjadi Warga Perusahaan yang Baik (Good Corporate Citizen) yang merupakan salah satu bentuk implementasi GCG, sejak 2011 BTEL telah menjadi anggota Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Indonesian Business Council for Sustainability Development (IBCSO). Melalui IBCSD ([www.ibcsd.or.id](http://www.ibcsd.or.id)) yang merupakan suatu organisasi nirlaba, BTEL turut berpartisipasi dalam program-program yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

## KOMPONEN-KOMPONEN UTAMA UNTUK PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BTEL

Pendekatan yang berkesinambungan terhadap kepatuhan dan penerapan prinsip serta praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada segenap Direksi dan Dewan Komisaris BTEL.

Kedua Dewan tersebut senantiasa menjadi bagian dari budaya etika dan integritas Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Suatu konsep penerapan GCG di BTEL telah diterapkan untuk membentuk budaya etis dan penuh integritas.

Diagram berikut menjabarkan konsep penerapan GCG yang menggunakan kerangka logika untuk membangun GCG:



### 1. PAKTA INTEGRITAS (PI)

PI merupakan pernyataan/janji pimpinan dan karyawan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perseroan. Komitmen tersebut ditunjukkan BTEL dengan telah ditandatanganinya Piagam Pakta Integritas sejak 1 Agustus 2006 dan dilanjutkan dengan penyusunan Modul PI PT Bakrie Telekom Tbk. yang merupakan kumpulan aturan pelaksanaan yang rinci, meliputi segala aspek yang diperlukan dalam rangka melaksanakan PI secara benar dan efektif di lingkungan PT Bakrie Telekom Tbk., menuju perwujudan Perseroan sebagai suatu lingkungan integritas yang efektif di Indonesia.

### 2. TATA KELOLA PERUSAHAAN/ CORPORATE GOVERNANCE (CG)

Secara umum CG didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Baik (Good) dalam konteks CG adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional per usahaan sesuai dengan konsep CG. Untuk memastikan tercapainya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), BTEL menggunakan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.

### 3. ATURAN BERPERILAKU/ CODE OF CONDUCT (CoC)

Aturan berperilaku yang diterapkan BTEL mencakup kewajiban dan larangan yang mengatur hubungan kerja baik secara hubungan internal antar pimpinan dengan pimpinan, pimpinan dengan karyawan, karyawan dengan karyawan, dan hubungan eksternal antara perusahaan dengan pihak eksternal.

CoC berasal dari budaya Perseroan. Dalam CoC terdapat dua panduan etika:

- a. Etika umum sebagai kontrol atas perilaku karyawan, misalnya dalam hal berinteraksi dan kerahasiaan.
- b. Etika bisnis yang berlaku dalam masalah tender dan berinteraksi dengan piutang dagang.

### 4. FOIS ( FINANCIAL OPERATIONAL INTEGRATED SYSTEM)

FOIS (Financial Operational Integrated System) dalam logical framework penerapan BTP (Bersih, Transparan, dan Profesional) di BTEL memiliki fungsi menterjemahkan prinsip-prinsip GCG dan CoC ke dalam tindakan nyata dengan menitikberatkan pengecekan secara detail dan simetris antara kegiatan operasional di lapangan dengan aspek keuangannya baik dalam anggaran, penggunaan, dan pencatatannya.

Kegunaan FOIS adalah mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang bersifat koruptif baik yang dilakukan oleh orang dalam, maupun bekerja sama dengan pihak luar. Ada 2 hal yang diperhatikan dalam penerapan FOIS, yaitu:

- a. Aktualisasi kebijakan, aturan, dan SOP di operasional perusahaan yang sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan; dan
- b. Sistem pengawasan dari aspek keuangan dan operasional secara terpadu.

Pada tingkatan operasional, BTEL memiliki berbagai kebijakan dan aturan seperti batasan kewenangan (BTEL-Approval Authority), Manual Mutu BTEL-QMS, Pedoman dan Prosedur di Unit-unit Kerja, dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang membantu karyawan bekerja dan beraktivitas sesuai dengan koridor dan aturan yang telah ditetapkan sehingga kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari semaksimal mungkin.

Untuk sistem pengawasan secara terpadu dalam aspek keuangan dan operasional, BTEL memiliki Risk Management, Corporate Internal Audit, dan Quality Audit yang mengemban tugas yang sangat penting untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin muncul, melakukan investigasi terhadap potensi kecurangan dan menganalisis

ketidaksiuaian yang bisa muncul dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah yang diperlukan.

### 5. PROSEDUR KERJA STANDAR (STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE/SOP)

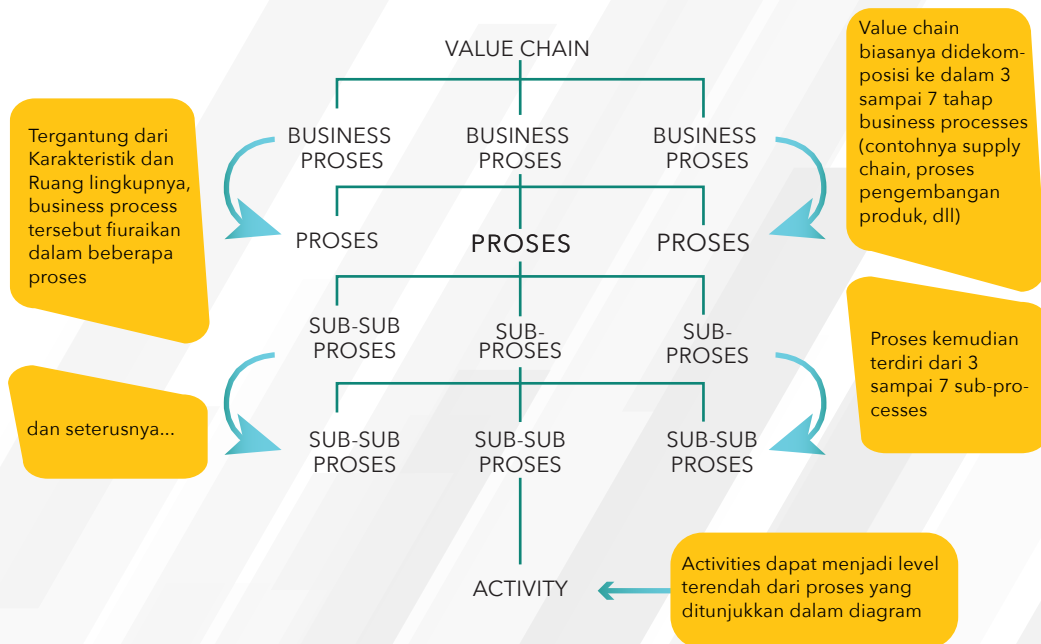
SOP menjadi bagian penting dalam pergerakan proses bisnis BTEL. Konsep pembangunan dan penerapan SOP dilakukan oleh Perusahaan melalui dua pendekatan yaitu : Top down Approach dan Bottom Up Approach yang sangat dipengaruhi dengan karakteristik SOP yang dibutuhkan pada saat atau pada tujuan bisnis tertentu.

#### TOP DOWN APPROACH

Dimulai dari value chain BTEL kemudian dikembangkan dalam bussines process dan sub process sampai ke level aktivitas.

#### BOTTOM UP APPROACH

Pendekatan yang dimulai dari aktivitas-aktivitas yang telah ada di level operasional kemudian dikembangkan menjadi suatu prosedur kerja standar (SOP)



## 6. TARIF

Salah satu acuan konsep GCG adalah prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness). Uraian dari TA RIF adalah sebagai berikut:

### **a. Transparency (Transparansi)**

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, BTEL menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. BTEL mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pokok-pokok pelaksanaan prinsip transparansi adalah sebagai berikut:

- i. BTEL menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- ii. Informasi yang diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha, dan strategi BTEL, kondisi keuangan, susunan pengurus, pemegang saham pengendali, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi BTEL.
- iii. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh BTEL tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- iv. Kebijakan BTEL dibuat secara tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

### **b. Accountability (akuntabilitas)**

BTEL harus dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu BTEL dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan BTEL dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pokok-pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- i. BTEL menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ BTEL dan karyawan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai BTEL (corporate values), dan strategi BTEL untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan bagi mereka.

- ii. BTEL meyakini bahwa semua organ BTEL dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- iii. Pemantauan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan BTEL.

## 7. ETIKA BISNIS

Etika bisnis merupakan bagian awal dari upaya BTEL untuk membangun kerangka GCG di Perseroan. Etika bisnis merupakan kerangka dasar tingkah laku atau filosofi yang digunakan oleh seluruh karyawan BTEL dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dengan berpedoman pada etika bisnis maka akan terbentuk per usahaan yang bersih (GCG).

Konsep etika bisnis di BTEL adalah bagaimana unsur-unsur yang ada di BTEL yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu dan perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis atau menjalankan bisnis berlaku secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Prinsip yang digunakan dalam etika bisnis, yaitu:

- a. Prinsip Otonomi**, sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya lebih baik untuk dilakukan. Dan orang yang otonom tahu apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.
- b. Prinsip Kejujuran**, yang terbagi menjadi tiga bagian:
  - Kejujuran dalam syarat perjanjian dan kontrak.
  - Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harga.
  - Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu per usahaan.
- c. Prinsip Keadilan**, menekankan perlakuan yang sama pada setiap individu sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Prinsip Saling Menguntungkan**, menekankan agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan suatu win-win solution.
- e. Prinsip Integritas Moral**, dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan.



TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Selain berfungsi sebagai kendaraan ekonomi yang berorientasi pada penyediaan produk layanan berkualitas dengan imbal balik berupa keuntungan usaha, Perseroan juga memiliki fungsi tanggung jawab sosial untuk membantu sesama atau kalangan yang membutuhkan bantuan atau memberikan stimulasi bagi pihak-pihak yang dinilai memerlukan perbaikan kesejahteraan. Tanggung jawab sosial ini pada implementasinya juga tergantung pada kondisi keuangan dan operasional Perseroan tanpa menghilangkan kesadaran akan tanggung jawab sosial itu sendiri. Kesadaran akan tanggung jawab sosial ini sudah menjadi bagian dari nilai korporat dan pribadi insan BTEL yang menjadi satu kesatuan Corporate Social

Responsibility-CSR yang berkelanjutan dan dan bermanfaat. Hal ini ini juga sejalan dengan amanah dari visi dan misi sosial Kelompok Usaha Bakrie.

Kondisi kinerja operasional dan keuangan Perseroan di tahun 2018 yang kurang menguntungkan tidak menyurutkan semangat berbagi dalam diri Perseroan dan pribadi insan BTEL dalam memberikan perhatian sosial kepada sesama. Perseroan berupaya untuk menyesuaikan kondisi tersebut dengan apa yang bisa diberikan atau dilakukan Perseroan dalam upaya membantu sesama sekecil apapun namun tetap memberikan manfaat.

### MAJELIS TA'LIM ESIA

Bekerja sama dengan Majelis Ta'lim Esia dan Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Bakrie Telecom, Perseroan secara rutin menyediakan konsumsi berbuka puasa bagi jamaah mushola Wisma Bakrie. Jamaah tersebut tidak hanya para karyawan Perseroan maupun dari kantor tetapi juga masyarakat sekitar Wisma Bakrie dalam hal ini termasuk para pedagang kaki lima yang berdagang di sekitar Wisma Bakrie. Di samping itu terdapat pula penyaluran dana zakat/infaq, karyawan melalui Komunitas Majelis Ta'lim ESIA dan HRD Perseroan (Employee Relations).

### CEK KESEHATAN GRATIS DAN DONOR DARAH

Sebagai kegiatan yang diselenggarakan secara rutin maupun insidental, Perseroan juga berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat dan program donor darah yang merupakan kegiatan donasi darah bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Palang Merah Indonesia.

Kegiatan-kegiatan sosial ini termasuk dalam agenda kegiatan sosial bersama antara perusahaan kelompok usaha Bakrie dan Yayasan Bakrie Untuk Negeri, dimana Perseroan adalah salah satu anggota kelompok usaha Bakrie yang terlibat aktif.



# LAPORAN KEUANGAN

# 06

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

## Surat Pernyataan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2018 PT Bakrie Telecom Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bakrie Telecom Tbk tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Mei 2019

### DEWAN KOMISARIS



---

**ANINDYA NOVYAN BAKRIE**  
Komisaris Utama



---

**BOBBY GAFUR S. UMAR**  
Wakil Komisaris Utama



---

**AI MULYADI MAMOER**  
Komisaris Independen

### DIREKSI



---

**R. BISMARKA KURNIAWAN**  
Direktur Utama



---

**TAUFAN E.N. ROTORASIKO**  
Wakil Direktur Utama



---

**JASTIROMO**  
Wakil Direktur Utama



---

**HARYA MITRA HIDAYAT**  
Direktur



---

**ANDI PRAVIDIA SALIMAN**  
Direktur



---

**W. MARK ROBSON**  
Direktur

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

# **Bakrie Telecom**

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2018**

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK**

***Consolidated Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
For the Year Ended December 31, 2018***

***PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES***

**Daftar Isi****Table of Content**

	Halaman / <u>Page</u>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1	<i>Consolidated statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3	<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan defisiensi modal konsolidasian	5	<i>Consolidated statements of changes in capital deficiency</i>
Laporan arus kas konsolidasian	6	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	7	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PT BAKRIE TELECOM TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL  
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
OF  
PT BAKRIE TELECOM TBK  
AND SUBSIDIARIES  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : R. Bismarka Kurniawan  
Alamat kantor : PT Bakrie Telecom Tbk  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,  
Jakarta - 12920  
Alamat rumah : Jl. Pinang Merah II SK-01  
RT.014/RW.016 Pondok Pinang  
Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan  
Telepon : (62 21) 91101112  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Andi Pravidia Saliman  
Alamat kantor : PT Bakrie Telecom Tbk  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,  
Jakarta - 12920  
Alamat rumah : Jl. Puter II ED 2/32 Bintaro 5  
RT.002/RW.009  
Jurangmangu Timur  
Pondok Aren - Tangerang  
Telepon : (62 21) 91101112  
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bakrie Telecom Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*We, the undersigned:*

1. Name : R. Bismarka Kurniawan  
Office address : PT Bakrie Telecom Tbk  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,  
Jakarta - 12920  
Residential address : Jl. Pinang Merah II SK-01  
RT.014/RW.016 Pondok Pinang  
Kebayoran Lama Jakarta  
Selatan  
Telephone : (62 21) 91101112  
Title : President Director
2. Name : Andi Pravidia Saliman  
Office address : PT Bakrie Telecom Tbk  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-1,  
Jakarta - 12920  
Residential address : Jl. Puter II ED 2/32 Bintaro 5  
RT.002/RW.009  
Jurangmangu Timur  
Pondok Aren - Tangerang  
Telephone : (62 21) 91101112  
Title : Director

*declare that:*

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements;
2. PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;  
b. PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for PT Bakrie Telecom Tbk and Subsidiaries' internal control system.

*This statement is made in all truth.*

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

R. Bismarka Kurniawan  
Direktur Utama / President Director

Andi Pravidia Saliman  
Direktur / Director

Jakarta, 17 Mei 2019 / May 17, 2019  
PT Bakrie Telecom Tbk

Office:

## Laporan Auditor Independen

## Independent Auditors' Report

Laporan/ Report No. 00079/2.1107/AU.1/06/1293-1/1 V/2019

### Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

### The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

#### PT Bakrie Telecom Tbk Dan Entitas Anak

#### PT Bakrie Telecom Tbk And Subsidiaries

Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya ("Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We were engaged to audit the accompanying consolidated financial statements of PT Bakrie Telecom Tbk (the "Company") and its Subsidiaries (the "Group"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2018, and the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

### Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian dan entitas anaknya tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan entitas anaknya yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements and its subsidiaries in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements and its subsidiaries that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Tanggung jawab auditor

### Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian dan entitas anaknya tersebut berdasarkan audit yang sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Namun karena hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements and its subsidiaries based on conducting the audit in accordance with Standards on Audit established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. However, because of the matter described in the Basis for Disclaimer of Opinion paragraph, we were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion.

#### **Basis untuk opini tidak menyatakan pendapat**

Seperti diungkapkan dalam catatan 14 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan Bakrie Telecom Pte. Ltd (Entitas Anak) sedang dalam proses untuk merestrukturisasi utang Wesel Senior dengan pokok sebesar USD380 juta yang sampai dengan tanggal laporan ini belum dapat ditentukan hasilnya. Kelompok Usaha belum berhasil memperoleh pendanaan pengganti dari para kreditur dan investor serta upaya dan langkah-langkah korporasi yang dilakukan belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Diungkapkan dalam catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian, pemegang Wesel Senior tersebut telah mengajukan gugatan kepada Kelompok Usaha. Dalam catatan 15 laporan keuangan konsolidasian, dijelaskan bahwa sampai dengan saat ini, utang yang diselesaikan melalui PKPU sejumlah Rp6,036 triliun, belum dapat dilakukan pembayaran karena kas Kelompok Usaha tidak mencukupi. Hal-hal tersebut di atas mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu, Kelompok Usaha kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan terlampir termasuk catatan atas laporan keuangannya tidak mengungkapkan fakta tersebut.

Kami tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat atas saldo Wesel Senior sejumlah USD380 juta atau setara dengan Rp5,502 triliun dan saldo akrual bunga sejumlah Rp3,717 triliun seperti dijelaskan dalam catatan 14 dan 13 atas laporan keuangan konsolidasian.

#### **Opini tidak menyatakan pendapat**

Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian PT Bakrie Telecom Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir.

#### **Basis of disclaimer of opinion**

*As disclosed in Note 14 to the consolidated financial statements, the Company and Bakrie Telecom Pte. Ltd. (Subsidiary) are in the process of restructuring the debt of Senior Notes in principal amount of USD380 million, the outcome of which could not be determined as of the date of this report. The Group has not succeeded in obtaining substitute funding from creditors and investors as well as the efforts and corporate actions that have not yet produced the results as expected. As disclosed in Note 36 to the consolidated financial statements, the Senior Notes holder has filed a lawsuit against the Group. In note 15 of the consolidated financial statements, it is explained that up to presence, the settlement of payables through PKPU amount of Rp6.036 trillion, has not been able to be paid because the cash of the Group are insufficient, The above matters indicate a material uncertainty that may cause a significant doubt on the ability of the Group to maintain as its going concern, and therefore, the Group may not be able to realize its assets and pay its liabilities in normal business activities. The accompanying financial statements including notes to the financial statements do not disclose such facts*

*We were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence for the balance of Senior Notes amounting of USD380 million or equivalent to Rp5.502 trillion and the balance of accrued interest amount of Rp 3.717 trillion as described in notes 14 and 13 to the consolidated financial statements.*

#### **Disclaimer of opinion**

*Because of the significance of the matter describe in the Basis for Disclaimer Opinion paragraph, we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion. Accordingly, we do not express an opinion on the accompanying consolidated financial statements and its subsidiaries as of December 31, 2018 and for the year then ended.*

**Penekanan Suatu Hal**

Kami membawa perhatian ke Catatan 10 atas Laporan Keuangan terlampir yang menjelaskan bahwa aset tidak lancar lainnya sejumlah Rp700 Milyar yang akan digunakan sepenuhnya untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Frekuensi Terutang dijelaskan pada Catatan 34 atas Laporan Keuangan terlampir, atas hal tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian bahwa aset masih dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha entitas. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

**Hal lainnya**

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 25 Mei 2018.

**Emphasis of matters**

*We draw attention to Note 10 to the accompanying Financial Statements which describes other non-current assets amount of Rp700 billion will be fully utilized for the fulfilment of the obligation of Payment of the Frequency Fee Payable described in Note 34 to the accompanying Financial Statements, in which case, it will create uncertainty that the assets may still be utilized in the entity's business activities. Our opinions are not modified in this respect.*

**Other Matters**

*The consolidated statement of financial position as of December 31, 2017 and for the year then ended, which were audited by other independent auditors who expressed an disclaimer opinion on such consolidated financial statements on May 25, 2018.*

**Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant  
KRISNAWAN, NUGROHO & FAHMY**



**Fahmy, CPA**

Izin Akuntan Publik No. AP. 1293 / License of Public Accountant No. AP. 1293

17 Mei 2019 / May 17, 2019

	Catatan / Notes	2018	2017	
<b>A S E T</b>				<b>A S S E T S</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2c,4	310	350	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	5	-	48	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	2d,6	40	38	Restricted cash
Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 72.204 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp 70.811 pada tanggal 31 Desember 2017)	7	953	2.253	Trade receivables (net allowances for impairment loss of Rp 72,204 as of December 31, 2018 and Rp 70,811 as of December 31, 2017)
Uang muka	8	313	1.582	Advances
<b>Total Aset Lancar</b>		<b>1.616</b>	<b>4.271</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Pajak dibayar dimuka	26a	1.292	995	Prepaid Tax
Aset tetap - bersih (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 9.370.736 pada tahun 2018 dan Rp 9.368.916 pada tahun 2017)	2h,2i,2j 2k,9	724	2.471	Fixed assets - net (Net accumulated depreciation of Rp 9,370,736 as of December 31, 2018 and Rp 9,368,916 as of December 2017)
Aset tidak lancar lainnya	10	709.873	710.285	Others non-current assets
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>		<b>711.889</b>	<b>713.751</b>	<b>Total Non-Current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>713.505</b>	<b>718.022</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL</b>				<b>LIABILITIES AND CAPITAL DEFICIENCY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha				Trade payables
pihak ketiga	11	406.667	325.543	Third parties
pihak berelasi	2e,11	17.036	11.107	Related parties
Utang lain-lain	12	143.150	91.167	Other payables
Utang pihak berelasi	2e,27	47.098	47.098	Due to related parties
Beban akrual	13	3.959.154	3.293.939	Accrued expenses
Utang pajak	2r,26b	20.580	16.517	Tax payables
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Wesel senior - bersih	14	5.502.780	5.148.240	Current maturities of long-term liabilities: Senior notes - net
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>10.096.465</b>	<b>8.933.611</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2r,26d	-	7.518	Deferred tax liability - net
Liabilitas imbalan kerja	2p,28	206	1.095	Employee benefits liability
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang yang diselesaikan melalui PKPU	15,35	6.036.077	5.931.222	Long-term liabilities - net of current maturities: Settlement of payables through PKPU
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>6.036.283</b>	<b>5.939.835</b>	<b>Total Non-current Liabilities</b>
<b>Total Liabilitas</b>		<b>16.132.748</b>	<b>14.873.446</b>	<b>Total Liabilities</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
dinyatakan lain )

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
DECEMBER 31, 2017 AND 2016**  
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

	<b>Catatan / Notes</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
<b>DEFISIENSI MODAL</b>				<b>CAPITAL DEFICIENCY</b>
Modal saham				Capital stock
Nilai nominal				Par value
Saham biasa				Common shares
seri A Rp 200				series A Rp200
seri B Rp 100				series B Rp100
(dalam satuan penuh)				(in full amount)
Modal dasar				Authorized shares
Saham biasa seri A				Common shares series A
10.000.000.000 saham				10,000,000,000 shares
pada tanggal 31 Desember				as of December 31,
2018 dan 2017				2018 and 2017
Saham biasa seri B				Common shares series B
87.111.652.195 saham				87,111,652,195 shares
pada tanggal				as of December 31,
31 Desember 2018 dan 2017				2018 and 2017
Modal ditempatkan dan				Issued and fully
disetor penuh				paid shares
Saham biasa seri A				Common shares series A
5.751.502.450 saham pada				5,751,502,450 shares as of
31 Desember 2018 dan 2017				December 31, 2018 and 2017
Saham biasa seri B				Common shares series B
31.022.402.185 saham pada				31,022,402,185 shares as of
31 Desember 2018 dan 2017	16	4.252.542	4.252.542	December 31, 2018 and 2017
Tambahan modal disetor	17	2.488.871	2.488.871	Additional paid-in capital
Saham beredar yang				Treasury stock
diperoleh kembali	2n,18	(11.000)	(11.000)	Premium on
Agio saham beredar yang				Treasury stock
diperoleh kembali	2n,18	50.623	50.623	Premium on conversion stock
Agio konversi hutang menjadi saham	15,16	618.931	618.931	Other capital reserves
Cadangan modal lainnya		(536.249)	7.056	Deficit
Defisit		<u>(22.282.801)</u>	<u>(21.562.226)</u>	
Defisiensi modal yang dapat				Capital deficiency
diatribusikan kepada pemilik				attributable to owners
entitas induk		(15.419.083)	(14.155.203)	of the parent entity
Kepentingan non pengendali	2b,19	<u>(160)</u>	<u>(221)</u>	Non-controlling interest
<b>Defisiensi Modal - Neto</b>		<b><u>(15.419.243)</u></b>	<b><u>(14.155.424)</u></b>	<b>Capital Deficiency - Net</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL</b>		<b><u>713.505</u></b>	<b><u>718.022</u></b>	<b>TOTAL LIABILITES AND CAPITAL DEFICIENCY</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements

**PT BAKRIE TELECOM Tbk**  
**DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk**  
**AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**PROFIT OR LOSS AND**  
**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
**FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017**  
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan /</u> <u>Notes</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	2e,2o,20,27			<b>OPERATING REVENUE</b>
Pendapatan usaha - bruto	32			Operating revenues - gross
Jasa telekomunikasi		8.526	7.871	Telecommunication services
Beban interkoneksi		(4.720)	(4.371)	Interconnection expenses
Pendapatan Usaha - Neto		<u>3.806</u>	<u>3.500</u>	Operating Revenues - Net
<b>BEBAN USAHA</b>				<b>OPERATING EXPENSES</b>
Penyusutan	2e,2o,2h,9,26	1.820	813.913	Depreciation
Operasi dan pemeliharaan	21	1.232	1.124	Operating and maintenance
Karyawan	23	8.194	36.232	Employee
Umum dan administrasi	22	29.221	8.590	General and administrative
Penjualan dan pemasaran	24	389	257	Sales and Marketing
Total Beban Usaha		<u>40.856</u>	<u>860.116</u>	Total Operating Expenses
<b>RUGI USAHA</b>		<u>(37.050)</u>	<u>(856.616)</u>	<b>OPERATING LOSS</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN)</b>				<b>OTHER INCOME</b>
<b>LAIN-LAIN</b>				<b>(CHARGES)</b>
Beban keuangan	25b	(605.744)	(716.835)	Financing charges
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2q,25a	(84.006)	(71.025)	Gain (loss) foreign exchange - net
Lain-lain - neto	25c	(1.179)	39.241	Others - net
Beban Lain-lain - Neto		<u>(690.929)</u>	<u>(748.619)</u>	Other Charges - Net
<b>RUGI SEBELUM BEBAN</b>				<b>LOSS BEFORE INCOME</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>		(727.979)	(1.605.235)	<b>TAX EXPENSE</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>		<u>7.404</u>	<u>108.753</u>	<b>INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)</b>
<b>RUGI NETO</b>		<u>(720.575)</u>	<u>(1.496.482)</u>	<b>NET LOSS</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements

PT BAKRIE TELECOM Tbk  
 DAN ENTITAS ANAK  
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
 KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
 TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017  
 (Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali  
 dinyatakan lain)

PT BAKRIE TELECOM Tbk  
 AND SUBSIDIARIES  
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
 PROFIT OR LOSS AND  
 OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017  
 (Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2018	2017	
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				<b>Items that will not be recalssified subsequently to profit or loss:</b>
Pengukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja		806	(94)	Remeasurement again on employee benefit liability
Pajak penghasilan terkait		-	(19)	Related income tax
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:</b>				<b>Items that will be recalssified subsequently to profit or loss:</b>
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		(544.111)	(2)	Exchange differences due to financial statements translation
<b>Penghasilan Komprehensif Lain - Neto setelah pajak</b>		(543.305)	(115)	<b>Other Comprehensive Income - Net Of Tax</b>
<b>TOTAL RUGI KOMPREHENSIF</b>		<b>(1.263.880)</b>	<b>(1.496.597)</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE LOSS</b>
<b>Rugi neto yang dapat diatribusikan kepada</b>				<b>Net loss attributable to:</b>
Pemilik entitas induk		(720.575)	(1.496.482)	Owner of the parent
Kepentingan non-pengendali	2b,19	-	-	Non-controlling interest
<b>Total</b>		<b>(720.575)</b>	<b>(1.496.482)</b>	<b>Total</b>
<b>Total rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>				<b>Total comprehensive loss attributable to:</b>
Pemilik entitas induk		(1.263.941)	(1.496.597)	Owner of the parent
Kepentingan non-pengendali	2b,19	61	-	Non-controlling interest
<b>Total</b>		<b>(1.263.880)</b>	<b>(1.496.597)</b>	<b>Total</b>
<b>RUGI NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Angka penuh)</b>				<b>BASIC LOSS PER SHARE ATRIBUTABLE TO THE OWNER OF PARENT (Full amount)</b>
<b>RUGI NETO</b>	2s,31	<b>(19,59)</b>	<b>(40,69)</b>	<b>NET LOSS</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements

PT BAKRIE TELECOM Tbk DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN PERUBAHAN DEFISIENSI MODAL KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL  
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAKRIE TELECOM Tbk AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN CAPITAL DEFICIENCY  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

(Figure in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan / Notes	Defisiensi Modal yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Capital Deficiency Attributable to Owner of the Parent										Defisiensi Modal - Neto / Capital Deficiency - Net	
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid Shares	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Saham Beredar yang Diperoleh Kembali / Treasury Stock	Agio Saham Beredar yang Diperoleh Kembali / Premium on Treasury Stock	Agio Saham yang Dikonversi dari Hutang/ Premium on Conversion Stock	Cadangan Modal Lainnya / Other Capital Reserves	Defisit / Deficit	Total / Total	Kepentingan Nonpengendali / Non-controlling Interest			
Saldo 1 Januari 2017 dilaporkan sebelumnya	3.633.609	2.488.014	(11.000)	50.623	-	7.171	(20.065.744)	(13.897.327)	(221)	(13.897.548)	Balance as of January 1, 2017 as previously reported	
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(1.496.482)	(1.496.482)	-	(1.496.482)	Net loss for the year	
Konversi saham	618.933	-	-	-	-	-	-	618.933	-	618.933	Stock conversion	
Agio konversi saham	-	-	-	-	618.931	-	-	618.931	-	618.931	Premium on stock conversion	
Tambahan modal disetor	-	857	-	-	-	-	-	857	-	857	Additional paid in capital	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:											Other comprehensive income for the year:	
Pengkukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	-	(94)	-	(94)	-	(94)	Remeasurement gain on employee benefits liability	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)	-	(2)	Exchange differences due to financial statements translation	
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	-	-	(19)	-	(19)	-	(19)	Related income tax	
<b>Saldo 31 Desember 2017</b>	<b>4.252.542</b>	<b>2.488.871</b>	<b>(11.000)</b>	<b>50.623</b>	<b>618.931</b>	<b>7.056</b>	<b>(21.562.226)</b>	<b>(14.155.203)</b>	<b>(221)</b>	<b>(14.155.424)</b>	<b>Balance as of December 31, 2017</b>	
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(720.575)	(720.575)	-	(720.575)	Net loss for the year	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:											Other comprehensive income for the year:	
Pengkukuran kembali laba atas liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	-	806	-	806	-	806	Remeasurement gain on employee benefits liability	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	-	(544.111)	-	(544.111)	-	(544.111)	Exchange differences due to financial statements translation	
Perubahan kepentingan non- pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	Changes in non-controlling interest	
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>4.252.542</b>	<b>2.488.871</b>	<b>(11.000)</b>	<b>50.623</b>	<b>618.931</b>	<b>(536.249)</b>	<b>(22.282.801)</b>	<b>(15.419.083)</b>	<b>(160)</b>	<b>(15.419.243)</b>	<b>Balance as of December 31, 2018</b>	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk**  
**DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk**  
**AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017**  
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	8.433	8.176	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya	(42.747)	(4.304)	Cash paid to suppliers and other operating activities
Pembayaran kepada karyawan	(21.806)	(17.517)	Cash paid to employees
Pembayaran beban keuangan	(13)	(32)	Payment of financing charges
Pembayaran pajak	(174)	(28.105)	Payment of taxes
Penerimaan bunga	3	9	Receipt of interest
Penerimaan lainnya	56.334	39.987	Others receipt
	<u>30</u>	<u>(1.786)</u>	
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi			Net Cash Flows Used in Operating activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pembelian aset tetap	(73)	(75)	Purchased fixed assets
Pembayaran akuisisi anak Perusahaan	-	-	Payment acquisition Subsidiaries
	<u>(73)</u>	<u>(75)</u>	
Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi			Net cash Flows Used in Investing Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	-	-	<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
<b>PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(43)</b>	<b>(1.861)</b>	<b>NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>EFEK PERUBAHAN NILAI KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>350</b>	<b>2.211</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>310</b>	<b>350</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See the accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1 . UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Bakrie Telecom Tbk (dahulu PT Radio Telepon Indonesia) ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1993 dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris No. 94 oleh Muhani Salim, SH., sebagaimana diperbaiki dengan Akta Notaris Pembetulan No. 13 tanggal 5 November 1993 dan diubah dengan Akta Notaris No. 129 tanggal 27 November 1993, keduanya dibuat oleh Abdurachman Kadir, SH., Notaris pengganti dari Muhani Salim, SH.

Status Perusahaan mengalami perubahan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana tertuang dalam resolusi para pemegang saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 6 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat oleh Agus Madjid, SH. Dimana perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No. C-03880 HT.01.04.TH.2006, tanggal 13 Februari 2006.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi penyediaan jaringan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi nasional dengan daerah operasi mencakup Jakarta, beberapa wilayah di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Wisma Bakrie, Lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan. Perusahaan memulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 November 1995.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 11 Agustus 2008, ruang lingkup kegiatan Perusahaan telah diperluas yang meliputi; merencanakan, membangun dan menyewakan sarana/fasilitas telekomunikasi, melaksanakan kegiatan pemasaran dan penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, melakukan pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana telekomunikasi, serta memperdagangkan perangkat/produk telekomunikasi.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sehubungan dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan modal dasar ditempatkan Perusahaan, yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 29 Mei 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 dan No. 28 masing-masing tertanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH.

**1 . GENERAL**

**a. Company Establishment**

*PT Bakrie Telecom Tbk (previously PT Radio Telepon Indonesia) (the "Company") was established in the Republic of Indonesia on August 13, 1993 within the framework of the Domestic Investment Law No. 6 Year 1968, as amended by Law No. 12 Year 1970 based on Notarial Deed No. 94, of Muhani Salim, SH., as amended by Amendment Notarial Deed No. 13 dated November 5, 1993 and amended by Notarial Deed No. 129 dated November 27, 1993, both made of Abdurachman Kadir, SH., substitute of Notary Muhani Salim, SH.*

*The Company's status was changed to that of a public company through the resolutions of the Company's shareholders as notarized by Deed No. 6 of Agus Madjid, SH., dated February 3, 2006. This change was reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and was accepted and recorded by the Directorate General of General Law Administration per letter No. C-03880 HT.01.04.TH.2006 dated February 13, 2006.*

*The scope of activities of the Company comprises the provision of fixed digital radio cellular telecommunication national network and services. The Company's operational areas are located in Jakarta, certain regions in West Java, Banten, Central Java, East Java, Bali, Sumatra, Sulawesi and Kalimantan. The Company is domiciled in Jakarta with its head office located at Wisma Bakrie, 3rd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, South Jakarta. The Company started its commercial operations on November 1, 1995.*

*Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting held on August 11, 2008, the scope of activities of the Company was modified to comprise; planning, development and lease of telecommunication equipment/ facilities, marketing and sales activities of telecommunication network and/ or services, maintenance, research and development of telecommunication facilities, and selling of telecommunication products/ utilities.*

*The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment in relation to the Company's Articles of Association that have been adapted to the Financial Services Authority (OJK) rules and the increase of authorized capital issued was based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 29, 2015, as stated in Deed of Resolution No. 27 and No. 28 which dated June 22, 2015 made before Lenny Janis Ishak, SH, Notary.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1 . UMUM (Lanjutan)**

Perubahan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana tertuang dalam surat No.AHU-0940316.AH.01.02. TAHUN 2015 dan diumumkan dalam Berita Negara No.98 Tambahan No. 43892 tanggal 6 November 2015, tanggal 7 Agustus 2015.

Pada tanggal 10 Oktober 2016, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1765 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 298/KEP/M.KOMINFO/6/2007 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas PT. Bakrie Telecom Tbk.

Sejalan dengan Surat pencabutan ijin tersebut, Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas PT. Bakrie Telecom Tbk dihentikan.

Pada tanggal 17 Oktober 2016, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 59/KEP/M.KOMINFO/02/2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional PT. Bakrie Telecom Tbk.

Sejalan dengan Surat pencabutan ijin tersebut, Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional PT. Bakrie Telecom Tbk. dihentikan.

Pada tanggal 7 November 2016, diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 213 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 184/DIRJEN/2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Pusat Layanan Informasi PT. Bakrie Telecom Tbk.

Sejalan dengan Surat pencabutan ijin tersebut, Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Pusat Layanan Informasi PT. Bakrie Telecom Tbk dihentikan.

Pada tanggal 9 November 2016, diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 195/DIRJEN/2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) PT. Bakrie Telecom Tbk.

**1 . GENERAL (Continued)**

*This change was reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and was accepted and recorded by the Directorate General of General Law Administration per letter No. AHU-0940316.AH.01.02. TAHUN 2015 and was published in the State Gazette No. 89, Supplement No. 43892 dated November 6, 2015. dated August 7, 2015.*

*On October 10, 2016, The government issued the Ministry of Communication and Information Decree No. 1765 Year 2016 that revoked the Ministry of Communication and Information Decree Number 298/KEP/M.KOMINFO/6/2007 concerning Operational License of Local Fixed Wireless Network of PT. Bakrie Telecom Tbk.*

*In line with the Ministry Decree, the operation of Local Fixed Wireless Network with limited mobility services of PT. Bakrie Telecom Tbk. was terminated.*

*On October 17, 2016, The government issued the Ministry of Communication and Information Decree No. 145 Year 2016 that revoked the Ministry of Communication and Information Decree Number 59/KEP/M.KOMINFO/02/2009, concerning Operational License of International Long Distance Fixed Network of PT. Bakrie Telecom Tbk.*

*In line with the Ministry Decree, the operation of International Long Distance Fixed Network Services of PT. Bakrie Telecom Tbk. was terminated.*

*On November 7, 2016, The government issued the Director General of Managing Post and Information Decree Number. 213 Year 2016 that revoked the Director General of Post and Telecommunication Decree Number 184/DIRJEN/2009 concerning Operational License of Call Center of PT. Bakrie Telecom Tbk.*

*In line with the that the Director General Decree, the operation of Call Center Services of PT. Bakrie Telecom Tbk. was terminated.*

*On November 9, 2016, The government issued the Director General of Managing Post and Information Decree Number. 235 Year 2016 that revoked the Director General of Post and Telecommunication Decree Number 195/DIRJEN/2010 concerning Operational License of Network Access Point Services of PT. Bakrie Telecom Tbk.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1 . UMUM (Lanjutan)**

Sejalan dengan Surat pencabutan ijin tersebut, Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet oleh PT. Bakrie Telecom Tbk dihentikan.

Pada tanggal 14 November 2016, diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 242 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 16/DIRJEN/2006 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) PT. Bakrie Telecom Tbk.

Sejalan dengan Surat pencabutan ijin tersebut, Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) oleh PT. Bakrie Telecom Tbk dihentikan.

Pada tanggal 26 September 2014, Perusahaan memperoleh persetujuan pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800 MHz PT Bakrie Telecom Tbk kepada PT Smartfren Telecom Tbk, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 932/KEP/M.KOMINFO/09/2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular.

Perusahaan tergabung dalam Kelompok Usaha

**b. Penawaran Umum Saham Perdana**

Pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan mencatat sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Penawaran Umum Perdana Saham Seri B Atas Nama Tahun 2005 sebanyak lima miliar lima ratus juta (5.500.000.000) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham.

Dalam rangka penawaran umum perdana ini, Perusahaan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak satu miliar seratus juta (1.100.000.000) lembar Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma yang menyertai seluruh saham Seri B atas nama. Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Seri B atas nama dengan harga pelaksanaan sebesar seratus tiga puluh lima rupiah (Rp135) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 3 Agustus 2006 sampai 2 Februari 2009.

Pada bulan Maret 2009, semua waran telah selesai dilaksanakan.

**1 . GENERAL (Continued)**

*In line with the that the Director General Decree, the operation of Network Access Point Services by PT. Bakrie Telecom Tbk. was terminated.*

*On November 14, 2016, The government issued the Director General of Managing Post and Information Decree Number. 242 Year 2016 that revoked the Director General of Post and Telecommunication Decree Number 16/DIRJEN/2006 concerning Operational License of Public Internet Telephony (VoIP) Services of PT. Bakrie Telecom Tbk.*

*In line with the that the Director General Decree, the operation of Public Internet Telephony (VoIP) Services by PT. Bakrie Telecom Tbk. was terminated.*

*On September 26, 2014, the Company obtained approval permits for transfer the radio frequency spectrum bandwidth 800 Mhz of PT Bakrie Telecom Tbk to PT Smartfren Telecom Tbk, based on Decision Letter of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 932/KEP/M.KOMINFO/09/2014 in respect to Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 30 Year 2014 concerning Settlement 800 MHz Radio Frequency Band the Purpose of Implementation of Cellular Mobile Network.*

*The Company is part of the Bakrie Group.*

**b. Initial Public Offering**

*On February 3, 2006, the Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) through an Initial Public Offering (IPO) of five billion five hundred million (5,500,000,000) registered Shares Series B in Year 2005 with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.*

*For the purposes of this public offering, the Company also simultaneously issued one billion one hundred million (1,100,000,000) Series I Warrants that were issued at no cost (naked warrants) accompanying the registered Series B shares. Series I Warrants gave the right to their holders to purchase Series B shares at an exercise price of one hundred and thirty-five rupiah (Rp135) per share, which could be exercised within the period of August 3, 2006 to February 2, 2009.*

*In March 2009, all warrants had been accomplished.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1 . UMUM (Lanjutan)**

Penawaran Umum Saham Perdana tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 September 2005 dan dituangkan dalam Akta Notaris No. 39 oleh Agus Madjid, SH.

**c. Penawaran Umum Terbatas (PUT)**

Pada tanggal 14 Februari 2008, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif dari Ketua Otoritas Jasa keuangan melalui surat No. S-944/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 atas Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua (8.638.079.352) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar seratus rupiah (Rp100) setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar tiga ratus lima puluh rupiah (Rp350). PUT tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Februari 2008 dengan Akta Notaris No. 38 oleh Agus Madjid, SH., dan pada tanggal 29 Februari 2008, PUT tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

**d. Pembelian kembali (buy-back) Saham**

Pada tanggal 15 Oktober 2008, Direksi menyetujui pembelian kembali saham yang beredar Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak satu koma satu triliun rupiah (Rp1,1 triliun) atau 20% dari modal disetor Perusahaan. Pembelian kembali saham tahap pertama akan dilakukan sebesar-besarnya seratus miliar rupiah (Rp100,0 miliar) dan pembelian kembali saham tahap kedua akan dilakukan sesuai dengan kemampuan, keperluan dan kondisi Perusahaan.

Pembelian kembali dilaksanakan dalam periode Oktober dan November tahun 2008, dimana sebanyak enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus (689.425.500) lembar saham telah dibeli kembali, dan pada tahun 2009, sebanyak lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus (579.425.500) lembar saham telah dijual kembali (Catatan 21).

**e. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD)**

Pada tanggal 22 Juni 2012 dan 29 Agustus 2012, Perusahaan menerbitkan saham Seri B dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham masing-masing sebesar lima ratus enam puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam (566.037.736) saham dan satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh (1.536.135.340) saham, untuk PT Bakrie Global Ventura, pihak berelasi melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) dengan harga pelaksanaan dua ratus enam puluh lima rupiah (Rp265) per saham.

**1 . GENERAL (Continued)**

*The IPO was approved by the Extraordinary Shareholders' General Meeting held on September 23, 2005 and notarized by Deed No. 39 of Agus Madjid, SH.*

**c. Rights Issue**

*On February 14, 2008, the Company obtained the notice of effectiveness from the Chairman of the Financial Services Authority per letter No. S-944/BL/2008 dated February 14, 2008 of its Rights Issue for a maximum of eight billion, six hundred thirty-eight million, seventy-nine thousand, three hundred fifty-two (8,638,079,352) Series B shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share which were offered at three hundred fifty rupiah (Rp350) per share. The Rights Issue, which was approved by the Extraordinary Shareholders' General Meeting held on February 15, 2008 and notarized by Deed No. 38 of Agus Madjid, SH., was listed on the Indonesia Stock Exchange on February 29, 2008.*

**d. Buy-Back of the Company's Shares of Stock**

*On October 15, 2008, the Board of Directors approved the buy-back of the Company's shares up to a maximum of one point one trillion rupiah (Rp1.1 trillion) or 20% of the paid-in capital of the Company. The buy-back of shares of stock in the first phase worth of up to one hundred billion rupiah (Rp100.0 billion) and the second phase of the balance will be carried out according to the availability, needs and condition of the Company.*

*The buy-back was undertaken during the period of October and November 2008, during which time six hundred eighty-nine million, four hundred twenty-five thousand, five hundred (689,425,500) shares were bought back, and in 2009, five hundred seventy-nine million, four hundred twenty-five thousand, five hundred (579,425,500) shares were reissued (Note 21).*

**e. Capital Stock Issuance Through Non-Preemptive Right (PMT-HMETD)**

*On June 22, 2012 and August 29, 2012, the Company issued Series B shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share amounting to five hundred sixty-six million, thirty-seven thousand, seven hundred thirty-six (566,037,736) shares and one billion, five hundred thirty-six million, one hundred thirty-five thousand, three hundred forty (1,536,135,340) shares, respectively, to PT Bakrie Global Ventura, a related party through Capital Stock Issuance Without Preemptive Right (PMT-HMETD) at an exercise price of two hundred sixty-five rupiah (Rp265) per share.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**f. Struktur Entitas Anak**

Pada tanggal 11 Maret 2010, berdasarkan Akta Notaris No. 03 dibuat oleh Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Bakrie Connectivity.

Ruang lingkup kegiatan Entitas Anak meliputi usaha perdagangan produk dan/atau perangkat telekomunikasi, jasa teknologi informasi, jasa penyedia dan pemanfaatan multimedia dan jasa pengadaan sumber daya manusia, telekomunikasi serta media cetak.

Pada tanggal 11 Maret 2010, berdasarkan Akta Notaris No. 04 dibuat oleh Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network). Perubahan nama Entitas Anak berdasarkan Akta Notaris No. 03 pada tanggal 9 September 2013. Pada tanggal 31 Desember 2015, Entitas Anak masih dalam tahap pengembangan.

Pada tanggal 19 April 2010, Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama Bakrie Telecom Pte., Ltd. Kantor Entitas Anak berlokasi di Singapura. Entitas Anak tidak memiliki kegiatan usaha lain selain memberikan jasa kepada Perusahaan dan memperoleh pendapatan dari jasa tersebut.

Pada tanggal 16 Juni 2016, berdasarkan Akta Notaris No. 09 dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, SH., M.Kn., Perusahaan mendirikan Entitas Anak yang bernama PT Anugerah Andalan Investama (AAI).

Ruang lingkup kegiatan AAI adalah meliputi perdagangan produk dan jasa berbasis internet, internet provider, jasa penyediaan sumber daya manusia, jasa televisi berbayar, jasa multimedia, dan jasa media cetak dan elektronik.

Pada tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Akta Notaris No 22 yang kemudian ditegaskan kembali dengan Akta Notaris No. 15 tanggal 24 Januari 2017 yang keduanya dibuat oleh Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, AAI telah mengambilalih saham-saham pada PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK).

Ruang lingkup kegiatan MKK adalah meliputi perdagangan barang dan jasa antara lain perdagangan alat-alat telekomunikasi, elektronik, jasa pembangunan instalasi telekomunikasi, industri barang-barang elektronik, jasa penerbitan dan desain grafis, jasa teknologi informasi dan internet konten serta jasa multimedia.

MKK adalah selaku pemegang saham pada PT. Layanan Prima Digital (LPD) berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 31 Agustus 2016 yang kemudian ditegaskan kembali melalui Akta Notaris No. 2 tanggal 28 Oktober 2016 yang keduanya dibuat oleh Firdhonal S.H.

**f. Structure of the Subsidiaries**

*On March 11, 2010, based on Notarial Deed No. 03, of Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., the Company established a Subsidiary, PT Bakrie Connectivity.*

*The scope of its Subsidiary activities consists of trading of products and/ or telecommunications equipment, services as information technology service providers, and the use of multimedia and human resources services, telecommunications and media.*

*On March 11, 2010, based on Notarial Deed No. 04, of Dheasy Suzanti, SH., M.Kn., the Company established a Subsidiary, PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network). The change in name of the Subsidiary was based on Notarial Deed No. 03 dated September 9, 2013. As of December 31, 2015, this Subsidiary is still under the development stage.*

*On April 19, 2010, the Company established a Subsidiary, Bakrie Telecom Pte., Ltd. The registered office of the Subsidiary is located in Singapore. The Subsidiary has no other business operation than to provide services to the Company and earns revenue from it.*

*On June 16, 2016, based on Notarial Deed no. 09 of Ervina Christina Sembiring, SH.,M.Kn. The Company established a Subsidiary, PT Anugerah Andalan Investama (AAI).*

*The scope of AAI consist of trading and services internet product, internet provider, human resources services, subscription television services, multimedia services, and printing and electronic media services.*

*On December 27, 2016, based on Notarial Deed No. 22 reaffirmed with Notarial Deed No. 15 dated January 24, 2017 of Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn, both of them, AAI has taken over PT. Mitra Kreasi Komunika (MKK) shares.*

*The scope of MKK consist of trading goods and services such as telecommunication equipment, electronic, develop telecommunication instalation, electronic goods, services publications and graphic design, information technology services, and internet content with multimedia services.*

*MKK as a shareholders at PT. Layanan Prima Digital (LPD) based on Notarial Deed No. 8 dated August 31, 2016 reaffirmed with Notarial Deed No.2 dated October 28, 2016 of Firdhonal S.H both of them.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1 . UMUM (Lanjutan)**

Ruang lingkup kegiatan LPD meliputi perdagangan barang-barang elektronik dan telekomunikasi serta peralatan Jaringan, penyediaan jasa internet dan multimedia, jasa televisi berbayar, jasa telekomunikasi, jasa publikasi dan penyiaran, jasa e-commerce dan jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa-jasa terkait lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan sebagai berikut (selanjutnya secara bersama-sama dengan Perusahaan disebut sebagai "Kelompok Usaha"):

**1 . GENERAL (Continued)**

The scope of LPD consist of trading electronic telecommunication goods with and network equipment, internet and multimedia services provider, subscription television services, telecommunication services, publication and broadcasting services, e-commerce services, and multimedia services and utilize through the telecommunication and others related services.

As of December 31, 2018 and 2017, the Company had ownership interest in Subsidiaries as follows (together with the Company hereinafter referred to as the "Group"):

Entitas Anak / Subsidiaries	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Bidang Usaha / Scope of Activities	Saat Dimulainya Kegiatan Usaha Komersial / Start of Commercial Operation	Domisili / Domicile	Total Aset Sebelum Eliminasi / Total Asset Before Elimination	
					2018	2017
<i>Kepemilikan Langsung / Direct Ownership :</i>						
PT Bakrie Connectivity	99,99	Perdagangan Telekomunikasi / Telecommunication Trading	2010	Indonesia	1	1
PT Bakrie Digital Net	99,80	Infrastruktur Telekomunikasi / Telecommunication Infrastructure	-	Indonesia	511	516
Bakrie Telecom Pte., Ltd	100,00	Entitas Bertujuan Khusus / Special Pupose Entity	2010	Singapura/ Singapore	9.415.349	8.216.541
PT Anugerah Andalan Investama	99,80	Perdagangan dan Jasa / Trading and Services	2016	Indonesia	9.173	9.304
<i>Kepemilikan Tidak Langsung / Indirect Ownership :</i>						
<i>Melalui / Through AAI</i>						
PT Mitra Kreasi Komunika	70,00	Perdagangan dan Jasa / Trading and Services	2016	Indonesia	8.650	9.668

**g. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit serta Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**g. Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee and Employees**

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2018 and 2017 was as follows:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1 . UMUM (lanjutan)**

**1 . GENERAL (continued)**

**2018 dan / and 2017**

<b>Dewan Komisaris</b>		<b>Board of Commissioners</b>
Komisaris Utama	Anindya Novyan Bakrie	President Commissioner
Wakil Komisiner Utama	Gafur Sulistyio Umar	Vice President Commissioner
Komisaris Independen	Ai Mulyadi Mamoer	Independent Commissioner
<b>Direksi</b>		<b>Board of Directors</b>
Direktur Utama	R. Bismarka Kurniawan	President Director
Wakil Direktur Utama	Jastiyo Abi	Vice President Director
Wakil Direktur Utama	Taufan Eko Nugroho Rotorasiko	Vice President Director
Direktur Independen	W. Mark Robson	Director
Direktur	Harya Mitra Hidayat	Director
Direktur	Andi Pravidia Saliman	

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*The composition of the Company's Audit Committee and the sole Corporate Secretary as of December 31, 2018 and 2017 was as follows:*

**2018 dan / and 2017**

<b>Komite Audit</b>		<b>Audit Committee</b>
Ketua	Ai Mulyadi Mamoer	Chairman
Anggota	Arydhian B Djamin	Member
Anggota	Dwi Winarno	Member
<b>Sekretaris Perusahaan</b>		<b>Corporate Secretary</b>
	Agustinus Harimurti	

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah karyawan Kelompok Usaha masing-masing adalah 6 dan 10 karyawan (tidak diaudit).

*As of December 31, 2018 and 2017, the Group had 6 and 10 employees, respectively (unaudited).*

**h. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian**

**h. Completion of the Consolidated Financial Statements**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2019.

*The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which have been authorized for issue by the Board of Directors on May 17, 2019.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan**

**a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements and Statement of Compliance**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

*The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies issued by the Financial Services Authority (OJK).*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, kecuali untuk penerapan pernyataan dan interpretasi baru dan revisi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2017 seperti yang diungkapkan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Penerapan dari perubahan standar akuntansi dan interpretasi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 dan relevan bagi perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan tahun berjalan:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 3 (revisi 2016) "Laporan Keuangan"
- PSAK 24 (revisi 2016) "Imbalan Kerja"
- PSAK 58 (revisi 2016) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK 60 (revisi 2016) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi"
- ISAK 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi perusahaan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas – Prakarsa Pengungkapan"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan – Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi"
- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*The accounting policies adopted in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with the accounting policies in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2014, except for the adoption of new and revised statements and interpretations effective January 1, 2017 as described in the related accounting policies.*

*The adoption of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from 1 January 2017 and relevant for Company, but did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year financial statements:*

- *Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements"*
- *PSAK 3 (revised 2016) "Financial Statements"*
- *PSAK 24 (revised 2016) "Employee Benefits"*
- *PSAK 58 (revised 2016) "Non-current Assets Held for Sale and Discounted Operation"*
- *PSAK 60 (revised 2016) "Financial Instruments: Disclosure"*
- *ISAK 31 "Interpretation on the scope of PSAK 13: Investment Property"*
- *ISAK 32 "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards"*

*New standards, amendments and interpretations issued and relevant for company but not yet effective for the financial year begin or after the date 1 January 2017 are as follows:*

- *Amendment to PSAK 16 "Fixed Asset"*
- *Amendment to PSAK 2 "Cash Flows Statement – Disclosure Initiative"*
- *Amendment to PSAK 46 "Taxation – Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealised Losses"*
- *Amendment to PSAK 62 "Insurance Contract"*
- *PSAK 71 "Financial Instrument"*
- *PSAK 72 "Revenue from Contract with Customers"*
- *PSAK 73 "Leases"*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Perseroan sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif disajikan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak tertentu.

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasi**

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian". Dengan diterbitkannya PSAK tersebut, PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" diubah namanya menjadi PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", dan juga menggantikan ISAK No. 7, "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus".

Penerapan PSAK No. 65 tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (investee), menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan investee.

Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*As at the authorisation date of these financial statements, the Company is reviewing the implication of the above standards, to its financial statements.*

*The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other basis described in the related accounting policies.*

*The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing and financing activities.*

*When the entity adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the entity reclassifies the items in its financial statements, the statements of financial position at the beginning of comparative period are presented.*

*The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company and its certain Subsidiaries.*

**b. Principles of Consolidation**

*Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 65, "Consolidated Financial Statements." With the issuance of such PSAK, PSAK No. 4 (Revised 2009), "Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements" was renamed to PSAK No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements," and ISAK No. 7, "Consolidation - Special Purpose Entities" was superseded.*

*The adoption of PSAK No. 65 has no impact in the Group's consolidated financial statements.*

*An entity (the parent) that controls one or more other entities (subsidiaries) were present consolidated financial statements. Investors, apart of the nature of its involvement with an entity (investee), determine whether the investor is a parent by assessing whether the investor controls the investee.*

*An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Dengan demikian, investor mengendalikan investee jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas investee;
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga (3) elemen pengendalian.

Konsolidasi atas investee dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investee dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investee.

Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang:

- (a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
- (b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- (c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar.

Entitas induk yang adalah entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*Therefore, the investor controls the investee if and only if the investor has all of the following:*

- (a) power over the investee;*
- (b) exposure or rights to variable returns from its involvement with the investee; and*
- (c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's returns.*

*Investors reassess whether the investor controls the investee if facts and circumstances indicate that one or more of the three (3) control elements have changed.*

*Investee is consolidated from the date of the investor obtains control of investee and continues to be consolidated until the date that such control ceases.*

*A parent determines whether the parent entity is an investment entity. An investment entity is an entity that:*

- (a) obtains funds from one or more investors for the purpose of providing investment management services;*
- (b) its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and*
- (c) measures and evaluates the performance of its investments on a fair value basis.*

*A parent that is an investment entity measures its investments in particular subsidiaries at fair value through profit or loss.*

*Non-controlling interest represents a portion of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.*

*Total comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.*

*All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- (a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau (jika sesuai) biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- (c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

**c. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

**d. Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai "Kas yang Dibatasi Penggunaannya." Kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban jatuh tempo dalam satu (1) tahun, disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Rekening bank dan deposito berjangka lainnya yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai aset tidak lancar.

**e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi**

Kelompok Usaha mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*If a parent loses control of a subsidiary, the parent:*

- (a) derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statements of financial position.
- (b) *recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost, and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset or, when appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture.*
- (c) *recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.*

**c. Cash and Cash Equivalents**

*Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within three (3) months or less and not pledged as collateral nor restricted in use.*

**d. Restricted Cash**

*Cash in banks and time deposits, which are restricted in use, are presented as "Restricted Cash." Restricted cash to be used to pay currently maturing obligations that are due within one (1) year are presented under current assets. Other current accounts and time deposits that are restricted in use are presented under non-current assets.*

**e. Transaction with Related Parties**

*The Group discloses transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures."*

*The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.*

*All significant transactions with related parties whether or not conducted under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

**f. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (lower of cost or net realizable value), dimana biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir tahun.

**g. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**h. Aset Tetap**

Kelompok Usaha telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	<b>Masa Manfaat / Economic Life Tahun / Years</b>	<b>Penyusutan / Percentage of Depreciation</b>	
Bangunan	20	20	Building
Peralatan telekomunikasi	5	5	Telecommunication equipment
Fasilitas telekomunikasi	5	5	Telecommunication facilities
Peralatan pengangkutan	5	5	Transportation equipment
Peralatan dan perabot kantor	4-5	4-5	Office equipment and fixtures
Aset sewaan	10	10	Leased assets

Masa manfaat ekonomis aset tetap dan metode depresiasi ditelaah, dan disesuaikan jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Kelompok Usaha mengestimasi taksiran sisa manfaat ekonomis peralatan dan fasilitas telekomunikasi menjadi lima (5) tahun. Sebelum tahun 2014, masa manfaat aset tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun.

Tanah dinyatakan sebesar nilai perolehan dan tidak disusutkan.

Aset dalam pengerjaan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**f. Inventories**

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by the weighted-average method. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

**g. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

**h. Fixed Asset**

The Group has chosen the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful lives of the assets. Estimated useful lives of the assets are as follows:

The fixed assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted if appropriate, at each end of the reporting period.

As of December 31, 2015 and 2014, the Group estimated the remaining useful life of telecommunication equipment and facilities to be five (5) years. Prior 2014, the useful lives of those assets were 10 (ten) years.

Land is stated at cost and is not depreciated.

Assets under construction are stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**i. Sewa**

Sewa yang mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada lessee diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, sewa pembiayaan dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan pada laba rugi. Aset sewaan yang dimiliki oleh lessee dengan dasar sewa pembiayaan dicatat pada akun aset tetap dan disusutkan sepanjang masa manfaat dari aset sewaan tersebut atau periode masa sewa, mana yang lebih pendek, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Dalam hal transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**j. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan**

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

PSAK No. 48 (Revisi 2014) menitikberatkan pada pengungkapan atas nilai terpulihkan untuk aset nonfinansial. Pernyataan yang direvisi mensyaratkan pengungkapan informasi tambahan jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.*

**i. Lease**

*Leases that transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item to the lessee are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or at the present value of the minimum lease payments if the present value is lower than the fair value. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recorded in profit or loss. Leased assets held by the lessee under finance leases are included in fixed assets and depreciated over the estimated useful life of the assets or the lease term, whichever is shorter, if there is no reasonable certainty that lessee will obtain ownership by the end of the lease term.*

*In the case of sale and leaseback results in a finance lease, this is to be treated as two separate transactions, i.e. sale and lease. The excess of sales proceeds over the carrying amount is deferred and amortized over the lease term.*

*Leases that do not transfer substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.*

**j. Impairment of Non-Financial Assets**

*Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets."*

*PSAK No. 48 (Revised 2014) focuses on the recoverable amount disclosures for non-financial assets. The revised statement requires additional disclosure of information if the recoverable amount represents the fair value less costs of disposal.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan selain goodwill, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dibalik lagi.

**k. Biaya Pinjaman**

Biaya pinjaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi tertentu terhadap pengeluaran untuk aset kualifikasian tersebut.

**l. Jaminan**

Jaminan merupakan uang jaminan yang dibayarkan untuk sewa lokasi untuk menara Base Transceiver Stations (BTS), sewa gedung kantor dan apartemen sesuai dengan perjanjian dan akan dikembalikan pada saat berakhirnya periode sewa.

**m. Segmen Operasi**

Pembuat keputusan operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perusahaan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*The Group evaluates at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.*

*Reversal on impairment loss for non-financial assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized on profit or loss, except for assets that presented using the revaluation model in accordance with other PSAK. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.*

**k. Borrowing Costs**

*Borrowing costs, either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.*

*For borrowings that are not specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying asset.*

**l. Security Deposits**

*Security deposits represent guarantee for field rental of Base Transceiver Stations (BTS), office building rent and apartment rent in accordance with the agreements, which will be returned at the end of the rental period.*

**m. Operating Segment**

*The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board of Directors reviews the Company's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports.*

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan. Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa CDMA Mobile dan jaringan telekomunikasi kepada para pelanggan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 20 dan 32).

**n. Saham Beredar Yang Diperoleh Kembali**

Saham beredar yang diperoleh kembali (treasury stock) untuk dikeluarkan lagi di kemudian hari dicatat dengan metode nilai nominal atau par value method. Berdasarkan metode ini, saham beredar yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominalnya dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Apabila saham beredar yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun tambahan modal disetor akan disesuaikan. Selisih lebih harga perolehan dari harga penerbitannya akan dikoreksi ke saldo laba.

**o. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak penjualan (PPN).

**Pendapatan Jasa Telekomunikasi**

Untuk pelanggan pasca bayar, pendapatan dari jasa penyambungan diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan sedangkan pendapatan pulsa serta pendapatan bulanan diakui pada saat terjadinya.

Pendapatan kartu pra bayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana dan kartu pulsa isi ulang diakui sebagai berikut:

- \* Penjualan kartu perdana diakui sebagai pendapatan saat penyerahan kepada agen penjual atau penjualan langsung kepada pelanggan akhir.
- \* Penjualan kartu pulsa isi ulang (pra bayar) diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan diakui secara proporsional sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat kartu telah habis masa berlakunya.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*The Board of Directors considers the business from the return of invested capital perspective. Total assets are managed on a central basis and are not allocated. The Company operates and manages the business in a single segment that provides CDMA Mobile and telecommunications network services to its customers. Further details are disclosed in (Notes 20 and 32).*

**n. Treasury Stock**

*Re-acquisition of capital stock to be held as treasury stocks for future reissuance is accounted for under the par value method. Under this method, treasury stock is presented at par value as a reduction from the capital stock account. If the treasury stock had been originally issued at a price above par value, the related additional paid-in capital account is adjusted. Any excess of the reacquisition cost over the original issuance price is treated as an adjustment to retained earnings.*

**o. Revenue and Expense Recognition**

*Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and sales taxes (VAT).*

**Telecommunication Services**

*For post-paid subscribers, revenues from connection services are recognized as income at the time the connections take place, while usage airtime and monthly subscription charges are recognized when earned.*

*Revenues from pre-paid cards, which consist of sale of starter packs and pulse reload vouchers, are recognized as follows:*

- \* Starter pack sales are recognized as revenue upon delivery of starter packs to dealers or directly to customers.
- \* Pulse reload vouchers (pre-paid) sales are initially recorded as unearned revenue and then proportionally recognized as usage revenue based on successful calls made by the subscribers or whenever the unused stored value of the voucher has expired.

2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)

**Pendapatan Interkoneksi**

Pendapatan dari interkoneksi, yang didasarkan pada perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional, diakui berdasarkan trafik sebenarnya yang tercatat dan disajikan sebesar pendapatan bruto (gross).

**Pendapatan Lain-lain**

Pendapatan jasa lainnya diakui pada saat penyerahan jasa tersebut.

**Beban**

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

**p. Imbalan Kerja**

Kelompok Usaha menentukan liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("Undang-undang") tanggal 25 Maret 2003. PSAK No. 24 (Revisi 2013) mensyaratkan entitas menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:

- (a) keuntungan dan kerugian aktuarial;

2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)

**Interconnection Revenues**

Revenues from network interconnection, which are based on agreements with other domestic and international telecommunication carriers are recognized based on the actual recorded traffic and are presented on a gross basis.

**Other Revenues**

Revenues from other services are recognized when the services are rendered.

**Expenses**

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

**p. Employee Benefits**

The Group determines its employee benefits liabilities under the Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 ("the Law"). PSAK No. 24 (Revised 2013) requires the present value of the defined benefit obligation, the related current service cost, and past service cost to be determined using the "Projected Unit Credit" method.

When an entity has a surplus in a defined benefit plan, an entity measures the defined benefit asset at the lower amount between the surplus of defined benefit plan and the upper limit on assets that determined using a discount rate.

An entity recognizes the components of defined benefit cost, except SAKs require or permit such costs as the acquisition cost of the asset, as follows:

- (a) service cost in profit or loss;
- (b) net interest on net liability (asset) of defined benefits in profit or loss; and
- (c) remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit in other comprehensive income.

Remeasurement on net liability (asset) of defined benefits that is recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in subsequent periods. However, the entity may transfer the amounts recognized as other comprehensive income in another account in equity.

Remeasurement the net liability (asset) of defined benefits consists of:

- (a) actuarial gains and losses;

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

(b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan

(c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

Kelompok Usaha mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi. Kurtailmen dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian operasi, atau terminasi atau penghentian program. Sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, Kelompok Usaha mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amandemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

**q. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Pembukuan Entitas Anak tertentu diselenggarakan dalam mata uang asing. Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Entitas Anak pada tanggal pelaporan dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang pelaporan, dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan penghasilan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Selisih kurs yang terjadi diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada akun "Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan".

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

(b) return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and

(c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

*The entity recognizes past service cost as an expense in an earlier of when the amendments or curtailment of program occurs and when the entity recognizes related restructuring costs or severances.*

*The Group recognizes gains or losses on the settlement of defined benefit plan when it occurs. A curtailment occurs when an entity make a material reduction in the number of employees covered by a plan; or amending the terms of a defined benefit plan so a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits. A curtailment may arise from an isolated event, such as the closing of a plant, discontinuance of an operation or termination or suspension of a plan. Before determining the past service cost, gains or losses on the settlement, the Group shall remeasure the net liability (asset) of defined benefits using current fair value of plan assets and current actuarial assumptions (including current market interest rates and other current market prices) which reflects the rewards offered in the program prior to amendment, curtailment or settlement program.*

**q. Foreign Currency Transactions and Balances**

*Transactions in foreign currencies are translated into functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to functional currency to reflect the middle exchange rate published by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the period. Gains or losses resulted from such adjustment or settlement of each monetary asset and liability denominated in foreign currencies are credited or charged as current period profit or loss.*

*The books of accounts of certain Subsidiaries are maintained in foreign currencies. For consolidation purposes, assets and liabilities of the Subsidiaries at the reporting date are translated into Rupiah, which is the presentation currency, using the exchange rates at that date, while income and expenses are translated at the transaction rates of exchange. Resulting translation adjustments are recognized in other comprehensive income under "Exchange Differences due to Financial Statements Translation" account.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>
Dolar AS	14.481
Dolar Singapura	10.603

**r. Pajak Penghasilan**

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK revisi ini tidak berdampak dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

The closing exchange rates used as of December 31, 2018 and 2017 were as follows:

	<u>2017</u>	
	13.548	US Dollar
	10.134	Singapore Dollar

**r. Income Taxes**

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes." The adoption of this revised PSAK has no impact in the Group's consolidated financial statements.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period.

Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that sufficient future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Kelompok Usaha mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

**s. Laba atau Rugi per Saham**

Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

**t. Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

*Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Group, when the result of the objection and/or appeal is determined.*

**s. Earnings or Losses per Share**

*Basic earnings or losses per share are calculated by dividing profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.*

**t. Provisions and Contingencies**

*Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

*Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.*

2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)

u. Instrumen Keuangan

1. Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi yang pada awalnya diukur dengan nilai wajar. Klasifikasi aset keuangan antara lain sebagai aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang atau aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS). Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awal dan, sepanjang diperbolehkan dan diperlukan, ditelaah kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengakuan Selanjutnya

- \* Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

- \* Investasi HTM

Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Kelompok Usaha mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)

u. Financial Instruments

1. Financial Assets

Initial Recognition

Financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss which are initially measured at fair value. Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL), held-to-maturity (HTM) investments, loans and receivables or available-for-sale (AFS) financial assets. The Group determines the classification of their financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each end of reporting period.

Subsequent measurement

- \* Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL where the financial assets are either held for trading or they are designated as FVTPL at initial recognition. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at FVTPL are carried on the consolidated statements of financial position at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. The gains or losses recognized in profit or loss include any dividend or interest earned from the financial assets.

- \* HTM investments

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Group has the positive intention and ability to hold them to maturity. Gains or losses are recognized in profit or loss when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

\* Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

\* Aset keuangan AFS

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Akan tetapi, bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas (12) bulan dari tanggal pelaporan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah aset keuangannya mengalami penurunan nilai.

\* Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka jumlah kerugian tersebut, yang diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif yang dihitung saat pengakuan awal aset tersebut, diakui pada laba rugi.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

\* Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted on an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest method, less any impairment. Gains or losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

\* AFS financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial recognition, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses being recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and gains or losses due to changes in exchange rates, until the financial assets are derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously reported in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustments. However, interest is calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss. These financial assets are classified as non-current assets unless the intention is to dispose of them within twelve (12) months from the reporting date.

Impairment of financial assets

*The Group evaluates at the end of each reporting period whether any of their financial asset is impaired.*

\* Financial assets measured at amortized cost

If there is objective evidence of impairment, the amount of loss, which is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not been incurred) discounted at the effective interest rate computed at initial recognition of the asset, is recognized in profit or loss.

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

**\* Aset keuangan AFS**

Jika terdapat bukti obyektif bahwa aset AFS mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Kelompok Usaha mengalihkan aset keuangan, maka Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana Kelompok Usaha tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

**2. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

Pengakuan Awal

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Instrumen utang dan ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau sebagai derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha dicatat sebesar hasil yang diperoleh, dikurangi biaya penerbitan instrumen ekuitas.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**\* AFS financial assets**

If there is objective evidence that an AFS financial asset is impaired, the cumulative loss previously recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustments even though such financial asset is not derecognized.

Derecognition of financial assets

The Group derecognizes financial assets if, and only if, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but assumes a contractual obligation to pay those cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Group transfers a financial asset, it evaluates the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset.

**2. Financial Liabilities and Equity Instruments**

Initial Recognition

The Group determines the classification of their financial liabilities at initial recognition. Debt and equity instruments are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at FVTPL, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN**  
(lanjutan)

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen sejenis yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, dipisahkan antara liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen liabilitas diestimasi dengan menggunakan suku bunga yang berlaku di pasar untuk instrumen non-convertible yang serupa.

Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas dengan dasar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan liabilitas tersebut berakhir melalui konversi atau pada tanggal instrumen jatuh tempo. Komponen ekuitas ditentukan dengan cara mengurangi jumlah komponen liabilitas dari keseluruhan nilai wajar instrumen keuangan majemuk. Jumlah tersebut diakui dan dicatat dalam ekuitas.

Pengukuran selanjutnya

(a) Liabilitas keuangan FVTPL

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada FVTPL. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali liabilitas derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dinyatakan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi termasuk bunga yang dibayar atas liabilitas keuangan.

(b) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

Compound financial instruments, a bond or similar instrument convertible by the holder into a fixed number of ordinary shares, are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. At the date of issuance of compound financial instruments, the fair value of the liability component is estimated using the prevailing market interest rate for a similar non-convertible instrument.

This amount is recorded as a liability on an amortized cost basis using the effective interest method until extinguished upon conversion or at the instrument's maturity date. The equity component is determined by deducting the amount of the liability component from the fair value of the compound financial instruments as a whole. This amount is recognized and included in equity.

Subsequent measurement

(a) Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL. Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. The gains or losses recognized in profit or loss incorporate any interest paid on the financial liabilities.

(b) Financial liabilities measured at amortized cost

After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Kelompok Usaha dilepaskan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

**3. Instrumen Derivatif**

Instrumen derivatif dicatat pada pengakuan awal sebesar nilai wajar pada tanggal perjanjian derivatif ditandatangani dan diukur kembali setiap akhir periode laporan. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajar positif dan liabilitas keuangan saat nilai wajar negatif.

Derivatif melekat disajikan dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang mencerminkan penyajian yang memadai atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan. Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan atau kontrak awal diperlakukan sebagai derivatif yang berbeda saat risiko dan karakteristiknya tidak saling berhubungan dengan kontrak utamanya dan kontrak utama tersebut tidak diukur dengan nilai wajar serta perubahan pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa periode jatuh tempo dari instrumen tersebut lebih dari dua belas (12) bulan dan tidak diharapkan untuk direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui sebagai laba tahun berjalan, kecuali seluruh persyaratan khusus (contoh, dokumen formal, penetapan dan pengukuran keefektifan transaksi) untuk diakui sebagai "Penghasilan Komprehensif Lainnya" sesuai dengan tipe akuntansi lindung nilai tertentu terpenuhi.

Seluruh instrumen derivatif Kelompok Usaha tidak memenuhi kriteria khusus untuk akuntansi lindung nilai, dan oleh karenanya, tidak ditentukan sebagai transaksi lindung nilai untuk tujuan akuntansi.

**4. Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*Derecognition of financial liabilities.*

*The Group derecognizes financial liabilities if, and only if, the Group's obligations are discharged, cancelled or expire.*

**3. Derivative Instruments**

*Derivative instruments are initially recognized at fair value as at the date a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured to their fair value at each end of reporting period. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities*

*Embedded derivative is presented with the host contract on the consolidated statements of financial position which represents an appropriate presentation of overall future cash flows for the instrument taken as a whole. Derivatives embedded in other financial instruments or other host contracts are treated as separate derivatives when their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value, with changes in fair value recognized in profit or loss.*

*A derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than twelve (12) months and it is not expected to be realized or settled within twelve (12) months.*

*Gains or losses arising from changes in the fair value of the derivative instrument be recognized currently in earnings, unless meeting all the specific requirements (i.e., formal documentation, designation and assessment of the effectiveness of the transaction) to allow deferral as "Other Comprehensive Income" under certain types of hedge accounting.*

*None of the derivative instruments of the Group qualifies the specific criteria for hedge accounting, and therefore, are not designated as hedges for accounting purposes.*

**4. Offsetting of financial instruments**

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.*

2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)

5. Instrumen keuangan yang diukur pada biaya  
perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

6. Pengukuran Nilai Wajar

PSAK No. 68 bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan mengurangi kompleksitas dengan memberikan definisi yang tepat dari nilai wajar dan sumber tunggal pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan untuk digunakan di seluruh PSAK. Persyaratan ini tidak memperluas penggunaan akuntansi nilai wajar namun memberikan pedoman tentang bagaimana hal tersebut diterapkan ketika penggunaannya sudah disyaratkan atau diizinkan oleh pernyataan lain dalam PSAK. Akibatnya, pedoman dan persyaratan yang berkaitan dengan pengukuran nilai wajar yang sebelumnya terletak di PSAK lain kini telah dipindahkan ke PSAK No. 68. PSAK No. 68 tidak berpengaruh material pada pengukuran nilai wajar aset atau liabilitas Kelompok Usaha, dimana perubahannya terbatas pada penyajian dan pengungkapan, dan oleh karena itu tidak berdampak dalam posisi keuangan atau kinerja Kelompok Usaha.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian lain pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

(a) di pasar utama (principal market) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau

(b) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (most advantageous market) untuk aset atau liabilitas tersebut.

2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)

5. Financial instruments measured at amortized  
cost

*Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.*

6. Fair Value Measurement

*PSAK No. 68 aims to improve consistency and reduce complexity by providing a precise definition of fair value and a single source of fair value measurement and disclosure requirements for use across PSAKs. The requirements do not extend the use of fair value accounting but provide guidance on how it should be applied where its use is already required or permitted by other statements within PSAKs. As a result, the guidance and requirements relating to fair value measurement that were previously located in other PSAKs have now been relocated to PSAK No. 68. PSAK No. 68 did not materially affect any fair value measurements of the Group's assets or liabilities, with changes being limited to presentation and disclosure, and therefore has no effect on the Group's financial position or performance.*

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants in the principal (or most advantageous market) at the measurement date under current market conditions (i.e. an exit price) regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique at the measurement date.*

*A fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:*

*(a) in the principal market for the asset or liability;  
or*

*(b) in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)**

Kelompok Usaha mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (highest and best use) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Hirarki nilai wajar dikategorikan dalam tiga (3) level input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar, sebagai berikut:

- (a) Input Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- (b) Input Level 2 – input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (c) Input Level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Kelompok Usaha menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

**2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

*The Group measures the fair value of an asset or a liability using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.*

*A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.*

*The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.*

*Fair value hierarchy are categorized into three (3) levels the inputs to valuation techniques used to measure fair value, as follows:*

- (a) Level 1 inputs - quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.*
- (b) Level 2 inputs – inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.*
- (c) Level 3 inputs - unobservable inputs for the asset or liability.*

*For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.*

*The Group determines appropriate classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability, and the level of the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized.*

2 . IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN  
(lanjutan)

v. Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak

PSAK 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" memberikan pengaturan akuntansi atas aset dan liabilitas yang timbul dari pengampunan pajak, dimana entitas dapat memilih menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan SAK lain yang relevan dalam mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak atau menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 70.

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK ini dan telah melengkapi persyaratan mengenai informasi akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masu harus dibayarkan oleh Kelompok Usaha sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Kelompok Usaha untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Perusahaan.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan asset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui, Kelompok Usaha mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- (a) Tanggal SKPP;
- (b) Jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak sesuai SKPP;
- (c) Jumlah yang diakui sebagai liabilitas pengampunan pajak, (jika ada).

2 . SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)

v. Accounting for tax amnesty assets and liabilities

PSAK 70 "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities" sets the accounting treatment for assets and liabilities arising from tax amnesty, in which entity is allowed to choose between accounting policy as prescribed by other relevant SAKs in recognition, measurement, presentation, and disclosure of tax amnesty assets and liabilities, and accounting policy prescribed in PSAK 70.

The Group had adopting this PSAK and had completed the requirement regarding accounting for Tax Amnesty and Liabilities information.

Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Minister of Finance of Republic Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid in Capital.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Group according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

The redemption money paid by the Group to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Company receives SKPP.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classifications of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

With respect to tax amnesty assets and liabilities recognized, the Group disclose the following in its financial statements:

- (a) The date of SKPP;
- (b) Amount recognized as tax amnesty assets in accordance with SKPP;
- (c) Amount recognized as tax amnesty liabilities, (if any).

**3 . ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan masing-masing Entitas Anak termasuk, antara lain, mata uang:

- yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa,
- dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas,
- yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa,
- yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, dan
- yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Kelompok Usaha, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah (Rp), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Kelompok Usaha dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi utama dimana Kelompok Usaha beroperasi dan harga jual barang dalam mata uang Rupiah.

**3 . CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS**

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The Group based their assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

The following judgments, estimates and assumptions made by management in the process of applying the Group's accounting policies have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determining functional currency

*The factors considered in determining the functional currency of the Company and each of its Subsidiary include, among others, the currency:*

- *that mainly influences sales prices for goods and services;*
- *of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services;*
- *that mainly influences labor, material and other costs of providing goods or services;*
- *in which funds from financing activities are generated; and*
- *in which receipts from operating activities are usually retained.*

*Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Rupiah (Rp), as this reflected the fact that majority of the Group's businesses are influenced by primary economic environment in which the Group operates and sales prices for goods in Rupiah currency.*

3 . ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada (Catatan 2).

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Kelompok Usaha. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 29).

Menilai jumlah terpulihkan dari aset keuangan

Kelompok Usaha mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggannya tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 7).

Menilai jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

3 . CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS (continued)

Determining classification of financial assets and financial liabilities

*The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in (Note 2).*

Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments

*The Group records certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which require the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization were determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Group utilized different valuation methodology or assumption. Such changes would directly affect the Group's profit or loss. Further details are disclosed in (Note 29).*

Assessing recoverable amounts of financial assets

*The Group evaluates specific accounts receivable where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce their receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the provision for impairment. Further details are disclosed in (Note 7).*

Assessing recoverable amounts of non-financial assets

*Allowance for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical condition, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3 . ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

Jumlah terpulihkan aset tetap didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan (Catatan 9).

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara empat (4) sampai dengan dua puluh (20) tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 2h dan 9).

Pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha mengestimasi taksiran sisa manfaat ekonomis peralatan dan fasilitas telekomunikasi menjadi lima (5) tahun.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 26).

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan kerja. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 28).

**3 . CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS (continued)**

*The recoverable amounts of fixed assets is based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook and future cash flows associated with the assets. Estimated future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in adjustments to the provision of impairment already booked (Note 9).*

*Determining depreciation method and estimated useful lives of fixed assets*

*The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within four (4) to twenty (20) years. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in (Notes 2h and 9).*

*As of December 31, 2014, the Group estimated that the remaining useful life of telecommunication equipment and facilities to be five (5) years.*

*Determining income taxes*

*Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in (Note 26).*

*Estimate of pension cost and employee benefits*

*The determination of the Group's liabilities and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on their selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. While the Group believes that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect their employee benefits liability and expense. Further details are discussed in (Note 28).*

**3 . ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

Mengevaluasi perjanjian sewa

Kelompok Usaha menandatangani perjanjian sewa sebagai lessee. Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan apakah semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Kelompok Usaha. Sewa guna usaha dimana Kelompok Usaha memperoleh seluruh risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika sebaliknya maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Kelompok Usaha terlibat dalam berbagai proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasehat hukum Kelompok Usaha yang menangani proses hukum dan pajak tersebut. Kelompok Usaha mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada.

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi".

Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Kelompok Usaha tidak yakin bahwa proses-proses tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam (Catatan 30 dan 36).

**3 . CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS (continued)**

Evaluating lease agreements

*The Group has entered into lease agreements as lessee. The management exercises judgment in determining whether all significant risk and rewards of ownership of the leased property are transferred to the Group. Lease wherein the Group acquires all significant risks and rewards of ownership of the leased property is accounted for as finance lease; otherwise it is accounted for as operating lease.*

Evaluating provisions and contingencies

*The Group involved in various legal and tax proceedings. The management exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies mainly through consultation with the Group's legal counsel handling those proceedings. The Group sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any.*

*In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset."*

*The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.*

*As of December 31, 2018, the Group did not believe that those proceedings will have a significant adverse effect on the consolidated financial statements. Further details are discussed in (Notes 32 and 40).*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4 . KAS DAN SETARA KAS**

	<u>2018</u>
Kas	
Rupiah	19
Dolar AS	10
Total Kas	<u>29</u>
Kas di bank	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	142
PT Bank Permata Tbk	91
PT Bank Central Asia Tbk	1
PT Bank Bukopin Tbk	1
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp 20 juta)	11
Sub - total	<u>246</u>
<u>Dolar AS</u>	
PT Bank Permata Tbk	9
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp 20 juta)	27
Sub - total	<u>35</u>
<u>Dolar Singapura</u>	
Deutsche Bank indonesia	-
Total Kas di Bank	<u>281</u>
<b>Total</b>	<b><u>310</u></b>

Kas dan setara kas seluruhnya ditempatkan pada pihak ketiga.

**5 . INVESTASI JANGKA PENDEK**

Investasi jangka pendek merupakan penempatan deposito jangka pendek di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jangka waktu empat (4) sampai dengan dua belas (12) bulan dalam Rupiah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp48 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 . Tingkat bunga tahunan investasi jangka pendek di deposito berjangka adalah 6,00% - 6,75%.

**6 . KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA**

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 30 Agustus 2012 dan adendumnya tanggal 12 November 2012, dengan Credit Suisse (Singapura) Limited (CS), facility agent, Perusahaan melakukan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya di CS yang akan digunakan oleh Perusahaan untuk membayar angsuran pokok termasuk bunga pinjaman (Catatan 34). Pada tahun 2014, facility agent berubah dari CS menjadi Madison Pacific Trust Limited.

**4 . CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	<u>2017</u>	
		Cash on hand
		Rupiah
	19	US Dollar
	13	
Total Cash on Hand	<u>32</u>	
		Cash in banks
		<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	57	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	203	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	11	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	2	PT Bank Bukopin Tbk
Others (each below Rp 20 million)	12	Others (each below Rp 20 million)
Sub - total	<u>285</u>	Sub - total
		<u>US Dollar</u>
PT Bank Permata Tbk	8	PT Bank Permata Tbk
Others (each below Rp 20 million)	25	Others (each below Rp 20 million)
Sub - total	<u>33</u>	Sub - total
		<u>Singapore Dollar</u>
Deutsche Bank indonesia	-	Deutsche Bank indonesia
Total Cash in Banks	<u>318</u>	Total Cash in Banks
<b>Total</b>	<b><u>350</u></b>	<b>Total</b>

All cash and cash equivalents were placed with third parties.

**5 . SHORT-TERM INVESTMENTS**

Short-term investments represent placements of time deposits with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp nil and Rp48 million as of December 31, 2018 and 2017, respectively, with terms of four (4) to twelve (12) months and denominated in Rupiah with interest rates of 6.00% - 6.75% per annum.

**6 . RESTRICTED CASH**

In accordance with the credit agreement dated August 30, 2012 and amendment dated November 12, 2012, with Credit Suisse (Singapore) Limited (CS), facility agent, the Company made placement of restricted cash in CS that will be used for installment payment of principle including interest on the loan facility (Note 34). In 2014, the facility agent changed from CS to Madison Pacific Trust Limited.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6 . KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian perwalian dengan The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) sehubungan dengan penunjukan BNY Mellon sebagai wali amanat, agen pembayaran dan pelaku pendaftaran "11,50% Guaranteed Senior Notes due 2015" (selanjutnya disebut "Wesel Senior") (Catatan 14), penempatan kas yang dibatasi penggunaannya di BNY Mellon akan digunakan untuk membayar bunga pinjaman Wesel Senior.

Total kas yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp40,0 juta dan Rp38,0 juta.

**6 . RESTRICTED CASH (continued)**

Based on a trustee agreement with The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) appointing BNY Mellon as the trustee, paying agent and registrar of "11.50% Guaranteed Senior Notes due 2015" (thereafter referred to as the "Senior Notes") (Note 16), placement of restricted cash was made in BNY Mellon that will be used for the payment of interest on the Senior Notes.

The total outstanding balances of restricted cash as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp40.0 million and Rp38.0 million, respectively.

**7 . PIUTANG USAHA**

	<u>2018</u>
Jasa interkoneksi	16.932
Jasa telekomunikasi	<u>56.225</u>
<b>Total</b>	<b>73.157</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(72.204)</u>
<b>Neto</b>	<b><u>953</u></b>

Piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai

	<u>2018</u>
Rupiah	58.134
Dolar AS	<u>15.023</u>
<b>Total</b>	<b>73.157</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(72.204)</u>
<b>Neto</b>	<b><u>953</u></b>

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>
Sampai dengan 30 hari	-
Lebih dari 30 hari - 60 hari	-
Lebih dari 60 hari - 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	<u>953</u>
<b>Total</b>	<b><u>953</u></b>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha yang seluruhnya berdasarkan penilaian secara individual adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>
Saldo awal tahun	70.811
Penyisihan selama tahun berjalan	1.393
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b><u>72.204</u></b>

**7 . TRADE RECEIVABLES**

	<u>2017</u>	
	16.932	<i>Interconnection services</i>
	<u>56.132</u>	<i>Telecommunication services</i>
<b>Total</b>	<b>73.064</b>	<b>Total</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(70.811)</u>	<i>Less allowance for impairment loss</i>
<b>Neto</b>	<b><u>2.253</u></b>	<b>Net</b>

Trade receivables based on currencies are as follows:

	<u>2017</u>	
Rupiah	58.060	<i>Rupiah</i>
Dolar AS	<u>15.004</u>	<i>US Dollar</i>
<b>Total</b>	<b>73.064</b>	<b>Total</b>
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(70.811)</u>	<i>Less allowance for impairment loss</i>
<b>Neto</b>	<b><u>2.253</u></b>	<b>Net</b>

The aging schedule of trade receivables was as follows:

	<u>2017</u>	
Sampai dengan 30 hari	-	<i>Up to 30 days</i>
Lebih dari 30 hari - 60 hari	-	<i>Over 30 days - 60 days</i>
Lebih dari 60 hari - 90 hari	-	<i>Over 60 days - 90 days</i>
Lebih dari 90 hari	<u>2.253</u>	<i>Over 90 days</i>
<b>Total</b>	<b><u>2.253</u></b>	<b>Total</b>

Movements in the allowance for impairment loss of trade receivables which were wholly based on individual assessments were as follows:

	<u>2017</u>	
Saldo awal tahun	70.811	<i>Beginning balance for the year</i>
Penyisihan selama tahun berjalan	-	<i>Provision during the year</i>
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b><u>70.811</u></b>	<b>Ending Balance for the Year</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**7 . PIUTANG USAHA (lanjutan)**

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang usaha.

**8 . UANG MUKA**

Total uang muka pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 313,0 juta dan Rp 1.528,0 juta.

Uang muka operasional departemen merupakan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan.

**9 . ASET TETAP**

**7 . TRADE RECEIVABLES (continued)**

The management believed that allowance for impairment loss of receivables was adequate to cover impairment losses on uncollectible trade receivables.

**8 . ADVANCES**

The total outstanding balances of advances as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 313.0 million and Rp 1,528.0 million, respectively.

Advances operational department represents advances that have not yet been settled by the related department.

**9 . FIXED ASSETS**

		2018					
	Saldo 1 Januari / Balance as of January 1, 2018	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi / Reclassifications	Saldo 31 Desember / Balance as of December 31, 2018		
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Cost is</b>	
Pemilikan Langsung						Direct Ownership	
Tanah	276	-	-	-	276	Land	
Bangunan	12.674	-	-	-	12.674	Building	
Peralatan						Telecommunication	
telekomunikasi	11.636.422	-	-	-	11.636.422	equipment	
Fasilitas						Telecommunication	
telekomunikasi	1.408.240	-	-	-	1.408.240	facilities	
Peralatan pengangkut	13.725	-	-	-	13.725	Transportation equipment	
Peralatan dan perabot						Office equipment and	
kantoor	137.455	73	-	-	137.528	fixtures	
Total Biaya Perolehan	13.208.792	73	-	-	13.208.865	Total Acquisition Costs	
<b>Akumulasi</b>						<b>Accumulated</b>	
<b>Penyusutan</b>						<b>Depreciation</b>	
Pemilikan langsung						Direct Ownership	
Bangunan	11.959	498	-	-	12.457	Building	
Peralatan						Telecommunication	
telekomunikasi	8.609.065	-	-	-	8.609.065	equipment	
Fasilitas						Telecommunication	
telekomunikasi	598.267	-	-	-	598.267	facilities	
Peralatan pengangkut	13.081	631	-	-	13.712	Transportation equipment	
Peralatan dan perabot						Office equipment and	
kantoor	136.544	691	-	-	137.235	fixtures	
Total Akumulasi						Total Accumulated	
Penyusutan	9.368.916	1.820	-	-	9.370.736	Depreciation	
<b>Penurunan Nilai</b>						<b>Impairment of</b>	
<b>Aset Tetap</b>						<b>Fixed Assets</b>	
Peralatan						Telecommunication	
telekomunikasi	3.027.432	-	-	-	3.027.432	equipment	
Fasilitas						Telecommunication	
telekomunikasi	809.973	-	-	-	809.973	facilities	
Total Penurunan						Total Impairment of	
Nilai Aset Tetap	3.837.405	-	-	-	3.837.405	Fixed Assets	
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>2.471</b>				<b>724</b>	<b>Carrying Amounts</b>	

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9 . ASET TETAP (lanjutan)**

**9 . FIXED ASSET (continued)**

	2017				Saldo 31 Desember / Balance as of December 31, 2017	
	Saldo 1 Januari / Balance as of January 1, 2017	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi / Reclassifications		
<b>Biaya Perolehan</b>						<b>Cost is</b>
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Tanah	276	-	-	-	276	Land
Bangunan	12.674	-	-	-	12.674	Building
Peralatan						Telecommunication
telekomunikasi	11.636.422	-	-	-	11.636.422	equipment
Fasilitas						Telecommunication
telekomunikasi	1.408.240	-	-	-	1.408.240	facilities
Peralatan pengangkut	13.725	-	-	-	13.725	Transportation equipment
Peralatan dan perabot						Office equipment and
kantoor	137.380	75	-	-	137.455	fixtures
<b>Total Biaya Perolehan</b>	<b>13.208.717</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.208.792</b>	<b>Total Acquisition Costs</b>
<b>Akumulasi</b>						<b>Accumulated</b>
<b>    Penyusutan</b>						<b>    Depreciation</b>
Pemilikan langsung						Direct Ownership
Bangunan	9.177	2.782	-	-	11.959	Building
Peralatan						Telecommunication
telekomunikasi	7.726.255	698.293	-	184.517	8.609.065	equipment
Fasilitas						Telecommunication
telekomunikasi	672.552	110.232	-	(184.517)	598.267	facilities
Peralatan pengangkut	11.945	1.136	-	-	13.081	Transportation equipment
Peralatan dan perabot						Office equipment and
kantoor	135.075	1.469	-	-	136.544	fixtures
<b>Total Akumulasi</b>						<b>Total Accumulated</b>
Penyusutan	<b>8.555.004</b>	<b>813.912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.368.916</b>	Depreciation
<b>Penurunan Nilai</b>						<b>Impairment of</b>
<b>    Aset Tetap</b>						<b>    Fixed Assets</b>
Peralatan						Telecommunication
telekomunikasi	3.027.432	-	-	-	3.027.432	equipment
Fasilitas						Telecommunication
telekomunikasi	809.973	-	-	-	809.973	facilities
<b>Total Penurunan</b>						<b>Total Impairment of</b>
<b>Nilai Aset Tetap</b>	<b>3.837.405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.837.405</b>	<b>Fixed Assets</b>
<b>Jumlah Tercatat</b>	<b>816.308</b>				<b>2.471</b>	<b>Carrying Amounts</b>

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar Rp1.820 juta dan Rp813.913 juta.

Depreciation expense for years ended as of December 31, 2018 and 2017 was charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income amounting to Rp 1,820 million and Rp 813,913 million, respectively.

Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU, kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait (Catatan 35).

Based on the Amicable Settlement Agreement, creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables (Note 35).

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9 . ASET TETAP (lanjutan)**

Pada bulan Juni 2015, Perusahaan menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa. Oleh karena itu pada tahun 2015, seluruh aset sewaan telah dihapusbukukan.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdapat penurunan nilai atas aset tetap masing-masing sebesar nil dan yang disebabkan oleh indikasi keusangan teknologi dan keterbatasan kemampuan untuk menghasilkan arus kas.

**10 . ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

	<u>2018</u>
Jaminan pelunasan kewajiban pembayaran biaya frekuensi terutang (Catatan 34)	500.000
Lisensi (Catatan 16)	200.917
Jaminan pelunasan	-
Lain - lain	8.956
<b>Total</b>	<b><u>709.873</u></b>

Pada tanggal 14 Oktober 2010, Perusahaan dan Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, Ditjen Postal menandatangani Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio No. 2149/BA/DITFREK/10/2010 dilakukan untuk menghitung kembali biaya perijinan (BHP Frekuensi Radio) dengan melakukan klarifikasi antara data Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dari tahun 2006 sampai dengan pisah batas tanggal 30 September 2010, dan untuk menentukan apakah pembayaran tersebut sesuai dengan kebutuhan yang berlaku dengan penerapan formula yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk layanan CDMA berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2005 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BHP Frekuensi Radio".

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio sejak tahun 2006 sampai dengan tanggal 30 September 2010, Perusahaan memiliki kelebihan bayar sebesar Rp200,9 miliar. Kelebihan bayar tersebut dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya dan akan digunakan untuk pembayaran kewajiban Perusahaan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika pada periode berikutnya (Catatan 16).

**11 . UTANG USAHA**

	<u>2018</u>
<b>Pihak ketiga</b>	
<u>Mata uang asing</u>	
Blackberry Singapore Pte. Ltd	7.300
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	45.753
<b>Sub - total</b>	<b><u>53.053</u></b>

**9 . FIXED ASSET (continued)**

In June 2015, the Company discontinued the use of the leased service tower. Therefore, in 2015, all leased assets were written off.

Based on a management review as of December 31, 2018 and 2017, impairment was recognized on fixed assets amounting to nil respectively, due to indication of outdated technology and limited ability to generate cash flow.

**10 . OTHER NON-CURRENT ASSETS**

	<u>2017</u>	
Guarantee payment on obligation of frequency fee payables (Note 34)	500.000	
License (Note 16)	200.917	
Security deposits	449	
Others	8.919	
<b>Total</b>	<b><u>710.285</u></b>	<b>Total</b>

On October 14, 2010, the Company and the Directorate of Radio Frequency Spectrum Management signed Minutes of Claims Optimizing Radio BHP Frequency and Data Matching Radio Frequency No. 2149/BA/DITFREK/10/2010, to recalculate the Company's license fees (Radio BHP Frequency) to clarify the payments made to the Directorate General of Post and Telecommunication from year 2006 until September 30, 2010 cut-off, and to determine whether these payments were in accordance with the requirements for CDMA services based on issued regulation No. 19 Year 2005 concerning "Implementation Guidelines of State Tariff for Non-Income Tax from Radio BHP Frequency" by the Ministry of Communication and Information.

Based on the conclusion of the Directorate of Radio Frequency Spectrum Management, the Company made overpayment amounting to Rp200.9 billion from 2006 until September 30, 2010. This overpayment has been treated as other non-current assets and will be used for payment of obligation of the Company to the Department of Communication and Information in the future (Note 16).

**11 . ACCOUNT PAYABLE**

	<u>2017</u>	
<b>Third parties</b>		
<u>Foreign currencies</u>		
Blackberry Singapore Pte. Ltd	7.300	
Others (each below Rp4 billion)	45.753	
<b>Sub - total</b>	<b><u>53.053</u></b>	<b>Sub - total</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11 . UTANG USAHA (lanjutan)**

	<u>2018</u>
<u>Rupiah</u>	
PT Smartfren Telecom Tbk	172.138
Kementerian Komunikasi dan Informasi	55.857
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	128.196
Sub - total	<u>356.191</u>
Beban Interkoneksi	50.476
Total pihak ketiga	<u>406.667</u>
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Bakrie Swasakti Utama	9.349
PT Multi Kontrol Nusantara	1.285
Lain - lain (masing -masing dibawah Rp4 miliar)	6.402
Total pihak berelasi	<u>17.036</u>
<b>Total Utang Usaha</b>	<b><u>423.703</u></b>
Persentase utang usaha pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	<u>0,1056%</u>

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>
Sampai dengan 30 hari	1.929
Lebih dari 30 hari - 60 hari	2.709
Lebih dari 60 hari - 90 hari	2.012
Lebih dari 90 hari	417.053
<b>Total</b>	<b><u>423.703</u></b>

**12 . UTANG LAIN - LAIN**

	<u>2018</u>
Dalam mata uang Rupiah	138.638
Dalam mata uang asing	4.512
<b>Total</b>	<b><u>143.150</u></b>

**13 . BEBAN AKRUAL**

	<u>2018</u>
Bunga Kewajiban kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	3.717.587
Gaji dan pensiun	77.902
Jasa profesional	43.384
Sewa	37.310
	13.560

**11 . ACCOUNT PAYABLE (continued)**

	<u>2017</u>	
		<u>Rupiah</u>
PT Smartfren Telecom Tbk	172.138	PT Smartfren Telecom Tbk
Ministry of Communication and Information	1.774	Ministry of Communication and Information
Others (each below Rp4 billion)	48.102	Others (each below Rp4 billion)
Sub - total	<u>222.014</u>	Sub - total
Interkoneksi	50.476	Interconnection expense
Total pihak ketiga	<u>325.543</u>	Total third parties
<b>Related parties</b>		<b>Related parties</b>
PT Bakrie Swasakti Utama	9.349	PT Bakrie Swasakti Utama
PT Multi Kontrol Nusantara	1.285	PT Multi Kontrol Nusantara
Others (each below Rp4 billion)	473	Others (each below Rp4 billion)
Total pihak berelasi	<u>11.107</u>	Total related parties
<b>Total Trade Payable</b>	<b><u>336.650</u></b>	<b>Total Trade Payable</b>
Persentase utang usaha pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	<u>0,0747%</u>	Percentage of related parties trade payables to total consolidated liabilities

The aging schedule of trade payables was as follows:

	<u>2017</u>	
Sampai dengan 30 hari	1.625	Up to 30 days
Lebih dari 30 hari - 60 hari	1.384	Over 30 days - 60 days
Lebih dari 60 hari - 90 hari	1.282	Over 60 days - 90 days
Lebih dari 90 hari	332.359	Over 90 days
<b>Total</b>	<b><u>336.650</u></b>	<b>Total</b>

**12 . OTHER PAYABLES**

	<u>2017</u>	
Dalam mata uang Rupiah	86.981	In Rupiah currency
Dalam mata uang asing	4.186	In foreign currencies
<b>Total</b>	<b><u>91.167</u></b>	<b>Total</b>

**13 . ACCRUED EXPENSES**

	<u>2017</u>	
Bunga Kewajiban kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	2.943.478	Interest Obligation to the Ministry of Communication and Information - the Directorate General of Post and Telecommunication
Gaji dan pensiun	134.259	Salaries and pension
Jasa profesional	93.303	Professional fees
Sewa	13.595	Rent

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13 . BEBAN AKRUAL (lanjutan)**

	<u>2018</u>
Lain-lain (masing - masing dibawah Rp20 miliar)	69.411
<b>Total</b>	<b><u>3.959.154</u></b>

Kewajiban kepada Departemen Komunikasi dan Informatika - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi merupakan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi dengan tarif sebesar 0,5% dari pendapatan neto setelah dikurangi penghapusan piutang ragu-ragu, ditambah dengan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) atau Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25% dari pendapatan neto setelah dikurangi penghapusan piutang ragu-ragu. Selain itu, ada juga kewajiban BHP Pita dan Terrestrial.

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-43/PUPNC.10.05/2017 tertanggal 23 May 2017, telah ditetapkan jumlah piutang yang harus di lunasi oleh Perusahaan kepada Kementerian dan Komunikasi Informatika adalah sebesar Rp 36.187.973.680 dengan rincian :

- Hutang pokok : Rp 22.229.354.356 dengan bunga nol rupiah.
- Denda : Rp 10.668.803.535
- Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% atau senilai Rp 3.289.815.789

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-79/PUPNC.10.05/2017 tertanggal 6 Juli 2017, telah ditetapkan jumlah piutang yang harus di lunasi oleh Perusahaan kepada Kementerian dan Komunikasi Informatika adalah sebesar Rp 7.672.486.890 dengan rincian :

- Hutang pokok : Rp 5.394.500.612 dengan bunga nol rupiah.
- Denda : Rp 1.580.487.470
- Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% atau senilai Rp 697.498.808

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-97/PUPNC.10.05/2017 tertanggal 14 Juli 2017, telah ditetapkan jumlah piutang yang harus di lunasi oleh Perusahaan kepada Kementerian dan Komunikasi Informatika adalah sebesar Rp 3.761.917.306 dengan rincian :

- Hutang pokok : Rp 2.637.241.131 dengan bunga nol rupiah.
- Denda : Rp 782.683.693
- Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% atau senilai Rp 341.992.482

**13 . ACCRUED EXPENSES (continued)**

	<u>2017</u>	
	73.449	Others (each below Rp20 billion)
<b>Total</b>	<b><u>3.293.939</u></b>	<b>Total</b>

*Obligation to the Department of Communication and Information - the Directorate General of Post and Telecommunication represents the Cost of Frequency Utilization Providing Right telecommunications at a rate of 0.5% of net revenues after the deduction of allowance for bad debts written-off, plus an additional Universal Service Obligation (USO) of 1.25% of net revenues after the deduction of allowance for bad debts written-off. Also, included obligations related to Frequency License and Microwave.*

*Based on the DKI Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: PJPNC-43/PUPNC.10.05/2017 dated May 23, 2017, the amount of receivables that must be repaid by the Company to the Ministry and Communication Informatics is Rp 36,187,973,680 with details :*

- Principal debt: Rp 22,229,354,356 with zero rupiah interest.
- Fines: Rp 10,668,803,535
- The administration fee for managing state accounts is 10% or valued at Rp 3,289,815,789

*Based on the DKI Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: PJPNC-79/PUPNC.10.05/2017 dated July 6, 2017, the amount of receivables that must be repaid by the Company to the Ministry and Communication Informatics is Rp 7,672,486,890 with details :*

- Principal debt: Rp 5,394,500,612 with zero rupiah interest.
- Fines: Rp 1,580,487,470
- The administration fee for managing state accounts is 10% or valued at Rp 697,498,808

*Based on the DKI Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: PJPNC-97 / PUPNC.10.05 / 2017 dated July 14, 2017, the amount of receivables that must be repaid by the Company to the Ministry and Communication Informatics is Rp 3,761,917,306 with details :*

- Principal debt: Rp 2,637,241,131 with zero rupiah interest.
- Fines: Rp 782,683,693
- The administration fee for managing state accounts is 10% or valued at Rp 341,992,482

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13 . BEBAN AKRUAL (lanjutan)**

Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-165/PUPNC.10.05/2017 tertanggal 6 Desember 2017, telah ditetapkan jumlah piutang yang harus di lunasi oleh Perusahaan kepada Kementerian dan Komunikasi Informatika adalah dengan rincian sebagai berikut :

- a) Hak penyerah piutang : Rp 6.785.040.881
- b) Biaya administrasi 1% dari hak penyerah piutang yaitu senilai Rp 67.850.408 apabila maksimal pembayaran tanggal 17 April 2018. Dan sebesar 10% dari hak penyerah piutang atau senilai Rp 678.504.088 apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal 17 April 2018.

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-2994/WKN.07/KNL.05/2017 tertanggal 8 Nopember 2017, perihal Permintaan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun 2014 a.n. Perusahaan, Perusahaan diminta untuk menyelesaikan kewajiban sebesar Rp 7.672.486.890 sesuai Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : SP3N-60/PUPNC.10.05/2016 tertanggal 20 April 2016.

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-3000/WKN.07/KNL.05/2017 tertanggal 8 Nopember 2017, perihal Permintaan Pembayaran Kewajiban KPU/USO Tahun 2014 dan 2015 a.n. Perusahaan, Perusahaan diminta untuk menyelesaikan kewajiban sebesar Rp 36.187.973.680 sesuai Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : SP3N-111/PUPNC.10.05/2016 tertanggal 27 Maret 2017.

Pembayaran harus dilakukan oleh Perusahaan guna menghindari tindakan hukum lebih lanjut, antara lain :

- a) Pencegahan ke luar wilayah Republik Indonesia terhadap pengurus/penanggungjawab Perusahaan.
- b) Paksa badan terhadap pengurus/penanggungjawab Perusahaan, dan
- c) Penyitaan atas harta kekayaan penanggung utang dan/atau penjamin utang.

**14 . WESEL SENIOR**

**11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015**

Pada tanggal 7 Mei 2010, Bakrie Telecom Pte., Ltd, Entitas Anak, menerbitkan "11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015" (selanjutnya disebut "Wesel Senior") sebesar USD250,0 juta dengan jangka waktu lima (5) tahun yang berakhir pada tanggal 7 Mei 2015, yang terdaftar di Singapore Exchange Securities Trading. Wesel Senior tersebut dibebani tingkat suku bunga sebesar 11,5% per tahun yang akan dibayarkan per semester pada setiap tanggal 7 Mei dan 7 November dimulai pada tanggal 7 November 2010.

**13 . ACCRUED EXPENSES (continued)**

Based on the DKI Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: PJPNC-165/PUPNC.10.05/2017 dated December 6, 2017, the amount of receivables that must be repaid by the Company to the Ministry and Communication Informatics with details as follows :

- a) Receivable right: Rp 6,785,040,881
- b) 1% administration fee from the receivable surrender rights is Rp 67,850,408 if the maximum payment is April 17, 2018 and 10% of the receivable surrender rights or Rp 678,504,088 if payment is made after April 17 2018

Based on the Letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number: S-2994 / WKN.07 / KNL.05 / 2017 dated November 8, 2017, regarding Requests for Payment of BHP Telecommunications Obligations for 2014 a.n. The Company, the Company was asked to settle the obligations amounting to Rp 7,672,486,890 according to the Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: SP3N-60 / PUPNC.10.05 / 2016 dated April 20, 2016.

Based on the Letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number: S-3000 / WKN.07 / KNL.05 / 2017 dated November 8, 2017, regarding Requests for Payment of Obligations of KPU / USO in 2014 and 2015 a.n. The Company, the Company was asked to settle the obligation amounting to Rp 36,187,973,680 according to the DKI Jakarta Branch Accounts Receivable Affairs Decree Number: SP3N-111 / PUPNC.10.05 / 2016 dated March 27, 2017.

Payments must be made by the Company to avoid further legal action , among others :

- a) Prevention outside the territory of the Republic of Indonesia towards the management / responsible of the Company.
- b) Forced the body of the Company's management / responsibility, and
- c) Confiscation of the assets of the debt guarantor and / or debt guarantor.

**14 . SENIOR NOTES**

**11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015**

On May 7, 2010, Bakrie Telecom Pte., Ltd, a Subsidiary, issued "11.500% Guaranteed Senior Notes due 2015" (hereafter referred to as the "Senior Notes") amounting to USD250.0 million with a maturity of five (5) years ended May 7, 2015, which are listed on Singapore Exchange Securities Trading. These Senior Notes are subject to interest of 11.5% per annum that is payable semi-annually on May 7 and November 7 of each year commencing on November 7, 2010.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14 . WESEL SENIOR (lanjutan)**

Wesel Senior tersebut dijamin oleh Perusahaan sebagai entitas induk perusahaan penjamin, PT Bakrie Connectivity dan PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network) sebagai Entitas Anak penjamin. Credit Suisse (Singapura) Limited (CS), Singapura, Merrill Lynch (Singapura) Pte., Ltd dan Morgan Stanley Asia (Singapura) Pte., bertindak sebagai pembeli awal (initial purchasers), dengan CS sebagai koordinator global tunggal (sole global coordinator). The Bank of New York Mellon ditunjuk sebagai wali amanat, agen pembayaran dan pelaku pendaftaran, sedangkan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, ditunjuk sebagai agen penjamin Indonesia sehubungan dengan saham yang dijamin.

Biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Wesel Senior tersebut adalah sebesar Rp82,8 miliar. Hasil penerbitan Wesel Senior tersebut diteruskan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd kepada Perusahaan dalam bentuk pinjaman berdasarkan Intercompany Loan Agreement antara Bakrie Telecom Pte., Ltd dan Perusahaan tanggal 7 Mei 2010. Utang Intercompany tersebut digunakan untuk melunasi utang dan modal belanja Perusahaan.

Sebelum tanggal 7 Mei 2013, Bakrie Telecom Pte., Ltd, Entitas Anak, memiliki opsi untuk melunasi Wesel Senior dengan cara sebagai berikut:

- (a) Melunasi seluruh atau sebagian Wesel Senior dengan harga pelunasan sebesar 100% dari jumlah pokok Wesel Senior ditambah dengan premium yang berlaku, beserta bunga yang masih harus dibayar, jika ada.
- (b) Melunasi sampai dengan 35% dari jumlah pokok Wesel Senior, dengan hasil penerimaan neto dari penawaran saham tersebut, dengan harga pelunasan 111,5% dari jumlah pokok Wesel Senior, beserta bunga yang masih harus dibayar, jika ada.

Pada tanggal 27 Januari 2011, Bakrie Telecom Pte., Ltd, menerbitkan Wesel Senior sebesar USD130,0 juta pada harga 107%. Wesel Senior tersebut dijamin oleh Perusahaan, PT Bakrie Connectivity, PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network) dan Bakrie Telecom Pte., Ltd. Hasil penerbitan Wesel Senior tersebut diteruskan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd kepada Perusahaan dalam bentuk pinjaman berdasarkan Supplemental Intercompany Loan Agreement antara Bakrie Telecom Pte., Ltd dan Perusahaan tanggal 27 Januari 2011. Utang Intercompany tersebut digunakan untuk melunasi utang kepada CS dan belanja modal Perusahaan. Biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan USD130,0 juta Wesel Senior tersebut adalah sebesar Rp71,5 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo Wesel Senior adalah sebagai berikut:

	<b>2018</b>
Wesel Senior (USD380,0 juta)	<u>5.502.780</u>

**14 . SENIOR NOTES (continued)**

*These Senior Notes are guaranteed by the Company as Parent Guarantor, PT Bakrie Connectivity and PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network) as Subsidiary Guarantors. Credit Suisse (Singapore) Limited (CS), Singapore, Merrill Lynch (Singapore) Pte., Ltd, and Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte., acted as initial purchasers with CS as the sole global coordinator. The Bank of New York Mellon has been appointed as the trustee, paying agent and registrar, while Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, has been appointed as Indonesian collateral agent with respect to the pledged shares.*

*The issuance costs related to the Senior Notes amounted to Rp82.8 billion. The proceeds of the Senior Notes were passed through by Bakrie Telecom Pte., Ltd to the Company in the form of loan based on Intercompany Loan Agreement between Bakrie Telecom Pte., Ltd and the Company dated May 7, 2010 and used to pay outstanding debt and for capital expenditures of the Company.*

*At any time prior to May 7, 2013, Bakrie Telecom Pte., Ltd, the Subsidiary, could at its option redeem the Senior Notes, as follows:*

- (a) Redeem the Senior Notes, in whole or in part, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the Senior Notes plus the applicable premium, and accrued and unpaid interest, if any.*
- (b) Redeem up to 35% of the aggregate principal amount of the Senior Notes, with the net proceeds of sales of its common stock in an equity offering, at a redemption price of 111.5% of the principal amount of the Senior Notes, plus accrued and unpaid interest, if any.*

*Bakrie Telecom Pte., Ltd, issued Senior Notes amounting to USD130.0 million on January 27, 2011 at 107%. These Senior Notes are guaranteed by the Company, PT Bakrie Connectivity, PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network) and Bakrie Telecom Pte., Ltd. The proceeds of Senior Notes were passed through by Bakrie Telecom Pte., Ltd to the Company in the form of loan based on Supplemental Intercompany Loan Agreement between Bakrie Telecom Pte., Ltd and the Company dated January 27, 2011. The Intercompany Loan was used to pay outstanding debts to CS and for capital expenditure of the Company. The issuance costs related to the USD130.0 million Senior Notes amounted to Rp71.5 billion.*

*As of December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance of Senior Notes was as follows:*

	<b>2017</b>	
	<u>5.148.240</u>	Senior Notes (USD380.0 million)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14 . WESEL SENIOR (lanjutan)**

Wesel Senior ini dalam kondisi wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran pokok dan bunga pada tanggal 31 Desember 2015 (wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2014).

Perusahaan dan Bakrie Telecom Pte., Ltd, sedang dalam proses untuk merestrukturisasi utang Wesel Senior (Catatan 34).

**15 . UTANG YANG DISELESAIKAN MELALUI PKPU**

	<u>2018</u>
Utang penyedia menara	3.035.290
Utang usaha	1.306.963
Utang biaya hak penggunaan dan <i>universal service obligation</i>	866.057
Utang dengan jaminan	746.120
Utang akibat derifatif	199.980
Utang afiliasi	74.436
Total	6.228.846
Diskonto utang	(192.769)
<b>Total</b>	<b><u>6.036.077</u></b>

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya (Catatan 35).

Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU, kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait.

Pada bulan Juni 2015, Perusahaan menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa. Sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU maka 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A). Pada tahun 2015, Perusahaan mencatat utang nilai sisa masa sewa sebesar Rp1.818,7 miliar dan beban terkait disajikan dalam laba rugi sebesar Rp1.667,8 miliar.

Pada tanggal 26 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang menyetujui penambahan modal Perusahaan atau penerbitan saham baru Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi terlebih dahulu. Saham baru Perusahaan tersebut diterbitkan sebadai pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

**14 . SENIOR NOTES (continued)**

As of December 31, 2015, the Senior Notes were in default condition due to late payment of principal and its interest (default condition due to late payment of interest as of December 31, 2014).

The Company and Bakrie Telecom Pte., Ltd, is in the process of restructuring the debt of Senior Notes (Note 34).

**15 . SETTLEMENT OF PAYABLES THROUGH PKPU**

	<u>2017</u>	
	3.035.290	Tower provider payables
	1.255.147	Trade payables
	866.057	Payables on fee of rights to use and the universal service obligation
	698.048	Salaries and pension
	195.290	Professional fees
	74.159	Rent
Total	6.123.991	Others (each below Rp20 billion)
Diskonto utang	(192.769)	
<b>Total</b>	<b><u>5.931.222</u></b>	<b>Total</b>

On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors (Note 35).

Based on the Amicable Settlement Agreement, creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables.

In June 2015, the Company discontinued the use of the leased service tower. Based on the Amicable Settlement Agreement, 100% of the residual value of the lease will be exchanged with the Mandatory Convertible Bond (MCB-A). In 2015, the Company booked residual value payable of the lease amounting to Rp1,818.7 billion and the related expense was presented in profit or loss amounting Rp1,667.8 billion.

On June 26th, 2016, Company obtained approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which approved the issuance of new shares by way of non-preemptive rights by issuing Mandatory Convertible Bonds before hand. The new shares to be issued as the implementation of conversion of Mandatory Convertible Bonds as governed under the Amicable Settlement Agreement.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**16 . MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Ficomindo Buana Registrar adalah sebagai berikut:

**16 . CAPITAL STOCK**

The composition of shareholders as of December 31, 2018 and 2017 based on registration by PT Ficomindo Buana Registrar, was as follows:

<u>Pemegang Saham</u>	<u>2018 dan 2017</u>		<u>Shareholders</u>
	<u>Jumlah Saham / Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam satuan penuh)/ Number of Shares Issued and Fully paid (in full amount)</u>	<u>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</u>	
Total saham biasa seri A dan B			Total common shares series A and B
PT Huawei Tech Investment	6.189.313.980	16,83%	PT Huawei Tech Investment
PT Mahindo Agung Sentosa	5.000.439.000	13,60%	PT Mahindo Agung Sentosa
PT Era Bhakti Persada	2.012.019.117	5,47%	PT Era Bhakti Persada
Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited	2.213.279.000	6,02%	Raiffeisen Bank International s/a Best Quality Global Limited
PT Bakrie Brothers Tbk	43.043.142	0,12%	PT Bakrie Brothers Tbk
Masyarakat	21.315.810.396	57,96%	Public
<b>Total</b>	<b>36.773.904.635</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

Sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut, Perusahaan telah menerima:

- (a) Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Januari 2006 sesuai dengan Surat No. S-123/PM/2006.
- (b) Persetujuan tertulis dari Bank Mandiri sesuai dengan Surat No. CBG.TRE/RD9.069/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang perubahan persyaratan kredit atas negative covenant sehubungan dengan pembagian bonus, dividen dan/atau keuntungan lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman No. KP-COD/014/PK-KI/2004 dan Akta Notaris No. 52 oleh Imas Fatimah, SH. pada tanggal 27 September 2004.

Sehubungan dengan Penawaran Umum di atas, sebelumnya Perusahaan juga telah melakukan perubahan atas nilai nominal saham sebagai berikut:

- (a) Setiap satu (1) saham seri A dengan nilai nominal semula seribu rupiah (Rp1.000) per saham menjadi lima (5) saham dengan nilai nominal dua ratus rupiah (Rp200) per saham.

In connection with the IPO, the Company received:

- (a) The Effective Statement Letter from the Chairman of the Financial Services Authority on January 23, 2006 per Letter No. S-123/PM/2006.
- (b) Written approval from Bank Mandiri through Letter No. CBG.TRE/RD9.069/2006 dated January 12, 2006 concerning the changes of credit terms regarding the negative covenants in relation to the distribution of bonuses, dividends and/or other benefits as stated in Loan Agreement No. KP-COD/014/PK-KI/2004 and Notarial Deed No. 52 of Imas Fatimah, SH. dated September 27, 2004.

In connection with the above IPO, the Company had previously changed the nominal value of its shares as follows:

- (a) Each common share series A with nominal value amounting to one thousand rupiah (Rp1,000) per share was converted into five (5) shares with nominal value of two hundred rupiah (Rp200) per share.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**16 . MODAL SAHAM (lanjutan)**

(b) Setiap satu (1) saham seri B dengan nilai nominal semula lima ratus rupiah (Rp500) per saham menjadi lima (5) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) per saham.

Pada tanggal 1 Maret 2017, PT Huawei Tech Investment telah mengkonversi Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki sebesar Rp 1.237.862.796.141 menjadi saham Perusahaan sebanyak 6.189.313.980 lembar saham.

Modal saham Perusahaan, PT Bakrie Connectivity dan PT Bakrie Digital Net (dahulu PT Bakrie Network), Entitas Anak, pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, digunakan sebagai jaminan atas Wesel Senior yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd. Entitas Anak (Catatan 14).

Jumlah saham modal dasar pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan anggaran dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

Jenis saham	Jumlah Saham Modal Dasar (dalam satuan penuh)/ <i>Number of Authorized Shares (in full amount)</i>	Nominal/ <i>Nominal (Rp)</i>	Total Dalam Jutaan Rupiah/ <i>Total In Million Rupiah</i>	Shares
Saham biasa seri A	10.000.000.000	200	2.000.000	<i>Common shares series A</i>
Saham biasa seri B	87.111.652.195	100	8.711.165	<i>Common shares series B</i>
<b>Total</b>	<b>97.111.652.195</b>		<b>10.711.165</b>	<b>Total</b>

Sesuai dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana tertuang dalam akta notaris No. 28 tanggal 10 Juli 2015 oleh Lenny Janis Ishak, SH; modal dasar Perusahaan ditingkatkan menjadi Rp10.711.165.219.500 (dalam satuan penuh) dengan komposisi saham seri A sejumlah sepuluh miliar (10.000.000.000) saham dengan nilai nominal dua ratus rupiah (Rp200) setiap saham dan saham seri B sejumlah delapan puluh tujuh miliar seratus sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima (87.111.652.195) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) setiap saham.

**17 . TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Melalui Penawaran Umum Perdana pada tanggal 3 Februari 2006, Perusahaan telah menerima sebesar Rp605,0 miliar untuk penawaran lima miliar lima ratus juta (5.500.000.000) saham seri B atas nama dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) dengan harga penawaran seratus sepuluh rupiah (Rp110).

**16 . CAPITAL STOCK (continued)**

(b) Each common share series B with nominal value amounting to five hundred rupiah (Rp500) per share was converted into five (5) shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.

On March 1, 2017, Mandatory Convertible Bond owned by PT Huawei Tech Investment amounting to Rp1,237,862,796,141 has converted to shares of the Company of 6,189,313,980 shares.

As of December 31, 2018 and 2017, the capital stock of the Company, PT Bakrie Connectivity and PT Bakrie Digital Net (formerly PT Bakrie Network), Subsidiaries, were used as collateral for the Senior Notes issued by Bakrie Telecom Pte., Ltd. A Subsidiary (Note 14).

The number of authorized shares as of December 31, 2018 and 2017 based on the Company's articles of association, was as follows:

Based on the result of the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on June 22, 2015 as stated in the notarial deed No. 28 dated July 10, 2015 of Lenny Janis Ishak, SH; the authorized capital of the Company has increased to be of Rp10,711,165,219,500 (in full amount) consist of common stock series A of ten billion (10,000,000,000) share with nominal value of two hundred rupiah (Rp200) per share and common stock series B of eighty seven billion, one hundred eleven million, six hundred fifty two thousand, one hundred ninety five (87,111,652,195) share with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share.

**17 . ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

Through the Initial Public Offering on February 3, 2006, the Company received the amount of Rp605.0 billion for the offering of five billion five hundred million (5,500,000,000) share series B with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) at an offering price of one hundred and ten rupiah (Rp110).

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**17 . TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)**

Melalui Penawaran Umum Terbatas I pada tanggal 29 Februari 2008, Perusahaan menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua (8.638.079.352) saham dengan nilai nominal seratus rupiah (Rp100) setiap saham yang ditawarkan dengan harga tiga ratus lima puluh rupiah (Rp350) setiap saham dengan nilai keseluruhan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3,0 triliun dan dengan selisih harga yang ditawarkan dengan harga nominal sebesar Rp2,2 triliun.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I, Perusahaan telah melakukan penyesuaian harga pelaksanaan sebesar seratus dua puluh tujuh rupiah (Rp127) setiap sahamnya dan menerbitkan sebanyak tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu (38.549.131) lembar Waran Seri I yang berlaku efektif mulai tanggal 27 Maret 2008. Waran Seri I merupakan lanjutan dari Penawaran Umum Saham Perdana.

Selisih neto antara harga penawaran dengan harga nominal diakui sebagai tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**17 . ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)**

Through the Rights Issue I on February 29, 2008, the Company issued a maximum of eight billion, six hundred thirty-eight million, seventy-nine thousand, three hundred fifty-two (8,638,079,352) shares with nominal value of one hundred rupiah (Rp100) per share, which were offered at three hundred fifty rupiah (Rp350) per share in the total maximum amount of Rp3.0 trillion and with an excess offering price over nominal price amounting to Rp2.2 trillion.

In accordance with Rights Issue I, the Company adjusted the exercise price to one hundred twenty-seven rupiah (Rp127) per share and issued thirty-eight million, five hundred forty-nine thousand, one hundred thirty-one (38,549,131) Series I Warrants effective March 27, 2008. Series I Warrants were an extension of the Initial Public Offering.

Net excess of price over par value of shares between nominal price and offering price was recognized as additional paid-in capital as of December 31, 2018 and 2017 as follows:

	<b>31 Desember 2018 dan 2017/ December 31, 2018 and 2017</b>			
<u>(Satuan penuh)</u>	<u>Selisih Lebih Harga Atas Nilai Nominal Saham/ Excess of Price Over Par Value of Shares</u>	<u>Biaya Penerbitan Saham/ Issuance Cost of Shares</u>	<u>Selisih Lebih Harga Atas Nilai Nominal Saham - Neto/ Net Excess of Price Over Par Value of Shares</u>	<u>(Full amount)</u>
Penerbitan 5.500.000.000 saham melalui penawaran umum (Catatan 1b)	55.000	27.229	27.771	<i>Issuance of 5,500,000,000 through initial public offering (Note 1b)</i>
Penerbitan 566.037.736 saham seri B melalui PMTHMETD (Catatan 1e)	93.396	-	93.396	<i>Issuance of 566,037,736 shares series B through PMTHMETD (Note 1e)</i>
Penerbitan 1.536.135.340 saham seri B melalui PMTHMETD (Catatan 1e)	253.462	11	253.451	<i>Issuance of 1,536,135,340 shares series B through PMTHMETD (Note 1e)</i>
Penerbitan 8.626.486.836 saham melalui PUT (Catatan 1c)	2.156.622	80.881	2.075.741	<i>Issuance of 8,626,486,836 shares through right issue (Note 1c)</i>
Penerbitan 1.076.515.248 saham melalui waran	37.655	-	37.655	<i>Issuance of 1,076,515,248 shares through exercise of warrants</i>
Pengampunan pajak	857		857	<i>Tax amnesty</i>
<b>Total</b>	<b><u>2.596.992</u></b>	<b><u>108.121</u></b>	<b><u>2.488.871</u></b>	<b>Total</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**18 . SAHAM BEREDAR YANG DIPEROLEH KEMBALI**

Transaksi saham beredar yang diperoleh kembali adalah sebagai berikut:

<b>31 Desember 2018 dan 2017/ December 31, 2018 and 2017</b>					
<b>Keterangan</b>	<b>Periode/ Period</b>	<b>Jumlah saham (Dalam satuan penuh) Number of Shares (in full amount)</b>	<b>Realisasi/ Realization (%)</b>	<b>arga Nomin Par Value Shares</b>	<b>Description</b>
Disetujui dalam Direksi (Catatan	2008	11.000.000.000			Approved in Board of Directors Meeting (Note 1d)
Pembelian kembali	2008	689.000.000	6,27%	68.900	Approved in Board of
Penerbitan kembali	2009	(579.000.000)		(57.900)	Approved in Board of
<b>Total</b>		<b>110.000.000</b>		<b>11.000</b>	<b>Total</b>

Selisih neto antara harga perolehan dengan harga nominal per lembar saham diakui sebagai "Agi Saham Beredar yang Diperoleh Kembali" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**18 . TREASURY STOCK**

Transactions regarding treasury stock were as follows:

Net excess of price over par value of shares between nominal price and acquisition price was recognized as "Premium on Treasury Stock" in the consolidated statements of financial position.

**19 . KEPENTINGAN NON PENGENDALI**

Akun ini terdiri dari:

- a. Kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak

	<b>2018</b>
PT Bakrie Digital Net	1
PT Bakrie Connectivity	(16)
PT Anugerah Andalan Investama	3
<b>Total</b>	<b>(12)</b>

- b. Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali

	<b>2018</b>
Bakrie Telecom Pte., Ltd	-
PT Bakrie Digital Net	-
PT Bakrie Connectivity	-
PT Anugerah Andalan Investama	(160)
<b>Total</b>	<b>(160)</b>

**19 . NON-CONTROLLING INTEREST**

This account consist of:

- a Non-controlling interest in net assets of Subsidiaries

	<b>2017</b>	
PT Bakrie Digital Net	2	PT Bakrie Digital Net
PT Bakrie Connectivity	(251)	PT Bakrie Connectivity
PT Anugerah Andalan Investama	28	PT Anugerah Andalan Investama
<b>Total</b>	<b>(221)</b>	<b>Total</b>

- b Income (loss) attributable to non-controlling interest

	<b>2017</b>	
Bakrie Telecom Pte., Ltd	-	PT Bakrie Telecom Pte., Ltd
PT Bakrie Digital Net	2	PT Bakrie Digital Net
PT Bakrie Connectivity	(251)	PT Bakrie Connectivity
PT Anugerah Andalan Investama	28	PT Anugerah Andalan Investama
<b>Total</b>	<b>(221)</b>	<b>Total</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**20 . PENDAPATAN USAHA**

Pendapatan usaha meliputi pendapatan yang berasal dari telepon tidak bergerak dan telepon bergerak terbatas, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2018</u>
Pendapatan jasa telekomunikasi Pascabayar	8.526
Beban interkoneksi dan biaya bagi hasil	<u>(4.720)</u>
<b>Neto</b>	<b><u>3.806</u></b>

Transaksi pendapatan yang berasal dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil (Catatan 27).

Selain itu, terdapat biaya bagi hasil untuk pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil yang dicatat sebagai bagian dari potongan harga dan biaya bagi hasil.

**21 . BEBAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN**

	<u>2018</u>
Sewa	734
Listrik	455
Kewajiban kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	<u>43</u>
<b>Total</b>	<b><u>1.232</u></b>

**22 . BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	<u>2018</u>
Jasa profesional	18.629
Perizinan, lisensi dan bea masuk	4.267
Sewa	2.890
Rugi penurunan nilai piutang usaha (Catatan 7)	1.393
Iuran keanggotaan	450
Perlengkapan kantor	174
Telepon, listrik dan air	138
Transportasi	120
Pemeliharaan kantor	48
Beban pos	6
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	<u>1.106</u>
<b>Total</b>	<b><u>29.221</u></b>

**20 . REVENUE**

Operating revenues represent revenues from fixed line and limited mobility telephone revenues, with details as follows:

	<u>2017</u>	
	7.871	Telecommunication services
		Postpaid
	<u>(4.371)</u>	Interconnection expenses and sharing cost
<b>Net</b>	<b><u>3.500</u></b>	<b>Net</b>

Revenue transactions from related parties for the years ended December 31, 2018 and 2017, amounted to nil respectively (Note 27).

In addition, revenue sharing cost to related party for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounting to nil, was recorded as part of discount and sharing cost.

**21 . OPERATING AND MAINTENANCE EXPENSES**

	<u>2017</u>	
	940	Rent
	150	Electricity
		Obligation to Department of Communication and Information to Directorate General of Post and Telecommunication
	<u>34</u>	
<b>Total</b>	<b><u>1.124</u></b>	<b>Total</b>

**22 . GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	<u>2017</u>	
	2.536	Professional fees
	29	Permits, licenses and customs clearance
	4.687	Rent
	-	Impairment loss of trade receivables (Notes 7)
	283	Memberships
	532	Office supplies
	149	Telephone, electricity and water
	89	Transportation
	131	Office maintenance
	5	Postage
	<u>149</u>	Others (each below Rp500 million)
<b>Total</b>	<b><u>8.590</u></b>	<b>Total</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22 . BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)**

Beban jasa profesional terutama timbul dari konsultasi hukum terkait dengan kasus litigasi wesel senior. Perusahaan mengajukan permohonan pengakuan atas hasil proses PKPU berdasarkan peraturan Bab 15 Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat dan masih dalam proses peradilan di New York.

**23 . BEBAN KARYAWAN**

	<u>2018</u>
Gaji dan upah	7.618
Transportasi	383
Tunjangan kesehatan	150
Tunjangan uang makan	42
<b>Total</b>	<b><u>8.194</u></b>

**24 . BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN**

	<u>2018</u>
Sewa	389
Iklan, promosi dan pameran	-
<b>Total</b>	<b><u>389</u></b>

**25 . PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

a. Selisih kurs

	<u>2018</u>
Laba selisih kurs	261.360
Rugi selisih kurs	(345.366)
<b>Total</b>	<b><u>(84.006)</u></b>

b. Beban keuangan

	<u>2018</u>
Beban bunga, amortisasi beban keuangan neto dan beban keuangan lainnya	(605.731)
Administrasi bank	(13)
<b>Total</b>	<b><u>(605.744)</u></b>

c. Lain-lain

	<u>2018</u>
Penghasilan bunga	3
Lain-lain	(1.182)
<b>Total</b>	<b><u>(1.179)</u></b>

**22 . GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (continuec**

Professional service expenses mainly arise from legal consultations related to senior notes order litigation cases. The company submitted a request for recognition of the results of the PKPU process based on the rules of Chapter 15 of the United States Bankruptcy Law and is still in the proceedings in New York.

**23 . EMPLOYEES EXPENSES**

	<u>2017</u>	
	34.125	Salaries and wages
	1.626	Transportation
	64	Medical allowance
	417	Meal allowance
<b>Total</b>	<b><u>36.232</u></b>	<b>Total</b>

**24 . SALES AND MARKETING EXPENSES**

	<u>2017</u>	
	256	Rent
	1	Advertising, promotion and exhibition
<b>Total</b>	<b><u>257</u></b>	<b>Total</b>

**25 . OTHER INCOME (CHARGES)**

a Foreign exchange

	<u>2017</u>	
	66.204	Gain on foreign exchange
	(137.229)	Loss on foreign exchange
<b>Total</b>	<b><u>(71.025)</u></b>	<b>Total</b>

b Financing charges

	<u>2017</u>	
	(716.803)	Interest charges, amortization of net financial charges and other financial charges
	(32)	Bank charges
<b>Total</b>	<b><u>(716.835)</u></b>	<b>Total</b>

c. Others

	<u>2017</u>	
	9	Interest income
	39.232	Others
<b>Total</b>	<b><u>39.241</u></b>	<b>Total</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26 . PERPAJAKAN**

a. Pajak dibayar dimuka

	<u>2018</u>
Pajak Pertambahan Nilai	<u>1.292</u>

b. Utang pajak

	<u>2018</u>
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	13.346
Pasal 23	1.570
Pasal 26	3.325
Pajak Pertambahan Nilai	<u>2.339</u>
<b>Total</b>	<b><u>20.580</u></b>

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>
Rugi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(727.979)
Laba (rugi) Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	204
Transaksi eliminasi	<u>(249)</u>
Rugi sebelum beban pajak yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan	<u>(728.025)</u>
<b>Beda temporer</b>	
Penyusutan	-
Penyisihan penurunan nilai aset	2.767
Penyisihan imbalan kerja	<u>111</u>
<b>Total</b>	<b><u>2.878</u></b>
<b>Beda tetap</b>	
Pajak dan pengembangan usaha	-
Gaji dan upah	-
Beban bunga	605.732
Bagian atas laba neto Entitas Anak	-
Lain-lain	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>605.732</u></b>
Taksiran Rugi Fiskal	<u>(119.415)</u>

**26 . TAXATION**

a. Prepaid taxes

	<u>2017</u>
	<u>995</u>

Value-Added Tax

b. Taxes payable

	<u>2017</u>
Pajak Penghasilan	
Article 21	12.837
Article 23	1.255
Article 26	6
Value-Added Tax	<u>2.419</u>
<b>Total</b>	<b><u>16.517</u></b>

Income taxes  
Article 21  
Article 23  
Article 26  
Value-Added Tax

**Total**

c. Current Tax

Reconciliation between loss before income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated fiscal loss for the years ended December 31, 2018 and 2017 was as follows:

	<u>2017</u>
Rugi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(1.605.235)
Laba (rugi) Entitas Anak sebelum beban pajak penghasilan	(9.109)
Transaksi eliminasi	<u>9.073</u>
Rugi sebelum beban pajak yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan	<u>(1.605.271)</u>
<b>Temporary differences</b>	
Depreciation	104.590
Provision for impairment loss assets	234
Provision for employee benefits	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>104.824</u></b>
<b>Permanent differences</b>	
Taxes and business development	592.081
Salary and wages	43
Interest expenses	-
Distribution of subsidiaries net profit	9.144
Others	<u>77</u>
<b>Total</b>	<b><u>601.345</u></b>
Taksiran Rugi Fiskal	<u>(899.102)</u>

Loss before income tax expenses per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income  
Income (loss) of Subsidiaries before income tax expenses  
Elimination transactions

Loss before income tax expense attributable to the Company

Temporary differences  
Depreciation  
Provision for impairment loss assets  
Provision for employee benefits

**Total**

Permanent differences  
Taxes and business development  
Salary and wages  
Interest expenses  
Distribution of subsidiaries net profit  
Others

**Total**

Estimated fiscal Loss

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26 . PERPAJAKAN (lanjutan)**

c. Pajak Kini (lanjutan)

	<u>2018</u>
Rugi Fiskal:	
2012	-
2013	-
2014	(1.592.976)
2015	(2.684.946)
2016	(1.103.798)
2017	(899.102)
Total rugi fiskal	<u>(6.280.822)</u>
Rugi Fiskal:	
2017	-
2018	(119.415)
Total rugi fiskal	<u>(119.415)</u>
<b>Total Akumulasi Rugi Fiskal</b>	<b><u>(6.400.237)</u></b>

Perusahaan tidak melakukan penyisihan beban pajak penghasilan kini karena Perusahaan masih mengalami rugi fiskal.

d. Pajak tangguhan

	<u>2018</u>
<b>Perusahaan:</b>	
Penyisihan aset pajak tangguhan	-
Penyisihan penurunan nilai piutang	-
Liabilitas imbalan kerja	-
Aset tetap	-
Beban Pajak Tangguhan - Perusahaan	-
Beban Pajak Tangguhan - Entitas Anak	-
<b>Beban Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b><u>-</u></b>

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<u>2018</u>
<b>Perusahaan:</b>	
Aset pajak tangguhan:	
Penyisihan aset pajak tangguhan	-
Akumulasi rugi fiskal dikurangi penyesuaian dan penyisihan	-
Piutang usaha	-
Liabilitas imbalan kerja	-
Liabilitas pajak tangguhan:	
Aset tetap	-

**26 . TAXATION (continued)**

c. Current Tax (continued)

	<u>2017</u>	
		<i>Fiscall loss:</i>
	(2.576.928)	2012
	(3.089.046)	2013
	(1.592.976)	2014
	(2.684.946)	2015
	-	2016
	-	2017
Total rugi fiskal	<u>(9.943.896)</u>	<i>Total fiscall loss</i>
		<i>Fiscall Loss:</i>
	(899.102)	2015
	-	2018
Total rugi fiskal	<u>(899.102)</u>	
<b>Total Akumulasi Rugi Fiskal</b>	<b><u>(11.742.100)</u></b>	<b><i>Estimated Cumulative Fiscall Loss</i></b>

No provision for current income tax expense was made due to the Company still being in a fiscal loss position.

d. Deferred Tax

	<u>2017</u>	
		<b>The company:</b>
	86.490	<i>Allowance for deferred tax assets</i>
	-	<i>Impairment of trade receivables</i>
	66	<i>Employee benefits liability</i>
	22.233	<i>Fixed assets</i>
Beban Pajak Tangguhan - Perusahaan	108.789	<i>Deferred Tax Expense - Company</i>
Beban Pajak Tangguhan - Entitas Anak	-	<i>Deferred Tax Expense - Subsidiaries</i>
<b>Beban Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b><u>108.789</u></b>	<b><i>Deferred Tax Expense - Net</i></b>

The deferred tax assets and liability of the Group as of December 31, 2018 and 2017 were as follows:

	<u>2017</u>	
		<b>The company:</b>
		<i>Deferred tax assets:</i>
	2.389.359	<i>Allowance for deferred tax assets</i>
	-	<i>Accumulated fiscal loss deducted with adjustment and allowance</i>
	(2.389.359)	<i>Trade receivables</i>
	13.248	<i>Employee benefits liability</i>
	219	<i>Deferred tax liability:</i>
	-	<i>Fixed assets</i>
	(20.918)	

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26 . PERPAJAKAN (lanjutan)**

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

	<u>2018</u>
<b>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Perusahaan - Neto</b>	<u>-</u>
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan Entitas Anak - Neto</b>	<u>-</u>
<b>Total Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan</b>	<u>-</u>

e. Pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain

Pengukuran kembali laba (rugi) atas liabilitas imbalan kerja	-
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<u>-</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan karena besar kemungkinan aset pajak tangguhan tidak dapat terealisasi di masa yang akan datang.

f. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 4 Mei 2016, Perusahaan menerima SKPLB No. 00071/407/092/16 atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2014 sejumlah Rp9.742,5 juta yang berbeda dengan jumlah yang diklaim oleh Perusahaan sejumlah Rp9.999,9 juta. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menerima kelebihan atas pembayaran pajak tersebut.

Pada tanggal 14 Maret 2017, Entitas Induk menerima Surat No. S-171/WPJ.19/KP.02/2017 perihal Jawaban Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Seharusnya Tidak Dikembalikan, dimana kewajiban Entitas Induk dinyatakan sebesar Rp28.06 miliar. Perusahaan telah melunasi kewajiban tersebut pada tanggal 29 Maret 2017.

g. Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, Perusahaan telah melaksanakan pengampunan pajak ini dengan memperoleh SKPP tanggal 7 April 2017.

**26 . TAXATION (continued)**

d. *Deferred Tax (continued)*

	<u>2017</u>	
	<u>(7.451)</u>	<b>Deferred Tax Assets (Liability) Company - Net</b>
	<u>(67)</u>	<b>Deferred Tax Liability Subsidiaries - Net</b>
	<u>(7.518)</u>	<b>Total Deferred Tax Assets (Liability)</b>

e. *Income tax relating to each item of other comprehensive income*

	(19)	<i>Remeasurements of gain (loss) on employee benefits liability</i>
	<u>(19)</u>	<b>Other Comprehensive Income</b>

*The management believed that the Company did not recognize deferred tax assets because it is probable that deferred tax assets can not be realized in the future.*

f. *Tax Assessment Letter*

*Subsequently, on May 4, 2016, the Company received SKPLB No. 00071/407/092/16 relating to overpayment of Value-Added Tax for the fiscal year 2014 amounted to Rp9,742.5 million instead of Rp9,999.9 million as claimed by the Company. As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not received the overpayment of VAT.*

*On March 14, 2017, Parent Company received Letter No. S-171/WPJ.19/KP.02/2017 regarding Response to Return Information Request Concerning the Amount of Taxes That are Not or Underpaid or Should Not Be Refunded, where the Parent Company liabilities are stated amounting to Rp28,06 billion. The Company has settled the obligation on March 29, 2017.*

g. *Tax Amnesty*

*In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 on the implementation of Law No. 11 of 2016 on tax amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty, the Company have participated in this tax amnesty with obtain SKPP on April 7, 2017.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**27 . TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha yang normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

	<u>2018</u>
<b>Sewa ke</b> (Catatan 34)	
PT Bakrie Swasakti Utama	4.623

Sifat dan hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan/ Nature of Relationship</u>	<u>Related Parties</u>
PT Bakrie Swasakti Utama	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	PT Bakrie Swasakti Utama
PT Provinces Indonesia	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	PT Provinces Indonesia
PT Multi Kontrol Nusantara	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	PT Multi Kontrol Nusantara
PT Viva Media Baru	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	PT Viva Media Baru
PT Asia Global Media	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	PT Asia Global Media
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika
PT Bakrie Global Ventura	Afiliasi / <i>Affiliate</i>	PT Bakrie Global Ventura

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan Komisaris dan Direksi yang dirinci pada (Catatan 1g). Total remunerasi dan imbalan lainnya yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebagai berikut:

**27 . TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Group entered into transactions with related parties.

	<u>2017</u>
<b>Rental to</b> (Note 34)	
PT Bakrie Swasakti Utama	4.623

Nature of relationships and transactions with related parties were as follows:

Key management personnel of the Company are the Boards of Commissioners and Directors as described in (Note 1g). Total remuneration and other benefits given to key management personnel were as follows:

	<u>31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017</u>			
	<u>Dewan Komisaris/ Board of Commissioners</u>	<u>Direksi/ Board of Directors</u>	<u>Total/ Total</u>	
Imbalan kerja jangka pendek	-	-	-	Short-term employment benefits
Imbalan pasca kerja	-	-	-	Post employment benefits
<b>Total</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<b>Total</b>

**Utang Pihak Berelasi**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Liabilitas jangka pendek</b>		
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika	35.186	35.186
PT Bakrie Global Ventura	11.912	11.912
<b>Total</b>	<u>47.098</u>	<u>47.098</u>
<b>Persentase terhadap Total Liabilitas Konsolidasian</b>	<u>0,2919%</u>	<u>0,3167%</u>

**Due to Related Parties**

<b>Current liabilities</b>
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika
PT Bakrie Global Ventura
<b>Total</b>
<b>Percentage to Total Consolidated Liabilities</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**27 . TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI  
(lanjutan)**

Utang pihak berelasi yang diperoleh PT Bakrie Connectivity (BCON), Entitas Anak, dari Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) merupakan utang usaha yang pembayarannya ditunda selama 18 bulan sejak tanggal 23 Desember 2014.

Utang pihak berelasi yang diperoleh Perusahaan dari PT Bakrie Global Ventura merupakan utang yang pembayarannya ditunda selama 18 bulan sejak tanggal 24 Maret 2015.

**28 . LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (dihitung oleh aktuaris independen PT Sigma Prima Solusindo) dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

Tingkat diskonto	8,5% pada 31 Desember 2018 dan 6,78% pada 31 Desember 2017 <i>8.5% in December 31, 2018 dan 6.78 in December 31, 2017</i>	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	6,5% per tahun / per annum	<i>Salary increment rate</i>
Tingkat mortalitas	TMI-III tahun 2011 / TMI-III year 2011	<i>Mortality rate</i>
Tingkat kemungkinan	5% dari tingkat mortalitas / 5% of mortality rate	<i>Disability rate</i>
Usia pensiun normal	55 tahun / 55 years	<i>Normal retirement age</i>
Tingkat Pengunduran diri	1% - 5%	<i>Resignation rate</i>

Analisa sensitivitas kuantitatif liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<b>Peningkatan (Penurunan) / Increase (Decrease)</b>	<b>Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Kerja / Impact on Employee Benefit Liability</b>	
Tingkat diskonto	1,00% -1,00%	(99) 112	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	1,00% -1,00%	112 (100)	<i>Salary increment rate</i>

Kelompok Usaha menghadapi sejumlah risiko signifikan terkait program imbalan kerja, sebagai berikut:

- (a) Perubahan tingkat diskonto  
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- (b) Tingkat kenaikan gaji  
Liabilitas imbalan kerja berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dimana semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai

	<b>2018</b>
Nilai kini liabilitas kewajiban kerja	206
Nilai wajar atas aset program	-
<b>Liabilitas imbalan kerja</b>	<b>206</b>

**27 . TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

Due to a related party obtained by PT Bakrie Connectivity (BCON), a Subsidiary, from Koperasi Karyawan Mitra Usaha Dinamika (Komunika) represents trade payable, which payment was deferred for 18 months starting from December 23, 2014.

Due to a related party obtained by the Company from PT Bakrie Global Ventura represents payable, which payment was deferred for 18 months starting from March 24, 2015.

**28 . EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY**

The employee benefits liability of the Group as of December 31, 2018 and 2017 (was calculated by an independent actuary PT Sigma Prima Solusindo), respectively, used the "Projected Unit Credit" method with considerations of the following assumptions:

The quantitative sensitivity analysis of the employee benefits liability to the changes in the weighted principal assumptions as of December 31, 2018 was as follows:

	<b>Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Kerja / Impact on Employee Benefit Liability</b>	
Tingkat diskonto	(99) 112	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	112 (100)	<i>Salary increment rate</i>

The Group was exposed to a number of significant risks related to its employee benefit plans, as follows:

- (a) Changes in discount rate  
A decrease in discount rate will increase plan liabilities.
- (b) Salary increment rate  
Employee benefit liability are linked to salary increment rate, whereby the higher salary increment rate will lead to higher liabilities.

Employee benefits liability was as follows:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
Nilai kini liabilitas kewajiban kerja	206	1.095	<i>Present value of benefits liability</i>
Nilai wajar atas aset program	-	-	<i>Fair value of plant assets</i>
<b>Liabilitas imbalan kerja</b>	<b>206</b>	<b>1.095</b>	<b><i>Employee benefits liability</i></b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28 . LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	<b>2018</b>
Saldo awal	1.095
Beban imbalan kerja karyawan	111
Rugi (penghasilan)	
komprehensif lain	(806)
Realisasi pembayaran manfaat	(194)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>206</b>

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Beban (penghasilan yang diakui dalam laba rugi :	
Biaya jasa kini	36
Biaya bunga	74
Dampak kurtailmen atau penyelesaian program	-
<b>Total</b>	<b>111</b>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Nilai kini liabilitas imbalan kerja	
pada awal tahun	1.095
Biaya jasa kini	36
Biaya bunga	74
Dampak kurtailmen atau penyelesaian program	-
Pengukuran kembali dari :	
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari :	
Perubahan dalam asumsi aktuaris	
Penyesuaian pengalaman	(806)
Imbalan yang dibayar	(194)
<b>Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja Pada Akhir Tahun</b>	<b>206</b>

**28 . EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

Movements of employee benefits liability were as follows:

	<b>2017</b>	
	767	<i>Beginning balance</i>
	234	<i>Employee benefits expense</i>
		<i>Other comprehensive loss (income)</i>
	94	<i>Actual benefits payments</i>
	-	
	1.095	<b>Ending Balance</b>

Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect to this employee benefits liability were as follows:

<i>Expense (income) recognized in profit or loss:</i>		
Current-service cost	170	
Interest cost	64	
Curtailment effect or program settlement	-	
<b>Total</b>	<b>234</b>	

Movements of the present value of the employee benefits liability were as follows:

<i>Present value of employee benefits liability at beginning of the year</i>	767	
<i>Current-service cost</i>	170	
<i>Interest cost</i>	64	
<i>Curtailment effect or program settlement</i>	-	
<i>Remeasurements from : Actuarial gain (losses) arising from :</i>		
<i>changes in actuary assumption</i>		
<i>Experience adjustments</i>	94	
<i>Benefit paid</i>	-	
<b>Present Value of Employee Benefits Liability at End of Year</b>	<b>1.095</b>	

**Perusahaan /  
The Company**

Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahunan berikutnya)	-	<i>Within the next 12 months (the next period yearly report)</i>
Antara 1 dan 3 tahun	14	<i>Between 1 and 3 years</i>
Antara 3 dan 5 tahun	15	<i>Between 3 and 5 years</i>
Antara 5 dan 10 tahun	32	<i>Between 5 and 10 years</i>
Di atas 10 tahun	145	<i>Beyond 10 years</i>
<b>Total</b>	<b>206</b>	<b>Total</b>

Perbandingan nilai kini liabilitas imbalan kerja, dan penyesuaian yang timbul akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan selama lima (5) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Comparison of the present value of employee benefits liability, and the experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what has actually occurred) over the last five (5) years were as follows:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	
Nilai kini liabilitas kewajiban kerja	(206)	(1.095)	(767)	(23.131)	(51.223)	<i>Present value of employee benefit liability</i>
Penyesuaian dalam liabilitas	952	450	(4.106)	(20.918)	40.563	<i>Adjustment on liability</i>

PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29 . INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 :

29 . FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table presents the carrying amounts and the estimated fair values of the financial instruments carried in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2018 and 2017 :

Akun	31 Desember 2018/ December 31, 2018		Accounts Financial Assets
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
<b>Aset Keuangan</b>			
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Kas	29	29	Cash on hand
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			<u>Loans and receivables</u>
Kas di bank	281	281	Cash in bank
Kas yang dibatasi penggunaannya	40	40	Restricted cash
Piutang usaha	953	953	Trade receivables
Jaminan	-	-	Security deposits
<b>Total Aset Keuangan</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>Total Financial Assets</b>
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Utang usaha	423.703	423.703	Trade payables
Utang lain-lain	143.150	143.150	Other payables
Beban akrual	3.959.154	3.959.154	Accrued expenses
Wesel senior	5.502.780	5.502.780	Senior notes
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	6.036.077	6.036.077	Settlement of payables through PKPU
<b>Total Liabilitas Keuangan</b>	<b>16.111.962</b>	<b>16.111.962</b>	<b>Total Financial Liabilities</b>

Akun	31 Desember 2017/ December 31, 2017		Accounts Financial Assets
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
<b>Aset Keuangan</b>			
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Kas	32	32	Cash on hand
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			<u>Loans and receivables</u>
Kas di bank	318	318	Cash in bank
Investasi jangka pendek	48	48	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	38	38	Restricted cash
Piutang usaha	2.253	2.253	Trade receivables
Jaminan	568	568	Security deposits
<b>Total Aset Keuangan</b>	<b>3.257</b>	<b>3.257</b>	<b>Total Financial Assets</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29 . INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

**29 . FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

Akun	31 Desember 2017/ December 31, 2017		Accounts Financial Liabilities
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
<b>Liabilitas Keuangan</b>			
<u>Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi</u>			<u>Measured at amortized Cost</u>
Utang usaha	336.649	336.649	Trade payables
Utang lain-lain	91.167	91.167	Other payables
Beban akrual	3.293.940	3.293.940	Accrued expenses
Wesel senior	5.148.240	5.148.240	Senior notes
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	5.931.222	5.931.222	Settlement of payables through PKPU
<b>Total Liabilitas Keuangan</b>	<b>14.848.316</b>	<b>14.848.316</b>	<b>Total Financial Liabilities</b>

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek :

Short-term financial assets and liabilities :

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun (1) atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual).

Short-term financial instruments with remaining maturities of one (1) year or less (cash and cash equivalents, trade receivables, restricted cash, short-term investments, trade payables, other payables and accrued expenses).

Instrumen keuangan ini sangat mendekati nilai tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek (Level 2).

These financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities (Level 2).

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang :

Long-term financial assets and liabilities :

a) Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel yang tidak dikuotasi (pinjaman jangka panjang dan utang sewa pembiayaan).

a) Unquoted long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (long-term loan and finance lease payables).

Nilai wajar dari liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama (Level 2).

The fair values of these financial liabilities are determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities (Level 2).

b) Liabilitas keuangan yang dikuotasi dalam pasar aktif (aset keuangan tersedia untuk dijual dan wesel senior).

b) Financial instruments quoted on an active market (available-for-sale financial asset and senior notes).

Nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual ditentukan dengan mengacu pada harga pasar terakhir.

The fair value of available-for-sale financial asset is determined based on the latest published quoted price.

**29 . INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Nilai wajar dari Wesel Senior yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku (Level 1).

**c) Aset keuangan jangka panjang**

Untuk aset keuangan tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi di harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal dikurangi penurunan nilai.

Tabel di atas ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- a) harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
- b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung (Level 2); dan
- c) input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

**30 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Kelompok Usaha dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Kelompok Usaha secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen risiko keuangan berada dibawah pengawasan langsung oleh Direksi dan terutama oleh Chief Financial Officer (CFO). CFO memiliki pusat departemen keuangan berikut kebijakan yang telah disetujui oleh Divisi Manajemen Risiko dan Direksi. Departemen ini mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan dalam kerjasama yang erat dengan unit-unit operasi Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko dan Direksi menentukan prinsip manajemen risiko keuangan secara keseluruhan, serta kebijakan pada area tertentu, seperti risiko mata uang asing, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan nonderivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

**29 . FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

*The fair value of the Senior Notes issued by the Group that are traded on an active market is determined with reference to their quoted market prices (Level 1).*

**c) Long-term financial assets**

*Other non-current financial assets that are not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs are carried at their nominal amounts less any impairment losses.*

*The table above analyzes the financial instruments measured at fair value by level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:*

- a) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- b) inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and*
- c) inputs are unobservable inputs for the asset or liability (Level 3).*

**30 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES**

*The Group is affected by various financial risks, including credit risk, foreign currency risk, interest rate risk and liquidity risk. The Group's overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on its previous years of financial performance.*

*Financial risk management is under the direct supervision of the Board of Directors and especially the Chief Financial Officer (CFO). The CFO has a central treasury department that follows policies approved by the Risk Management Division and Board of Directors. The department identifies and evaluates financial risks in close cooperation with the Company's operating units. The Risk Management Division and Board of Directors determine the principles for overall financial risk management, as well as policies covering specific areas, such as foreign currency risk, interest rate risk, credit risk, use of derivative and non-derivative financial instruments, and investment in excess of liquidity.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Risiko kredit**

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar nilai tercatat aset keuangan Kelompok Usaha, sebagai berikut:

	<b>2018</b>
Kas dan setara kas (kecuali kas)	281
Investasi jangka pendek	-
Kas yang dibatasi penggunaannya	40
Piutang usaha	953
Jaminan	-
<b>Total</b>	<b>1.274</b>

Kelompok Usaha mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang berkesinambungan dan pemantauan saldo secara aktif. Kelompok Usaha mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan aset derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2018 / December 31, 2018</b>					
	<b>Belum Jatuh Tempo ataupun Mengalami Penurunan Nilai/Neither Past Due nor Impaired</b>	<b>Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due but Not Impaired</b>				
	<b>Kurang dari 3 bulan/Less than 3 months</b>	<b>3 bulan - 6 bulan/3 months - 6</b>	<b>6 bulan - 1 tahun/6 months - 1 year</b>	<b>Lebih dari 1 tahun</b>	<b>Total / Total</b>	
Kas dan setara kas (kecuali kas)	281	-	-	-	255	Cash and cash equivalents (except cash o hand)
Investasi jangka pendek	-	-	-	-	48	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	40	-	-	-	38	Restricted cash
Piutang usaha	-	-	953	-	2.253	Trade receivables
Jaminan	-	-	-	-	568	Security deposits
<b>Total</b>	<b>321</b>	<b>-</b>	<b>953</b>	<b>-</b>	<b>3.126</b>	<b>Total</b>

**30 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (continued)**

**a. Credit risk**

The Group's exposure to credit risk arises from the default of other parties, with maximum exposure equal the carrying amount of its financial assets, as follows:

	<b>2017</b>	
Cash and cash equivalents (except cash on hand)	255	
Short-term investments	48	
Restricted cash	38	
Trade receivables	2.253	
Security deposits	568	
<b>Total</b>	<b>3.162</b>	

The Group has in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring. The Group manages credit risk exposed from their deposits with banks and derivative assets by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. There are no significant concentration of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

The analysis of the age of financial assets that were not yet due or not impaired and past due as at the end of the reporting period but not impaired was as follows:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**30 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (continued)**

31 Desember 2017 / December 31, 2017

	Belum Jatuh Tempo ataupun Mengalami Penurunan Nilai/Neither Past Due nor Impaired	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due but Not Impaired				Total / Total	
		Kurang dari 3 bulan/Less than 3 months	3 bulan - 6 bulan/3 months - 6	6 bulan - 1 tahun/6 months - 1 year	Lebih dari 1 tahun over 1 year		
Kas dan setara kas (kecuali kas)	255	-	-	-	-	255	Cash and cash equivalents (except cash o hand)
Investasi jangka pendek	48	-	-	-	-	48	Short-term investments
Kas yang dibatasi penggunaannya	38	-	-	-	-	38	Restricted cash
Piutang usaha	-	-	310	367	1.578	2.255	Trade receivables
Jaminan	568	-	-	-	-	568	Security deposits
<b>Total</b>	<b>909</b>	<b>-</b>	<b>310</b>	<b>367</b>	<b>1.578</b>	<b>3.164</b>	<i>Total</i>

Manajemen melakukan penilaian atas kualitas kredit counterparties karena tidak ada peringkat kredit eksternal yang tersedia dan terpenuhi, dimana tidak terdapat risiko signifikan yang terkait dengan mereka.

The management assessed the credit quality of the counterparties for which no external credit rating is available and is satisfied, that there is no significant risk associated with them.

**b. Risiko mata uang asing**

Kelompok Usaha terekspos risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dari transaksi, aset dan liabilitas tertentu dalam Dolar AS yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Kelompok Usaha memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dengan aset keuangan dalam mata uang asing terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Kelompok usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

**b. Foreign currency risk**

The Group is exposed to changes in foreign currency exchange rates primarily from certain transactions, assets and liabilities in US Dollar which arise from financing activities and daily operations. The Group monitors and manages the risk by matching the foreign currency financial liabilities with relevant foreign currency assets and buying or selling foreign currencies at spot rate when necessary.

As of December 31, 2018 and 2017, the Group had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

	2018	2017
<b>Aset</b>		
Kas		
Dolar AS	35	33
Dolar Singapura	-	-
Piutang usaha		
Dolar AS	15.023	15.004
Kas yang dibatasi penggunaannya		
Dolar AS	40	38
<b>Total Aset</b>	<b>15.099</b>	<b>15.075</b>
<b>Liabilitas</b>		
Utang usaha		
Dolar AS dan mata uang lain	57.179	53.053
Utang lain-lain		
Dolar AS	4.512	4.186
Beban akrual		
Dolar AS	3.647.422	2.873.643
Utang pihak berelasi		
Dollar As	11.912	11.912
Wesel senior		
Dollar As	5.502.780	5.148.240
Utang yang diselesaikan melalui PKPU		
Dolar AS dan mata uang lain	3.294.239	3.056.515
<b>Total Liabilitas</b>	<b>12.518.044</b>	<b>11.147.549</b>
<b>Liabilitas Neto</b>	<b>(12.502.945)</b>	<b>(11.132.474)</b>

Berdasarkan estimasi manajemen, sampai dengan tanggal pelaporan Kelompok Usaha berikutnya, kurs Rupiah terhadap Dolar AS dapat melemah/menguat 5% dibandingkan kurs pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Jika nilai tukar mata uang Rupiah Indonesia berlanjut melemah/menguat 5% terhadap mata uang Dolar AS yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2018 dengan seluruh variable lain tetap, maka rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2018 masing-masing akan berupa peningkatan/penurunan sekitar Rp486,1 miliar.

Jika nilai tukar mata uang Rupiah Indonesia berlanjut melemah/menguat 5% terhadap mata uang Dolar AS yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2018 dengan seluruh variable lain tetap, maka rugi sebelum pajak penghasilan pada tahun 2017 masing-masing akan berupa peningkatan/penurunan sekitar Rp498,5 miliar.

**c. Risiko tingkat suku bunga**

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman serta aset dan liabilitas berbunga. Kebijakan Kelompok Usaha adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

**30 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

	2018	2017	
<b>Assets</b>			<b>Assets</b>
Cash			Cash
US Dollar	35	33	US Dollar
Singapore Dollar	-	-	Singapore Dollar
Trade receivables			Trade receivables
US Dollar	15.023	15.004	US Dollar
Restricted fund			Restricted fund
US Dollar	40	38	US Dollar
<b>Total Assets</b>	<b>15.099</b>	<b>15.075</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Liabilities</b>			<b>Liabilities</b>
Trade payables			Trade payables
US Dollar and other currencies	57.179	53.053	US Dollar and other currencies
Other payables			Other payables
US Dollar	4.512	4.186	US Dollar
Accrued expenses			Accrued expenses
US Dollar	3.647.422	2.873.643	US Dollar
Due to related party			Due to related party
US Dollar	11.912	11.912	US Dollar
Senior notes			Senior notes
US Dollar	5.502.780	5.148.240	US Dollar
Settlement payables through PKPU			Settlement payables through PKPU
US Dollar and other currencies	3.294.239	3.056.515	US Dollar and other currencies
<b>Total Liabilities</b>	<b>12.518.044</b>	<b>11.147.549</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>Total Assets</b>	<b>(12.502.945)</b>	<b>(11.132.474)</b>	<b>Total Assets</b>

Based on management's estimate, until the Group's next reporting date, the exchange rate of Rupiah against US Dollar may weaken/strengthen by 5%, compared to the exchange rate as of December 31, 2018 and 2017.

If the extent the Indonesian Rupiah had weakened/strengthened by 5% against US Dollar at December 31, 2018 with all other variables held constant, the 2018 loss before income tax would have been an increase/a decrease of approximately Rp486.1 billion, respectively.

If the extent the Indonesian Rupiah had weakened/strengthened by 5% against US Dollar at December 31, 2018 with all other variables held constant, the 2016 loss before income tax would have been an increase/a decrease of approximately Rp498.5 billion, respectively.

**c. Interest rate risk**

The Group's exposure to interest rate risk relates primarily to its borrowing obligations and interest-bearing assets and liabilities. The Group's policies are to obtain the most favorable interest rates available.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Kelompok Usaha tidak memiliki saldo aset dan liabilitas dengan tingkat suku bunga mengambang yang material.

**d. Risiko likuiditas**

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Kelompok Usaha mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas dan fleksibilitas piutang melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan nonderivatif yang diperlukan dalam pemahaman jatuh tempo kebutuhan arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (yang terdiri dari saldo pokok terutang). Utang yang diselesaikan melalui PKPU sebagian akan diselesaikan melalui penerbitan *Mandatory Convertible Bond*.

**30 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (continued)**

As of December 31, 2018 and 2017, the Group did not have material balances of assets and liabilities with floating interest rates.

**d. Liquidity risk**

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents to support business activities on a timely basis. The Group maintains a balance between continuity of accounts receivable collectability and flexibility through the use of bank loans and other borrowings.

The following table analyzes the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities which are essential in understanding the timing of cash flows requirements. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (consisting of outstanding principal balance). Settlement of payables through PKPU will be settled partially by issuing *Mandatory Convertible Bonds*.

31 Desember 2018 / December 31, 2018						
Niali arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto/ Contractual undiscounted cash flowd amounts						
	Nilai tercatat/ carrying amounts	Total/ Total	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Utang usaha dan utang lain-lain	566.853	566.853	566.853	-	-	Trade and other payables
Beban akrual	3.959.154	3.959.154	-	-	3.959.154	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						Current maturities of Long term Liabilities
Wesel senior	5.502.780	5.148.240	-	-	5.148.240	Senior notes
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	-	47.098	-	Due to related parties
Utang yang diselesaikan melalui PKPU	6.036.077	5.931.222	-	-	5.931.222	Settlements of payables through PKPU
<b>Total</b>	<b>16.111.962</b>	<b>15.652.567</b>	<b>566.853</b>	<b>-</b>	<b>15.038.616</b>	<b>Total</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30 . TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**30 . FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND  
POLICIES (continued)**

31 Desember 2017 / December 31, 2017						
Niali arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto/ Contractual undiscounted cash flow amounts						
	Nilai tercatat/ carrying amounts	Total/ Total	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Utang usaha dan						Trade and other
utang lain-lain	427.816	-	-	-	-	payables
Beban akrual	3.293.940	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang						Current maturities of
jatuh tempo dalam						Long term
waktu satu tahun						Liabilities
Wesel senior	5.148.240	5.148.240	-	-	5.148.240	Senior notes
Utang pihak berelasi	47.098	47.098	47.098	-	-	Due to related parties
Utang yang diselesaikan						Settlements of payables
melalui PKPU	5.931.222	5.931.222	-	-	5.931.222	through PKPU
<b>Total</b>	<b>14.848.316</b>	<b>11.126.560</b>	<b>47.098</b>	<b>-</b>	<b>11.079.462</b>	<b>Total</b>

**Pengelolaan Permodalan**

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Kelompok Usaha adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Kelompok Usaha mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Kelompok Usaha akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Kelompok Usaha memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal dimana total utang dibagi dengan total modal. Total utang ini adalah utang pokok dari pinjaman yang berbunga dan total modal adalah total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**Capital Management**

The main objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of its business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, the Group may adjust the amount of dividend payments to shareholders, return capital structure or issue shares certificates. No changes have been made in the objectives, policies and processes as they have been applied in previous years.

The Group monitors its use of capital structure using a debt-to-equity ratio which is total debt divided by total equity. Total debt represents interest bearing borrowings, while equity represents total equity attributable to owners of the parent.

**31 . RUGI NETO PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN  
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK**

**31 . LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS  
OF PARENTS**

	2018	2017	
Rugi neto diatribusikan kepada			Net loss atributable to the owners
Pemilik entitas induk	(720.575)	(1.496.482)	of parents
Jumlah rata-rata tertimbang saham			Weighted average number of
per saham dasar (angka penuh)	36.773.904.635	36.773.904.635	ordinary shares (full amount)
<b>Rugi Per Saham Dasar</b>			<b>Basic Loss Per Share</b>
<b>(dalam satuan penuh)</b>	<b>(19,59)</b>	<b>(40,69)</b>	<b>(in full amount)</b>

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**32 . INFORMASI SEGMENT**

Kelompok Usaha hanya mempunyai satu segmen usaha yaitu jasa telekomunikasi yang dipertimbangkan sebagai segmen primer.

Rincian pendapatan jasa telekomunikasi berdasarkan jenis jasa layanan adalah sebagai berikut:

	<b>2018</b>
Pendapatan pemakaian pulsa	8.026
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1 miliar)	500
<b>Total</b>	<b>8.526</b>

**33 . LISENSI JASA TELEKOMUNIKASI**

**a. Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan bergerak Seluler**

Pada tanggal 17 April 2015, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 186 tahun 2015 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Seluler PT Bakrie Telecom Tbk". Lisensi ini diberikan untuk menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak seluler dengan Wilayah Penyelenggaraan Nasional. Izin ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap lima (5) tahun.

**b. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas**

Pada tanggal 25 Agustus 2004, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dengan Akses Radio dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP.282 tahun 2004 tentang "Lisensi untuk Jaringan Tetap Lokal dengan Akses Radio dan Jasa Teleponi Dasar PT Bakrie Telecom". Lisensi ini diberikan untuk menyelenggarakan (i) Jaringan Tetap Lokal dengan alokasi frekuensi 825 Mhz - 835 Mhz berpasangan dengan 870 Mhz - 880 Mhz dan (ii) Jasa Teleponi Dasar dengan wilayah layanan di propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dengan akses radio dan jasa teleponi dasar, sesuai dengan Peraturan No. 36/1999 tentang Telekomunikasi.

Pada tanggal 15 Juni 2007, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 298/KEP/M.KOMINFO/6/2007.

**32 . SEGMENT INFORMATION**

The Group has only one business segment, i.e. telecommunication services, which are considered as a primary segment.

The details of revenues based on the service type were as follows:

	<b>2017</b>	
	6.113	Usage charge
	411	Others (each below Rp 1 billion)
<b>Total</b>	<b>6.524</b>	<b>Total</b>

**33 . TELECOMMUNICATION SERVICE LICENSE**

**a. License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network**

On April 17, 2015, the Company obtained Operational License for Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network based on the Decree of Director General of Post and Information No. 186 year 2015 regarding "License for the Basic Telephony Services Through Cellular Mobile Network PT Bakrie Telecom Tbk". This license was granted for Basic Telephony Services through cellular mobile network with national service area coverage. The license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years.

**b. License for Fixed Wireless Access with Limited Mobility**

On August 25, 2004, the Company obtained Operational License for Local Fixed Network with Radio Access License and Basic Telephony Service based on the Decree of Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia No. KP.282 year 2004 regarding "License for the Local Fixed Line with Radio Access and Basic Telephony Services PT Bakrie Telecom." This license was granted for (i) Local Fixed network with frequency allocation of 825 Mhz - 835 Mhz and pair-off with 870 Mhz-880 Mhz, and (ii) Basic Telephone Service covering DKI Jakarta, West Java and Banten provinces. This Local Fixed Network service with Radio Access and Basic Telephone Service is in accordance with Law No. 36/1999 of Telecommunication.

On June 15, 2007, the Company was granted an Operational License for Fixed Wireless Access with Limited Mobility based on the Decree of the Ministry of Communication and Information Republic of Indonesia No. 298/KEP/M.KOMINFO/6/2007.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**33 . LISENSI JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)**

Izin tersebut diberikan untuk menyelenggarakan:  
(i) Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas yang beroperasi pada pita frekuensi 800 MHz, yaitu pada kanal 37, 78 dan 119 di Propinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat; kanal 201, 242 dan 283 untuk di luar Propinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat; dan (ii) Jasa Teleponi Dasar dengan jangkauan nasional yang mencabut lisensi regional sebelumnya No.KP.282 tahun 2004.

Pada tanggal 14 Oktober 2009, Pemerintah menetapkan penambahan alokasi kanal frekuensi radio dengan nomor kanal 1019 untuk wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat kepada Perusahaan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.363/Kep/M.KOMINFO/X/2009.

Pada tanggal 10 September 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 30 Tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Dengan peraturan ini maka Pita frekuensi radio 800 MHz pada 824-835 MHz yang berpasangan dengan 869-880 MHz; serta 880-890 MHz yang berpasangan dengan 925-935 MHz dengan moda FDD, diperuntukan seluruhnya bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Berbasis Netral Teknologi dengan cakupan wilayah layanan nasional.

Pada tanggal 26 September 2014, Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 932 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT Bakrie Telecom, Tbk. Kepada PT Smartfren Telecom, Tbk., dengan pengalihan spektrum pita frekuensi dimaksud efektif mulai berlaku terhitung sejak tanggal 14 Desember 2014. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mempersyaratkan Penggabungan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi PT Bakrie Telecom Tbk. dan PT Smartfren Tbk., sehingga PT Bakrie Telecom Tbk. tetap dapat memberikan Layanan Jasa Teleponi Dasar kepada seluruh pelanggannya.

**c. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional (SLI)**

Pada tanggal 12 Februari 2009, Perusahaan memperoleh izin untuk menyelenggarakan SLI dan jasa teleponi dasar, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 59/KEP/M.KOMINFO/02/2009 tentang "Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional PT Bakrie Telecom Tbk". Izin penyelenggaraan SLI ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun.

**33 . TELECOMMUNICATION SERVICE LICENSE (continued)**

*The license was granted for (i) Fixed Wireless Access with Limited Mobility frequency bandwidth of 800 Mhz with channel number 37, 78 and 119 in Banten, DKI Jakarta and West Java provinces; Channel 201,242 and 283 for outside Banten, DKI Jakarta, Banten and West Java; (ii) Basic Telephony Service with nationwide coverage, which revoked the previous regional license No. KP.282 year 2004.*

*On October 14, 2009, the Government determined additional frequency channel allocation number 1019 for DKI Jakarta, Banten and West Java Area, as stated in Decree of Ministry of Communication and Information No. 363/Kep/M.KOMINFO/X/2009.*

*On September 10, 2014, the Government issued the Regulation of the Ministry of Communication and Information Republic of Indonesia No. 30 Year 2014 concerning Settlement Radio Frequency Band of 800 MHz for the Need Mobile Cellular Network. With this ruling, therefore the radio frequency band of 800 MHz from 824-835 MHz was paired with 869-880 MHz, and 880-890 MHz was paired with 925-935 MHz with FDD mode, intended entirely for Mobile Cellular Network Based 'Neutral' Technology with national service area coverage.*

*On September 26, 2014, the Government issued Decree of the Minister of Communication and Information No. 932 Year 2014 regarding the approval of Transfer of License Use of Radio Frequency Spectrum at 800 MHz Radio Frequency Band PT Bakrie Telecom Tbk. to PT Smartfren Telecom, Tbk., with the transfer of the frequency band spectrum effectively coming into force as from December 14, 2014. The Minister of Communication and Information, would require the Merger Implementation of Telecommunication Network PT Bakrie Telecom Tbk. and PT Smartfren Tbk., therefore PT Bakrie Telecom Tbk. would still provide basic telephony services to all of its customers.*

**c. License for Operation of Fixed International Direct Connection Network (SLI)**

*On February 12, 2009, the Company obtained a license for SLI and basic telephony service, based on Decree of the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia No. 59/KEP/M.KOMINFO/02/2009 regarding "License for Operation of Fixed International Direct Connection Network PT Bakrie Telecom, Tbk." The SLI will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years.*

**33 . LISENSI JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)**

**d. Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)**

Pada tanggal 23 Januari 2006, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, No. 16/Dirjen/2006 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik PT Bakrie Telecom Tbk". ITKP ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun. Evaluasi terbaru dibuat pada tahun 2011.

**e. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP)**

Pada tanggal 2 Maret 2007, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 053/DIRJEN/2007 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet PT Bakrie Telecom Tbk". Izin penyelenggaraan jasa ISP ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun. Evaluasi terbaru dibuat pada tahun 2012.

**f. Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP)**

Pada tanggal 7 Juni 2010, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point Provider/NAP) dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 195/DIRJEN/2010 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet PT Bakrie Telecom Tbk". Izin NAP ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun.

**g. Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Pusat Layanan Informasi**

Pada tanggal 5 Agustus 2009, Perusahaan memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Call Center dengan wilayah layanan nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 184/DIRJEN/2009 tentang "Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Pusat Layanan Informasi PT Bakrie Telecom Tbk". Izin ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap lima (5) tahun.

**33 . TELECOMMUNICATION SERVICE LICENSE (continued)**

**d. License to Operate Internet Telephony Services for Public Interest (VoIP)**

On January 23, 2006, the Company obtained License to Operate Internet Telephony Services for Public Interest (VoIP) with nationwide coverage, based on Decree of Director General of Post and Telecommunication, Department of Communication and Information No. 16/Dirjen/2006 regarding "License to Operate Internet Telephony Services for Public Interest PT Bakrie Telecom Tbk." The VoIP will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years. The most recent evaluation was conducted in 2011.

**e. License for Operation of Internet Service Provider (ISP)**

On March 2, 2007, the Company obtained a License for Operational Internet Service Provider with nationwide coverage, based on Decision Letter of the Director General Post and Telecommunication No. 053/DIRJEN/2007 regarding "License for Operation of Internet Service Provider PT Bakrie Telecom Tbk." The ISP license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years. The most recent evaluation was conducted in 2012.

**f. License for Operation of Network Access Point Provider (NAP)**

On June 7, 2010, the Company obtained a License for Operational Network Access Point Provider with nationwide coverage based on Decision Letter of the Director General Post and Telecommunication No. 195/DIRJEN/2010 regarding "License for Operation of Network Access Point Provider PT Bakrie Telecom Tbk." The NAP license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years.

**g. License for Operation of Call Center Service Provider**

On August 5, 2009, the Company obtained a License for Operation of Call Center Service Provider with nationwide coverage, based on Decree of the Director General Post and Telecommunication No. 184/DIRJEN/2009 regarding "License for Operation of Call Center Service Provider PT Bakrie Telecom Tbk." The license will be evaluated annually and will be fully evaluated every five (5) years.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN**

Perusahaan memiliki perjanjian dan ikatan yang signifikan, sebagai berikut:

**a. PT Indosat Tbk**

Pada tanggal 18 Desember 2007, Perusahaan dan PT Indosat Tbk (Indosat) mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jarbersel INDOSAT dengan Jartaplok BAKRIE TELECOM No. INDOSAT 0003/C00-CC0/LGL/2007 dan Jartaplok BAKRIE TELECOM No. 2392/EST-PKS/INDOSAT/XII/2007 dan Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jartap INDOSAT dengan Jartaplok BAKRIE TELECOM No. INDOSAT 0006/C00-CC0/LGL/2007 serta No. BAKRIE TEL2500/EST-PKS/INDOSAT/XII/2007. Perjanjian tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Interkoneksi antara jaringan bergerak Selular Indosat dengan jaringan tetap lokal Perusahaan dan jaringan tetap Indosat dengan jaringan tetap lokal Perusahaan sehingga setiap pengguna masing-masing pihak dapat mengadakan atau menerima panggilan interkoneksi dan dapat juga mengirim dan menerima SMS ke/atau dari setiap pengguna pihak lainnya;
- Besarnya biaya interkoneksi adalah sesuai dengan lalu lintas interkoneksi antara Indosat dengan Perusahaan;
- Perjanjian-perjanjian tersebut berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak. Dalam hal tidak ada perubahan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, maka perjanjian ini akan tetap berlaku secara otomatis.

Dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama, maka perjanjian-perjanjian interkoneksi yang telah ditandatangani sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jarbersel INDOSAT dengan Jartaplok BAKRIE TELECOM tersebut telah diperbaharui dengan amandemen keempat yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2011 No. INDOSAT 035/C00-C0H/LGL/2011 dan No. BAKRIE TELECOM 5542/EST-Amd/INDOSAT/X/2011.

Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jartap INDOSAT dengan Jartaplok BAKRIE TELECOM tersebut telah diperbaharui dengan amandemen ketiga yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2011 No. INDOSAT 036/C00-C0H/LGL/2011 dan No. BAKRIE TELECOM 5543/EST-Amd/INDOSAT/X/2011.

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS**

The Company had outstanding significant agreements and commitments as follows:

**a. PT Indosat Tbk**

On December 18, 2007, the Company and PT Indosat Tbk (Indosat) signed a Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network Jarbersel INDOSAT with Jartaplok BAKRIE TELECOM No. INDOSAT 0003/C00-CC0/LGL/2007 and Jartaplok BAKRIE TELECOM No. 2392/EST-PKS/INDOSAT/XII/2007 and Cooperation Agreement of interconnection Telecommunication Network Jartap INDOSAT with Jartaplok BAKRIE TELECOM No. INDOSAT 0006/C00-CC0/LGL/2007 and No. BAKRIE TEL2500/EST-PKS/INDOSAT/XII/2007. The agreement covered the following, among others:

- Interconnection between mobility network Indosat Cellular with the Company's local fixed line and interconnection of Indosat's fixed line with the Company's local fixed line, whereby the users are able to make or receive interconnection call and also send and receive SMS to or from other users;
- Total interconnection expenses are according to traffic interconnection between Indosat and the Company;
- The agreement is effective from the signing date by both parties. If there are no amendments to or termination of this Cooperation Agreement, then it will remain in effect automatically.

With the signing of the Cooperation Agreement, the previous interconnection agreement was no longer effective.

The agreement of Interconnection Telecommunication Network Jarbersel INDOSAT with Jartaplok BAKRIE TELECOM was renewed with the fourth amendment that was signed on October 7, 2011 No. INDOSAT 035/C00-C0H/LGL/2011 and No. BAKRIE TELECOM 5542/EST-Amd/INDOSAT/X/2011.

The agreement of Interconnection Telecommunication Network Jartap INDOSAT with Jartaplok BAKRIE TELECOM was renewed with the third amendment that was signed on October 7, 2011 No. INDOSAT 036/C00-C0H/LGL/2011 and No. BAKRIE TELECOM 5543/EST-Amd/INDOSAT/X/2011.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**b. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk**

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) No. TELKOM 148/HK.810/DCI-A1000000/2007 dan No. BAKRIE TELECOM 2501/EST-PKS/TELKOM/ XII/2007, dimana masing-masing pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Saling membuka seluruh prefiks dan/atau kode akses, sehingga setiap pelanggan dari kedua pihak dapat memanggil dan/atau menerima panggilan dari nomor pelanggan pihak lainnya memanfaatkan fitur-fitur atas panggilan interkoneksi, mengakses atau memanfaatkan berbagai jenis jasa telepon pada operator lainnya;
- Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi tanggal 28 Desember 2007 antara Perusahaan dengan Telkom tersebut, maka perjanjian-perjanjian kerja sama interkoneksi beserta semua perubahan/side letter/adendum atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Perjanjian dengan Telkom berlaku selama dua (2) tahun, efektif mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk amandemen/side letter.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan adendum pertama yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2008 No. TELKOM 46/HK.820/DCI-A1000000/2008 dan No. BAKRIE TELECOM 388/EST-Amd/TELKOM/III/2008 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum kedua yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2009 No. TELKOM 127/HK.820/DCI-A1000000/2009 dan No. BAKRIE TELECOM 2444/EST-Amd/TELKOM/XII/2009 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum ketiga yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2011 No. TELKOM 193/HK.820/DCI-A1000000/2011 dan No. BAKRIE TELECOM 5228/EST-AMD/TELKOM/VII/2011 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum keempat yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2012 No. TELKOM 126/HK.820/DWS-A1000000/2012 dan No. BAKRIE TELECOM 610/BTEL-AMD/TELKOM/ XII/2012.

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

**b. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk**

*The Company has a Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network with PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) No. TELKOM 148/HK.810/DCI-A1000000/2007 and No. BAKRIE TELECOM 2501/EST-PKS/TELKOM/ XII/2007 under which each party agrees as follows:*

- *Opening all prefix and/ or access codes, so each customer from either party can make and/ or receive calls from other operator numbers, using features of interconnection call, accessing or using telephone services of other operators;*
- *With the signing of the Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network between Company and Telkom dated December 28, 2007, the cooperation agreement of interconnection and all the amendments/side letters/ addendum previously signed were no longer effective.*
- *Agreement with Telkom was effective for two (2) years, from January 1, 2008 to December 31, 2009 and could be extended or ended before the expiry date based on agreement from both parties in the form of an amendment/ side letter*

*The agreement was renewed with the first amendment that was signed on March 31, 2008 No. TELKOM 46/HK.820/DCI-A1000000/2008 and No. BAKRIE TELECOM 388/EST-Amd/TELKOM/ III/2008, which was then renewed with the second amendment signed on December 30, 2009 No. TELKOM 127/HK.820/DCI-A1000000/2009 and No. BAKRIE TELECOM 2444/EST-Amd/TELKOM/ XII/ 2009, which was then renewed with the third amendment signed on August 28, 2011 No. TELKOM 193/HK.820/DCI-A1000000/2011 and No. BAKRIE TELECOM 5228/EST-AMD/ TELKOM/VII/2011, which was then renewed with the fourth amendment signed on December 18, 2012 No. TELKOM 126/HK.820/DWS-A1000000/2012 and No. BAKRIE TELECOM 610/BTEL-AMD/TELKOM/ XII/2012.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**c. PT XL Axiata Tbk (sebelumnya PT  
Excelcomindo Pratama Tbk)**

1. Perusahaan menandatangani Master Tower Lease Agreement (MLTA) dengan PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) tertanggal 16 Juli 2008 mengenai sewa ruang atas satu atau lebih menara telekomunikasi BTS milik XL untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang akan digunakan untuk operasional usaha Perusahaan. Sejak tanggal 1 November 2012 Perusahaan menghentikan kerja sama MLTA. Atas terminasi ini, Perusahaan dikenakan biaya terminasi sebesar Rp163,2 miliar. Perjanjian ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Interkoneksi langsung antara jaringan Bakrie Telecom dengan jaringan Excelcom sehingga setiap pengguna masing-masing dapat mengirim atau menerima panggilan atau SMS dari pelanggan masing-masing perusahaan;
- Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan interkoneksi Excelcom atas panggilan keluar sesuai dengan hak Excelcom berdasarkan peraturan pemerintah serta perjanjian diatas; dan
- Perjanjian interkoneksi berlaku efektif sejak tanggal 19 Desember 2007 dan akan berlaku selama jangka waktu lima (5) tahun.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan amandemen kelima yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2012 No. XL: 006/LGL-TBU-CR/HAY/V/2012 dan No. BAKRIE TELECOM: 662/BTEL-Amd/XL/VI/2012.

2. Pada tanggal 14 April 2009, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama "Interkoneksi Sambungan Langsung Internasional" dengan XL No. XL 1838.A/XXXII.S.5360/XL/IV/2009 dan No. BTEL 637/EST-PKS/XL/IV/2009.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan amandemen pertama yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2011 No. XL: 256/LGL-NetCo/X/2011 dan No. BTEL 5578/EST-AMD/XL/X/2011.

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

**c. PT XL Axiata Tbk (formerly PT Excelcomindo  
Pratama Tbk)**

1. The Company entered into a Master Tower Lease Agreement (MLTA) with PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) dated July 16, 2008 regarding the lease of space on one or more BTS Towers owned by XL and ground space of the property for the placement of the Company communication equipment to be used in the operation of the Company's business. On November 1, 2012, the Company terminated the MLTA. Due to the termination, the Company was charged the termination costs amounting to Rp163.2 billion. The agreement covers the following:

- Direct interconnection between Bakrie Telecom network and Excelcom network, so each user can send or receive calls or SMS from customers of each company;
- The Company has an obligation to pay Excelcom for the interconnection revenue from outgoing calls by rights Excelcom's network based on government regulation and the agreement; and
- Interconnection agreement is effective for five (5) years starting December 19, 2007.

The agreement was renewed with fifth amendment that was signed on June 1, 2012 No. XL: 006/LGL-TBU-CR/HAY/V/2012 and No. BAKRIE TELECOM: 662/BTEL-Amd/XL/VI/2012.

2. On April 14, 2009, the Company and XL signed a Cooperation Agreement No. XL 1838.A/XXXII.S.5360/XL/IV/2009 and No. BTEL 637/EST-PKS/XL/IV/2009 concerning "Interconnection of International Direct Dial."

This agreement was renewed with the first amendment that was signed on October 17, 2011 No. XL: 256/LGL-NetCo/X/2011 and No. BTEL 5578/EST-AMD/XL/X/2011.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**d. PT Telekomunikasi Selular**

Pada tanggal 30 November 2007, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan dengan Telkomsel dengan Jaringan Tetap Lokal Bakrie Telecom No. Telkomsel : 2162/LG.05/PD-00/XI/2007 dan No. Bakrie Telecom 1408/EST-PKS/TELKOMSEL/XI/ 2007, yang bertujuan mengganti perjanjian yang lama yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Interkoneksi langsung antara jaringan Telkomsel dengan jaringan Perusahaan untuk menyediakan jasa panggilan atau panggilan dan mengirim pesan pendek (SMS) melalui Telkomsel dan jaringan Perusahaan dari pelanggan masing-masing perusahaan;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Telkomsel beban interkoneksi sesuai dengan peraturan Pemerintah dan perjanjian atas pendapatan dari panggilan keluar melalui sambungan Telkomsel; dan
- Perjanjian pertama dengan Telkomsel tersebut berlaku efektif untuk dua (2) tahun sejak tanggal 1 November 2007 sampai dengan 31 Oktober 2009 dan diperpanjang secara otomatis untuk setiap dua (2) tahun berikutnya.
- Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan amandemen keenam yang ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2012 No. TELKOMSEL Amd.703/LG.05/PD-00/V/2012 dan No. Bakrie Telecom 599/BTEL-AMD/TELKOMSEL/V/2012.

**e. PT Mobile 8 Telecom Tbk**

Pada tanggal 30 Januari 2004, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan dengan PT Komunikasi Selular Indonesia (Komselindo) dan PT Metro Selular Nusantara (Metrose), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Interkoneksi jaringan Perusahaan dengan Sambungan Jaringan Selular (STBS) Komselindo dan Metrose untuk menyediakan jasa panggil atau menerima panggilan dan mengirim atau menerima pesan SMS dari pelanggan masing-masing perusahaan;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Komselindo dan Metrose biaya interkoneksi sesuai dengan peraturan pemerintah atas pendapatan dari panggilan keluar melalui jaringan Komselindo dan Metrose; dan

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

**d. PT Telekomunikasi Selular**

*On November 30, 2007, the Company and Telkomsel entered into a Cooperation Interconnection Network Agreement No. Telkomsel : 2162/LG.05/PD-00/XI/2007 and No. Bakrie Telecom 1408/EST-PKS/TELKOMSEL/XI/2007 to revoke the previous cooperation agreement that had been signed by the two parties. The agreement covers the following:*

- *Interconnection of the Company's telecommunication network with Telkomsel network to make outgoing or receive incoming calls and short message service (SMS) through Telkomsel and the Company's network from a customer of either company;*
- *The Company has an obligation to pay interconnection expense to Telkomsel based on the government regulation and the agreement of revenue from outgoing calls made through Telkomsel's networking; and*
- *The original agreement with Telkomsel is effective for two (2) years from November 1, 2007 until October 31, 2009 and will automatically be renewed and remain effective for the next two (2) years.*
- *The agreement was renewed with the sixth amendment that was signed on May 28, 2012 No. TELKOMSEL Amd.703/LG.05/PD-00/V/2012 and No. Bakrie Telecom 599/BTEL-AMD/TELKOMSEL/V/2012.*

**e. PT Mobile 8 Telecom Tbk**

*On January 30, 2004, the Company, PT Komunikasi Selular Indonesia (Komselindo) and PT Metro Selular Nusantara (Metrose), entered into a Cooperation Interconnection Network Agreement, which covered the following:*

- *Interconnection of the Company's telecommunication network with cellular lines of Komselindo and Metrose networks to make outgoing or receive incoming calls and SMS from a customer of any of the companies;*
- *The Company has an obligation to pay interconnection charges to Komselindo and Metrose based on the government regulation for revenue from outgoing calls made through Komselindo and Metrose networking; and*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

- Perjanjian dengan Komselindo dan Metroselel tersebut berlaku secara efektif sejak tanggal 30 Januari 2004 dan berlaku terus menerus sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak atau dihentikan berdasarkan keputusan pemerintah yang mencabut izin masing-masing pihak.

Sehubungan dengan telah efektifnya penggabungan usaha antara Metroselel, Komselindo dan Telesera ke dalam PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) pada tanggal 31 Mei 2007 berdasarkan Surat Efektif Pemberitahuan Penggabungan dari Mobile-8 No. 054/M8-LGL/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007, maka sejak tanggal efektif tersebut, seluruh hak dan liabilitas Metroselel, Komselindo dan Telesera berdasarkan Perjanjian Interkoneksi beralih secara hukum kepada Mobile-8.

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Antar Jaringan Tetap Lokal dengan Mobile-8 No. Mobile-8: 37.M8/37.BTEL-FWA.08/TEK/II/2008 No. Bakrie Telecom 2586/EST-PKS/M8/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan diubah dengan addendum pertama yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2010 dengan referensi No. Mobile-8: 205.M8/205.BTEL.10/ICR/VII/2010 Nomor Bakrie Telecom: 1775/EST-Amd/MOBILE-8/VII/2010.

Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Bergerak Selular Mobile 8 dengan Jaringan Tetap Lokal Bakrie Telecom No. Mobile 8 : 02.MOBILE 8/02.BTEL.08/TEK/II/2008 No. Bakrie Telecom 2585/EST-PKS/M8/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan diubah dengan amendemen pertama yang ditandatangani tanggal 28 Maret 2008 Nomor Mobile 8: 86.MOBILE-8/87.BTEL.08/ICR/III/2008 Nomor Bakrie Telecom: 396/EST-Amd/MOBILE-8/III/2008 dan amendemen kedua yang ditandatangani tanggal 15 April 2009 Nomor Mobile 8: 030.MOBILE-8/030.BTEL.09.ICR/II/2009 Nomor Bakrie Telecom : 348/EST-Amd/MOBILE-8/II/2009, dan amendemen ketiga yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2010 Nomor Mobile 8:197.M8/197.BTEL.10/ICR/VII/ 2010 - No. Bakrie Telecom: 1623/EST-Amd/M8/VII/2010.

**f. PT Hutchinson CP Telecommunications**

Pada tanggal 22 Desember 2006, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi dengan PT Hutchinson CP Telecommunications ("HCPT") No. BAKRIE TEL:1157/EST-PKS/HCPT/XII/2006 dan No. HCPT 243/HCPT-ICR/XII/2006 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

- *The agreement between Komselindo and Metroselel has been effective since January 30, 2004 and will be in effect continuously until there is a written notice to terminate the agreement at the latest six (6) months after written notice of either party, or terminated based on the government's decision to revoke the license of either party.*

*In connection with the effective business acquisitions between Metroselel, Komselindo and Telesera into PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) on May 31, 2007 based on Effective Announcement Letter of Acquisitions from Mobile-8 No. 054/M8-LGL/VI/2007 on June 22, 2007, all rights and liabilities of Metroselel, Komselindo and Telesera were legally transferred to Mobile-8 based on the Interconnection Agreement.*

*The Company entered into a Cooperation Interconnection Local Fixed Network Agreement with Mobile-8 through No. Mobile-8: 37.M8/37.BTEL-FWA.08/TEK/II/2008 No. Bakrie Telecom 2586/EST-PKS/M8/XII/2007 dated December 28, 2007 and renewal with first amendment was signed on July 13, 2010 with reference No. Mobile-8: 205.M8/205.BTEL.10/ICR/VII/2010 No. Bakrie Telecom: 1775/EST-Amd/MOBILE-8/VII/2010.*

*The Cooperation agreement regarding Interconnection Mobile Network Cellular Mobile-8 with Local Fixed Network Bakrie Telecom No. Mobile 8: 02.MOBILE-8/02.BTEL.08/TEK/II/2008 No. Bakrie Telecom 2585/EST-PKS/M8/XII/2007 dated December 28, 2007 and renewed with first amendment that was signed on March 28, 2008 No. Mobile 8: 86.MOBILE-8/87.BTEL.08/ICR/III/2008 No. Bakrie Telecom: 396/EST-Amd/MOBILE-8/III/2008 and second amendment that was signed on April 15, 2009 No. Mobile 8: 030.MOBILE-8/030.BTEL.09.ICR/II/2009 No. Bakrie Telecom: 348/EST-Amd/MOBILE-8/II/2009, and third amendment that was signed on July 13, 2010 No. Mobile 8 : 197.M8/197.BTEL.10/ICR/VII/2010 - No. Bakrie Telecom: 1623/EST-Amd/M8/VII/2010.*

**f. PT Hutchinson CP Telecommunications**

*On December 22, 2006, the Company entered into a Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network with PT Hutchinson CP Telecommunications ("HCPT") No. BAKRIE TEL: 1157/EST-PKS/HCPT/XII/2006 and No. HCPT 243/HCPT-ICR/XII/2006 which covered the following:*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

- Interkoneksi antara jaringan telekomunikasi Perusahaan dengan jaringan telekomunikasi HCPT, sehingga setiap pelanggan Perusahaan dan HCPT dapat mengadakan atau menerima panggilan interkoneksi serta dapat menerima atau mengirim SMS;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya interkoneksi kepada HCPT dan menjaga kualitas pelayanan interkoneksi bagi pelanggannya;
- Perjanjian antara Perusahaan dan HCPT tersebut berlaku secara efektif sejak tanggal 22 Desember 2006 dan berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak atau dihentikan berdasarkan keputusan pemerintah.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan adendum keempat yang ditandatangani pada tanggal 5 April 2011 No. HCPT: 181/LGL-AMD4-AGR/PT Bakrie Telecom Tbk/IM-LS/ICGR/IV/11 and No. BTEL: 4127/EST-Amd/HCPT/II/2011.

**g. PT Smart Telecom**

- Interkoneksi antara jaringan tetap lokal Perusahaan dengan jaringan bergerak selular Smart agar dapat menyediakan jasa telekomunikasi yang lebih handal, sehingga Perusahaan dan Smart saling menyediakan layanan interkoneksi kepada pelanggannya;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya interkoneksi kepada Smart sebagai akibat dari layanan ini dan juga sebaliknya.

Pada tanggal 6 November 2007, Perusahaan dan Smart menandatangani adendum pertama terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi No. BAKRIETEL 2000/EST-Amd/SMART/XI/2007 dan No. SMART: AMD.283/LO-BOD/ST/RAI/XI/2007 untuk mengubah ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi, berkaitan dengan perubahan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular Smart.

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

- *Interconnection between the telecommunication network of the Company and telecommunication network of HCPT to provide interconnection call service and sending Short Message Service (SMS) and receive calls or SMS from each Company's customers;*
- *The Company has the obligation to pay interconnection charges to HCPT and maintain the quality of interconnection services for customers;*
- *The agreement between the Company and HCPT was effective from December 22, 2006 and could be terminated at any time within three (3) months after written notice from either of the parties, or terminated based on a government decree.*

*The agreement was renewed with the fourth amendment that was signed on April 5, 2011 No. HCPT: 181/LGL-AMD4-AGR/PT Bakrie Telecom Tbk/IM-LS/ICGR/IV/11 and No. BTEL: 4127/EST-Amd/HCPT/II/2011.*

**g. PT Smart Telecom**

- *Interconnection between Company local fixed network with mobility network cellular Smart is for providing good telecommunication services therefore the Company and Smart can provide interconnection services to their customers;*
- *The Company has the obligation to pay the cost of interconnection service to Smart and vice versa.*

*On November 6, 2007, the Company and Smart signed the first Amendment of Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network No. BAKRIETEL 2000/EST-Amd/SMART/XI/2007 and No. SMART: AMD.283/LO-BOD/ST/RAI/XI/2007 to change the consideration requirement in the Cooperative Agreement of Interconnection Telecommunication Network in relation to the amendment of license for Mobility Network Cellular Smart.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan amandemen kedua yang ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2008 No. SMART AMD.097/LO-BOD/ICR/ST/III/ 2008 dan No. BAKRIE TEL 290/EST-Amd/SMART/III/ 2008 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum ketiga yang ditandatangani pada tanggal 7 September 2009 No. SMART 422/Regulatory-ICR/SMART/Add3-Bakrie/IX/09 dan No. BAKRIE TEL 1817/EST-AMD/SMART/IX/ 2009 dan amandemen keempat yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2010 No. BAKRIE TEL: 670/EST-AMD/SMART/IV/2010 dan No. SMART: 135/Regulatory-ICR/SMART/AmdIV-Bakrie/IV/10.

Amandemen kelima yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2011 No. BAKRIE TEL: 4655/BTEL-Amd/SMART/V/2011 dan No. SMART: 136/Regulatory-ICR/SMART/Amd5-BAKRIE/V/11. Amandemen keenam yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2013 No. BAKRIE TEL: 276/BTEL-Amd/SMARTFREN/V/2013 dan No. SMART: 038a/Regulatory-ICR/SMART/Amd VI-BAKRIE/V/13.

**h. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia**

**1. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi**

Pada tanggal 17 April 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama interkoneksi jaringan telekomunikasi dengan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) No. Bakrie Telecom: 364/EST-PKS/STI/IV/2007 - Nomor STI: 009/PKS/GA-STI/IV/2007 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Interkoneksi langsung antara jaringan STI dan jaringan Perusahaan dan masing-masing dapat saling menyediakan layanan interkoneksi dan dapat mengirim atau menerima SMS;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya interkoneksi kepada STI dan sebaliknya;
- Perusahaan dan STI wajib menjaga kinerja dan kualitas layanan masing-masing sesuai parameter yang telah ditentukan;
- Perjanjian antara Perusahaan dan STI tersebut berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2007 sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak atau dihentikan berdasarkan keputusan pemerintah.

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

*The agreement was renewed with the second amendment that was signed on March 6, 2008 No. SMART AMD.097/LO-BOD/ICR/ST/III/2008 and No. BAKRIE TEL 290/EST-Amd/SMART/III/2008, which was then renewed with the third amendment signed on September 7, 2009 No. SMART 422/Regulatory-ICR/SMART/Add3-Bakrie/IX/09 and No BAKRIE TEL 1817/EST-AMD/ SMART/IX/2009 and fourth amendment that was signed on April 14, 2010 No. BAKRIE TEL : 670/EST-AMD/SMART/IV/2010 dan No. SMART: 135/Regulatory-ICR/SMART/ AmdIV-Bakrie/IV/10.*

*The fifth amendment was signed on May 2, 2011 No. BAKRIE TEL: 4655/BTEL-Amd/SMART/V/2011 and No. SMART: 136/Regulatory-ICR/SMART/Amd5-BAKRIE/V/11. The sixth amendment was signed on May 8, 2013 No. BAKRIE TEL: 276/BTEL-Amd/SMARTFREN/V/2013 and No. SMART: 038a/Regulatory-ICR/SMART/Amd VI-BAKRIE/V/13.*

**h. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia**

**1. Cooperative Agreement Of Interconnection Network**

*On April 17, 2007, the Company entered into a Cooperative Agreement of Interconnection Network with PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) No Bakrie Telecom: 364/EST-PKS/STI/IV/2007 - Nomor STI: 009/PKS/GA-STI/IV/2007 which covers the following:*

- *Interconnection between the Company telecommunication network and the telecommunication network of STI is to provide interconnection services and sending short message service or SMS from each*
- *The Company has the obligation to pay the cost of these services to STI and vice versa;*
- *The Company and STI have obligations to maintain the performance and quality of their service to defined parameters;*
- *The agreement between the Company and STI was effective from April 17, 2007 and could be terminated at any time within three (3) months after written notice from either of the parties, or terminated based on a government decree.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan adendum pertama yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2007 No. STI 008/PKS/ES-STI/X/2007 dan No. BAKRIETEL 1977/EST-AMd/STI/X/2007 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum kedua yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2008 No. STI 006/PKS.EA-STI/III/2008 dan No. BAKRIETEL 270/EST-Amd/STI/III/2008 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum ketiga yang ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2009 No. STI 005/PKS/EA-STI/V/2009 dan No. BAKRIETEL 1137/EST-Amd/STI/V/2009 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum keempat yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2010 No. STI 001/PKS/EA-STI/II/2010 dan No. BAKRIETEL 150/EST-AMD/STI/2010 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum kelima yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2010 No. STI 004/PKS/EA-STI/IV/2010 dan No. BAKRIETEL 632/EST-AMD/STI/IV/2010

Selanjutnya diperbaharui dengan adendum keenam yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2011 No. STI 012/PKS/EA-STI/VI.2011 dan No. BAKRIETEL 4571/EST-Amd/STI/IV/2011. Selanjutnya diperbaharui dengan adendum ketujuh yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2013 No. STI 012/PKS/EA-STI/IX.2013 dan No. BAKRIETEL 406/EST-Amd/STI/IX/2013.

**2. Perjanjian Jual Beli Bersyarat**

Pada tanggal 14 Maret 2012 Perusahaan mengumumkan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan Sampoerna Strategic, Twinwood Ventures Ltd., dan Polaris Mobile Pte., Ltd., sebagai pemegang saham PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI).

Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan akan memperoleh tiga puluh lima (35) persen dari saham STI dengan perjanjian bahwa tiga (3) tahun ke depan dapat menjadi pemegang saham mayoritas. Sebagai imbalannya Sampoerna Strategic dapat menjadi pemegang saham Perusahaan.

Sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jual Beli Bersyarat, para pihak belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli, dengan demikian perjanjian tersebut dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi melalui surat kesepakatan pengakhiran tertanggal 15 Januari 2015.

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

*The agreement was renewed with the first amendment that was signed on October 25, 2007 No. STI 008/PKS/ES-STI/X/2007 and No. BAKRIETEL 1977/EST-AMd/STI/X/2007, which was then renewed with the second amendment that was signed on March 3, 2008 No. STI 006/PKS.EA-STI/III/2008 and No. BAKRIETEL 270/EST-Amd/STI/III/2008, which was then renewed with the third amendment signed on May 27, 2009 No. STI 005/PKS/EA-STI/V/2009 and No. BAKRIETEL 1137/EST-Amd/STI/V/2009, which was then renewed with the fourth amendment signed on January 29, 2010 No. STI 001/PKS/EA-STI/II/2010 and No. BAKRIETEL 150/EST-AMD/STI/2010, which was then renewed with the fifth amendment signed on April 1, 2010 No. STI 004/PKS/EA-STI/IV/2010 and No. BAKRIETEL 632/EST-AMD/STI/IV/2010.*

*Then was renewed with the sixth amendment that was signed on April 8, 2011 No. STI 012/PKS/EA-STI/VI.2011 and No. BAKRIETEL 4571/EST-Amd/STI/IV/2011. The next was renewed with the seventh amendment that was signed on September 20, 2013 No. STI 012/PKS/EA-STI/IX.2013 dan No. BAKRIETEL 406/EST-Amd/STI/IX/2013.*

**2. Conditional Sales Purchase Agreement**

*On March 14, 2012, the Company announced the signing of the Conditional Sales Purchase Agreement with Sampoerna Strategic, Twinwood Ventures Ltd., and Polaris Mobile Pte., Ltd., as the shareholders of PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI).*

*In the agreement, the Company will acquire 35% of the shares of STI with the agreement that within the next three (3) years, the Company will become the majority shareholder. In return, Sampoerna Strategic will become a shareholder of the Company.*

*Until end of the period of the Conditional Sales Purchase Agreement, Both Parties can not fulfill requirements as stated in the Sales Purchase Agreement, thus that Sales Purchase Agreement is no longer valid and terminated according to termination agreement dated on January 15, 2015.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**i. PT. AXIS Telekom Indonesia (sebelumnya PT. Natrindo Telepon Seluler)**

Perusahaan mengadakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi dengan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) No. NTS 299/JKT-NTS/IV/2008 dan No. BAKRIETEL 429/EST-PKS/NTS/IV/2008, dimana masing-masing pihak menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Interkoneksi langsung antara jaringan telekomunikasi Perusahaan dengan jaringan telekomunikasi NTS, sehingga setiap pelanggan Perusahaan dan NTS dapat mengadakan atau menerima panggilan interkoneksi serta dapat menerima atau mengirim SMS;
- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya interkoneksi kepada NTS dan menjaga kualitas pelayanan interkoneksi bagi pelanggannya;
- Perjanjian antara Perusahaan dan NTS tersebut berlaku secara efektif sejak tanggal 1 April 2008 dan berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri perjanjian selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak atau dihentikan berdasarkan keputusan pemerintah.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dengan adendum pertama yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2009 No. 358/EST-Amd/NTS/II/2008 yang selanjutnya diperbaharui dengan adendum kedua yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2009 No. NTS 047/JKT-NTS/II/2010 dan No. BAKRIETEL 2382/EST-Amd/NTS/XII/2009.

Selanjutnya diperbaharui dengan adendum ketiga yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011 No. AXIS : 222/JKT-AXIS/V/2011 dan No. BTEL : 4966/EST-Amd/AXIS/VI/2011, dan diperbaharui dengan adendum keempat yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2012 No. AXIS : 138/JKT - AXIS/V/2012 dan No. BTEL : 616/EST-Amd/AXIS/V/2012.

**j. PT Mora Telematika Indonesia**

Pada tanggal 28 November 2008, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Mora Telematika Indonesia untuk menjual dan memindahkan fasilitas telekomunikasi dan peralatan yang dipasang antara Singapura - Batam, Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan Perusahaan.

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

**i. PT. AXIS Telekom Indonesia (formerly PT. Natrindo Telepon Seluler)**

*The Company has a Cooperation Agreement of Interconnection Telecommunication Network with PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) No. NTS 299/JKT-NTS/IV/2008 and No. BAKRIETEL 429/EST-PKS/NTS/IV/2008 under which each party agrees as follows:*

- *Interconnection between telecommunication network Company and telecommunication network NTS to provide interconnection call service and sending Short Message Service (SMS) and receive call or SMS from each company's customers;*
- *The Company has the obligation to pay interconnection charges to NTS and maintain the quality of interconnection services for customers;*
- *The agreement between the Company and NTS effective from April 1, 2008 was valid and could be terminated at any time within three (3) months after written notice from either of the parties, or terminated based on a government decree.*

*The agreement was renewed with the first amendment that was signed on February 24, 2009 No. 358/EST-Amd/NTS/II/2008, which was then renewed with the second amendment signed on December 7, 2009 No. NTS 047/JKT-NTS/II/2010 and No. BAKRIETEL 2382/EST-Amd/NTS/XII/2009.*

*It has been renewed with the third addendum that was signed on July 1, 2011 No. AXIS: 222/JKT-AXIS/2011 and BTEL No is: 4966/EST-Amd/AXIS/VII/2011. Then was renewed with the fourth amendement that was signed on May 25, 2012 No. AXIS : 138/JKT - AXIS/V/2012 and No. BTEL : 616/EST-Amd/AXIS/V/2012.*

**j. PT Mora Telematika Indonesia**

*On November 28, 2008, the Company engaged PT Mora Telematika Indonesia to sell and transfer telecommunication facilities and devices installed laying between Singapore and Batam, Indonesia for the purpose of improving the Company's network.*

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**k. PT Bakrie Swasakti Utama (Pihak Berelasi)**

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama untuk sewa kantor dan lahan parkir untuk satu (1) tahun, yang dapat diperbaharui kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Jumlah beban sewa setiap tahun disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang diungkapkan dalam (Catatan 27).

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Perusahaan memperpanjang perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 yang dapat diperpanjang kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Harga sewa baru untuk luas area 6.559,99m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp471,9 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian pengalihan pengelolaan ruang usaha sektor utara Rasuna Office Park dari PT Provinces Indonesia ke PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015. Biaya iuran pengelolaan per bulan yang harus dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp30,25 ribu per meter dengan luas area 1.665m<sup>2</sup> atau sebesar Rp50,4 juta per bulan (Catatan 27).

Perusahaan juga menandatangani pengalihan perjanjian pengelolaan ruang usaha sektor selatan Rasuna Office Park dari PT Provinces Indonesia ke PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Biaya iuran pengelolaan per bulan yang harus dibayar Perusahaan adalah sebesar Rp30,0 ribu per meter dengan luas area 937m<sup>2</sup> atau sebesar Rp28,3 juta per bulan (Catatan 27).

Pada tanggal 25 September 2014, Perusahaan memperpanjang perjanjian sewa dengan PT Bakrie Swasakti Utama dari tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 yang dapat diperpanjang kembali setelah tanggal perjanjian berakhir. Harga sewa baru untuk luas area 459,74m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp32,9 juta per bulan. Sampai dengan tanggal laporan ini, proses perpanjangan perjanjian sewa masih dalam proses penandatanganan.

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

**k. PT Bakrie Swasakti Utama (Related Party)**

*The Company entered into a rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama for the lease of certain office and parking spaces with one (1) year term, subject to renewal after the expiry date. The amount of the rental expense for every year presented in the consolidated financial statements is disclosed in (Note 27).*

*On October 1, 2014, the Company extended its rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama from September 1, 2014 until August 31, 2015 subject to renewal after the expiry date. The new rental per month amounted to Rp471,9 million for a total area of 6,559.99m<sup>2</sup>.*

*On December 31, 2013, the Company entered into an agreement to transfer building management of the northern sector of Rasuna Office Park from PT Provinces Indonesia to PT Bakrie Swasakti Utama from June 3, 2014 until January 2, 2015. Service charges per square meter amounted to Rp30.25 thousand for a total area of 1,665m<sup>2</sup> or amounting to Rp50.4 million per month (Note 27).*

*The Company also entered into an agreement to transfer the building management of the southern sector Rasuna Office Park from PT Provinces Indonesia to PT Bakrie Swasakti Utama from March 1, 2014 until December 31, 2014. Service charges per meter amounted to Rp30.0 thousand for a total area of 937m<sup>2</sup> amounting to Rp28.3 million per month (Note 27).*

*On September 25, 2014, the Company extended its rental agreement with PT Bakrie Swasakti Utama from September 1, 2014 until February 28, 2015, subject to renewal after expiry date. The new rental change amounted to Rp32.9 million per month for a total area of 459.74m<sup>2</sup>. As of the date of this report, the extension of the rental agreement is still in the process of signing.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**i. Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha  
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi**

Perusahaan mengadakan Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ("Perjanjian") dengan pihak ketiga, PT Smartfren Telecom Tbk ("SF"), pada tanggal 30 Oktober 2014. Berdasarkan Perjanjian, hak pita frekuensi radio yang sebelumnya dipegang oleh Perusahaan akan digabungkan kepada hak pita frekuensi radio yang dipegang oleh SF berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menkominfo No. 932 tanggal 26 September 2014. Selanjutnya, Perusahaan dapat mempergunakan pita frekuensi radio tersebut dengan skema sewa menyewa jaringan telekomunikasi dengan SF.

Berdasarkan Perjanjian, Perusahaan akan memperoleh kompensasi sebagai berikut:

- a. Perusahaan akan memperoleh saham SF sejumlah 1.000.000.000 saham.
- b. Perusahaan akan memperoleh dana sebesar Rp500,0 miliar dari SF untuk digunakan sebagai pembayaran Biaya Frekuensi Terutang, yang akan dibayarkan SF kepada Perusahaan pada tahun ke lima setelah tanggal efektif dari Perjanjian. Dana tersebut akan diterima dan dimiliki penuh oleh Perusahaan, dan akan digunakan senilai klaim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("KOMINFO") atas jumlah sisa Biaya Frekuensi Terutang oleh Perusahaan yang masih belum dibayar pada saat ulang tahun kelima setelah tanggal efektif, apabila ada. Pembayaran tersebut sepenuhnya untuk kepentingan dan atas nama Perusahaan sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Frekuensi Terutang.

Perusahaan akan menyewa jaringan telekomunikasi milik SF guna melaksanakan kegiatan usahanya dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi, setelah tanggal efektif dari Perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai tercatat izin pita frekuensi radio adalah nihil, sehingga Perusahaan mencatat imbalan yang diterima dari SF sebesar Rp591,0 miliar sebagai hasil kerjasama penggabungan kegiatan usaha penyelenggara jaringan telekomunikasi.

**m. Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan**

Perusahaan mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi ("Perjanjian Sewa") dengan pihak ketiga, PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") pada tanggal 30 Oktober 2014.

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

**i. Joint Agreement Implementation of  
Telecommunication Network Business Activities**

On October 30, 2014, the Company entered into Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ("Agreement") with PT Smartfren Telecom Tbk ("SF"), a third party. In accordance with the Agreement, the radio frequency previously held by the Company will be merged with that held by SF based on the Menkominfo Decision Letter No. 932 dated September 26, 2014. Furthermore, the Company is allowed to use the radio frequency by using telecommunication network rental scheme with SF.

Based on the Agreement, the Company will receive the following compensation:

- a. The Company will receive 1,000,000,000 shares of SF.
- b. The Company will receive funds of Rp500.0 billion from SF to be used as Payment of Frequency Fees Payable, which will be paid by SF to the Company on the fifth anniversary of the effective date of the Agreement. The funds will be received and fully owned by the Company, and will be used for claim from the Ministry of Communications and Information of the Republic of Indonesia ("KOMINFO") for the remaining Frequency Fee Payable by the Company that remain unpaid at the time of the fifth anniversary of the effective date, if any. The payment made is solely for the benefit and on behalf of the Company as the fulfillment of payment obligations of Frequency Fee Payable.

The Company will rent telecommunication networks of SF in order to carry out its business activities in the telecommunication services after the effective date of the Agreement.

As of December 31, 2014, the carrying amount of the radio frequency was nil. Therefore, the Company recognized compensation received from SF amounting to Rp591.0 billion as proceeds from merger activity for telecommunication network service.

**m. Lease Agreement Telecommunication Networks**

On October 30, 2014, the Company entered into Lease Agreement Telecommunication Networks ("Lease Agreement") with PT Smartfren Telecom Tbk ("SF"), a third party.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

Berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut, Perusahaan akan menyewa jaringan telekomunikasi yang digunakan dan dioperasikan oleh SF, guna melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Jangka waktu atas Perjanjian Sewa ini berlaku selama tiga tahun sejak Perjanjian Sewa ini ditandatangani. Jangka waktu sewa ini dapat diperpanjang berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama antara Perusahaan dan SF.

Jumlah sewa yang harus dibayar oleh Perusahaan kepada SF setiap bulannya selama jangka waktu sewa adalah sebesar Rp30,0 miliar. Denda keterlambatan pembayaran sewa sebesar 1% per hari akan dikenakan kepada Perusahaan, apabila terdapat keterlambatan pembayaran sewa.

Perjanjian sewa tersebut telah diperbaharui dengan amandemen yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2015, No.088A/Commercial/Smartfren /Amd 1 -BTEL/XII/15 dengan jumlah sewa yang harus dibayar oleh Perusahaan kepada SF setiap bulannya sebesar Rp27,0 miliar. Perjanjian sewa ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal 1 Januari 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dan SF.

**n. Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Call and Put Option Agreement)**

Perusahaan mengadakan suatu perjanjian jual beli bersyarat (call and put option agreement) dengan McBeal Development Ltd tertanggal 2 April 2015 dimana Perusahaan dan calon pembeli dapat melakukan jual beli saham PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") yang dimiliki oleh Perusahaan dengan harga dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dapat di-exercise sewaktu-waktu. Option tersebut telah di-exercise pada tanggal 25 September 2015 sebanyak 1.000.000.000 lembar saham atau sekitar 0,97% dari seluruh saham disetor PT Smartfren Tbk ("SF") dengan nilai USD10 juta atau setara dengan Rp146.650,0 iuta.

**o. Madison Pacific Trust Limited (sebelumnya dengan Credit Suisse)**

Pada tanggal 30 Agustus 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Credit Suisse (Singapura) Limited, sebagai facility agent, dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar USD50 juta untuk jangka waktu delapan belas (18) bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun.

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

*In accordance with the Lease Agreement, SF is willing to lease the telecommunications network that is used and operated by SF for the Company's operation as a telecommunications provider.*

*The Lease Agreement is effective for three years from signing of the Lease Agreement. The duration of the lease can be extended based on the terms and conditions mutually agreed between the Company and SF.*

*The amount of rental to be paid every month by the Company to SF during the term of the lease is equal to Rp30.0 billion. The Company will be charged 1% of rental fee per day for any delay in rental payments.*

*The Lease Agreement was renewed with the amendment that was signed on December 22, 2015 No. 088A/Comercial/Smartfren/Amd 1 -BTEL/XII/15, with the amount of rental to be paid every month by the Company to SF is equal to Rp27.0 billion. The Lease Agreement is effective for three-month period from January 1, 2016, and can be renewed based on mutually agreed between the Company and SF.*

**n. Call and Put Option Agreement**

*The Company have entered into a conditional sales and purchase agreement (call and put option agreement) with McBeal Development Ltd dated April 2, 2015 whereby the Parties may proceed with the sales and purchase of PT Smartfren Telecom Tbk ("SF") shares under the call and put option agreement and can be exercised at any time. The option to sell has been exercised on September 25, 2015 the whole 1,000,000,000 shares or approximately 0.97% of issued shares of PT Smarfren Telecom Tbk ("SF") with total value amounting to USD10 milion or equal to Rp146,650.0 million.*

**o. Madison Pacific Trust Limited (previously with Credit Suisse)**

*On August 30, 2012, the Company entered into a credit agreement with Credit Suisse (Singapore) Limited, as the facility agent, with loan facility amounting to USD50 million that will be payable in eighteen (18) months. This loan bears interest of 11.5% per annum.*

**34 . PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

Pemberi pinjaman atas pinjaman ini adalah Orchard Centar Master Limited, Orchard Dejima Limited dan Milton Global Resources Limited dengan nilai pinjaman masing-masing sebesar USD26 juta, USD4 juta dan USD20 juta. Pada tanggal 4 Juli 2014, facility agent atas pinjaman ini berubah dari dengan Credit Suisse (Singapura) Limited menjadi Madison Pacific Trust Limited ("MPTL"). Perubahan ini telah diketahui dan disetujui bersama antara Perusahaan sebagai peminjam dengan para pemberi pinjaman.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya (Catatan 15 dan 35).

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG**

Pada tanggal 23 Oktober 2014, PT Netwave Multimedia (Netwave) mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan dengan register perkara No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst sebagai akibat dari tidak dibayarkannya utang jatuh tempo Perusahaan terhadap Netwave Rp4,7 miliar. Pada rapat kreditor tanggal 8 Desember 2014 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan pembahasan dan pemungutan suara (voting) kreditor atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perusahaan dan sebagian besar kreditor konkuren Perusahaan atau sejumlah 94,56% kreditor konkuren telah memberikan suara setuju atas Rencana Perdamaian tersebut.

Pada tanggal 9 Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU oleh Netwave terhadap Perusahaan telah mengeluarkan keputusan yang mengesahkan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian dalam PKPU antara Perusahaan dan para kreditornya.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam Perjanjian Perdamaian ini Perusahaan dan para kreditor dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah diatur didalam Rencana Perdamaian, antara lain sebagai berikut:

**34 . SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS  
(continued)**

*The original lenders of this loan are Orchard Centar Master Limited, Orchard Dejima Limited and Milton Global Resources Limited in the amount of USD26 million, USD4 million and USD20 million, respectively. On July 4, 2014, the facility agent of this loan changed from Credit Suisse (Singapore) Limited to Madison Pacific Trust Limited ("MPTL"). This change was acknowledged and agreed together with the Company as borrower and lenders*

*On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors (Notes 15 and 35).*

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT**

*On October 23, 2014, PT Netwave Multimedia (Netwave) filed a Suspension of Payment (PKPU) petition against the Company under case register No.59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst as a result of non-payment of overdue payables to Netwave by the Company amounting to Rp4.7 billion. At the creditors meeting on December 8, 2014 held in the Commercial Court of the Central Jakarta District Court, discussions were held and creditors voted on the Amicable Settlement Plan proposed by the Company, with the majority, or 94.56% of the unsecured creditors of the Company voting in favor of the Amicable Settlement Plan.*

*On December 9, 2014, the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court and the PKPU adjudicators of Netwave petition against the Company issued a decision officially approving in PKPU, the Amicable Settlement Agreement between the Company and its creditors.*

*Furthermore, based on the aforementioned, in Amicable Settlement Agreement, the Company and the creditors mutually agree with the terms that have been set out in the Amicable Settlement Agreement, among others, as follows:*

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

1. Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan mempertimbangkan dan mendasarkan kepada keadaan kegiatan usaha Perusahaan saat ini, Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014, dan keadaan pasar, serta kedudukan para kreditor Perusahaan sehubungan dengan jaminan-jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan jaminan-jaminan yang diberikan tersebut.
2. Cash Waterfall.  
Perusahaan akan berusaha mengalokasikan Sisa Kas Operasional (di luar Utang Baru dan penerbitan Saham Baru) dari kegiatan usaha utama Perusahaan ke dalam suatu rekening Perusahaan dan akan dipergunakan dengan urutan skala prioritas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian PKPU.
3. Pengesampingan terhadap Kewajiban Lain.  
Perjanjian Perdamaian ini tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap pembayaran atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Perusahaan kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Penggabungan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 dan Perjanjian Sewa Menyewa Jaringan Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 30 Oktober 2014 berikut seluruh perjanjian turutannya (apabila ada).
4. Seluruh bunga, penalti dan/atau denda yang telah timbul sampai dengan Tanggal Homologasi akibat Utang Perusahaan akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur sebaliknya secara tegas dan khusus oleh Perusahaan dalam Perjanjian Perdamaian ini.
5. Terhadap tagihan-tagihan lain yang:
  - 1) belum teridentifikasi sampai Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi; atau
  - 2) belum teridentifikasi sampai Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi; atau

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

1. *Amicable Settlement Agreement was made in consideration of and based on the current condition of the Company's operations, the Agreement of Business Activity Merger of Telecommunication Network Implementation between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014, Agreement of Telecommunication Network Lease between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014, and the market condition, as well as the position of the creditors in connection with the guarantees held by secured creditors, and the terms and conditions relevant to the guarantees given.*
2. *Cash Waterfall.*  
*The Company will attempt to allocate the Remaining Amount of Cash Operations from the Company's main business activities (outside New Debt and the issuance of New Shares) in the accounts of the Company and which will be used in accordance with the order of priorities as required by the PKPU settlement agreement.*
3. *Waiver of Other Obligations. The Amicable Settlement Agreement is not binding and does not apply to payments or implementation of the obligations of the Company to any parties related to the Agreement of Business Activity Merger of Telecommunication Network Implementation between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014 and Agreement of Telecommunication Network Lease Agreement between the Company and PT Smartfren Telecom Tbk dated October 30, 2014 following the entire agreement and its other related agreements (if any).*
4. *All interest, penalties and/or fines related to the Company's Debts that have been incurred up to the Official Approval of Settlement Agreement Date will be entirely eliminated, except as otherwise expressly and specifically stated by the Company in the Amicable Settlement Agreement.*
5. *With regard to other outstanding bills that:*
  - 1) *have not been identified in the Amicable Settlement Agreement; or*
  - 2) *have not been identified in the Amicable Settlement Agreement; or*

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

- 3) yang baru teridentifikasi setelah Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi namun tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi, perbuatan okum, permulaan atau rangkaian kejadian, atau ketentuan okum yang terdapat sebelum Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi yang terdapat putusan badan peradilan atau badan arbitrase yang berkekuatan okum tetap yang diakui oleh okum Indonesia;

maka tagihan-tagihan lain sebagaimana disebut di atas (disebut "Utang Diluar Verifikasi") akan tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

- a) tagihan tersebut dapat diterima oleh Perusahaan namun harus sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b) hanya ketika ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tagihan diterima dan diakui kemudian oleh Perusahaan, maka tagihan tersebut akan dibayar Perusahaan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

**Utang Usaha**

A. Utang Usaha Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar (utang kategori Tranche A), Perusahaan akan melakukan pembayaran tunai atas utang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Utang Usaha Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar, pembayaran akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi.
- b) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang Usaha Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar (utang kategori Tranche A), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

- 3) those newly identified after the Amicable Settlement Agreement but that came from or arose out of conditions, legal acts, the beginning or a series of events, or laws that occurred before this Amicable Settlement Agreement obtained the binding of the court and arbitration body's decision as recognized by the laws of Indonesia;

the other outstanding bills as referred to above (referred as "Verification of Outside Debt") will be subject to the following conditions:

- a) the outstanding bills may be accepted by the Company but must be in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia (Indonesian Financial Accounting Standards/PSAK) and the prevailing laws; and
- b) only when the above conditions have been met and the outstanding bill is accepted and recognized later by the Company, then the bill will be paid by the Company starting in the 31st year after the Official Approval of Settlement Agreement Date.

**Trade Payables**

A. For Trade Payables of Rp1.0 up to Rp3.0 billion (debt category Tranche A), the Company will make a cash payment on the payables under the following conditions:

- a) For Trade Payables of Rp1.0 up to Rp3.0 billion, the payment will be paid in installments and will be paid no later than the 84th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
- b) If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay Trade Payables of Rp1.0 to Rp3.0 billion (debt category Tranche A), then the payment of residual value of the payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payable payments on the next due date, and this will continue until the final maturity date.

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAAN  
UTANG (lanjutan)**

- c) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir b) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi.
- B. Utang Usaha diatas Rp3,0 miliar dalam mata uang selain Rupiah (utang kategori Tranche C) dan Utang Usaha di atas Rp3,0 miliar dalam mata uang Rupiah (utang kategori Tranche D)
1. Nilai Utang Usaha sampai dengan Rp3,0 miliar pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian di atas.
  2. 30% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
  3. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai utang kategori Tranche C sebesar 4% per tahun dan untuk Porsi Tunai utang kategori Tranche D sebesar 6% per tahun, yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai di atas.
  4. 70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1) akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan Rp2,0 ratus/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya ("UUPT").
  5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya, dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

- c) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the remaining amounts of payables in accordance with the schedule in point b) as at the final maturity date, then the remaining amounts of payables will be paid no later than the end of the 15th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date*
- B. *Trade Payables above Rp3.0 billion in currencies other than Rupiah (debt category Tranche C) and Trade Payables above Rp3.0 billion in Indonesian Rupiah (debt category Tranche D)*
1. *Trade Payables up to Rp3.0 billion will be paid in accordance with the aforementioned Amicable Settlement Agreement.*
  2. *Of the remaining amounts of Trade Payables, 30% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) will be paid in cash with installments ("Cash Portion") and will be paid not later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
  3. *The Company will provide interest on Cash Portion of Tranche C category at 4% per year and for the Cash Portion of Tranche D category at 6% per year, which will be paid by following the above Cash Portion payment schedule.*
  4. *Of the remaining amounts of Trade Payables, 70% after deduction of the amounts, as mentioned in point 1) will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date at an exercise price of Rp2.0 hundred/share having regard to the provisions of the Capital Market Regulation and provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and its changes and/or enhancements ("UUPT").*
  5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest set out in the aforementioned Amicable Settlement Agreement, then payment of the residual value of Cash Portion and its interest that remain unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date.*

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan pada jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
8. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
9. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

**Utang Tower Provider (Penyedia Menara)**

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang Tower Provider atas sewa tower yang telah jatuh tempo, belum dibayarkan, dan timbul sampai dengan tanggal 10 November 2014:

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

6. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and unpaid interest in accordance with the schedule referred to in point 5) above as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.
7. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 6) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).
8. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 7) above, then the unpaid Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.
9. The Company does not provide interest on the principal amount of the 70% as referred to in point 4) above, which will be converted into shares in accordance with the above.

**Tower Provider Payables (Tower Provider)**

The debt restructuring provisions on Tower Provider Payables for tower rentals that have matured, but are unpaid up to November 10, 2014:

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAAN  
UTANG (lanjutan)**

**A. Utang Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar  
(utang kategori Tranche A)**

- 1) Utang Rp1,0 sampai dengan Rp3,0 miliar pembayaran akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-84 setelah Tanggal Homologasi.
- 2) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Perdamaian (utang kategori Tranche A), maka sisa nilai utang yang tidak terbayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai tanggal jatuh tempo terakhir.
- 3) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa utang sesuai dengan jadwal pada butir 2) sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir, maka atas sisa utang tersebut akan dibayarkan paling lambat pada akhir tahun ke-15 setelah Tanggal Homologasi.

**B. Utang diatas Rp3,0 miliar.**

- 1) Nilai utang sampai dengan Rp3,0 miliar pertama akan dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian Perdamaian di atas.
- 2) 30% dari sisa utang setelah dikurang nilai sesuai butir 1) di atas (utang kategori Tranche D), berikut dengan bunga sebesar 6% per tahun dari nilai tersebut akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
- 3) 70% dari sisa utang setelah dikurangi nilai sesuai butir 1) di atas akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp2,0 ratus/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

**A. Payables of Rp1.0 up to Rp3.0 billion (debt  
category of Tranche A)**

- 1) Payables Rp1.0 up to Rp3.0 billion the payment will be paid in installments and will be paid no later than the 84th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
- 2) If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement there are insufficient funds to pay payables as set forth in the Amicable Settlement Agreement, (debt category Tranche A), then payment of the residual value of the payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the payable payments on the next due date, and this will continue until final maturity date.

- 3) If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the remaining amounts of payables in accordance with the schedule as referred to in point 2) as at the final maturity date, then the remaining unpaid amounts of the payables will be paid no later than end of the 15th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date

**B. Payables above Rp3.0 billion.**

- 1) Payables up to Rp3.0 billion will be paid in accordance with the aforementioned Amicable Settlement Agreement.
- 2) Of the remaining amounts of payables, 30% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) (debt category Tranche D), including its interest at 6% per year will be paid in cash in installments ("Cash Portion") and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
- 3) Of the remaining amounts of payables, 70% after deduction of the amounts as mentioned in point 1) above will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date at an exercise price of Rp2.0 hundred/ share having regard to the provisions of the Capital Market Regulation and provisions of UUPT.

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

- 4) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir.
- 5) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga sampai dengan bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
- 6) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
- 7) Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

- 4) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion as set forth in the aforementioned Amicable Settlement Agreement, then payment of the residual value of Cash Portion remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with the Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date.*
- 5) *If after spending/payments made based on the priority in accordance with Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
- 6) *If after spending/ payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
- 7) *If after spending/ payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

- 8) Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

**C. Sisa Masa Sewa.**

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi untuk Utang Tower Provider atas nilai sewa untuk sisa masa sewa tower berdasarkan perjanjian sewa tower yang telah ada antara Perusahaan dengan masing-masing kreditor atas Utang Tower Provider yang dihitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan akhir masa sewa tower sesuai masing-masing perjanjian sewa tersebut:

- 1) 100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp2,0 ratus/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
- 2) Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai yang akan ditukar menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas.

**D. Penghentian Fasilitas Penyediaan Tower.**

Kreditor atas Utang Tower Provider dapat menghentikan layanan penggunaan tower yang disewa oleh Perusahaan akhir bulan Juni 2015, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan dan kreditor atas Utang Tower Provider terkait.

**Utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) dan Universal Service Obligation (USO)**

1. Utang Pokok BHP dan USO adalah utang yang diakui Perusahaan secara tertulis sampai dengan tanggal 10 November 2014 ("Utang Pokok BHP"), terdiri atas:
  - a. Utang BHP Frekuensi Pita.
  - b. Utang BHP Frekuensi ISR.
  - c. Utang BHP Telekomunikasi.
  - d. Utang USO.
2. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas Utang Pokok BHP, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran cicilan Utang Pokok BHP berikutnya.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

- 8) *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 4) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

**C. The Remaining Lease Period.**

*The debt restructuring provisions of Tower Provider Payables for the remaining term of the tower lease based on the existing tower lease agreements between the Company and each of the creditors on Tower Provider Payables calculated from November 10, 2014 through the end of the lease term in accordance with respective tower lease agreement are as follows:*

- 1) *The total amount (100%) of the remaining term of the lease will be exchanged for Mandatory Convertible Bond (MCB-A) for a period of ten (10) years issued by the Company on the Effective Date at the conversion price of Rp2.0 hundred/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
- 2) *The Company does not provide interest on the amount to be exchanged into MCB-A according to the above provisions.*

**D. Termination of Tower Provider Facilities.**

*Creditors of Tower Provider Payables may terminate the usage service of leased tower by the Company by at the latest June 2015, unless otherwise determined by the Company and its creditors in relation to Tower Provider Payables.*

**Payables on Fee of Right to Use (BHP) and the Universal Service Obligation (USO)**

1. *BHP and USO Principal Payables represent payables that are recognized by the Company in writing up to November 10, 2014 ("BHP Principal Payables"), consisting of:*
  - a. *BHP Frequency Band Payables.*
  - b. *BHP Frequency ISR Payables.*
  - c. *BHP Telecommunication Payables.*
  - d. *USO Payables.*
2. *In the event of excess payment of BHP Principal Payables, the excess will be included in the next repayment installments of BHP Principal Payables.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAAN  
UTANG (lanjutan)**

3. Pembayaran Utang Pokok BHP Frekuensi Pita, Utang BHP Frekuensi ISR, Utang BHP Frekuensi Telekomunikasi dan Utang USO akan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-10 setelah Tanggal Homologasi.
4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang yang diatur dalam butir 3) di atas, maka sisa utang yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran utang pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir. Apabila masih terdapat sisa utang yang belum dibayarkan setelah tahun ke-10 setelah Tanggal Homologasi maka sisa utang tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun berikutnya secara prorata setiap tahunnya.
5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar utang sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas maka sisa utang yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran sisa utang pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
6. Dalam hal terdapat penjaminan atas pembayaran Utang Pokok BHP dan penjaminan tersebut kemudian jatuh tempo dan diefektifkan/dicairkan sebelum jadwal pembayaran Utang Pokok BHP tersebut di atas berakhir, maka jadwal pembayaran tersebut tidak berlaku lagi kecuali masih terdapat sisa Utang Pokok BHP terkait yang jadwal pembayarannya tetap akan merujuk pada jadwal pembayaran Utang Pokok BHP sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

**Utang Dana Hasil Wesel Senior**

- A. Pembayaran Utang Dana Hasil Wesel Senior akan dilakukan oleh Perusahaan dengan cara sebagai berikut:

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

3. *Principals of BHP Frequency Band Payables, BHP Frequency ISR Payables, BHP Frequency Telecommunications Payables and USO Payables will be paid in installments and will be paid no later than the 10th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the payables as referred to in point 3) above, then payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payables payment on the next due date, and this will continue until final maturity date. If there are remaining payables after the 10th year after the Official Approval of Settlement Agreement Date then these remaining payables will be paid within a period of five (5) years on a pro rata basis each year.*
5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the payables based on schedule as referred in point 4), then payables remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payables payment on the next due date, and this will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
6. *In the event of a guarantee given for payment of BHP Principal Payables and the guarantee then matures and is effected before the aforementioned BHP Principal Payables repayment schedule expires, the payment schedule is no longer valid unless related BHP Principal Payables remain that still refer to the BHP Principal Payables repayment schedule as stipulated in the Amicable Settlement Agreement.*

**Payables on Proceeds from Senior Notes**

- A. *Payables on Proceeds from the Senior Notes will be made by the Company in the following manner:*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

1. 30% dari Utang Dana Hasil Wesel Senior (utang kategori Tranche C) akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
2. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk utang kategori Tranche C sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
3. 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu sepuluh (10) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dan dapat diperpanjang oleh Perusahaan dengan harga pelaksanaan konversi Rp200,0/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir 1) di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.
5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunganya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

1. *Of Payables on Proceeds from Senior Notes (debt category Tranche C), 30% will be paid in cash ("Cash Portion") in installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.*
2. *The Company will provide interest at 4% on Cash Portion of debt category Tranche C, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 1) above.*
3. *Of the Affiliate Payables, 70% will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of ten (10) years from the Effective Date and may be extended by the Company at the conversion price of Rp200.0/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest as mentioned in point 1) above, then payment of the residual value of Cash Portion that remains unpaid on any maturity date will be deferred and combined with Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until final maturity date.*
5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year*

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAAN  
UTANG (lanjutan)**

6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6), maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/ Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
8. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas, yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.
9. Jika diperlukan, Perusahaan akan berusaha meminta atau melakukan upaya/tindakan yang diperlukan agar dilaksanakan penyelesaian/pembayaran atas Utang Dana Hasil Wesel Senior sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian ini, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan dan ketentuan, antara lain sebagai berikut:
  - a) Secara khusus meminta perhatian pengadilan bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan Securities Acts Amerika Serikat, diperkenankan untuk berpedoman pada pengecualian terhadap pendaftaran berdasarkan Pasal 3(a)(10) dari Securities Acts 1933 Amerika Serikat, dimana, Pasal 3(a)(10) mengizinkan suatu proses pengadilan di luar Amerika Serikat (dalam hal ini, proses PKPU Perusahaan) untuk melakukan suatu pertukaran Wesel Senior dengan pemegang Wesel Senior yang berada di Amerika Serikat jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
8. *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 3) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*
9. *If necessary, the Company will attempt to solicit or make efforts/actions needed to be implemented for settlement/payment of Payables on Proceeds from Senior Notes in accordance with the provisions of the Amicable Settlement Agreement, including but not limited to the following acts and provisions, among others:*
  - a) *In particular call to the attention of the court that, in order to comply with the United States Securities Acts, it be allowed to be guided by the exceptions to the registration pursuant to Article 3(a)(10) of the 1933 United States Securities Act, whereby Article 3(a)(10) permits a court outside the United States (in this case, the PKPU process of the Company) to conduct an exchange of Senior Notes by the holders of such Notes who are in the United States providing they meet certain conditions.*

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

b) Atas Porsi Tunai dapat diterbitkan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan dan ditawarkan kepada para pemegang Wesel Senior sebagai pertukaran (exchange offer) berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku, termasuk pengecualian pendaftaran yang sesuai berdasarkan Securities Acts Amerika Serikat. Surat berharga yang baru dapat memiliki ketentuan dan persyaratan tambahan sebagaimana akan disetujui oleh pemegang Wesel Senior, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Perjanjian Perdamaian ini.

c) Apabila ada pemegang Wesel Senior yang tidak bersedia untuk melepaskan tagihan berdasarkan hukum manapun, maka mereka tidak berhak untuk menerima surat berharga baru. Ketentuan ini secara khusus tidak mengurangi hak Perusahaan untuk meminta pengakuan atas proses PKPU ini berdasarkan Pasal 15 Bankruptcy Code Amerika Serikat atau setiap ketentuan lain dari hukum nasional manapun yang mengizinkan pengakuan atas proses pengadilan asing.

d) Melakukan upaya yang wajar agar Pemegang Wesel Senior asing dapat dihubungi melalui sistem kliring. Namun demikian, jika ada Pemegang Wesel Senior asing yang tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk menerima surat berharga baru dalam waktu enam (6) bulan sejak pemberitahuan, maka seluruh hak mereka akan gugur.

**10. Untuk menghindari keragu-raguan:**

a) Utang Dana Hasil Wesel Senior adalah utang Perusahaan kepada BTPL sebesar USD380,0 juta berdasarkan Intercompany Loan Agreement dan Supplemental Intercompany Loan Agreement masing-masing tertanggal 7 Mei 2010 dan 27 Januari 2011 ("Intercompany Loan Agreement") dimana Perusahaan sebagai peminjam dan BTPL sebagai pemberi pinjaman.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

b) *The Cash Portion may be exchanged for new securities issued by the Company and offered to holders of Senior Notes based on the prevailing capital market regulations, including the appropriate registration exemption under the United States Securities Acts. The new securities may have additional terms and conditions as shall be approved by the holders of the Senior Notes, and the provisions do not conflict with this Amicable Settlement Agreement.*

c) *If there are any holders of Senior Notes who are not willing to relinquish any claim under the law, then they are not entitled to receive new securities. This provision specifically does not reduce the Company's right to request recognition of this PKPU process under Article 15 United States Bankruptcy Code or any other provision of any national law that allow the recognition of the foreign court.*

d) *Make a reasonable effort so that foreign holders of Senior Notes may be contacted through the clearing system. However, if there is a foreign holder of Senior Notes that cannot be contacted or does not provide the necessary documentation to receive new securities within six (6) months from the notification, then all their rights will be void.*

**10. For the avoidance of doubt:**

a) *Payables on Proceeds from Senior Notes are Payables of the Company to BTPL amounting to USD380.0 million based on the Intercompany Loan Agreement and Supplemental Intercompany Loan Agreement, dated May 7, 2010 and January 27, 2011, respectively, ("Intercompany Loan Agreement"), wherein the Company is the borrower and BTPL the lender.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

- b) Dana Hasil Wesel Senior yang diperoleh Perusahaan berdasarkan Intercompany Loan Agreement merupakan dana hasil penerbitan Wesel Senior yang harus diberikan oleh BTPL dalam bentuk pinjaman kepada Perusahaan melalui Intercompany Loan, sesuai dengan ketentuan dalam Offering Memorandum USD250 Million 11.5% Guaranteed Senior Notes Due 2015 dan USD130 Million Senior Notes at 107% yang diterbitkan oleh BTPL.
- c) Dengan di-homologasi-nya Perjanjian Perdamaian ini yang juga mencakup skema atau pola penyelesaian Utang Dana Hasil Wesel Senior oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka terhitung sejak Tanggal Homologasi tersebut, Perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh perjanjian atau dokumen yang terkait dengan penerbitan Wesel Senior yang menjadi berakhir, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan seluruh jaminan yang ada dalam rangka penerbitan Wesel Senior, yaitu jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) yang diberikan oleh Perusahaan, jaminan yang diberikan oleh Para Penjamin, serta jaminan lainnya apabila ada. Dalam hal terdapat putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh hukum Indonesia yang menyatakan Perusahaan dan Para Penjamin wajib melaksanakan pembayaran akibat pencairan setiap jaminan yang diberikan dalam penerbitan Wesel Senior maka pembayaran kewajiban tersebut akan dilakukan Perusahaan dengan mengikuti ketentuan Perjanjian Perdamaian ini dan porsi pembayaran kewajiban tersebut akan mengurangi porsi pembayaran terhadap Utang Dana Hasil Wesel Senior secara sama besar.

**Utang Afiliasi**

Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

1. 100% dari Utang Afiliasi akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) Perusahaan yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp2 ratus/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

- b) Proceeds from the Senior Notes were acquired by the Company based on the Intercompany Loan Agreement as the proceeds from the Senior Notes to be provided by BTPL in the form of loans to the Company through Intercompany Loan in accordance with the provisions of the Offering Memorandum, being USD250 million 11.5% Senior Guaranteed Notes Due 2015 and USD130 million Senior Notes at 107%, issued by BTPL.
- c) With the Amicable Settlement Agreement, which also includes a scheme or pattern of settlement of Payables on Proceeds from Senior Notes by the Company, then starting from the Official Approval of Settlement Agreement Date, the Company no longer has an obligation to fulfill the entire agreements or documents associated with the issuance of the Senior Notes, which were automatically terminated, including but not limited to compliance with all existing collateral for issuance of the Senior Notes, which are Corporate Guarantee provided by the Company, the guarantee given by the Guarantor, as well as other guarantees, if any. In the event of a court decision that is legally binding and recognized by Indonesian law, which rules that the Company and the Guarantor shall make payment due to execution of any guarantees given in the issuance of Senior Notes, the payment obligations of the Company will be carried out by following the provisions of the Amicable Settlement Agreement and the portion of payment obligations will reduce the portion of payment to Payables on Proceeds from Senior Notes in the same amount. payment to Payables on Proceeds from Senior Notes in the same amount.

**Affiliate Payables**

Affiliate Payables will be paid under the following scheme:

1. All the Affiliate Payables (100%) will be exchanged for the Mandatory Convertible Bond (MCB-A) of the Company with a maturity of 10 years from the Effective Date of conversion at an exercise price of Rp2 hundred/share having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAAN  
UTANG** (lanjutan)

2. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas yang akan dikonversi menjadi MCB-A sesuai ketentuan di atas.

**Utang dengan Jaminan (Utang Kategori)**

1. Terhadap Utang dengan Jaminan dalam Perjanjian Perdamaian ini yang diperhitungkan dan diakui adalah seluruh nilai utang pokoknya saja.
2. Seluruh jumlah Utang dengan Jaminan akan dibayarkan secara tunai dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
3. Perusahaan akan memberikan bunga atas Utang dengan Jaminan sebesar 4% yang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas.
4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Utang dengan Jaminan beserta bunganya yang diatur dalam butir 2) dan 3), maka sisa nilai Utang dengan Jaminan dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran berikutnya pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.
5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Utang dengan Jaminan dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Utang dengan Jaminan") maka Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu lima (5) tahun secara prorata setiap tahunnya.
6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar, Sisa Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT**  
(continued)

2. The Company does not provide interest on the amount of payables as referred to in point 1) to be exchanged into MCB-A according to the above provisions.

**Payables with Collateral (Debt Category Tranche B)**

1. Payables with Collateral in the Amicable Settlement Agreement are included and recognized only for their principal amounts.
2. The entire amounts of Payables with Collateral will be paid in cash by installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date.
3. The Company will provide interest at 4% on Payables with Collateral, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 2) above.
4. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay Payables with Collateral and associated interest as referred in points 2) and 3), then payment of the residual value of Payables with Collateral and associated interest remaining unpaid on any maturity date will be deferred and combined with payment on the next due date, and this will continue.
5. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of Payables with Collateral and associated interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Payables With Collaterals") then the Remaining Payables with Collateral shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.
6. If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Payables with Collateral at any maturity date as referred to in point 5) above.

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

Maka Sisa Utang dengan Jaminan yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Utang dengan Jaminan pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).

7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Utang dengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6) di atas masih terdapat Sisa Utang dengan Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Utang dengan Jaminan tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) Perusahaan yang berjangka waktu dua (2) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.

**Utang Akibat Derivatif (utang kategori**

1. 30% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan dibayarkan secara tunai ("Porsi Tunai") dengan dicicil dan akan dibayar selambat-lambatnya sampai bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi.
2. Perusahaan akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4% per tahun yang akan dibayarkan dengan mengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
3. 70% dari sisa Utang Akibat Derivatif akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB-A) berjangka waktu sepuluh (10) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp200,0/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
4. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Porsi Tunai beserta bunganya yang diatur dalam butir 1) dan 2) di atas, maka sisa nilai Porsi Tunai dan bunganya yang tidak dapat dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Porsi Tunai pada tanggal jatuh tempo berikutnya dan demikian seterusnya.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

*Then payment of the unpaid Remaining Payables with Collateral will be deferred and combined with Remaining Payables with Collateral on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*

7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Payables with Collateral as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Payables with Collateral will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*

**Derivatives Payables (debt category Tranche C)**

1. *Of remaining amount of Derivative Payables, 30% will be paid in cash ("Cash Portion") in installments and will be paid no later than the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date*
2. *The Company will provide interest at 4% on Cash Portion, which will be paid in accordance with the payment schedule referred to in point 1) above.*
3. *Of the Derivative Payables, 70% will be paid by Mandatory Convertible Bond (MCB-A) issued by the Company with a maturity of ten (10) years from the Effective Date at the conversion price of Rp200.0/share, having regard to the provisions of Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
4. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Cash Portion and its interest as mentioned in points 1) and 2) above, then payment of the residual value of Cash Portion that remains unpaid on any maturity date will be deferred and combined with Cash Portion payment on the next due date, and this will continue until final maturity date.*

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

5. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar sisa Porsi Tunai dan bunga yang belum dibayarkan setelah bulan ke-66 setelah Tanggal Homologasi ("Sisa Porsi Tunai") maka Sisa Porsi Tunai tersebut akan dibayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah bulan ke-66 tersebut secara prorata setiap tahunnya.
6. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai pada setiap saat jatuh tempo sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada butir 5) di atas, maka Sisa Porsi Tunai yang belum dibayarkan tersebut akan ditangguhkan pembayarannya dan digabungkan dengan pembayaran Sisa Porsi Tunai pada saat jatuh tempo berikutnya dan demikian selanjutnya sampai dengan saat jatuh tempo terakhir (pada akhir tahun ke-5).
7. Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkan Cash Waterfall sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tidak terdapat cukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai, setelah akhir tahun ke-5 sebagaimana dimaksud pada butir 6) yang belum terbayarkan, maka atas Sisa Porsi Tunai tersebut akan ditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCB B) berjangka waktu 2 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT.
8. Perusahaan tidak memberikan bunga atas nilai pokok 70% sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas yang akan dikonversi menjadi saham sesuai ketentuan di atas.

**Utang Pembiayaan Kendaraan**

1. Utang Pembiayaan Kendaraan termasuk bunganya akan dibayar sesuai ketentuan kontrak antara Perusahaan dengan kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

5. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the residual value of the Cash Portion and its interest as at the 66th month after the Official Approval of Settlement Agreement Date ("Remaining Cash Portion") then the Remaining Cash Portion shall be paid within a period of five (5) years after the 66th month on a pro rata basis each year.*
6. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion at any maturity date as referred to in point 5) above, then payment of the unpaid Remaining Cash Portion will be deferred and combined with the Remaining Cash Portion payments on the next due date, and will continue until the final maturity date (at the end of the 5th year).*
7. *If after spending/payments made based on the priority in accordance with the Cash Waterfall as set forth in the Amicable Settlement Agreement, there are insufficient funds to pay the Remaining Cash Portion as at the end of the 5th year as referred to in point 6) above, then the Remaining Cash Portion will be paid by Mandatory Convertible Bonds (MCB-B) of the Company with a maturity of two (2) years with the procedures and minimum conversion exercise price in accordance with the applicable provisions of the Capital Market Regulation and the provisions of UUPT.*
8. *The Company does not provide interest on the principal amount of 70% as referred to in point 3) above, which will be converted into shares in accordance with the above.*

**Vehicles Finance Payables**

1. *Vehicles Finance Payables and associated interest will be paid in accordance with the terms in the contract between the Company and creditors based on existing Vehicles Finance Payables that were entered into before this Amicable Settlement Agreement.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35 . GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERDAMAIAN  
UTANG (lanjutan)**

2. Kelalaian atau kegagalan pelaksanaan kewajiban Perusahaan kepada kreditor atas Utang Pembiayaan Kendaraan berdasarkan kontrak yang telah ada sebelum Perjanjian Perdamaian ini yang menimbulkan akibat atau konsekuensi yang diatur dalam kontrak tersebut, tidak menyebabkan atau tidak dianggap telah terjadi kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.

**Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi,  
antara lain sebagai berikut:**

1. Tidak ada pemberian jaminan kebendaan dan/atau jaminan perusahaan yang baru yang akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan.
2. Setiap Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bonds (MCB) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini yang tidak dimintakan konversi menjadi saham Perusahaan oleh kreditor terkait sampai dengan tanggal jatuh tempo MCB tersebut, maka MCB tersebut menjadi berakhir dan jika terdapat klaim atas nilai MCB tersebut oleh kreditor maka pembayarannya akan dilakukan mulai tahun ke-31 setelah Tanggal Homologasi.

Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU masih memerlukan proses lebih lanjut yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini masih berlangsung.

Pada tanggal 26 Juni 2016, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk melakukan penambahan modal baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui mekanisme penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Pada tanggal 1 Maret 2017, PT Huawei Tech Investment telah mengkonversi Obligasi Wajib Konversi yang dimiliki sebesar Rp 1.237.862.796.141 menjadi saham Perusahaan sebanyak 6.189.313.980 lembar saham.

Pada bulan Agustus 2016, Perusahaan menerbitkan sertifikat OWK bagi masing-masing kreditor yang berhak memperoleh OWK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

**35 . OVERVIEW OF AMICABLE DEBTS SETTLEMENT  
(continued)**

2. *Negligence or failure in the implementation of the Company's obligations to creditors on Vehicles Finance Payables under existing contracts prior to the Amicable Settlement Agreement, arising from or due to consequences as stipulated in the contract, shall not cause or be deemed to have resulted in the failure of the implementation of the Amicable Settlement Agreement.*

**Other Restructuring Provisions, among others, are as follows:**

1. *No new asset guarantees and/or corporate guarantees shall be given in connection with the Amicable Settlement Agreement, unless otherwise determined by the Company.*
2. *Each Mandatory Convertible Bonds (MCB) issued pursuant to this Amicable Settlement Agreement whose conversion into shares of the Company is not requested by creditors on its maturity date, shall then be automatically terminated and should a claim on the MCB be subsequently be made by creditors, the payment will be made after the 31st year following the Official Approval of Settlement Agreement Date.*

*The execution of this Amicable Settlement Agreement in PKPU is still subject to further process, which as of the completion date of the consolidated financial statements is still ongoing.*

*On June 26, 2016, the Company had approval from the General Meeting of Shareholders the Company to perform additional capital without right to order by OWK mechanism as stipulated on Amicable Settlement Agreement.*

*On March 1, 2017, Mandatory Convertible Bond owned by PT Huawei Tech Investment amounting to Rp1,237,862,796,141 has converted to shares of the Company of 6,189,313,980 shares.*

*In August 2016, the Company issued OWK certificates for each creditors which are entitled to obtain OWK as stipulated on Amicable Settlement Agreement.*

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**36 . KONTIJENSI**

- a. Pada tanggal 18 Juni 2008, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan keputusan No. 26/KPPU-L/2007 agar Perusahaan membayar denda sebesar Rp4,0 miliar kepada Kas Negara atas pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perusahaan mengajukan keberatan atas keputusan KPPU pada tanggal 23 Juli 2008 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 8 April 2015, Perusahaan menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan informasi bahwa Mahkamah Agung telah mengkonsolidasikan permohonan keberatan atas keputusan No.26/KPPU-L/2007 (termasuk keberatan dari Perusahaan) dan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili keberatan dari semua pemohon. Pada tanggal 27 Mei 2015, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan keputusan menerima keberatan atas keputusan KPPU dan memutuskan pada pokoknya bahwa Perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999 tersebut diatas.

Pada tanggal 22 Juni 2015, KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 5 Desember 2016, telah diberitahukan kepada Perusahaan bahwa pada tanggal 28 Mei 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan kasasi atas putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan amar putusan dalam pemberitahuan resmi tersebut Perusahaan diharuskan membayar denda sebesar Rp 4.000.000.000 kepada kas Negara.

Pembayaran denda tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Perusahaan dengan mengikuti ketentuan klausul 1.5 butir V dalam Perjanjian Perdamaian.

**b. Pengajuan gugatan oleh Pemegang Wesel Senior terhadap Kelompok Usaha pada Pengadilan New York**

Pada tanggal 22 September 2014, terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemegang 25% Wesel Senior-USD yaitu Universal Investment Advisory SA, Vaquero Master EM Credit Fund Ltd, dan Trucharm Ltd yang tergabung dalam Komite Ad Hoc, mengajukan gugatan terhadap Kelompok Usaha terkait dengan pembayaran bunga Wesel Senior-USD yang diterbitkan oleh Bakrie Telecom Pte., Ltd. (Entitas Anak) Gugatan tersebut terdaftar pada Pengadilan New York dengan nomor 652890/2014 (Gugatan 1). Pengajuan Gugatan 1 tersebut dilakukan pada saat Kelompok Usaha sedang melakukan upaya negosiasi untuk melakukan restrukturisasi pembayaran Wesel Senior-USD dengan Steering Committee.

**36 . CONTINGENCIES**

- a On June 18, 2008, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) issued Decision No. 26/KPPU-L/2007 ordering the Company to settle fines amounting to Rp4.0 billion to the State Treasury (Kas Negara) for violating Article 5 of Law No. 5 year 1999 on Anti-Monopoly and Unfair Competition.

The Company filed a petition to object against KPPU's decision on July 23, 2008 to the South Jakarta District Court. On April 8, 2015, the Company received letter from the Central Jakarta District Court to provide information that the Supreme Court has consolidated the petition of objection against the Decision No. 26/KPPU-L/2007 (including the objection from the Company), and appointed the District Court of Central Jakarta to adjudicate the objection from all petitioners. On May 27, 2015, the Presiding Judges issued Judgment to accept the objection againsts the KPPU Decision and also declared in principle that the Company does not violate Article 5 of Law No. 5 year 1999 as stated above.

On June 22, 2015, KPPU had submitted a cassation regarding the District Court of Central Jakarta decision to the Supreme Court. Based on official notice form the District Court of South Jakarta dated December 5, 2016, had notified the Company that on May 28, 2016 the Supreme Court has issued an appeal verdict on the decision of the Central Jakarta District Court. Based on the decision, the Company is required to pay a penalty a sum of Rp4,000,000,000 to the state treasury.

The payment of penalty will be executed by the Company based on Amicable Settlement Plan clause 1.5 point V.

**b Lawsuit filed by Senior Notes Holders against the Group in the Supreme Court of New York**

On September 22, 2014, parties acting on behalf of themselves as the holders of 25% of USD Senior Notes, namely Universal Investment Advisory SA, Vaquero EM Credit Master Fund Ltd, and Trucharm Ltd incorporated in the Ad Hoc Committee, and filed a lawsuit against the Group in connection with the payment of interest on the USD Senior Notes issued by Bakrie Telecom Pte., Ltd (a Subsidiary). The lawsuit was registered with the New York Supreme Court under a number 652890/2014 (Claim 1). Submission of Claims 1 was made at the time when the Group making efforts to negotiate restructuring of the payment of the USD Senior Notes with the Steering Committee.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**36 . KONTIJENSI (lanjutan)**

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Komite Ad Hoc melakukan perubahan pada Gugatan 1, dimana selain tuntutan pembayaran bunga Wesel Senior-USD, Komite Ad Hoc juga menuntut percepatan pembayaran utang pokok dari Wesel Senior-USD (Gugatan 2). Pengajuan tuntutan pembayaran bunga dan percepatan pembayaran pokok Wesel Senior-USD juga disampaikan oleh Bank of New York Mellon selaku pihak trustee yang mengatasmakan pemegang 25% Wesel Senior-USD di atas.

Tuntutan dari Komite Ad Hoc pada dasarnya adalah untuk pokok dan bunga Wesel Senior USD yang telah jatuh tempo (dengan asumsi bahwa Wesel Senior USD telah secara sah dipercepat). Tuntutan ini telah terakomodasi di dalam Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor Perusahaan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian). Perusahaan bermaksud untuk mengajukan permohonan pengakuan atas hasil proses PKPU di New York berdasarkan peraturan Bab 15 Undang-undang Kepailitan Amerika Serikat dan diharapkan bahwa proses pengakuan tersebut akan menjadi penyelesaian bagi proses peradilan di New York.

Dengan diajukannya permohonan PKPU oleh Netwave maka proses negosiasi tersebut terhenti dan skema restrukturisasi yang pernah diusulkan kemudian dituangkan di dalam Rencana Perdamaian dalam PKPU.

Pada tanggal 9 November 2014, Kelompok Usaha telah menerima notifikasi dari Wali Amanat yang juga mewakili para Pemegang Wesel Senior USD perihal permintaan percepatan pembayaran atas pokok dan bunga yang sudah jatuh tempo dan belum terbayar atas seluruh utang Wesel Senior USD.

Sampai dengan tanggal laporan ini, gugatan tersebut masih berlangsung dan hasil akhirnya belum dapat ditentukan saat ini.

- c. Pada tanggal 5 Juni 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kemenkominfo") sebagai salah satu kreditor yang tagihannya diselesaikan melalui PKPU, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2014 yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Dalam memori peninjauan kembali, Kemenkominfo mendalilkan bahwa Kemenkominfo merupakan kreditor preferen dari Perusahaan, oleh karenanya meminta agar Kemenkominfo dan tagihannya dikeluarkan dari PKPU Perusahaan. Permohonan peninjauan kembali tersebut tidak menghalangi pelaksanaan penyelesaian perdamaian utang yang telah diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

**36 . CONTINGENCIES (continued)**

On October 1, 2014, the Ad Hoc Committee made an amendment to Claim 1, in which in addition to the demands of USD Senior Notes interest payments, the Ad Hoc Committee also demanded accelerated repayment of the principal debt of the USD Senior Notes (Claim 2). Claims for payment of interest and accelerated principal of USD Senior Notes were also submitted by the Bank of New York Mellon as trustee on behalf of the above holders of 25% of the USD Senior Notes.

The Ad Hoc Committee's claim was essentially for principal and interest due on the USD Senior Notes (on the assumption that the USD Senior Notes have been validly accelerated). These claims have been compromised under the Amicable Settlement Plan approved by creditors of the Company in the context of the Suspension of Payment Process (PKPU) of the Company's obligations proceedings (as described in the Settlement Agreement). The Company intends to apply for recognition of the PKPU proceedings in New York under Chapter 15 of the US Bankruptcy Code and is advised that such recognition would be dispositive of the New York litigation.

With the filing of the petition PKPU by Netwave, the negotiation process was stopped and the proposed restructuring scheme was then incorporated into the Amicable Settlement Plan in the PKPU.

On November 9, 2014, the Group received a notice from the Trustee which is also acting on behalf of the USD Senior Notes Holders, regarding the accelerated payment of the principal and any accrued and unpaid interest of the total debt of USD Senior Notes.

As of the date of this report, the lawsuit is still ongoing and the outcome is not presently determinable.

- c. On June 5, 2015, The Ministry of Communication and Information of Republic of Indonesia ("Kemenkominfo") as one of the Company's creditors whose receivables have been settled through PKPU, has requested a Judicial Review on the Commercial Court District Court of Central Jakarta Decision No. 59/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dated December 9, 2015, which is considered final and legally binding. In its Judicial Review memorandum, Kemenkominfo has claimed itself to be Preferred Creditor of the Company and therefore it has requested that Kemenkominfo and its receivables be excluded from the Company's PKPU. Said Judicial review shall not in any way obstruct the execution of the payable under the Amicable Settlement Agreement.

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Saldo dalam tabel diajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BAKRIE TELECOM Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**36 . KONTIJENSI (lanjutan)**

Pada tanggal 23 Oktober 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan menolak permohonan peninjauan kembali Kemenkominfo dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum menerima salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kemenkominfo.

Manajemen Perusahaan yakin dapat mempertahankan pendapatnya. Karena itu, tidak ada liabilitas yang dicatat untuk merefleksikan kontinjensi tersebut.

**37 . KELANGSUNGAN USAHA**

Kelompok Usaha mengalami defisiensi modal pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 . Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh rugi penurunan nilai aset, penghapusan uang muka dan pengembangan proyek, rugi selisih kurs, beban keuangan dan kerugian usaha dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2018, total liabilitas jangka pendek Kelompok Usaha telah melampaui total asetnya. Lebih lanjut, pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 , utang Wesel Senior dalam kondisi wanprestasi (Catatan 15).

Pada tahun 2018, Perusahaan belum memiliki rencana dalam waktu dekat untuk melakukan corporate action. Apabila corporate action akan dilakukan Perusahaan akan senantiasa memperhatikan ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, termasuk keterbukaan informasi kepada publik.

Berikut beberapa inisiatif dan rencana yang akan dilakukan Perusahaan pada tahun 2018, diantaranya:

- a. Mengikuti semua ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian penyelesaian utang Perusahaan yang sudah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Catatan 35).
- b. Menyiapkan proyeksi bisnis baru dan kebutuhan biaya akan diupayakan melalui kas internal ataupun melalui hutang sejauh memungkinkan.
- c. Bisnis penyedia infrastruktur media akan dilakukan di masa depan dalam waktu dekat, dan sedang dilakukan persiapan-persiapan yang diperlukan sekaligus dengan memperhatikan peraturan terkait.
- d. Pada Tahun 2017, Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK-A) sebagai pembayaran atas utang-utang Perusahaan kepada para kreditur, sebagai salah satu upaya pelaksanaan penyelesaian utang melalui PKPU.
- e. Menerapkan kebijakan pengendalian biaya.
- f. Merestrukturisasi utang Wesel Senior yang diterbitkan Entitas Anak di Singapura.

**36 . CONTINGENCIES (continued)**

On October 23, 2015, the Supreme Court decided to decline a judicial review as submitted by Kemenkominfo and as of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not received a decision letter on the judicial review that was requested by Kemenkominfo.

Management of the Company expected to be successful in defending its position. Therefore, no accrual has been made to reflect the contingency.

**37 . GOING CONCERN**

The Group is in a capital deficiency position as of December 31, 2018 and 2017 . This condition is mainly caused by impairment loss on assets, advances and project development write-off, loss on foreign exchange, significant finance costs and operating losses from previous years. As of December 31, 2018 , total current liabilities of the Group have exceeded its total assets. In addition, as of December 31, 2018 and 2017, Senior Notes was in default condition (Note 15).

In 2018, the Company has no plans in the near future to conduct corporate action. If corporate action is to be carried out, the Company will continue to observe the applicable capital market regulations, including information disclosure to the public

Here are some of the initiatives and plans that will be implemented by the Company in 2018, including:

- a Compliance with the terms and conditions of the Amicable Settlement Agreement that has been approved by the judges of the Commercial Court in Central Jakarta District Court (Note 35).
- b Prepare new business projections and cost requirements will be sought through internal cash or through debt as far as possible.
- c Business media infrastructure providers will be in the future in the near future, and preparations are being made at the same time concerning with the relevant regulations.
- d In 2017, the Company has issued Mandatory Convertible Bonds (OWK-A) as payment for the Company's debts to the creditors as one of the efforts to implement debt settlement through PKPU.
- e Implementation of cost-reduction policies.
- f Restructuring Senior Notes in Subsidiary in Singapura

**38 . PERNYATAAN DAN INTERPRETASI AKUNTASI  
YANG BELUM DITERAPKAN**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan pernyataan dan interpretasi baru, penyesuaian dan revisi atas standar akuntansi yang belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan pernyataan dan interpretasi baru, penyesuaian dan revisi atas standar akuntansi yang belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.

- PSAK No. 4 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi"
- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), "Properti Investasi"
- PSAK No. 15 (Revisi 2015), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 19 (Revisi 2015), "Aset Tak Berwujud"
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015), "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 65 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66 (Revisi 2015), "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67 (Revisi 2015), "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar"
- ISAK No. 30 (Revisi 2015), "Pungutan"

Pernyataan akuntansi dan interpretasi revisi yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2015), "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK No. 31 (Revisi 2015), "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi"

Pernyataan akuntansi baru dan revisi yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 16 (Revisi 2015), "Aset Tetap"
- PSAK No. 69, "Agrikultur"

Kelompok Usaha sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan pernyataan dan interpretasi baru, penyesuaian dan revisi tersebut tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**38 . ACCOUNTING STATEMENTS AND INTERPRETATIONS  
NOT YET ADOPTED**

*The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued new, adjustment and revised statements and interpretations of accounting standards which are not yet effective for the financial year beginning January 1, 2015.*

*The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued new, adjustment and revised statements and interpretations of accounting standards which are not yet effective for the financial year beginning January 1, 2015.*

- *PSAK No. 4 (Revised 2015), "Separate Financial Statements"*
- *PSAK No. 5 (Adjustment 2015), "Operating Segment"*
- *PSAK No. 13 (Adjustment 2015), "Investment Property"*
- *PSAK No. 15 (Revised 2015), "Investments in Associates and Joint Ventures"*
- *PSAK No. 19 (Revised 2015), "Intangible Assets"*
- *PSAK No. 22 (Adjustment 2015), "Business Combinations"*
- *PSAK No. 24 (Revised 2015), "Employee Benefits"*
- *PSAK No. 25 (Adjustment 2015), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors"*
- *PSAK No. 53 (Adjustment 2015), "Share-based Payment"*
- *PSAK No. 65 (Revised 2015), "Consolidated Financial Statements"*
- *PSAK No. 66 (Revised 2015), "Joint Arrangements"*
- *PSAK No. 67 (Revised 2015), "Disclosure of Interests in Other Entities"*
- *PSAK No. 68 (Adjustment 2015), "Fair Value Measurement"*
- *ISAK No. 30 (Revised 2015), "Collection"*

*The revised accounting statement and interpretation issued and effective for the year commencing on or after January 1, 2017 are as follows:*

- *PSAK No. 1 (Revised 2015), "Presentation of Financial Statements"*
- *ISAK No. 31 (Revised 2015), "Interpretation of PSAK No. 13: Investment Property"*

*The new and revised accounting statements issued and effective for the year commencing on or after January 1, 2018 are as follows:*

- *PSAK No. 16 (Revised 2015), "Fixed Assets"*
- *PSAK No. 69, "Agriculture"*

*The Group is evaluating the potential impact on the consolidated financial statements as a result of the adoption of such new, adjustment and revised statements and interpretations.*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN



TERIMA KASIH

PT BAKRIE TELECOM TBK

WISMA BAKRIE LT. 3  
JL HR RASUNA SAID KAV B-1  
JAKARTA 12920

+6221 52920264

[www.bakrietelecom.com](http://www.bakrietelecom.com)  
[corsec@bakrietelecom.com](mailto:corsec@bakrietelecom.com)